Tatang Syaripudin

LANDASAN PENDIDIKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2012

LANDASAN PENDIDIKAN
Tatang Syaripudin

Tata Letak & Cover : Rommy Malchan

Cetakan Ke-1, Desember 2009
Cetakan Ke-2, Juli 2012 (Edisi Revisi)

ISBN : 978-602-7774-35-3
Ilustrasi Cover : Sumber, http://www.1zoom.net/Miscellaneous/wallpaper/209029/z150.3/

Pengelola Program Kualifikasi S-1 melalui DMS

Pengarah	:	Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Penanggungjawab	:	Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Tim Taskforce	:	Prof. Dr. H. Aziz Fahrurrozi, MA.
		Prof.Ahmad Tafsir
		Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, MA.
		Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.E.d.
		Dr.s Asep Herry Hemawan, M. Pd.
		Drs. Rusdi Susilana, M. Si.

Alamat :
Subdit Kelembagaaan Direktorat Pendidikan Tingggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Lt.8 Jl. Lapangan Banteng Barat Mo. 3-4 Jakarta Pusat 10701
Telp. 021-3853449 Psw.236, Fax. 021-34833981
http://www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id
email:kasubditlembagadiktis@kemenag.go.id/
kasi-bin-lbg-ptai@pendis.kemenag.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah melalui Dual Mode System—selanjutnya ditulis Program DMS—merupakan ikhtiar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru-guru dalam jabatan di bawah binaannya. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2009 dan masih berlangsung hingga tahun ini, dengan sasaran 10.000 orang guru yang berlatar belakang guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Program DMS dilatari oleh banyaknya guru-guru di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang belum berkualifikasi sarjana (S1), baik di daerah perkotaan, terlebih di daerah pelosok pedesaan. Sementara pada saat yang bersamaan, konstitusi pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2007, dan PP No. 74 Tahun 2008) menetapkan agar sampai tahun 2014 seluruh guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah harus sudah berkualifikasi minimal sarjana (S1).

Program peningkatan kualifikasi guru termasuk ke dalam agenda prioritas yang harus segera ditangani, seiring dengan program sertifikasi guru yang memprasyaratkan kualifikasi S1. Namun dalam kenyataannya, keberadaan guru-guru tersebut dengan tugas dan tanggungjawabnya tidak mudah untuk meningkatkan kualifikasi akademik secara individual melalui perkuliahan regular. Selain karena faktor biaya mandiri yang relatif membebani guru, juga ada konsekuensi meninggalkan tanggungjawabnya dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas.

Dalam situasi demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya melakukan terobosan dalam bentuk Program DMS—sebuah program akselerasi (*crash program*) di jenjang pendidikan tinggi yang memungkinkan guru-guru sebagai peserta program dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka (TM) dan pembelajaran mandiri (BM). Untuk BM inilah proses pembelajaran memanfaatkan media modular dan perangkat pembelajaran online (e-learning).

Buku yang ada di hadapan Saudara merupakan modul bahan pembelajaran untuk mensupport program DMS ini. Jumlah total keseluruhan modul ini adalah 53 judul. Modul edisi tahun 2012 adalah modul edisi revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun 2009. Revisi dilakukan atas dasar hasil evaluasi dan masukan dari beberapa LPTK yang mengeluhkan kondisi modul yang ada, baik dari sisi content maupun fisik. Proses revisi dilakukan dengan melibatkan para pakar/ahli yang tersebar di LPTK se-Indonesia, dan selanjutya hasil review diserahkan kepada penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Dengan keberadaan modul ini, para pendidik yang saat ini sedang menjadi mahasiswa agar membaca dan mempelajarinya, begitu pula bagi para dosen yang mengampunya.

Pendek kata, kami mengharapkan agar buku ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Kami tentu menyadari, sebagai sebuah modul, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pendalaman lebih lanjut. Untuk itulah, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semoga upaya yang telah dilakukan ini mampu menambah makna bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, dan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah swt. Akhirnya, hanya kepada-Nya kita semua memohon petunjuk dan pertolongan agar upaya-upaya kecil kita bernilai guna bagi pembangunan sumberdaya manusia secara nasional dan peningkatan mutu umat Islam di Indonesia. Amin

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta,   Juli 2012

Direktur Pendidikan Tinggi Islam



Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA

DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH

Mata kuliah Landasan Pendidikan akan membekali mahasiswa dengan berbagai asumsi pendidikan yang dijabarkan dalam pokok bahasan: konsep landasan pendidikan, manusia dan pendidikan; landasan filosofis pendidikan; landasan psikologis pendidikan; landasan sosiologis dan antropologis pendidikan; landasan historis pendidikan dan landasan yuridis sistem pendidikan nasional.

Manfaat mata kuliah ini adalah dapat menambah wawasan kependidikan mahasiswa berkenaan dengan berbagai asumsi pendidikan, sehingga dapat memperkokoh landasan kependidikannya untuk dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan.

Secara umum, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki wawasan tentang berbagai asumsi pendidikan, baik yang bersifat filosofis, ilmiah maupun yuridis. Di samping itu, mahasiswa diharapkan pula dapat mengaplikasikanya, baik dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut. Adapun secara khusus, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan konsep landasan pendidikan.
2. Menjelaskan implikasi makna hakikat manusia terhadap pendidikan.
3. Mengidentifikasi berbagai pengertian pendidikan.
4. Mengidentifikasi asumsi-asumsi pendidikan dari berbagai aliran filsafat.
5. Menjelaskan asumsi-asumsi psikologis pendidikan.
6. Menjelaskan asumsi-asumsi sosiologis pendidikan.
7. Menjelaskan asumsi-asumsi antropologis pendidikan.
8. Menjelaskan asumsi-asumsi historis pendidikan.
9. Menjelaskan asumsi-asumsi yuridis sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta bobot SKS mata kuliah Landasan Pendidikan, materi mata kuliah ini disajikan dalam 6 modul berikut ini:

Modul 1 Landasan Pendidikan, Manusia dan Pendidikan.
Modul 2 Landasan Filosofis Pendidikan.
Modul 3 Landasan Psikologis Pendidikan.
Modul 4 Landasan Sosiologis dan Antropologis Pendidikan.
Modul 5 Landasan Historis Pendidikan Indonesia.
Modul 6 Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan mempelajari setiap modul secara cermat sesuai dengan petunjuk yang disajikan pada setiap modul, dan dengan mengerjakan tugas serta latihan dan tes formatif yang diberikan, mahasiswa akan berhasil menguasai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

LANDASAN PENDIDIKAN
MANUSIA DAN PENDIDIKAN

MODUL

1

LANDASAN PENDIDIKAN
MANUSIA DAN PENDIDIKAN

Pendahuluan

Praktek pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan mantap, memiliki tujuan yang jelas, ada kesesuaian isi kurikulum dengan kebutuhan anak dan kebutuhan masyarakatnya, terhindar dari kesalahan-kesalahan sehingga efektif dan efisien cara-cara pelaksanaannya, hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu kepada suatu landasan pendidikan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan praktek pendidikan, para pendidik - khususnya para calon pendidik - perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya. Selanjutnya, mengingat pendidikan itu pada dasarnya adalah upaya memanusiakan manusia (humanisasi). Karena itu dalam rangka praktek pendidikan, para pendidik dan calon pendidik perlu memahami hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan sebagai salah satu landasannya. Dapat Anda bayangkan, apa jadinya apabila pendidik tidak memahami hakikat manusia, padahal pendidikan yang diselenggarakannya tiada lain adalah untuk memanusiakan manusia? Jelas kiranya bahwa konsep hakikat manusia yang dianut pendidik akan berimplikasi terhadap konsep dan praktek pendidikannya.

Modul ini akan mengantarkan Anda kepada pemahaman tentang konsep landasan pendidikan, konsep hakikat manusia, pengertian pendidikan dan implikasi konsep hakikat manusia terhadap pengertian pendidikan. Dengan mempelajari modul ini, pada akhirnya Anda akan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip antropologis (antropo-filosofis) sebagai asumsi tentang mengapa manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri, prinsip-prinsip antropologis tentang mengapa manusia dapat dididik, dan dapat mengidentifikasi berbagai pengertian pendidikan. Semua ini diharapkan akan mengembangkan wawasan kependidikan Anda dan akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memahami hakikat landasan pendidikan, serta hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian landasan pendidikan.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis landasan pendidikan.
3. Menjelaskan fungsi landasan pendidikan bagi pendidik.

4. Menjelaskan hakikat manusia.
5. Mengidentifikasi prinsip-prinsip antropologis sebagai asumsi bahwa manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri.
6. Mengidentifikasi prinsip-prinsip antropologis sebagai asumsi bahwa manusia akan dapat dididik.
7. Mengidentifikasi berbagai pengertian pendidikan.
8. Mendeskripsikan implikasi hakikat manusia terhadap pengertian pendidikan.

Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 mencakup pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan dan fungsi landasan pendidikan. Kegiatan belajar 2 mencakup konsep hakikat manusia, manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri, serta manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Adapun kegiatan belajar 3 berkenaan dengan pengertian pendidikan dan implikasi hakikat manusia terhadap pengertian pendidikan.

Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut ini:

1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam modul ini.
2. Baca materi modul dengan seksama, tambahkan catatan pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan, dll. sesuai pemikiran yang muncul pada diri Anda. Dalam menjelaskan suatu konsep atau asas, seringkali digunakan istilah dan diberikan contoh, pahami hal tersebut sesuai konteks pembahasannya.
3. Terdapat keterkaitan antara materi pokok bahasan kesatu (kegiatan belajar satu) dengan materi pokok bahasan kedua (kegiatan belajar kedua) dst. Materi pada kegiatan belajar kesatu berimplikasi terhadap materi kegiatan belajara kedua dst. Karena itu untuk menguasai keseluruhan materi modul ini mesti dimulai dengan memahami secara berurutan materi modul pada setiap pokok bahasan yang disajikan pada kegiatan belajar satu s.d. kegiatan belajar tiga secara berurutan.
4. Cermati dan kerjakan latihan/tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan latihan/tugas tersebut, gunakan pengetahuan yang telah Anda kuasai sebelumnya. Pengetahuan dan penghayatan berkenaan dengan pengalaman hidup dan pengalaman kerja Anda sehari-hari akan dapat membantu penyelesaian tugas.
5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan kunci jawaban untuk menentukan penilaian benar /tidaknya jawaban Anda.
6. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan tutorial elektronik, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Landasan Pendidikan

Ada tiga pokok bahasan yang akan Anda kaji dalam kegiatan belajar ini, yaitu (1) pengertian landasan pendidikan, (2) jenis-jenis landasan pendidikan dan (3) fungsi landasan pendidikan bagi pendidik. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi definisi landasan, studi dan praktek pendidikan sebagai dua bentuk kegiatan yang mesti terdapat dalam pendidikan, serta definisi landasan pendidikan. Kajian dalam pokok bahasan kedua meliputi empat jenis landasan pendidikan berdasarkan sumbernya, dan dua jenis landasan pendidikan berdasarkan sifat isi asumsinya. Adapun kajian dalam pokok bahasan ketiga berkenaan dengan fungsi landasan pendidikan bagi pendidik dalam rangka melaksanakan peranan-peranannya. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda akan dapat menjelaskan pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, dan fungsi landasan pendidikan bagi pendidik.

1. Pengertian Landasan Pendidikan

Landasan. Apabila Anda membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, akan ditemukan bahwa istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan (Balai Pustaka, 2005:633). Selain itu, istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, dapat Anda pahami bahwa landasan adalah suatu alas pijakan atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal.

Menurut sifat wujudnya dibedakan adanya dua jenis landasan, yaitu: (1) landasan yang bersifat material dan (2) landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain landasan pacu pesawat terbang, fondasi bangunan gedung, dsb. Adapun contoh landasan yang bersifat konseptual antara lain Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; landasan teoritis suatu hipotesis dalam penelitian, landasan pendidikan, dsb.

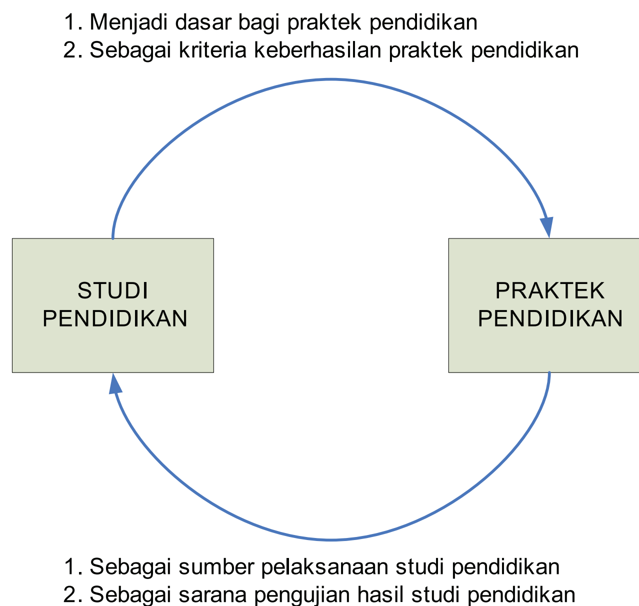
Berdasarkan uraian di atas telah Anda ketahui bahwa landasan pendidikan tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Selanjutnya, mari kita kaji

lebih lanjut pengertian landasan yang bersifat konseptual tersebut. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan *asumsi.* Di dalam *Encarta Dictionary Tools* (2003) dijelaskan, bahwa asumsi adalah sesuatu yang dijadikan titik tolak; sesuatu yang diyakini benar tanpa pembuktian. Sesuatu yang diyakini benar tanpa pembuktian tersebut dapat berupa ide atau gagasan, kepercayaan (misal: kepercayaan akan kebenaran suatu ajaran agama), hukum atau peraturan; di samping itu, dapat pula berupa aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dsb. Adapun sesuatu yang diyakini benar tanpa pembuktian tersebut dijadikan orang sebagai titik tolak dalam rangka berpikir (misalnya saat melakukan studi pendidikan atau mempelajari konsep pendidikan) dan/atau dalam rangka bertindak (misalnya dalam rangka melakukan suatu praktek pendidikan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi adalah sesuatu yang sudah dianggap benar tanpa perlu pembuktian lagi, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir dan/atau dalam rangka bertindak.

Studi Pendidikan dan Praktek Pendidikan. Studi pendidikan dan praktek pendidikan merupakan dua bentuk kegiatan yang berbeda, tetapi kedua bentuk kegiatan tersebut pada dasarnya mesti terdapat dalam rangka pendidikan. *Studi pendidikan* adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memahami sistem konsep pendidikan. Contoh: mahasiswa jurusan Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati sedang membaca modul Landasan Pendidikan; Para guru madrasah ibtidaiyah Arafah sedang melakukan konferensi kasus untuk mencari pemecahan masalah bagi siswa X yang sering membolos; Sekelompok guru madrasah ibtidaiyah sedang mengikuti seminar dengan tema "Peningkatan Kualitas Pendidikan dalam Menyongsong Era Globalisasi" yang diselenggarakan di Kampus UIN; Sekelompok mahasiswa sedang berdiskusi untuk dapat merumuskan berbagai alasan yang menjadi landasan tentang perlunya pendidikan sepanjang hayat, dsb. Sedangkan *praktek pendidikan* adalah kegiatan bersama yang dilakukan pendidik dan peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Contoh: Berdasarkan hasil konferensi kasus, Pak Solehudin membimbing siswa X agar menyadari kekeliruannya dan memperbaiki diri sehingga tidak membolos lagi; Ibu Ina sedang melatih para siswanya agar dapat memecahkan soal-soal matematika; Pak Hilmy sedang membimbing santrinya belajar membaca al'Quran, dsb. Coba Anda berikan contoh-contoh kegiatan lainnya yang tergolong studi pendidikan dan contoh-contoh kegiatan lainnya yang tergolong praktek pendidikan !

Agar praktek pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan, sebelum praktek pendidikan tersebut diselenggarakan maka pendidik seharusnya melakukan studi pendidikan terlebih dahulu. Melalui studi pendidikan itulah pendidik akan memahami dengan benar makna pendidikan, ke mana tujuan pendidikan mesti di arahkan, siapa sesunguhnya peserta didik, apa semestinya isi kurikulumnya, bagaimana mestinya cara-cara pendidikan dilaksanakan, dst. Dengan

demikian, melalui studi pendidikan, pendidik akan memahami seperangkat asumsi yang akan dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikannya. Berdasarkan uraian tadi kiranya Anda dapat memahami alasan tentang mengapa dalam pendidikan mesti terdapat momen (saat) studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Berkenaan dengan bentuk kegiatan studi dan praktek pendidikan ini Redja Mudyahardjo menyatakan bahwa: "Meskipun antara praktek pendidikan dan studi pendidikan terdapat perbedaan, tetapi antara keduanya terdapat hubungan komplementer atau hubungan saling melengkapi" (Odang Muchtar, 1991:12). Adapun hubungan komplementer tersebut dapat dideskripsikan pada bagan berikut ini:



Hubungan Komplementer Studi Pendidikan dan Praktek Pendidikan

Landasan Pendidikan. Seperti telah Anda pahami melalui uraian di muka, bahwa dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan antara lain kita akan memperoleh pemahaman tentang berbagai asumsi yang dapat dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Selain itu, sesungguhnya berbagai asumsi sebagai hasil studi pendidikan tersebut juga dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan semua uraian terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa *landasan pendidikan* adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan mesti terdapat studi pendidikan dan praktek pendidikan, maka istilah

landasan pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seperangkan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan/atau studi pendidikan.

2. Jenis-jenis Landasan Pendidikan

Apabila kita kaji, asumsi-asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan sesungguhnya berasal dari berbagai sumber. Asumsi-asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan itu dapat bersumber dari agama, filsafat, ilmu, dan hukum atau yuridis. Sehubungan dengan itu, berdasarkan sumbernya jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1) Landasan religius pendidikan.
2) Landasan filosofis pendidikan.
3) Landasan ilmiah pendidikan.
4) Landasan hukum/landasan yuridis pendidikan.

Landasan Religius Pendidikan. **Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: "Carilah ilmu sejak dari buaian hingga masuk liang lahat (hingga meninggal dunia)"; "Menuntut ilmu adalah fardlu bagi setiap muslim" (al-Hadits). Bertitik tolak kepada Hadits tadi, maka bagi setiap muslim bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Silahkan Anda cari contoh-contoh lainnya dalam ajaran agama Islam yang semestinya dijadikan titik tolak dalam praktek pendidikan dan/atau dalam rangka studi pendidikan.**

Landasan Filosofis Pendidikan. **Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain: Idealisme, Realisme, Pragmatisme, Pancasila, dsb. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu melainkan ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. Sebab itu, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan Idealisme, landasan filsofis pendidikan Pragmatisme, dsb. Contoh landasan filsafat pendidikan: Penganut Realisme antara lain berpendapat bahwa "pengetahuan yang benar diperoleh manusia melalui pengalaman indra (penginderaan)". Implikasinya, penganut Realisme mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung (misal: melalui observasi, praktikum, dsb.) atau pengalaman tidak langsung (misal: melalui membaca laporan-laporan hasil penelitian, dsb).**

Selain tersajikan berdasarkan aliran-alirannya, landasan filosofis pendidikan dapat pula disajikan berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya dalam tema:

"Manusia sebagai Animal Educandum" (M.J. Langeveld, 1980), ***Man and Education*"** **(Frost, Jr., 1957), dll.**

Landasan Ilmiah Pendidikan. **Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Sebagaimana Anda ketahui, terdapat berbagai disiplin ilmu, seperti: psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, sejarah, biologi, dsb. Sebab itu, ada berbagai** ***jenis landasan ilmiah pendidikan*****, antara lain: landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ekonomi pendidikan, landasan politik pendidikan, dan landasan fisiologis pendidikan.**

- ***Landasan psikologis pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Contoh: "Setiap individu mengalami perkembangan secara bertahap, adapun pada setiap tahap perkembangannya setiap individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikannya". Implikasinya, pendidikan mesti dilaksanakan secara bertahap; tujuan dan isi pendidikan mesti disesuaikan dengan tahapan dan tugas perkembangan individu/peserta didik.**
- ***Landasan sosiologis pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: "Di dalam masyarakat yang menganut stratifikasi sosial terbuka, terdapat peluang besar untuk terjadinya mobilitas sosial. Adapun faktor yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial itu antara lain bakat dan pendidikan". Implikasinya, para orang tua rela berkorban membiayai pendidikan anak-anaknya (dengan menyisihkan kebutuhan hidup sekunder lainnya) agar anak mereka dapat naik dalam tingkatan anak tangga sosialnya.**
- ***Landasan antropologis pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: masyarakat akaan tetap eksis apabila terdapat konformitas dan homogenitas di dalamnya, untuk itu maka masyarakat menyelenggarakan enkulturasi terhadap generasi mudanya.**
- ***Landasan ekonomi pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: "Kalkulasi ekonomi selalu berkenaan dengan modal, produksi, distribusi, persaingan, untung/ laba dan rugi". Implikasinya, pendidikan dipandang sebagai penanaman modal pada diri manusia** ***(human investment)*** **untuk mempertinggi mutu tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produksi. Selain itu, pemilihan sekolah atau jurusan oleh seseorang akan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan biaya/modal yang dimilikinya,**

prosfek pekerjaan serta gaji yang mungkin diperolehnya setelah lulus dan bekerja. Jika sekolah ingin laku (banyak memperoleh siswa), maka harus mempunyai daya saing tinggi dalam hal prestasi.

- ***Landasan biologis pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah biologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: "Dibanding dengan khewan, manusia memiliki otak yang lebih besar sehingga ia mampu berpikir". Implikasinya, manusia memungkinkan untuk dididik.**
- ***Landasan politik pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah politik yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: Pemerintahan demokrasi mengimplikasikan manajemen pendidikan yang bersifat desentralistik.**
- ***Landasan historis pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau (sejarah) yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan masa kini dan masa datang. Contoh: Semboyan "tut wuri handayani" sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh para pendidik adalah semboyan dari Ki Hadjar Dewantara (Pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa pada tgl 3 Juli 1922 di Yogyakarta) yang disetujui hingga masa kini dan untuk masa datang karena dinilai berharga.**
- ***Landasan fisiologis pendidikan*** **adalah asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari kaidah-kaidah fisiologi tentang manusia yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: "kematangan organ-organ tubuh seperti fungsi otak, susunan syaraf, alat dria, otot-otot, dsb. mendahului perkembangan kemampuan berpikir sebagai fungsi jiwa. Implikasinya, isi pendidikan harus disesuaikan dengan masa peka, yaitu masa kematangan organ-organ tubuh untuk dapat menerima pengaruh-pengaruh dari luar secara efektif dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan berpikir sebagai fungsi kejiwaan.**

Landasan Hukum/Landasan Yuridis Pendidikan. **Landasan hukum/landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh: Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan: "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" (Pasal 6); "Setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar" (Pasal 34). Implikasinya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah atau para guru panitia penerimaan siswa baru di MI harus memprioritaskan anak-anak (pendaftar) berusia tujuh tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak-anak yang baru mencapai usia enam tahun. Karena itu, panitia penerimaan siswa baru perlu menyusun daftar urut anak (pendaftar) berdasarkan usianya, selanjutnya, berdasarkan aturan di atas baru panitia**

menetapkan batas nomor urut pendaftar yang akan diterima sesuai kapasitas yang dimiliki sekolah.

Upaya mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis landasan pendidikan, di samping dapat dilakukan berdasarkan sumbernya (sebagaimana telah Anda pahami melalui uraian di atas), dapat pula dilakukan berdasarkan sifat isi dari asumsi-asumsinya. Berdasarkan sifat isi asumsi-asumsinya, landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) landasan deskriptif pendidikan dan 2) landasan preskriptif pendidikan.

Landasan deskriptif pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya *(Dasein)* yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan umumnya bersumber dari hasil riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu, sebab itu landasan deskriptif pendidikan disebut juga *landasan ilmiah pendidikan* atau *landasan faktual pendidikan*. Landasan deskriptif pendidikan antara lain meliputi: landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, dsb. Adapun **landasan preskriptif pendidikan** adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal/diharapkan/dicita-citakan *(Das Sollen)* yang disarankan menjadi titik tolak studi pendidikan dan/atau praktek pendidikan. Landasan preskriptif pendidikan antara lain meliputi: landasan filosofis pendidikan, landasan religius pendidikan, dan landasan yuridis pendidikan.

3. Fungsi Landasan Pendidikan

Gedung madrasah akan dapat berdiri tegak dan kuat apabila gedung madrasah tersebut didirikan dengan bertumpu pada suatu landasan (fondasi) yang kokoh. Apabila landasannya tidak kokoh, apalagi jika gedung madrasah itu didirikan dengan tidak bertumpu pada landasan yang semestinya, maka gedung madrasah tersebut tidak akan kuat untuk dapat berdiri tegak. Mungkin gedung itu miring dan retak-retak, sehingga akhirnya runtuh berantakan. Demikian pula pendidikan, pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan mantap, benar dan baik, relatif tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan pembangunan.

Contoh: Dalam praktek pendidikan, para guru antara lain dituntut agar melaksanakan peranan sesuai semboyan *"tut wuri handayani"*. Untuk itu, para guru idealnya memahami dan meyakini *asumsi-asumsi* dari semboyan tersebut. Sebab jika tidak, sekalipun tampaknya guru tertentu berbuat "seperti" melaksanakan peranan sesuai semboyan *tut wuri handayani*, namun perbuatan itu tidak akan disadarinya sebagai perbuatan untuk *tut wuri handayani* bagi para siswanya. Bahkan mungkin saja terjadi guru tersebut

melakukan perbuatan yang justru bertentangan dengan semboyan *tut wuri handayani.* Misalnya: guru kurang menghargai bakat masing-masing siswa; semua siswa dipandang sama, tidak memiliki perbedaan individual; guru lebih sering mengatur apa yang harus diperbuat siswa dalam rangka belajar, guru tidak menghargai kebebasan siswa; dll. Mungkin saja guru memerankan diri sebagai penentu perkembangan pribadi siswa, guru berperan sebagai pembentuk prestasi siswa, guru berperan sebagai pembentuk untuk menjadi siapa para siswanya di kemudian hari sesuai kehendak sepihak dari guru sendiri,dsb. Dalam contoh ini, semboyan tinggal hanya sebagai seboyan. Sekalipun guru hapal betul semboyan tersebut, tetapi jika asumsi-asumsinya tidak dipahami dan tidak diyakini, maka perbuatan dalam praktek pendidikannya tetap tidak bertitik tolak pada semboyan tadi, tidak mantap, terjadi kesalahan, sehingga tidak akan efisien dan tidak akan efektif.

Sebaliknya, jika guru memahami dan meyakini asumsi-asumsi dari semboyan *tut wuri handayani* (yaitu: kodrat alam dan kebebasan siswa), maka ia akan dengan sadar dan mantap melaksanakan peranannya. Dalam hal ini ia relatif tidak akan melakukan kesalahan dalam praktek mendidik. Misalnya: guru akan menghagai dan mempertimbangkan bakat setiap siswa dalam rangka belajar, sekalipun para siswa memiliki kesamaan, tetapi guru juga menghargai individualitas setiap siswa. Guru akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengatur diri mereka sendiri dalam rangka belajar, guru menghargai kebebasan siswa. Guru membimbing para siswa dalam rangka belajar sesuai dengan kecepatan dan kapasitas belajarnya masing-masing, dll. Pendek kata, dengan bertitik tolak pada asumsi kodrat alam dan kebebasan yang dimiliki setiap siswa, maka perbuatan guru dalam praktek pendidikannya bukan untuk membentuk prestasi belajar tanpa mempertimbangkan bakat atau kecepatan dan kapasitas belajar masing-masing siswa; bukan untuk membentuk siswa agar menjadi siapa mereka nantinya sesuai kehendak guru belaka; melainkan membimbing para siswa dalam belajar sehingga mencapai prestasi optimal sesuai dengan bakat, minat, kecepatan dan kapasitas belajarnya masing-masing; memberikan kesempatan/kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing melalui interaksi dengan lingkungannya, dan berdasarkan sistem nilai tertentu demi terwujudnya tertib hidupnya sendiri dan tertibnya hidup bersama. Guru hanya akan "mengatur" atau mengarahkan siswa ketika siswa melakukan kesalahan atau salah arah dalam rangka belajarnya.

Sebagaimana halnya praktek pendidikan, studi pendidikan juga memerlukan asumsi sebagai titik tolaknya. Studi pendidikan antara lain dapat berupa kegiatan membaca buku tentang pendidikan, penelitian pendidikan, dsb. Seseorang yang membaca buku pendidikan dengan maksud untuk memperluas dan memperkokoh wawasan kependidikannya tentu memerlukan landasan atau asumsi tertentu. Perlu dimaklumi bahwa ide, konsep, prinsip, hukum, teori dsb. yang diuraikan para penulis buku umumnya bersifat ragam atau memuat berbagai aliran dan pendapat yang mana antara

satu dengan yang lainnya memiliki persamaan dan perbedaan. Apabila pembaca buku tersebut tidak bertumpu pada salah satu asumsi yang kokoh, maka yang bersangkutan akan mengalami kebingungan dalam menentukan ide, konsep, hukum, atau teori mana yang akan diadopsinya. Mungkin pula terjadi akhirnya yang bersangkutan memiliki seperangkat pikiran tentang pendidikan yang tidak konsisten atau tidak koheren.

Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa *landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik (guru) dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan dan/atau studi pendidikan.* Di samping itu, *landasan pendidikan memiliki kegunaan untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik dalam rangka praktek pendidikan maupun dalam memahami dan membangun wawasan kependidikan.*

Ada berbagai jenis landasan pendidikan yang perlu kita kaji, antara jenis landasan pendidikan yang satu dengan jenis landasan pendidikan yang lainnya tentunya akan saling melengkapi. Di samping itu, karena adanya berbagai aliran dalam filsafat, adanya berbagai teori dalam ilmu, bahkan adanya perbedaan kepercayaan atau agama yang dianut, maka dalam rangka mempelajari berbagai jenis landasan pendidikan tersebut akan ditemukan berbagai prinsip, hukum, teori dan sebagainya yang mungkin dapat kita sepakati, sebaliknya, mungkin pula ditemukan berbagai prinsip, hukum, teori dll. yang tidak dapat kita sepakati. Namun demikian, hal yang terakhir itu hendaknya tidak dijadikan alasan sehingga kita tidak mau mempelajarinya. Sebab, semua itu justru akan memperluas dan memperjelas wawasan kependidikan kita. Hanya saja kita mesti pandai memilah dan memilih mana yang harus ditolak dan mana yang seharusnya diterima serta kita anut. Inilah salah satu peranan pelaku studi landasan pendidikan, yaitu membangun landasan kependidikannya sendiri. Landasan pendidikan yang dianut itulah yang akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan/atau studi pendidikan lebih lanjut.

Latihan:

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan: 1) definisi landasan pendidikan; 2) alasan tentang mengapa pendidikan perlu dilaksanakan dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh; 3) peta/bagan jenis-jenis landasan pendidikan.

Petunjuk Jawaban Latihan:

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali konsep landasan, konsep studi pendidikan dan konsep praktek pendidikan. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu mengacu kepada konsep tentang sifat normatif pendidikan yang harus dilaksanakan secara bijaksana dan harus dapat

dipertanggung jawabkan. Adapun untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu memahami jenis-jenis landasan pendidikan, baik berdasarkan sumbernya maupun berdasarkan sifat isi asumsi-asumsinya.

Rangkuman

Pendidikan bersifat normatif dan mesti dapat dipertangungjawabkan. Pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarang, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana. Sebab itu, sebelum melaksanakan praktek pendidikan, para pendidik – khususnya para calon pendidik - perlu terlebih dahulu melakukan studi pendidikan agar memiliki kejelasan tentang landasan-landasannya.

Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan mesti terdapat studi pendidikan dan praktek pendidikan, maka istilah landasan pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seperangkan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan/ atau studi pendidikan.

Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi: 1) landasan religius pendidikan, 2) landasan filosofis pendidikan, 3) landasan ilmiah pendidikan, dan landasan hukum/yuridis pendidikan. Adapun Berdasarkan sifat isi asumsi-asumsinya, landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) landasan deskriptif pendidikan dan 2) landasan preskriptif pendidikan.

Bagi pendidik (guru), landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan dan/atau studi pendidikan lebih lanjut. Di samping itu, landasan pendidikan memiliki kegunaan untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan, baik dalam rangka praktek pendidikan maupun dalam rangka memahami dan membangun wawasan kependidikan melalui studi pendidikan.

Tes Formatif 1

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan disebut ....
   A. landasan pendidikan.
   B. praktek pendidikan.
   C. studi pendidikan.
   D. tujuan pendidikan.

2. Contoh kegiatan yang tergolong praktek pendidikan adalah ....
   A. Ibu Annisa sedang membaca buku psikologi pendidikan.
   B. Ibu Kurniasih dan pak Dede berdiskusi tentang pengertian pendidikan.
   C. Pak Yusuf sedang mengajarkan konsep "ekosistem" kepada murid-muridnya.
   D. Pak Jamil memikirkan cara terbaik untuk memotivasi belajar para muridnya.

3. Ajaran agama yang berisi ajaran tentang kehidupan manusia yang dicita-citakan/ideal yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan tergolong ke dalam landasan
   A. deskriptif pendidikan
   B. empiris pendidikan.
   C. ilmiah pendidikan.
   D. preskriptif pendidikan.

4. Asumsi-asumsi pendidikan yang bersumber dari hasil riset ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu dikenal pula sebagai landasan ....
   A. deskriptif pendidikan.
   B. filosofis pendidikan.
   C. religius pendidikan.
   D. yuridis pendidikan.

5. Contoh landasan pendidikan yang tergolong ke dalam landasan preskriptif pendidikan adalah landasan ....
   A. antropologis pendidikan.
   B. filosofis pendidikan.
   C. psikologis pendidikan.
   D. sosiologis pendidikan.

6. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila mengimplikasikan pendidikan hendaknya betujuan agar peserta didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Ini adalah contoh landasan ....
   A. ilmiah pendidikan.
   B. filosofis pendidikan.
   C. fisiologis pendidikan.
   D. religius pendidikan.

7. "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan" (Pasal 1 ayat 1 UUD RI 1945). Ini adalah contoh landasan ....

A. ilmiah pendidikan. B. filosofis pendidikan.
C. religius pendidikan. D. yuridis pendidikan.

8. Menurut teori belajar Behaviorisme motivasi belajar besifat ekstrinsik, sebab itu guru harus bertanggung jawab untuk dapat menimbulkan motivasi belajar pada diri siswa. Ini adalah contoh landasan ....
A. antopologis pendidikan. B. biologis pendidikan.
C. ekonomi pendidikan. D. psikologis pendidikan.

9. Berikut ini adalah alasan tentang perlunya pendidikan dilaksanakan atas dasar landasan pendidikan yang kokoh, *kecuali* ....
A. pendidikan adalah kegiatan yang alamiah.
B. pendidikan hakikatnya bersifat normatif.
C. pendidikan harus dapat dipertanggung jawabkan.
D. pendidikan harus dilaksanakan secara bijaksana.

10. Khususnya bagi guru, landasan pendidikan akan berfungsi sebagai ....
A. isi kurikulum pendidikan. B. proses pendidikan.
C. titik tolak pendidikan. D. tujuan pendidikan.

Balikan dan Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar 2. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu Dididik dan Dapat Dididik

Ada tiga pokok bahasan yang akan Anda kaji dalam kegiatan belajar ini, yaitu tentang: (1) hakikat manusia, (2) manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dan (3) manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi asal-usul manusia, wujud dan potensinya, berbagai dimensi kehidupannya, serta kedudukan dan tugas manusia di dunia. Kajian dalam pokok bahasan kedua berkenaan dengan prinsip-prinsip antropologis sebagai asumsi bahwa manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Adapun kajian dalam pokok bahasan ketiga berkenaan dengan prinsip-prinsip antropologis sebagai asumsi bahwa manusia akan dapat dididik. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Anda akan dapat menjelaskan hakikat manusia, serta dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip antropologis sebagai asumsi bahwa manusia perlu didik, perlu mendidik diri dan dapat dididik.

1. Hakikat Manusia

a. Asal –usul Manusia

Dalam perjalanan hidupnya manusia mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta dan asal-usul keber-ada-an dirinya sendiri. Terdapat dua aliran pokok dalam filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu *Evolusionisme* dan *Kreasionisme* (J.D. Butler, 1968). Menurut Evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia – sebagaimana halnya alam semesta – ada dengan sendirinya berkembang dari alam itu sendiri, tanpa Pencipta. Penganut aliran ini antara lain Herbert Spencer, Charles Darwin, dan Konosuke Matsushita. Sebaliknya, Kreasionisme menyatakan bahwa asal usul manusia – sebagaimana halnya alam semesta - adalah ciptaan suatu *Creative Cause atau Personality*, yaitu Tuhan YME. Penganut aliran ini antara lain adalah Al-Ghazali.

Kita dapat mengakui kebenaran tentang adanya proses evolusi di alam semesta termasuk pada diri manusia, tetapi tentunya kita *menolak* pandangan yang menyatakan

adanya manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri, tanpa Pencipta. Penolakan ini terutama didasarkan atas keimanan kita terhadap Allah SWT sebagai Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia. Silahkan Anda buka al-Quran surat as-Sajdah: 7-8; al-Hijr: 28-29; at-Thariq 6-7; Ya Sin:77; az-Zumar:6; al-Mu'minun:12-14). Dari ayat-ayat al-Quran tadi dapat dipahami bahwa hakikat manusia berpangkal pada dua asal: asal yang jauh, yaitu kejadian pertama dari tanah, ketika Allah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaanNya kepadanya; dan asal yang dekat, yaitu kejadian kedua dari nutfah (Abdurrahman an-Nahlawi, 1989:54).

Secara filosofis penolakan terhadap ajaran Evolusionisme antara lain didasarkan kepada empat argumen berikut ini:

1) *Argumen ontologis:* Semua manusia memiliki ide tentang Tuhan. Sementara itu, bahwa *realitas* (kenyataan) lebih sempurna daripada ide manusia. Sebab itu, Tuhan pasti ada dan realitas ada-Nya itu pasti lebih sempurna daripada ide manusia tentang Tuhan.
2) *Argumen kosmologis*: Segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Adanya alam semesta - termasuk manusia - adalah sebagai akibat. Di alam semesta terdapat rangkaian sebab-akibat, namun tentunya mesti ada Sebab Pertama yang tidak disebabkan oleh yang lainnya. Sebab Pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lainnya, tidak berada sebagai materi, melainkan sebagai "Pribadi" atau "Khalik".
3) *Argumen Teleologis:* Segala sesuatu memiliki tujuan (contoh: mata untuk melihat, kaki untuk berjalan dsb.). Sebab itu, segala sesuatu (realitas) tidak terjadi dengan sindirinya, melainkan diciptakan oleh Pengatur tujuan tersebut, yaitu Tuhan.
4) *Argumen Moral:* Manusia bermoral, ia dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat, dsb. Ini menunjukkan adanya dasar, sumber dan tujuan moralitas. Dasar, sumber, dan tujuan moralitas itu adalah Tuhan.

Keempat argumen di atas menegaskan bahwa Tuhan YME sebagai Pencipta alam semesta adalah benar adanya. Sekalipun tersirat, dalam argumen ini termuat gagasan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan YME.

b. Wujud dan Potensi Manusia

Menurut Julien de La Mettrie – salah seorang penganut aliran *Materialisme* – bahwa esensi manusia semata-mata bersifat *badani,* esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya. Sebab itu, segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual atau rohaniah dipandang hanya sebagai resonansi dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Tubuhlah yang mempengaruhi jiwa. Contoh: Jika ada organ tubuh luka muncullah rasa sakit. Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai *Epiphenomenalisme* (J.D. Butler, 1968).

Sebaliknya, menurut Plato – salah seorang penganut aliran *Idealisme* - bahwa esensi manusia bersifat *kejiwaan/ spiritual/rohaniah.* Memang Plato tidak mengingkari adanya aspek badan, namun menurut dia jiwa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada badan. Jiwa berperan sebagai pemimpin badan, jiwalah yang mempengaruhi badan, karena itu badan mempunyai ketergantungan kepada jiwa. Contoh: Pada saat berpuasa, jiwa mengendalikan badan untuk tidak minum dan tidak makan, sekalipun kerongkongan sudah kering dan perut keroncongan. Pandangan tentang hubungan badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai *Spiritualisme* (J.D.Butler, 1968).

Rene Descartes mengemukakan pandangan lain yang secara tegas bersifat *dualistik.* Menurut Descartes esensi manusia terdiri atas dua substansi, yaitu b*adan dan jiwa.* Karena manusia terdiri atas dua substansi yang berbeda (badan dan jiwa), maka antara keduanya tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi (S.E. Frost Jr., 1957), demikian pandangan filosofis Descartes. Namun demikian, lain lagi dalam pandangan *common sense*-nya, Descartes sebaliknya mengakui adanya hubungan antara badan dan jiwa. Menurutnya badan dan jiwa satu sama lain saling mempengaruhi. Pandangan hubungan badan dan jiwa seperti ini dikenal sebagai paham Interaksionisme (Titus dkk., 1959).

Sebagai penolakan terhadap paham Interaksionisme muncul paham Paralelisme. Menurut paham ini, tak ada hubungan saling mempengaruhi antara badan dan jiwa. Sekalipun dalam pengalaman sehari-hari kita melihat dan merasakan kenyataan adanya keserasian antara aspek badan dan kejiwaan, namun hal itu bukan berarti adanya saling mempengaruhi antara keduanya. Melainkan, sebagaimana dikemukakan oleh Leibniz (1646-1716) bahwa keserasian tersebut disebabkan karena sudah diciptakan sebelumnya oleh Tuhan.

Semua pandangan di atas dibantah oleh E.F. Schumacher (1980). Menurut Schumacher manusia adalah kesatuan dari yang bersifat badani dan rohani yang secara prinsipal berbeda daripada benda, tumbuhan, hewan, maupun Tuhan. Sejalan dengan ini Abdur Rahman Shalih Abdullah (1991) menegaskan: "meski manusia merupakan perpaduan dua unsur yang berbeda, ruh dan badan, namun ia merupakan pribadi yang integral".

Sebagai kesatuan badani-rohani manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran *(consciousnesss)*, memiliki penyadaran diri *(self-awareness)*, mempunyai berbagai kebutuhan, instink, nafsu, serta mempunyai tujuan. Manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan potensi untuk berbuat baik, namun di samping itu karena hawa nafsunya ia pun memiliki potensi untuk berbuat jahat. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir (cipta), potensi berperasaan (rasa), potensi berkehendak (karsa), dan memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam eksistensinya manusia berdimensi individualitas/personalitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan dan keberagamaan. Implikasi dari semua itu, manusia memiliki historisitas, berinteraksi/berkomunikasi, dan memiliki dinamika.

c. Dimensi-dimensi Manusia

1) Individualitas/Personalitas

Dari uraian di atas telah Anda pahami bahwa manusia bukan hanya badannya, bukan pula hanya rohnya. Manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya, dst. Dalam kehidupan sehari-hari Anda pun menyaksikan adanya perbedaan pada setiap orang, sehingga masing-masing bersifat unik. Perbedaan ini berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat, hobi, cita-citanya, dsb. Jika Anda bandingkan, manusia kembar siam sekalipun tidak memiliki kesamaan dalam keseluruhannya bukan? Selain itu, karena setiap manusia memiliki subjektivitas (ke-diri-sendirian), maka ia hakikatnya adalah pribadi, ia adalah subjek. Sebagai pribadi atau subjek, setiap manusia bebas mengambil tindakan atas pilihan serta tanggung jawabnya sendiri (otonom) untuk menandaskan keberadaanya di dalam lingkungan. Dengan demikian dapat Anda simpulkan bahwa manusia adalah individual/personal, adapun karakteristiknya bahwa manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, dan merupakan subjek yang otonom, serta berada dalam pertumbuhan dan perkembangan.

2) Sosialitas

Sekalipun setiap manusia adalah individual/personal, tetapi ia tidak hidup sendirian, tak mungkin hidup sendirian, dan tidak mungkin hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan hidup pula dalam keterpautan dengan sesamanya. Dalam hidup bersama dengan sesamanya (bermasyarakat), setiap individu menempati kedudukan *(status)* tertentu, mempunyai dunia dan mempunyai tujuan hidupnya masing-masing, namun demikian, sekaligus ia pun mempunyai *dunia bersama* dan *tujuan hidup bersama* dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanyalah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini Aristoteles menyebut manusia sebagai *makhluk sosial* atau makhluk bermasyarakat (Ernst Cassirer, 1987).

Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Ernst Cassirer menyatakan: "manusia takkan menemukan diri, manusia takkan menyadari individualitasnya kecuali melalui perantaraan pergaulan sosial. Adapun Theo Huijbers mengemukakan bahwa "dunia hidupku dipengaruhi oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga demikian mendapat arti sebenarnya dari aku bersama orang lain itu" (Soerjanto P. dan K. Bertens,1983). Sebaliknya, terdapat pula pengaruh dari individu terhadap masyarakatnya. Masyarakat terbentuk dari individu-individu, maju mundurnya suatu masyarakat akan tertentukan oleh individu-individu yang membangunnya (Iqbal, 1978).

Karena setiap manusia adalah pribadi/individu, dan karena terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan sesamanya, maka idealnya situasi hubungan antara individu dengan sesamanya itu tidak merupakan hubungan antara

subjek dengan objek, melainkan *subjek* dengan *subjek* yang oleh Martin Buber disebut hubungan *I – Thou / Aku-Engkau* (Maurice S. Friedman, 1954). Selain itu, hendaknya terdapat keseimbangan antara individualitas dan sosialitas pada setiap manusia.

3) Keberbudayaan

Kebudayaan adalah "keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar" (Koentjaraningrat, 1985). Ada tiga jenis wujud kebudayaan, yaitu: (1) sebagai kompleks dari ide-ide, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dsb.; (2) sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan (3) sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, ia hidup berbudaya dan membudaya. Manusia menggunakan kebudayaan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya atau untuk mencapai berbagai tujuannya. Di samping itu kebudayaan menjadi milik manusia, menyatu dengan dirinya, ia hidup sesuai dengan kebudayaannya. Karena itu, kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia, melainkan meliputi perbuatan manusia itu sendiri. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena dan bersama kebudayaannya. Di dalam kebudayaan dan dengan kebudayaan itu manusia menemukan dan mewujudkan diri. Berkenaan dengan ini Ernst Cassirer menegaskan: "Manusia tidak menjadi manusia karena sebuah faktor di dalam dirinya, seperti misalnya naluri atau akal budi, melainkan fungsi kehidupannya, yaitu pekerjaannya, kebudayaannya. Demikianlah kebudayaan termasuk hakikat manusia (C.A. Van Peursen, 1988).

Dari uraian di atas kiranya Anda telah memahami bahwa kebudayaan memiliki fungsi positif bagi kemungkinan eksistensi manusia, namun demikian perlu dipahami pula bahwa apabila manusia kurang bijaksana dalam mengembangkan dan/atau menggunakannya, maka kebudayaan pun dapat menimbulkan kekuatan-kekuatan yang mengancam eksistensi manusia. Dalam perkembangannya yang begitu cepat, sejak abad yang lalu kebudayaan disinyalir telah menimbulkan *krisis antropologis.* Berkenaan dengan ini Martin Buber mengemukakan contoh keterhukuman manusia oleh karyanya sendiri: Manusia menciptakan mesin untuk melayani dirinya, tetapi akhirnya manusia menjadi pelayan mesin. Demikian pula dalam bidang ekonomi, semula manusia berproduksi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi akhirnya manusia tenggelam dan dikuasai produksi (Ronald Gregor Smith, 1959).

Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Kodrat *dinamika* pada diri manusia mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaruan kebudayaan. Hal ini tentu saja didukung oleh pengaruh kebudayaan masyarakat/bangsa lain terhadap kebudayaan masyarakat tertentu, serta dirangsang pula oleh tantangan yang datang dari

lingkungan. Selain itu, mengingat adanya dampak positif dan negatif dari kebudayaan terhadap manusia, masyarakat kadang-kadang terombang ambing diantara dua relasi kecenderungan. Di satu pihak ada yang mau melestarikan bentuk-bentuk lama (konservatif), sedang yang lain terdorong untuk menciptakan hal-hal baru (inovatif). Ada pergolakan yang tak kunjung reda antara tradisi dan inovasi. Hal ini meliputi semua kehidupan budaya (Ernst Cassirer, 1987).

4) Moralitas

Eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas, sebab manusia memiliki *kata hati* yang dapat membedakan antara baik dan jahat. Adapun menurut Immanuel Kant disebabkan pada manusia terdapat *rasio praktis* yang memberikan perintah mutlak *(categorical imperative).* Contoh: jika Anda meminjam buku milik teman, rasio praktis atau kata hati Anda menyatakan bahwa buku itu *wajib* dikembalikan. (S.E. Frost Jr., 1957; P.A. van der Weij, 1988). Sebagai subjek yang otonom (memiliki kebebasan), manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Adapun kebebasan untuk bertindak/berbuat itu selalu berhubungan dengan *norma-norma moral* dan *nilai-nilai moral* yang juga harus dipilihnya. Karena manusia mempunyai kebebasan memilih untuk bertindak/berbuat, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya.

5) Keberagamaan

Keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentang waktu (dulu-sekarang-akan datang), maupun dalam rentang geografis dimana manusia berada.

Seperti telah Anda pahami, manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Di lain pihak, Allah pun telah menurunkan wahyu melalui Utusan-utusanNya, dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar (sehingga) manusia beriman dan bertaqwa kepadaNya. Dalam keberagamaan ini manusia dapat merasakan hidupnya menjadi bermakna. Ia memperoleh kejelasan tentang asal-usulnya, dasar hidupnya, tata cara hidupnya, dan menjadi jelas pula ke mana arah tujuan hidupnya.

6) Historisitas, Komunikasi/Interaksi dan Dinamika

Berbagai dimensi eksistensi manusia sebagaimana telah diuraikan terdahulu mengimplikasikan bahwa eksistensi manusia memiliki dimensi historisitas, komunikasi/interaksi, dan dinamika.

Historisitas. Eksistensi manusia memiliki dimensi historisitas, artinya bahwa keberadaan manusia pada saat ini terpaut kepada masa lalunya, ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia, ia mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Historisitas memiliki fungsi dalam eksistensi manusia. Historisitas turut membangun eksistensi manusia. Sehubungan dengan ini Karl Jaspers menyatakan: "Manusia harus tahu siapa dia tadinya, untuk menjadi sadar kemungkinan menjadi apa dia nantinya. Masa lampaunya yang historis adalah faktor dasar yang tidak dapat dihindarkan bagi masa depannya" (Fuad Hasan, 1973).

Manusia telah melampaui masa lalunya, adapun keberdaannya pada saat ini adalah sedang dalam perjalanan hidup, perkembangan dan pengembangan diri. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi ia juga harus terus berjuang untuk hidup sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya. Karena itu, ia *"belum selesai" menjadi manusia, "belum selesai" mengaktualisasikan diri demi mencapai tujuan hidupnya.* Tujuan hidup manusia mencakup tiga dimensi, yaitu (1) dimensi ruang (di sini - di sana, dunia - akhirat); (2) dimensi waktu (masa sekarang - masa datang); (3) dimensi nilai (baik - tidak baik) sesuai dengan agama dan budaya yang diakuinya (M.I. Soelaeman, 1988). Adapun esensi tujuan hidup manusia tiada lain untuk mencapai keselamatan/ kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau untuk mendapatkan ridlo Allah Swt.

Komunikasi atau Interaksi. Dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, manusia berinteraksi/berkomunikasi. Komunikasi/interaksi ini dilakukannya baik secara vertikal, yaitu dengan Tuhannya; secara horizontal yaitu dengan alam dan sesama manusia serta budayanya; dan bahkan dengan "dirinya sendiri". Demikianlah interaksi/ komunikasi tersebut bersifat multi dimensi.

Dinamika. N. Drijarkara S.J. (1986) menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika (manusia sebagai dinamika), artinya manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai arah horisontal (ke arah sesama dan dunia) maupun arah transendental (ke arah Yang Mutlak). Adapun dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri baik dalam hubungannya dengan sesama, dunia dan Tuhan.

Manusia adalah subjek, sebab itu ia dapat mengontrol dinamikanya. Namun demikian karena ia adalah kesatuan jasmani-rohani (yang mana ia dibekali nafsu), sebagai insan sosial, dsb., maka dinamika itu tidak sepenuhnya selalu dapat dikuasainya. Terkadang muncul dorongan-dorongan negatif yang bertentangan dengan apa yang seharusnya, kadang muncul pengaruh negatif dari sesamanya yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kadang muncul kesombongan yang tidak seharusnya diwujudkan, kadang individualitasnya terlalu dominan atas sosialitasnya, dsb. Sehubungan dengan itu, idealnya manusia harus secara sengaja dan secara prinsipal menguasai dirinya agar dinamikanya itu betul-betul sesuai dengan arah yang seharusnya.

d. Kedudukan dan Tugas Manusia di Dunia

Seperti telah dikemukakan di atas, manusia memiliki dimensi dinamika, sebab itu eksistensi manusia bersifat dinamis. Bagi manusia bereksistensi berarti “meng-ada-kan” dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti merencanakan, berbuat dan menjadi. Permasalahannya, manusia itu bereksistensi untuk menjadi siapa? Eksistensi manusia tiada lain adalah untuk menjadi manusia. Inilah tugas yang diembannya. Tegasnya ia harus menjadi *manusia ideal* (manusia yang diharapkan, dicita-citakan, atau menjadi manusia yang seharusnya). Idealitas (keharusan, cita-cita/harapan) ini bersumber dari Allah SWT melalui ajaran agama yang diturunkanNya, bersumber dari sesama dan budayanya, bahkan dari diri manusia itu sendiri.

Mengacu kepada ajaran Islam, Al-Rasyidin dan Syamsul Nizar (2005:17-21) mengemukakan bahwa kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi (Q. S. Al-Baqarah/2:30). Adapun tugas hidupnya adalah mengabdi kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan (Q.S. Adz-Dzaariaat/51:56). Islam menggariskan bahwa seluruh aktivitas seorang hamba selama ia hidup di alam semesta ini dapat dinilai sebagai ibadah manakala aktivitas itu ditujukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Agar manusia dapat berperan sesuai dengan kedudukan dan tugas hidupnya, maka manusia dibekali oleh Allah dengan fitrah serta berbagai potensi yang harus dikembangkan dan diwujudkannya. Apabila hal ini kita hubungkan dengan fitrah manusia dan berbagai potensi yang dimilikinya sebagaimana telah Anda pahami dari uraian terdahulu, maka dengan demikian dapat pula dipahami bahwa manusia ideal adalah manusia yang mampu mewujudkan berbagai potensinya secara optimal, sehingga beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya.

2. Manusia sebagai Makhluk yang Perlu Dididik dan Perlu Mendidik Diri

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu, eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Ia adalah manusia tetapi sekaligus “belum selesai” mewujudkan dirinya sebagai manusia *(prinsip historisitas).*

Bersamaan dengan hal di atas, dalam eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan *(prinsip idealitas).*

Permasalahannya, bagaimana mungkin manusia dapat menjadi manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu mari terlebih dahulu kita bandingkan sifat perkembangan khewan dan sifat perkembangan manusia. Perkembangan khewan bersifat *terspesialisasi/tertutup.* Contoh: kerbau lahir sebagai anak kerbau, selanjutnya ia hidup dan berkembang sesuai kodrat dan martabat ke-kerbau-annya (mengkerbau/menjadi kerbau). Pernahkan Anda menemukan anak kerbau yang berkembang menjadi serigala? Mustahil bukan? Sebaliknya, perkembangan manusia bersifat *terbuka.* Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia, misalnya: potensi untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, potensi untuk dapat berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dsb. Namun demikian setelah kelahirannya, bahwa potensi itu mungkin terwujudkan, kurang terwujudkan atau tidak terwujudkan. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya (menjadi manusia), sebaliknya mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang atau tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya (kurang/tidak menjadi manusia). Contoh: Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti menemukan fenomena perilaku orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., orang-orang yang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma budaya masyarakatnya, dsb. Di samping itu, Anda pun menyaksikan orang-orang yang berperilaku kurang/tidak sesuai dengan perilaku manusia yang seharusnya, baik menurut nilai dan norma agama maupun budayanya. Perilaku koruptor bak tikus kantor bukan? Contoh lain dikemukakan Anne Rollet, ia melaporkan bahwa sampai tahun 1976 para etnolog telah mencatat 60 anak-anak buas yang hidup bersama dan dipelihara oleh binatang. Tidak diketahui bagaimana awal kejadiannya, yang jelas telah ditemukan bahwa diantara ke-60 anak tersebut ada yang dipelihara oleh serigala, kijang, kera, serigala, dsb. Anak-anak tersebut berperilaku tidak sebagaimana layaknya manusia, melainkan bertingkah laku sebagaimana binatang yang memeliharanya. Mereka tidak berpakaian, agresif untuk menyerang dan menggigit, tidak dapat tertawa, ada yang tidak dapat berjalan tegak, tidak berbahasa sebagaimana bahasanya manusia, dll. (Intisari, No.160 Tahun ke XIII, November 1976:81-86). Demikianlah, perkembangan kehidupan manusia bersifat terbuka atau serba mungkin. Inilah *prinsip posibilitas/prinsip aktualitas.*

Dari uraian di atas, dapat Anda pahami bahwa berbagai kemampuan yang seharusnya dilakukan manusia tidak di bawa sejak kelahirannya, melainkan harus diperoleh setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Di satu pihak, berbagai kemampuan tersebut diperoleh manusia melalui upaya bantuan dari pihak lain. Mungkin dalam bentuk pengasuhan, pengajaran, latihan, bimbingan, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang dapat dirangkumkan dalam istilah *pendidikan.* Di lain pihak, manusia yang bersangkutan juga harus belajar atau harus *mendidik diri*. Mengapa manusia harus mendidik diri? Sebab, dalam bereksistensi yang harus "menga-ada-kan/menjadikan" diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apa pun upaya yang diberikan pihak lain (pendidik) kepada seseorang (peserta didik) untuk membantunya menjadi manusia, tetapi apabila seseorang tersebut tidak mau mendidik diri, maka upaya

bantuan tersebut tidak akan memberikan konstribusi bagi kemungkinan seseorang tadi untuk menjadi manusia. Lebih dari itu, jika sejak kelahirannya perkembangan dan pengembangan kehidupan manusia diserahkan kepada dirinya masing-masing tanpa dididik oleh orang lain dan tanpa upaya mendidik diri dari pihak manusia yang bersangkutan, kemungkinannya ia hanya akan hidup berdasarkan dorongan instingnya saja.

Manusia belum selesai menjadi manusia, ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia, untuk menjadi manusia ia perlu dididik dan mendidik diri. *"Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan",* demikian kesimpulan Immanuel Kant dalam teori pendidikannya (Henderson, 1959). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi M.J. Langeveld yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan *Animal Educandum* (M.J. Langeveld, 1980).

Berdasarkan uraian terdahulu dapat Anda simpulkan, bahwa manusia adalah makhluk yang perlu didik dan perlu mendidik diri. Terdapat tiga prinsip antropologis yang menjadi asumsi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan perlunya manusia mendidik diri, yaitu: *(1) prinsip historisitas, (2) prinsip idealitas, dan (3) prinsip posibilitas/aktualitas.*

3. Manusia sebagai Makhluk yang Dapat Dididik

Dari uraian yang lalu telah Anda pahami bahwa manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Selanjutnya mungkin muncul permasalahan pada diri Anda: apabila manusia perlu dididik, apakah manusia akan dapat dididik ? Prinsip-prinsip Antropologis apakah yang melandasinya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Anda dapat mengacu kepada konsep hakikat manusia sebagaimana telah diuraikan terdahulu (point 1). Berdasarkan itu dapat ditemukan lima prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu **:** (1) prinsip potensialitas, (2). prinsip dinamika, (3) prinsip individualitas, (4) prinsip sosialitas, dan (5) prinsip moralitas.

(1) Prinsip Potensialitas.

Pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, bermoral/berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, mampu berkarya, dst.. Di pihak lain, manusia memiliki berbagai potensi, yaitu: potensi untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dan potensi karya. Sebab itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal.

(2) Prinsip Dinamika.

Ditinjau dari sudut pendidik, pendidikan diupayakan dalam rangka membantu

manusia (peserta didik) agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri (peserta didik) memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi/komunikasinya secara horisontal maupun vertikal.. Karena itu dinamika manusia mengimplikasikan bahwa ia akan dapat didik.

(3) Prinsip Individualitas

Praktek pendidikan merupakan upaya *membantu* manusia (peserta didik) yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri. Dipihak lain, manusia (peserta didik) adalah individu yang memiliki ke-diri-sendirian (subyektivitas), bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Sebab itu, individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik.

(4) Prinsip Sosialitas

Pendidikan berlangsung dalam pergaulan (interaksi/komunikasi) antar sesama manusia (pendidik dan peserta didik). Melalui pergaulan tersebut pengaruh pendidikan disampaikan pendidik dan diterima peserta dididik. Telah Anda pahami, hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, ia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi huhungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik.

(5) Prinsip Moralitas

Pendidikan bersifat *normatif*, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. Di samping itu, pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia; agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat dan budayanya. Di pihak lain, manusia berdimensi moralitas, manusia mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Sebab itu, dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik.

Atas dasar berbagai asumsi di atas, jelas kiranya bahwa manusia akan dapat dididik, sehubungan dengan ini M.J. Langeveld (1980) memberikan identitas kepada manusia sebagai *"Animal Educabile"*.

Dengan mengacu pada asumsi bahwa manusia akan dapat dididik, diharapkan kita tetap sabar dan tabah dalam melaksanakan pendidikan. Andaikan saja Anda telah melaksanakan upaya pendidikan, sementara peserta didik belum dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, Anda seyogyanya tetap sabar dan tabah untuk tetap mendidiknya. Dalam konteks ini, Anda justru perlu introspeksi diri, barangkali saja terjadi kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan dalam upaya pendidikan tersebut, sehingga peserta didik terhambat dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini, coba Anda rumuskan tentang: 1) hakikat manusia; 2) mengapa manusia perlu dididik; dan 3) mengapa manusia dapat dididik.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali konsep asal usul manusia, wujud dan berbagai potensinya, serta berbagai dimensi eksistensinya. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu mengingat kembali prinsip-prinsip keharusan pendidikan.Adapun untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu mengingat kembali prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan.

Rangkuman

Manusia adalah makhluk Allah SWT, sebagai kesatuan badani-rohani manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran *(consciousnesss)*, memiliki penyadaran diri *(self-awareness)*, mempunyai berbagai kebutuhan, instink, nafsu, serta mempunyai tujuan. Manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki potensi untuk berbuat baik dan untuk berbuat jahat; memiliki potensi untuk mampu berpikir (cipta), potensi berperasaan (rasa), potensi berkehendak (karsa), dan potensi untuk berkarya. Dimensi eksistensi manusia meliputi individualitas/personalitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan dan keberagamaan. Adapun semua itu, mengimplikasikan dimensi historisitas, interaksi/komunikasi dan dinamika.

Perkembangan kehidupan khewan bersifat tertutup, sebaliknya perkembangan kehidupan manusia bersifat terbuka (mungkin memanusia, mungkin kurang atau tidak memanusia). Sementara itu, manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia. Adapun kenyataannya, manusia akan dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan.

Manusia adalah makhluk yang perlu didik dan perlu mendidik diri. Prinsip antropologis sebagai asumsinya yaitu: 1) prinsip historisitas, 2) prinsip idealitas, dan 3) prinsip posibilitas/aktualitas.

Manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Adapun asumsi yang melandasinya adalah prinsip-prinsip antropologis sebagai berikut: 1) prinsip potensialitas, 2) prinsip dinamika, 3) prinsip sosialitas, 4) prinsip individualitas, dan 5) prinsip moralitas.

Tes Formatif 2

1. Argumen kosmologis merupakan salah satu argumen filosofis yang mengakui bahwa manusia adalah ....
   A. ciptaan Tuhan.
   B. hasil evolusi.
   C. kesatuan badan-ruh.
   D. makhluk berbudaya.

2. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Ini adalah konsep tentang ....
   A. asal- usul manusia di muka bumi.
   B. wujud manusia di muka bumi.
   C. kedudukan manusia di muka bumi.
   D. tugas hidup manusia di muka bumi.

3. Kita mengakui bahwa manusia adalah kesatuan badani-ruhani, hal ini sejalan dengan gagasan dari ....
   A. Abdur Rahman Shalih Abdullah.
   B. Julien de La Mettrie
   C. Plato.
   D. Rene Descartes.

4. Manusia pada dasarnya makhluk bermoral. Ia dapat membedakan antara perbuatan baik dan jahat, karena ia memiliki ....
   A. insting.
   B. perasaan.
   C. hawa nafsu.
   D. kata hati.

5. Eksistensi manusia pada saat ini terpaut kepada masa lalunya, ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia, dan mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Ini adalah makna dimensi ....
   A. historisitas.
   B. individualitas.
   C. moralitas.
   D. sosialitas.

6. Manusia selalu aktif "meng-ada-kan" diri kearah penyempurnaan diri. Ini adalah makna dimensi ....
   A. komunikasi.
   B. dinamika.
   C. keberbudayaan.
   D. keberagamaan.

7. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri. M.J. Langeveld menyebutnya dengan istilah ....
   A. animal educabile.
   B. animal educandum.
   C. animal rational.
   D. animal symbolicum.

8. Prinsip sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik, sebab ....
   A. manusia merupakan subjek yang unik dan bebas atau otonom.
   B. manusia bergaul dengan sesamanya dan saling mempengaruhi.
   C. manusia dapat membedakan perbuatan yang baik dan jahat.
   D. manusia memiliki potensi cipta, rasa, karsa, dan karya.

9. Eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Ini tergolong kepada ....
   A. prinsip aktualitas.
   B. prinsip sosialitas.
   C. prinsip idealitas.
   D. prinsip potensialitas.

10. Berikut ini adalah prinsip-prinsip antropologis yang menjadi asumsi bahwa manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri, ***kecuali*** ....
    A. prinsip historisitas.
    B. prinsip idealitas.
    C. prinsip aktualitas.
    D. prinsip individualitas.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat pada bagian akhir Modul 1 ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar 3. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Pengertian Pendidikan

Anda akan mengkaji tiga pokok bahasan dalam kegiatan belajar ini, yaitu: (1) pengertian pendidikan berdasarkan lingkupnya, (2) pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan pendekatan sistem, serta (3) pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan Antropo-filosofis (implikasi dari pandangan tentang hakikat manusia terhadap pendidikan).

Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi definisi dan karakteristik pendidikan dalam arti luas dan sempit. Kajian dalam pokok bahasan kedua meliputi berbagai definisi atau konsep dalam ilmu-ilmu tertentu yang memiliki makna pendidikan, dan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Adapun kajian dalam pokok bahasan ketiga meliputi definisi pendidikan sebagai humanisasi dan karakteristiknya, serta pengertian pendidikan menurut pendekatan religius (Islam). Dengan demikian setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Anda akan dapat menjelaskan berbagai pengertian pendidikan, baik pengertian pendidikan berdasarkan lingkupnya, yaitu: pengertian luas dan sempit; berbagai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan pendekatan sistem; pengertian pendidikan sebagai humanisasi, serta pengertian tarbiyah dan ta'lim.

1. Pengertian Pendidikan berdasarkan Lingkupnya

a. Pendidikan dalam Arti Luas

Dalam arti luas, *pendidikan adalah hidup.* Artinya, pendidikan adalah segala pengalaman (belajar) di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi perkembangan individu. Contoh: Seorang anak tertarik dengan nyala api yang membara, ia memegangnya, merasakan panas, dan berdasarkan pengalaman itu akhirnya ia selalu hati-hati apabila mengahadapi atau menggunakan api. Para siswa dan para guru sedang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di madradsah ibtidayah. Ketika terjadi bencana alam tsunami, seseorang menyadari dosa-dosa yang telah diperbuatnya, segera bertaubat kepada Allah swt dan berupaya untuk tidak berbuat dosa lagi.

Dari contoh di atas Anda dapat memahami bahwa pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan manusia yang bersifat multi dimensi, baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia dan budayanya, dengan alam, bahkan dengan Tuhannya.Dalam hubungan yang bersifat multi dimensi itu pendidikan belangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, berbagai bentuk tindakan, dan berbagai peristiwa, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Sehubungan dengan ini Rupert S. Lodge menyatakan: *"In the wider sense, all experience is said to be educative . …. Everything we say, think, or do, educates us, no less than what is said or done to us by other beings, animate or inanimate. In this wider sense, life is education, and education is life"* (Mohammad Noor Syam, 1984).

Dalam arti luas, pendidikan berlangsung bagi siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Pendidikan tidak terbatas pada penyekolahan *(schooling)* saja, bahkan pendidikan berlangsung sejak lahir hingga meninggal dunia atau sepanjang hayat. Pendidikan berlangsung di berbagai tempat atau lingkungan, baik di dalam keluarga, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Sebab itu, Mortimer J. Adler (1982) menyatakan bahwa: *"education is lifelong process of which schooling is only a small but necessary part ".*

Disadari maupun tidak disadari, pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti luas, tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar dan tidak ditentukan dari luar individu. Tujuan pendidikan adalah pertumbuhan, jumlah tujuan pendidikan tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup (Redja Mudyahardjo, 2001).

b. Pendidikan dalam Arti Sempit

Rupert S. Lodge menyatakan: *"In the narrower sense, education becomes, in practice identical with schooling, i.e. formal instruction under controlled conditions"* (Mohammad Noor Syam, 1984). Dalam arti sempit, pendidikan dalam prakteknya identik dengan penyekolahan *(schooling)*, yaitu pengajaran formal di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol.

Dalam arti sempit, pendidikan hanya berlangsung bagi mereka yang menjadi siswa pada suatu madrasah atau mahasiswa pada suatu perguruan tinggi (lembaga pendidikan formal). Pendidikan dilakukan dalam bentuk pengajaran *(instruction)* yang terprogram dan bersifat formal. Pendidikan berlangsung di sekolah atau di dalam lingkungan tertentu yang diciptakan secara sengaja dalam konteks kurikulum sekolah yang bersangkutan.

Lamanya pendidikan untuk setiap individu bervariasi, mungkin enam tahun, sembilan tahun, dan bahkan mungkin kurang atau lebih lebih dari itu sesuai dengan kesempatan dan kemampuan biaya yang dimilikinya. Pendidikan mempunyai titik terminal yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pengertian sempit, tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar individu; tujuan pendidikan terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu; tujuan pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat (Redja Mudyahardjo, 2001).

PERBANDINGAN PENGERTIAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN LINGKUPNYA

HAL	PENGERTIAN LUAS	PENGERTIAN SEMPIT
Definisi	Pendidikan adalah hidup	Pendidikan adalah *schooling*; pengajaran formal yang terkontrol
Tujuan	Melekat dalam tujuan hidup individu, tidak ditentukan dari luar individu	Terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu; mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat; ditentukan oleh pihak luar individu
Peserta Didik	Siapapun	siswa/mahasiswa
Waktu	Kapanpun; sepanjang hayat	Waktu tertentu, terjadwal, memiliki batas akhir /terminal
Tempat	Di mana pun	Lembaga pendidikan formal dalam berbagai bentuknya
Pendidik	Tidak terbatas pada pendidik profesional (guru/dosen).	Pendidik profesional (guru, dosen, dsb).
Bentuk Kegiatan Pendidikan	Berbagai kegiatan, peristiwa dan tindakan, baik yang pada awalnya dimaksudkan untuk pendidikan maupun tidak.	Pengajaran di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol.

2. Pengertian Pendidikan berdasarkan Pendekatan Ilmiah dan Pendekatan Sistem

a. Pengertian Pendidikan berdasarkan Pendekatan Ilmiah

Terdapat berbagai konsep hasil studi beberapa disiplin ilmu tertentu yang dipandang memiliki makna pendidikan. Munculnya berbagai konsep tersebut disebabkan setiap disiplin ilmu memiliki objek studi yang spesifik berkenaan dengan manusia.

Berdasarkan pendekatanan antropologi, pendidikan dipandang identik dengan

enkulturasi atau pembudayaan, yaitu suatu proses dengan jalan mana seseorang menyesuaikan diri kepada suatu kultur masyarakat dan mengasimilasikan nilai-nilainya. Menurut Hansen enkulturasi mencakup "proses perolehan keterampilan bertingkah laku, pengetahuan tentang standar-standar budaya, dan kode-kode perlambangan seperti bahasa dan seni, motivasi yang didukung oleh kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan menanggapi, ideologi dan sikap-sikap" (Imran Manan. 1989).

Berdasarkan pendekatan ekonomi, pendidikan dipandang sebagai *human investment* atau usaha penanaman modal pada diri manusia untuk mempertinggi mutu tenaga kerja sehingga mempertinggi produksi barang dan/atau jasa. Sedangkan berdasarkan tinjauan politik, pendidikan didefinisikan sebagai proses *civilisasi,* yaitu "suatu upaya menyiapkan warga negara yang sesuai dengan aspirasi bangsa dan negaranya" (Odang Muchtar, 1976).

Berdasarkan pendekatan sosiologi, pendidikan dipandang identik dengan *sosialisasi* yaitu suatu proses membantu generasi muda agar mampu menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Emile Durkheim (Jeane H. Ballantine,1985) bahwa: *"Education is the influence exercised by adult generations on those that are not yet ready for social life. It is object is to arouse and to develop in the child a certain number of physical, intellectual and moral states which are demanded of him by both the political society as a whole and the special milieu for which he is specifically destined.* (Pendidikan adalah pengaruh yang dilakukan oleh generasi orang dewasa kepada mereka yang belum siap untuk melakukan kehidupan sosial. Sasarannya adalah membangun dan mengembangkan sejumlah kondisi fisik, intelek, dan moral pada diri anak sesuai dengan tuntutan masyarakat politis secara keseluruhan dan oleh lingkungan khusus tempat ia akan hidup dan berada).

Berdasarkan pendekatan biologi, pendidikan berarti proses *adaptasi*. Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Horne bahwa pendidikan merupakan proses "penyesuaian diri yang terbaik dari seseorang manusia yang sadar terhadap lingkungannya" (Redja Mudyahardjo, 1995). Sedangkan menurut pendekatan psikologi, pendidikan identik dengan *personalisasi,* yaitu upaya membantu perubahan tingkah laku individu untuk mencapai perkembangan optimal menjadi diri sendiri.

Selanjutnya uraian berikut akan menjelaskan pengertian pendidikan berdasarkan tinjauan *pedagogik.* M.J. Langeveld dalam bukunya *"Beknopte Theoritische Paedagogiek''* (Simajuntak, 1980) mengemukakan: "Pendidikan dalam artinya yang hakiki, ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa". Pada bagian lain dalam bukunya tersebut, Langeveld juga menyatakan: "mendidik berarti melakukan tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan". Adapun menurutnya tujuan pendidikan itu adalah kedewasaan. Berdasarkan pernyataan-pernyatan di atas dapat Anda simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar

mencapai kedewasaan.

Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa (pendidik) dengan orang yang belum dewasa (anak didik/peserta didik) di dalam suatu lingkungan. Karena pendidikan merupakan upaya yang disengaja, maka pendidik tentunya harus menyadari tujuan pendidikannya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik memilih isi pendidikan (pengaruh) tertentu dan menggunakan alat pendidikan tertentu pula. Dengan demikian, ada berbagai unsur yang terlibat dalam pergaulan pendidikan. *Unsur-unsur yang terlibat dalam pergaulan pendidikan* itu adalah:

(1) Tujuan pendidikan.
(2) Pendidik.
(3) Anak Didik/Peserta Didik.
(4) Isi Pendidikan (kurikulum).
(5) Alat Pendidikan.
(6) Lingkungan Pendidikan.

Menurut M. J. Langeveld, pendidikan baru terjadi ketika anak telah mengenal *kewibawaan.* Adapun syarat anak mengenal kewibawaan adalah kemampuan anak dalam memahami bahasa. Dengan demikian *batas bawah pendidikan* atau saat pendidikan dapat mulai berlangsung yakni ketika anak mengenal kewibawaan. Sedangkan *batas atas pendidikan* atau saat akhir pendidikan adalah ketika tujuan pendidikan telah tercapai, yaitu kedewasaan. Bila anak belum mengenal kewibawaan, pendidikan belum dapat dilaksanakan. Dalam keadaan anak seperti ini, yang dapat dilaksanakan adalah *pra pendidikan atau pambiasaan.* Sedangkan apabila anak telah mencapai kedewasaan, yang mungkin terjadi adalah *bildung* atau pengembangan diri sendiri. Sehubungan dengan itu, dalam kegiatan pra pendidikan (pembiasaan) dan atau dalam praktek pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dengan anak yang belum dewasa, tanggung jawab pendidikan terletak pada diri pendidik. Sedangkan dalam *bildung*, tanggung jawab terletak pada orang dewasa yang melaksanakan bildung tersebut.

b. Pengertian Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem

Berdasarkan pendekatan sistem, *pendidikan* dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (mentransformasi input menjadi out put).

Sistem pendidikan merupakan salah satu sistem dari sejumlah sistem lainnya (seperti sistem ekonomi, sistem politik, dsb.) yang berada di dalam suatu *supra sistem* (masyarakat). Sistem pendidikan juga merupakan sistem buatan manusia yang bersifat *terbuka,* artinya sistem yang sengaja diciptakan manusia dengan mengambil input

dari masyarakat dan memberikan out put-nya kepada masyarakat. Sebab itu, antara sistem pendidikan dengan sistem lainnya yang ada di dalam masyarakat akan saling mempengaruhi.

Menurut P.H. Coombs (Odang Muchtar, 1976), ada tiga jenis sumber input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu :

1) ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang berlaku di dalam masyarakat;
2) penduduk serta tenaga kerja yang berkualitas;
3) ekonomi atau penghasilan masyarakat.

Dari ketiga jenis sumber input di atas itulah komponen-komponen sistem pendidikan dibangun, adapun komponen sistem pendidikan tersebut meliputi:

1) Tujuan dan prioritas.
   Komponen ini berfungsi untuk mengarahkan semua kegiatan sistem.
2) Siswa atau peserta didik.
   Komponen ini berfungsi untuk belajar atau menjalani proses pendidikan.
3) Pengelolaan atau management.
   Komponen ini berfungsi mengkoordinasikan, mengarahkan dan menilai sistem pendidikan.
4) Struktur dan jadwal.
   Komponen ini berfungsi mengatur waktu dan pengelompokan siswa menurut tujuan-tujuan tertentu.
5) Isi atau kurikulum.
   Komponen ini berfungsi sebagai bahan atau apa yang harus dipelajari siswa.
6) Guru atau pendidik.
   Komponen ini berfungsi membantu menyediakan bahan dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk siswa.
7) Alat bantu belajar.
   Komponen ini berfungsi agar KBM menjadi lebih menarik, bervariasi dan mudah.
8) Fasilitas.
   Komponen ini berfungsi menyediakan tempat untuk terjadinya kegiatan belajar mengajar (KBM).
9) Teknologi.
   Komponen ini berfungsi untuk memperlancar KBM.
10) Kontrol kualitas.
   Komponen ini berfungsi membina sistem peraturan dan kriteria pendidikan.
11) Penelitian.
   Komponen ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, penampilan sistem, dan hasil kerja sistem.
12) Biaya.

Komponen ini berfungsi sebagai petunjuk tingkat efisiensi sistem pendidikan.

Menurut Rakhmat W., komponen siswa tergolong *raw input* (masukan mentah), sedangkan komponen lainnya seperti guru, kurikulum, dsb. tergolong *instrumental input* (Odang Muchtar, 1976). Input lain yang turut mempengaruhi sistem pendidikan adalah *environmental input* yang antara lain berupa faktor sosial budaya, keamanan lingkungan, dsb.

Di dalam sistem pendidikan berlangsung suatu proses pendidikan. Proses ini pada dasarnya merupakan interaksi fungsional antar berbagai komponen pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau mentransformasi *raw input* (siswa) menjadi *out put* pendidikan, adapun *out put* pendidikan adalah manusia terdidik.

Model Input-Output Pendidikan

Lingkungan		Lingkungan
Input Pendidikan	Proses Pendidikan	Hasil Pendidikan
Lingkungan		Lingkungan

3. Pendidikan sebagai Humanisasi

Melalui point 1 dan point 2 dalam kegiatan belajar 3 ini Anda telah mengkaji beberapa pengertian pendidikan. Dalam uraian berikut mari kita kaji lebih lanjut tentang pendidikan sebagai humanisasi yang merupakan implikasi gagasan filosofis tentang hakikat manusia terhadap pendidikan.

Definisi Pendidikan*.* Telah Anda pahami bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik, perlu mendidik diri, dan sebagai makhluk yang dapat dididik. Di pihak lain, telah Anda pahami pula bahwa eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia. Inilah keharusannya, sebagaimana dinyatakan Karl Japers bahwa: *"to be a man is to become a man"* / ada sebagai manusia adalah menjadi manusia (Fuad Hasan, 1973). Adapun manusia akan dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya maka *pendidikan tiada lain adalah humanisasi* (upaya memanusiakan manusia).

Sasaran Pendidikan. Konsep hakikat manusia sebagai kesatuan yang serba dimensi dan terintegrasi sebagaimana telah Anda pahami melalui kegiatan belajar 2, mengimplikasikan bahwa sasaran pendidikan bukan aspek badaniahnya saja dari manusia, bukan pula aspek kejiwaannya saja. Sasaran pendidikan bukan aspek kemampuan berpikirnya saja, bukan hanya dimensi individulitasnya, atau dimensi sosialitasnya saja, dst. S*asaran pendidikan hakikatnya adalah manusia sebagai kesatuan yang terintegrasi.* Jika tidak demikian pandangan kita mengenai sasaran pendidikan, pendidikan tidak akan dapat membantu kita demi mewujudkan (mengembangkan) manusia seutuhnya. Contoh: Pada dasarnya setiap manusia telah menerima pendidikan. Tetapi dalam kehidupan ini kita menemukan fenomena bahwa diantara orang-orang yang bermata dan bertelinga yang secara fisik adalah sehat, namun ternyata mereka tak "melihat" dan tak "mendengar". Ada diantara kalangan orang pintar yang memiliki segudang ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi ternyata mereka hidup tidak/kurang bermoral, tidak/kurang berperasaan, dsb. Terdapat orang-orang yang hanya mementingkan dirinya saja tanpa peduli terhadap sesamanya. Terdapat pula orang-orang yang hidup terombang-ambing karena hanya mengikuti perkembangan masyarakat dan kebudayaannya saja, tanpa memiliki kepribadian yang mantap. Terdapat orang-orang yang berkarya hanya untuk memuaskan nafsunya saja, atau hanya demi kehidupan dunianya saja tanpa arah tujuan untuk kehidupan akhiratnya. Berbagai fenomena itu dapat terjadi antara lain karena kesalahan konsep tentang hakikat manusia sehingga sasaran pendidikannya tidak berkenaan dengan manusia secara utuh.

Tujuan dan Fungsi Pendidikan*.* Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualitas) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada padanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya/dicita-citakan (idealitas). Mengacu pada konsep hakikat manusia sebagaiamana telah Anda pelajari dalam kegiatan belajar 2, maka sosok manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi *tujuan pendidikan* itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt., berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Inilah manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan yang ingin dicapai melalui pendidikan. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.

Sifat/karakteristik Pendidikan. Pendidikan diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal, sebab itu *pendidikan bersifat normatif.* Implikasinya, sesuatu tindakan dapat digolongkan ke dalam upaya pendidikan apabila tindakan itu diarahkan menuju

terwujudnya manusia ideal. Selain itu, materi dan cara-cara pendidikannya pun perlu dipilih atas dasar asumsi tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan yang diturunkan daripadanya. Apabila sebaliknya maka tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai upaya pendidikan. Contoh: (1) Guru melihat murid bernama Amin membuang sampah tidak pada tempatnya. Dengan tujuan agar Amin mampu hidup bersih dan sehat, maka guru memberikan wejangan kepada Amin supaya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. (2) Guru membiarkan murid-muridnya menyontek pada waktu ujian. Tindakan guru pada contoh no (1) sesuai dengan nilai dan norma yang di anut, sebab itu merupakan upaya pendidikan. Sebaliknya, tindakan guru pada contoh no. (2) tidak sesuai dengan nilai baik yang kita anut dan melanggar norma, sebab itu tidak tergolong sebagai upaya pendidikan.

Sebagai humanisasi, pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas. Karena itu, berbagai pengertian pendidikan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu hendaknya tidak dipahami secara parsial. Pendidikan hendaknya tidak direduksi menjadi sebatas pengajaran saja. Pengajaran memang tergolong ke dalam salah satu bentuk upaya bantuan yang diberikan kepada peserta didik, tetapi upaya ini terbatas hanya dalam rangka untuk menguasai dan mengembangkan pengetahuan semata. Pendidikan jangan direduksi menjadi sebatas latihan saja, sebab latihan hanya diarahkan dalam rangka menguasai keterampilan saja. Pendidikan jangan pula direduksi menjadi hanya sebatas sosialisasi atau enkulturasi saja, personalisasi saja, *human investment* atau untuk menghasilkan tenaga kerja saja, dst. Sebagai humanisasi pendidikan seyogyanya meliputi berbagai bentuk kegiatan dalam upaya mengembangkan berbagai potensi manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Sebab itu pula, pendidikan adalah bagi siapa pun, berlangsung di mana pun, melalui berbagai bentuk kegiatan, dan kapan pun (sepanjang hayat). Ini berarti pula bahwa pendidikan perlu dilaksanakan pada setiap tahap perkembangan manusia. Pentingnya pendidikan bukan hanya pada masa kanak-kanak saja, melainkan sejak dini hingga meninggal dunia.

Prinsip sosialitas mengimplikasikan bahwa pendidik mempunyai kemungkinan untuk dapat mempengaruhi peserta didik. Namun demikian, *humanisasi bukanlah pembentukan peserta didik* atas dasar kehendak sepihak dari pendidik. Peserta didik bukanlah objek yang harus dibentuk oleh pendidik. Alasannya, bahwa peserta didik hakikatnya adalah subjek yang otonom. Kita harus menyadari prinsip individualitas/personalitas ini. Sesuai dengan prinsip ini bahwa yang berupaya mewujudkan potensi kemanusiaan itu adalah peserta didik sendiri. Bahwa yang berupaya meng-ada-kan atau mengaktualisasikan diri itu hakikatnya adalah peserta didik sendiri. Sekuat apapun upaya yang dilakukan pendidik, apabila dilakukan dengan melanggar prinsip individualitas/personalitas dari peserta didik, maka upaya itu tidak/sulit untuk dapat diterima oleh peserta didik. Implikasinya, *peranan pendidik* bukanlah membentuk peserta

didik, melainkan membantu peserta didik untuk mewujudkan dirinya dengan mengacu kepada semboyan *ingarso sung tulodo* (memberikan teladan), *ing madya mangun karso* (membangkitkan semangat, kemauan), dan *tut wuri andayani* (membimbing/ memimpin).

Sifat pendidikan yang normatif dan dimensi moralitas mengiplikasikan bahwa pendidikan hanyalah bagi manusia, tidak ada pendidikan bagi khewan. Manusia dididik untuk menjadi manusia yang baik, berperilaku baik atau berakhlak mulia . Di pihak lain, manusia memiliki potensi untuk mampu berbuat baik, ia dibekali kata hati untuk dapat membedakan perbuatan baik dan jahat. Sebab itu, manusia akan mungkin dididik untuk tujuan tadi. Sementara khewan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan baik atau tidak baiknya suatu perbuatan, tingkah laku khewan tidak dapat dinilai baik ataupun jahat. Sebab itu, istilah dan makna pendidikan tidak berlaku untuk khewan.

4. Pengertian Tarbiyah dan Ta'lim (Pendidikan) menurut Islam

Istilah pendidikan dalam konteks Islam mengacu kepada istilah *tarbiyah dan ta'lim.* Dalam hal tertentu kedua istilah tersebut memiliki kesamaan makna., tetapi secara esensial setiap istilah tersebut memiliki perbedaan makna (Abdul Fattah Jalal, 1988).

a. Tarbiyah

Sebagaimana dikemukakan Abdurrahman an-Nahlawi (1989), menurut kamus bahasa Arab, lafal *at-Tarbiyah* berasal dari tiga kata: (1) *raba yarbu,* artinya: bertambah dan tumbuh; (2) *rabiya yarba* dengan *wazn* (bentuk) *khafiya yakhfa*, artinya: menjadi besar; (3) *rabba yarubu* dengan *wazn* (bentuk) *madda yamuddu*, yang berarti: memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara.

Selanjutnya An-Nahlawi mengemukakan bahwa beberapa pengkaji telah menyusun definisi pendidikan dari ketiga asal kata di atas. Imam al-Baidlawi (wafat 685 H) di dalam tafsirnya "Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil" menyatakan: "Makna asal *ar-Rabb* adalah *at-Tarbiyah*, yaitu: menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. Kemudian kata itu dijadikan sifat Allah swt. sebagai *mubalaghah* (penekanan). Di samping itu, ar-Raghib al-Asfahani (wafat 502 H) menyatakan bahwa: "makna asal *ar-Rabb* adalah *at-Tarbiyah*, yaitu memelihara sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna".

Dari ketiga asal kata di atas Abdurrahman al-Bani menyimpulkan, bahwa pendidikan (at-Tarbiyah) terdiri atas empat unsur, yaitu:

(1) Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh.
(2) Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam.
(3) Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya.

(4) Proses itu dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana diisyaratkan oleh al-Baidlawi dan ar-Raghib dengan "sedikit demi sedikit".

Berdasar semua uraian di atas, Abdurrahman an-Nahlawi (1989:32-33) menarik empat kesimpulan asasi dalam memahami makna pendidikan, yaitu: *Pertama*, pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan dan objek. *Kedua,* secara mutlak, pendidik yang sebenarnya hanyalah Allah, Pencipta fitrah dan Pemberi berbagai potensi. Dia-lah Yang memberlakukan hukum dan tahapan perkembangan serta interaksinya, dan hukum-hukum untuk mewujudkan kesempurnaan kebaikan serta kebahagiaan. *Ketiga*, Pendidikan menunut adanya langkah-langkah yang secara bertahap harus dilalui oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan urutan yang telah disusun secara sistematis. Anak melakukan itu fase demi fase. *Keempat*, kerja pendidik harus mengikuti aturan penciptaan dan pengadaan yang dilakukan Allah, sebagaimana harus mengikuti syara' dan Din Allah.

b. Ta'lim

Al-Rasyid dan Syamsul Nizar (2005) mengemukakan bahwa istilah *al-Ta'lim* telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan *al-Tarbiyah.* Rasyid Ridla, misalnya mengartikan al-Ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Argumentasinya didasarkan pada ayat al-Quran, yaitu Q.S. Al-Baqarah/2:151. Silahkan Anda baca Al Quran dan baca surat serta ayat tersebut. Apabila telah selesai membacanya, Anda dipersilahkan melanjutkan uraian di bawah ini !

Sehubungan dengan ayat pada surat Al Baqarah di atas, menurut Abdul Fattah Jalal (1988), bahwa Islam memandang proses *ta'lim* lebih universal daripada *tarbiyah*. Sebab, ketika mengajarkan tilawatul Quran kepada kaum muslimin, Rasulullah saw. tidak terbatas pada membuat mereka sekedar dapat membaca saja, melainkan "membaca dengan perenungan" yang berisikan pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah. Dari membaca semacam ini, Rasul membawa mereka kepada *tazkiyah* (pensucian) yaitu pensucian dan pembersihan diri manusia dari segala kotoran, dan menjadikan diri itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.

Dengan mengacu kepada Q.S. al-Isra/17:24 dan Q.S. as-Syura/26:18 selanjutnya Abdul Fattah Jalal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tarbiyah ialah proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama pertumbuhan manusia, atau menurut istilah yang kita gunakan dewasa ini adalah pada fase bayi dan kanak-kanak. Penggunaan kata tarbiyah

pada ayat pertama menunjukkan, bahwa pendidikan pada fase ini menjadi tanggung jawab keluarga. Orang tua – khususnya Ibu dan ayah - bertanggung jawab mengasuh dan mengasihi anak yang masih kecil dan berada dalam situasi ketergantungan. Adapun *ta'lim* lebih luas dari pendidikan pada fase kanak-kanak. Ta'lim merupakan suatu proses yang harus terus menerus diusahakan manusia semenjak dilahirkan. Sebab manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Berkenaan dengan ini silahkan Anda membaca al Quran Q.S. an-Nahl/16:78.

Selain hal di atas dijelaskan pula bahwa *ta'lim* tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan berdasarkan prasangka atau yang lahir dari taklid semata-mata, ataupun cerita khayal dan dongengan dusta. Bahkan pemusatan kepada pengetahuan teoritis, mengulang kaji secara lisan dan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya – padahal ia sendiri tidak merealisasikan kaidah-kaidah perilaku yang terkandung dalam pengetahuannya itu – menandakan kekurangan penguasaan ilmu yang bersangkutan. Hilanglah dari pemilik ilmu itu sifat pemikiran yang benar dan sehat. Hal ini jelas dicela oleh Allah swt. Sebaliknya, *ta'lim* meliputi berbagai ilmu pengertahuan (teoritis maupun praktis), berbagai keterampilan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, serta pedoman perilaku yang baik.

Kecenderungan Abdul Fattah Jalal sebagaimana dikemukakan di atas, didasarkan pada argumentasi bahwa manusia pertama yang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah adalah nabi Adam a.s. Hal ini secara eksplisit disinyalir dalam Q.S. Al Baqarah/2:31. Silahkan Anda buka Al Quran dan baca ayat tersebut! Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kata *"allama"* untuk memberikan pengajaran kepada nabi Adam a.s. memiliki nilai lebih yang sama sekali tidak dimiliki para malaikat.

Dari seluruh keterangan di atas, terungkap jelas bahwa menurut konsep islam, istilah ta'lim lebih luas jangkauannya dan lebih umum sifatnya daripada tarbiyah yang khusus berlaku bagi anak kecil. Namundemikian, dapat dipahami dalam konteks ini bahwa pendidikan hendaknya diarahkan agar seseorang (peserta didik) dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Latihan/Tugas:

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini, coba Anda tuliskan kembali tentang: 1) perbedaan antara pendidikan dalam arti luas dan dalam arti sempit; 2) Definisi pendidikan menurut sudut pandang berbagai disiplin ilmu tertentu.; 3) asumsi yang menjadi alasan bahwa sebagai humanisasi pendidikan bukanlah *pembentukan* manusia; 4) Bandingkan makna istilah tarbiyah dengan istilah ta'lim.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali karakteristik pendidikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu mengacu kepada konsep sosialisasi, enkulturasi, adaptasi, personalisasi, human investment dst.Adapun untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu mengacu kepada konsep tentang manusia sebagai subjek yang otonom (dimensi individulitas/personalitas). Untuk menjawab latihan nomor 4) Anda dapat mengacu pada persamaan dan perbedaan arti dari istilah tarbiyah dan ta'lim.

Rangkuman

Dalam arti luas, pendidikan adalah hidup, sedangkan dalam arti sempit identik dengan *schooling*. Kedua pengertian pendidikan tersebut memiliki karakteristik masing-masing.

Berdasarkan pendekatan ilmiah, ada beberapa konsep/istilah yang dipandang mengandung makna identik dengan pendidikan, yaitu: sosialisasi, enkulturasi, civilisasi, adaptasi, individualisasi/personalisasi, *human investment* dsb. Sedangkan menurut sudut pandang *pedagogik* pendidikan diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan orang dewasa dalam membantu anak untuk mecapai kedewasaan. Adapun berdasarkan pendekatan sistem, pendidikan didefinisikan sebagai keseluruhan terpadu dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan pendekatan religius (Islam), ada dua istilah yang memiliki makna pendidikan, yaitu *tarbiyah* dan *ta'lim*. Kedua istilah ini memang memiliki kesamaan arti, tetapi juga memiliki perbedaan. Tarbiyah berkenaan dengan pendidikan anak-anak, sedangkan ta'lim memilki pengertian yang lebih luas jangkauannya.

Adanya keragaman pengertian pendidikan merupakan bukti adanya berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap pendidikan, ini tiada lain mengingat begitu pentingnya pendidikan dalam rangka eksisitensi manusia. Tetapi berbagai pengertian pendidikan tersebut hendaknya tidak kita pahami secara parsial, berbagai pengertian tersebut pada dasarnya saling melengkapi mengingat pendidikan itu hakikatnya adalah humanisasi.

Tes Formatif 3

1. Dalam arti luas, makna istilah pendidikan identik dengan ….
   A. instruction.
   B. counseling.
   C. life.
   D. training.

2. Karakteristik pendidikan dalam arti sempit adalah ….
   A. dilaksanakan oleh siapapun dan berlangsung sepanjang hayat.
   B. berbentuk kegiatan belajar-mengajar yang terkontrol dan formal.
   C. pendidiknya adalah siapapun.
   D. Tujuan pendidikannya melekat dalam tujuan hidup individu.

3. Berdasarkan pendekatan sosiologi, pendidikan identik dengan ….
   A. adaptasi.
   C. sosialisasi.
   B. enkulturasi.
   D. personalisasi.

4. Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan orang dewasa dalam membantu anak agar mencapai kedewasaan. Ini adalah definisi pendidikan berdasarkan pendekatan
   A. antropologi.
   C. andragogik.
   B. psikologi.
   D. pedagogik.

5. Berdasarkan pendekatan sistem, interaksi antar komponen sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan merupakan ….
   A. input lingkungan pendidikan.
   C. proses pendidikan.
   B. input alat pendidikan.
   D. out put pendidikan.

6. Menurut pendekatan sistem, komponen pendidikan yang berfungsi membantu menyediakan bahan dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk siswa adalah ….
   A. guru/pendidik.
   B. isi pendidikan / kurikulum.
   C. alat bantu belajar.
   D. pengelolaan/management.

7. Eksistensi manusia adalah untuk menjadi manusia, manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Implikasinya hakikat pendidikan adalah ….
   A. enkulturasi.
   B. civilisasi.
   C. sosialisasi.
   D. humanisasi.

8. Pendidikan bersifat normatif, sebab tujuan pendidikan diarahkan untuk terwujudnya manusia sesuai dengan ....
   A. aktualitasnya.
   B. idealitasnya.
   C. sosialitanya.
   D. historisitasnya.

9. Sebagai humanisasi, pendidikan bukan berarti *pembentukan* manusia (peserta didik) oleh manusia lainnya (pendidik). Sebab asumsinya bahwa manusia (peserta didik) itu adalah ....
   A. pribadi yang otonom dalam "meng-ada-kan" dirinya.
   B. pribadi yang perkembangnnya telah terspesialisasi
   C. makhluk bermoral yang dapat membedakan baik dan jahat.
   D. makhluk sosial yang dapat saling mempengaruhi.

10. Berdasarkan kajian tentang makna tarbiyah dan ta'lim, bahwa tarbiyah memiliki makna sebagai berikut, ***kecuali*** ....
   A. merupakan suatu kegiatan pendidikan yang bertujuan.
   B. pelaksanaannya sebaiknya setahap demi setahap.
   C. pendidikan yang dilakukan pada saat anak masih kecil.
   D. pendidikan yang dilakukan sepanjang hayat.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Modul 2 Kegiatan Belajar 1. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 3 pada Modul1 ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1: 1. A, 2. C, 3. D, 4. A, 5. B, 6. B, 7. D. 8.D, 9. A, 10. C.
Tes Formatif 2: 1. A, 2. C, 3. A, 4. D, 5. A, 6. B, 7. B, 8. B, 9. C, 10. D.
Tes Formatif 3: 1. C, 2. B, 3. C, 4. D, 5. C, 6. A, 7. D, 8. B. 9. A. 10. C.

MODUL 2

LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN

LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN

Pendahuluan

Para pendidik perlu memiliki suatu landasan filosofis pendidikan. Ada dua alasan mengapa para pendidik perlu memiliki landasan filosofis pendidikan. *Pertama*, karena pendidikan bersifat normatif, maka dalam rangka pendidikan diperlukan asumsi yang bersifat normatif pula. Adapun asumsi-asumsi pendidikan yang bersifat normatif itu antara lain dapat bersumber dari filsafat. Landasan filosofis pendidikan yang bersifat preskriptif atau normatif ini akan memberikan petunjuk kepada pendidik tentang apa yang seharusnya di dalam pendidikan atau apa yang dicita-citakan dalam pendidikan. *Kedua*, bahwa pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang pula secara holistik. Adapun kajian pendidikan secara holistik dapat diwujudkan melalui pendekatan filosofis.

Di dalam khasanah teori pendidikan terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan, antara lain Idealisme, Realisme, Pragmatisme, dsb. Namun demikian, kita bangsa Indonesia memiliki filsafat pendidikan nasional tersendiri, yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, maka berbagai aliran filsafat pendidikan perlu kita pelajari, tetapi pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya tetap berlandaskan Pancasila. Pemahaman atas berbagai aliran filsafat pendidikan akan dapat membantu Anda untuk tidak terjerumus ke dalam aliran filsafat lain. Di samping itu, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kita pun dapat mengambil hikmah dari berbagai aliran filsafat pendidikan lainnya, dalam rangka memperkokoh landasan filosofis pendidikan kita. Dengan memahami landasan filosofis pendidikan diharapkan tidak terjadi kesalahan konsep tentang pendidikan yang akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam praktek pendidikan.

Modul ini akan membantu Anda untuk memahami pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan, serta konsep landasan filosofis pendidikan menurut berbagai aliran filsafat, baik yang bersifat akademik maupun ideologis. Adapun aliran filsafat yang dimaksud yaitu: Idealisme, Realisme, Pragmatisme, dan Pancasila. Lebih khusus lagi modul ini akan membantu Anda untuk memahami implikasi konsep filsafat umum setiap aliran filsafat terhadap konsep pendidikan.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memiliki wawasan tentang landasan filosofis pendidikan sebagai titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan lebih lanjut. Adapun secara khusus, Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan asumsi-asumsi filosofis pendidikan Idealisme.
2. Menjelaskan asumsi-asumsi filosofis pendidikan Realisme..
3. Menjelaskan asumsi-asumsi filosofis pendidikan Pragmatisme.
4. Menjelaskan asumsi-asumsi filosofis pendidikan nasional (Pancasila).

Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama mencakup pengertian serta karakteristik filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Kegiatan belajar 2 meliputi pembahasan landasan filosofis pendidikan Idealisme dan Realisme. Kegiatan belajar 3 meliputi pemababahasan landasan filosofis Pragmatisme dan landasan filosofis pendidikan nasional, yaitu Pancasila.

Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut ini:

1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam modul ini.
2. Baca materi modul dengan seksama, tambahkan catatan pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan, dll. sesuai pemikiran yang muncul. Dalam menjelaskan suatu konsep atau asas, seringkali digunakan istilah dan diberikan contoh, pahami hal tersebut sesuai konteks pembahasannya.
3. Terdapat keterkaitan antara materi sub pokok bahasan kesatu (kegiatan pembelajaran satu) dengan materi sub pokok bahasan kedua (kegiatan pembelajaran kedua) dst. Materi pada kegiatan pembelajaran kesatu berimplikasi terhadap materi kegiatan pembelajaran kedua dst. Karena itu untuk menguasai keseluruhan materi modul ini mesti dimulai dengan memahami secara berurutan materi modul pada setiap sub pokok bahasan yang disajikan pada kegiatan pembelajaran satu s.d. kegiatan pembelajaran tiga secara berurutan.
4. Cermati dan kerjakan tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan tugas tersebut, gunakan pengetahuan yang telah Anda kuasai sebelumnya, pengetahuan dan penghayatan berkenaan dengan pengalaman hidup Anda sehari-hari akan dapat membantu.
5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan rambu-rambu jawaban untuk menentukan penilaian benar /tidaknya jawaban Anda.
6. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan tutorial elektronik, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Pengertian Filsafat dan Landasan Filosofis Pendidikan

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji dua pokok bahasan, yaitu mengenai filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Kajian pada pokok bahasan pertama meliputi definisi filsafat, karakteristik filsafat, sistematika filsafat dan aliran-aliran filsafat. Sedangkan kajian pada pokok bahasan kedua meliputi definisi landasan filosofis pendidikan, karakteristik landasan filosofis pendidikan, struktur landasan filosofis pendidikan dan aliran-aliran dalam landasan filosofis pendidikan. Dengan demikian setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat memahami pengertian filsafat dan landasan filosofis pendidikan. Pemahaman ini akan sangat membantu Anda untuk memahami permasalahan pokok yang akan dikaji dalam kegiatan belajar selanjutnya, yakni mengenai konsep filsafat pendidikan menurut berbagai aliran filsafat.

1. Pengertian dan Karakteristik Filsafat

Definisi Filsafat secara Etimologis. Istilah filsafat (Inggris: *philosophy;* Arab: *falsafah*) berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu *philein* atau *philos* yang berarti cinta atau sahabat, dan s*ophia* atau s*ophos* yang berarti kebijaksanaan. Kedua kata tersebut membentuk istilah *philosophia*. Dengan demikian, berdasarkan asal usul katanya, *philosophia* (filsafat) berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Karena istilah *philosophia* dalam bahasa Indonesia identik dengan istilah filsafat, maka untuk orangnya, yaitu orang yang mencintai kebijaksanaan disebut *filsuf.*

Istilah *philosophia* atau filsafat telah digunakan sejak dulu dalam tradisi Yunani Kuno. Sekitar abad keenam sebelum masehi, Pythagoras (580-500 SM) telah menggunakannya. Berkenaan dengan pengertian istilah *philosophia* Phythagoras pernah menyatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang bijaksana, melainkan seseorang filsuf atau seseorang yang mencintai kebijaksanaan (Dagobert D. Runes, 1981). Demikian pula Socrates (470-399 SM), sebagaimana tercatat dalam salah satu tulisan Plato yang berjudul *Phaedrus,* Socrates dengan kerendahan hati menyatakan tentang *filsuf* sebagai berikut: “Tak akan

kusebut arif bijaksana mereka itu (maksudnya: filsuf), karena sebutan demikian itu hanya berlaku bagi Tuhan; lebih suka aku menamakan mereka (para filsuf) sahabat-sahabat kebijaksanaan; begitulah gelar yang bersahaja bagi mereka" (Fuad Hassan, 1986).

Cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan dalam istilah filsafat mengandung arti cinta kepada pengetahuan yang benar; cinta kepada perbuatan yang benar, baik, dan adil, selain itu bahkan cinta kepada keindahan. Adapun perasaan cinta tersebut diwujudkan para filsuf antara lain dalam perbuatan sebagai berikut:

1) Berpikir secara mendalam untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat tentang segala sesuatu. Misalnya, para filsuf dengan cara berpikir tertentu berupaya untuk memperoleh pengetahuan tentang hakikat alam semesta, hakikat manusia, hakikat keadilan, hakikat pendidikan, dsb. Melalui berpikir dengan menggunakan metode tertentu para filsuf berharap untuk mendapatkan kebenaran mengenai segala sesuatu.
2) Mengamalkan kebenaran. Maksudnya bahwa para filsuf pada umumnya selalu berupaya berbuat dengan bertitik tolak kepada kebenaran yang telah diperolehnya dan diyakininya benar.
3) Mengajarkan kebenaran sebagai hasil berpikirnya kepada orang lain dengan harapan agar orang lain mengetahui dan mengamalkannya juga.
4) Berjuang mempertahankan kebenaran tersebut dengan penuh pengorbanan. Kebenaran yang diajarkan dan diamalkan oleh para filsuf kadangkala berbeda dengan kebenaran yang diamalkan dan diajarkan oleh pihak lain seperti oleh penguasa, masyarakat, dsb. Sehubungan dengan ini para filsuf tak jarang ditentang, difitnah, bahkan ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh penguasa pada zamannya. Namun demikian karena cintanya kepada kebijaksanaan para filsuf yang bersangkutan tetap tabah menjalani semua hal di atas. Dalam sejarah kebudayaan umat manusia telah tercatat bahwa para filsuf memang telah menunjukkan cinta mereka kepada kebijaksanaan. Hal ini antara lain telah ditunjukkan oleh Pythagoras dan Socrates.

Definisi Filsafat secara Operasional. Sebagaimana telah Anda pahami melalui uraian di muka, salah satu perbuatan filsuf dalam mewujudkan cintanya kepada kebijaksanaan adalah berpikir atau berfilsafat untuk memperoleh kebenaran. Dalam rangka memahami dan mendefinisikan apa yang disebut dengan filsafat, diantara para ahli banyak yang melihatnya dalam konteks ini. Di satu pihak ada diantara para ahli yang mendefinisikan filsafat dari segi proses berpikirnya, dan ada pula diantara mereka yang mendefinisikan filsafat dari segi hasilnya (hasil berpikir para filsuf). Namun demikian sesungguhnya antara keduanya itu (filsafat sebagai proses dan filsafat sebagai hasil) tak dapat dipisahkan dalam rangka membangun pengertian filsafat.

Ditinjau dari segi proses berpikirnya, filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpikir reflektif sistematis dan kritis kontemplatif untuk menghasilkan sistem

pikiran atau sistem teori tentang hakikat segala sesuatu secara komprehensif. Sejalan dengan ini Titus dkk. (1979) mengemukakan bahwa: *Philosophy is a method of reflective thinking and reasoned inquiry* (Filsafat adalah metode atau cara berpikir reflektif dan penyelidikan melalui menalar).

Sebagai suatu hasil berpikir, filsafat adalah sekelompok teori atau sistem pikiran. Titus dkk., (1979) merumuskannya dalam kalimat: *"Phylosophy is a group of theories or systems of thougt".* Hasil berfilsafat yang telah dilakukan oleh para filsuf tiada lain adalah sistem teori atau sistem pikiran mengenai segala sesuatu. Sistem teori atau sistem pikiran ini tentunya sudah ada atau sudah tergelar di dalam kebudayaan umat manusia. Kita dapat menemukannya dalam bentuk tulisan atau buku, puisi, dsb., sebagaimana telah dihasilkan oleh para filsuf besar seperti: Socrates, Plato, Aristoteles, Rene Descartes, Iqbal, Alghazali, John Dewey, John Locke, dsb. Dengan redaksi lain, filsafat sebagai hasil berpikir dapat didefinisikan sebagai suatu sistem teori atau sistem pikiran tentang hakikat segala sesuatu yang bersifat komprehensif, yang diperoleh melalui berpikir reflektif sistematis dan kritis kontemplatif.

Definisi Filsafat Secara Leksikal. Ditinjau secara leksikal, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup (Balai Pustaka, 2005). Kita sering atau mungkin pernah mendengar pernyataan berikut ini: "filsafat hidup saya adalah ....", atau "Pancasila adalah filsafat hidup bangsa Indonesia". Istilah filsafat dalam pernyataan-pernyataan tadi memiliki arti sebagai sikap hidup atau pandangan hidup.

Dalam pengertian di atas, setiap orang baik secara individual maupun secara kelompok tentu memiliki filsafatnya masing-masing. Adapun filsafat tersebut akan tercermin di dalam pernyataan-pernyataan atau perbuatan-perbuatannya. Contoh: Orang yang apabila bepergian ke luar rumah selalu membawa senjata tajam untuk membela diri, mencerminkan sebagian kecil dari keseluruhan pandangan hidupnya. Orang tersebut memiliki pandangan bahwa alam di luar dirinya berbahaya dan memusuhinya, sebab itu hendaknya selalu waspada untuk mempertahankan diri atau untuk membela diri.

Sebagai sikap hidup atau pandangan hidup, filsafat tentunya bukan slogan-slogan yang tidak diyakini kebenarannya dan tidak dijadikan dasar tindakan atau perbuatan dalam hidup sehari-hari. Sebaliknya, bahwa sikap hidup dan pandangan hidup itu sudah diyakini kebenarannya dan dijadikan dasar tindakan dalam hidup sehari-hari.

Filsafat sebagai sikap hidup dan pandangan hidup dapat dimiliki seseorang secara alamiah melalui pengalaman hidup bersama di dalam masyarakatnya. Sikap hidup atau pandangan hidup itu dimiliki melalui pengalaman yang relatif tidak disadari secara rasional dan diperoleh tidak dengan cara-cara berfilsafat. Sebaliknya, filsafat sebagai sikap hidup atau pandangan hidup itu dapat pula dimiliki seseorang melalui cara-cara belajar yang disadari misalnya melalui belajar tentang filsafat. Dengan mempelajari

filsafat, seseorang atau suatu kelompok masyarakat atau bangsa akan dapat membangun sikap hidup atau pandangan hidupnya. Selain itu, filsafat sebagai sikap hidup atau pandangan hidup bahkan dapat pula dimiliki seseorang melalui berfilsafat sebagaimana telah dilakukan oleh para filsuf.

Karakteristik Filsafat. Dapat didentifikasi enam hal berkenaan dengan karakteristik filsafat, yaitu objek yang dipelajari filsafat (objek studi), proses berfilsafat (proses studi), tujuan berfilsafat, hasil berfilsafat (hasil studi), penyajian dan sifat kebenarannya.

Objek studi filsafat adalah segala sesuatu , meliputi segala sesuatu yang telah tergelar dengan sendirinya (ciptaan Tuhan) maupun segala sesuatu sebagai hasil kreasi manusia. Namun demikian dari segala sesuatu tersebut hanya yang bersifat mendasarlah yang dipelajari atau dipertanyakan dan dipikirkan oleh para filsuf. Pendek kata objek studi filsafat bersifat *komprehensif mendasar*.

Proses studi atau proses berfilsafat dimulai dengan *ketakjuban, ketidak puasan, hasrat bertanya, dan keraguan* seseorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Sehubungan dengan itu dalam berfilsafat para filsuf tidak berpikir dengan bertolak kepada suatu asumsi yang telah ada, sebaliknya mereka *menguji asumsi* yang telah ada. Selain itu, berpikir filosofis atau berfilsafat bersifat *kontemplatif*, artinya berfikir untuk mengungkap hakikat dari sesuatu yang difikirkan, atau berfikir *spekulatif* yakni berfikir melampauai fakta yang ada untuk mengungkap apa yang ada di balik yang nampak, atau disebut pula berfikir *radikal,* yaitu berfikir sampai kepada akar dari sesuatu yang dipertanyakan hingga terungkap hakikat dari apa yang dipertanyakan tersebut. Adapun dalam rangka mengungkap hakikat sesuatu yang dipertanyakannya itu para filsuf berfikir secara *sinoptik,* yaitu berfikir dengan pola yang bersifat merangkum keseluruhan tentang apa yang sedang dipikirkan atau dipertanyakan, pola berfikir ini merupakan kebalikan dari pola berfikir analitik. Perlu dipahami pula bahwa dalam berfikirnya itu para filsuf melibatkan seluruh pengalaman insaninya sehingga bersifat *subjektif*.

Tujuan para filsuf berpikir sedemikian rupa mengenai apa yang dipertanyakannya tiada lain adalah untuk memperoleh kebenaran. Adapun hasil berfilsafat adalah berwujud system teori, system pikiran atau system konsep yang bersifat *normative* atau *preskriptif* dan *individualitistik-unik*. Hasil berfilsafat bersifat normatif atau preskriptif artinya bahwa system gagasan filsafat menunjukkan tentang apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Sedangkan individualistik-unik artinya bahwa system gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf tertentu akan berbeda dengan system gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf lainnya. Ini mungkin terjadi antara lain karena sifat subjektif dari proses berfikirnya yang melibatkan pengalaman insani masing-masing filsuf. Sebab itu, maka kebenaran filsafat bersifat *subjektif-paralelistik*, maksudnya bahwa suatu system gagasan filsafat adalah benar bagi filsuf yang bersangkutan atau bagi para penganutnya; antara system gagasan filsafat yang satu dengan system gagasan filsafat yang lainnya

tidak dapat saling menjatuhkan mengenai kebenarannya. Dengan kata lain, bahwa masing-masing aliran filsafat memiliki kebenaran yang berlaku dalam relnya masing-masing. Adapun hasil berfilsafat tersebut disajikan para filsuf secara *tematik sistematis* dalam bentuk *naratif* (uraian lisan/tertulis) atau *profetik* (dialog/tanya jawab lisan/tertulis).

Sistematika/Cabang-cabang Filsafat. Berdasarkan objek yang dipelajarinya filsafat dapat diklasifikasi ke dalam: 1) Filsafat Umum atau Filsafat Murni, dan 2) Filsafat Khusus atau Filsafat Terapan (Redja Mudyahardjo, 1995).

Cabang Filsafat Umum terdiri atas:

a. Metafisika yang meliputi: (1) Metafisika Umum atau Ontologi, dan (2) Metafisika Khusus yang meliputi cabang: (a) Kosmologi, (b) Teologi, dan (c) Antropologi.
b. Epistemologi.
c. Logika.
d. Aksiologi yang meliputi cabang: (1) Etika dan (2) Estetika.

Adapun cabang Filsafat Khusus antara lain: (1) Filsafat Hukum, (2) Filsafat Ilmu, (3) Filsafat Pendidikan, dsb.

Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas (segala sesuatu yang ada) secara menyeluruh (komprehensif).

Ontologi adalah cabang filsafat (metafisika umum) yang mempelajari atau membahas tentang hakikat *ada*-nya segala sesuatu yang ada secara komprehensif. Contoh tentang apa yang dibahas atau dipermasalahkan di dalam Ontologi antara lain: apakah hakikat yang ada (realitas) itu bersifat material atau ideal? Apakah hakikat yang ada itu bersifat tunggal, dua, atau plural? Apakah yang ada itu menetap atau berubah? Dsb. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentunya tidak satu, melainkan berbeda-beda.

Kosmologi adalah cabang filsafat (bagian metafisika khusus) yang mempelajari atau membahas tentang hakikat alam termasuk segala isinya, kecuali manusia.

Teologi adalah cabang filsafat (bagian dari metafisika khusus) yang mempelajari atau membahas tentang keberadaan Tuhan. Dalam teologi permasalahan tentang keberadaan Tuhan ini dibahas secara rasional terlepas dari kepercayaan agama. Misalnya: pengakuan akan adanya Tuhan itu bukan atas dasar keimanan, melainkan atas argumentasi rasional. Contohnya "Argumen Kosmologi" yang menyatakan bahwa: segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Adanya alam semesta - termasuk manusia - adalah sebagai akibat. Di alam semesta terdapat rangkaian sebab-akibat, namun tentunya mesti ada Sebab Pertama yang tidak disebabkan oleh yang lainnya. Sebaliknya, Sebab Pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lainnya, tidak berada sebagai materi, melainkan sebagai "Pribadi" atau "Khalik", yaitu Tuhan

Antropologi adalah cabang filsafat (bagian metafisika khusus) yang mempelajari atau membahas tentang hakikat manusia. Persoalan yang dibahas dalam antropologi antara lain: siapakah manusia itu, ciptaan Tuhan atau muncul dari alam sebagai hasil evolusi? Apakah yang hakiki pada manusia itu badannya atau jiwanya? Bagaimanakah hubungan antar badan dan jiwa? Bagaimanakah hubungan manusia dengan tuhannya, dengan alam, dengan sesamanya, dsb.

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Persoalan yang dibahas dalam epistemology antara lain mengenai sumber-sumber pengetahuan, cara-cara memperoleh pengetahuan, kriteria kebenaran pengetahuan, dsb.

Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang asas-asas, aturan-aturan, prosedur dan kriteria penalaran (berpikir) yang benar. Logika antara lain membahas tentang bagaimana cara berpikir yang tertib agar kesimpulan-kesimpulannya benar.

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Aksiologi terdiri dari *Etika* adalah cabang filsafat (bagian aksiologi) yang mempelajari atau membahas tentang hakikat baik jahatnya perbuatan manusia; dan *Estetika* adalah cabang filsafat (bagian aksiologi) yang mempelajari atau membahas tentang hakikat seni (*art*) dan keindahan (*beauty*).

Aliran Filsafat. Sebagaimana dapat dipahami dari uraian dimuka, bahwa karakteristik berpikir para filsuf yang bersifat kontemplatif dan subjektif telah menghasilkan system gagasan yang bersifat individualistik-unik. Namun demikian, dalam peta perkembangan system pikiran filsafat para ahli filsafat menemukan kesamaan dan konsistensi pikiran dalam bentuk beberapa aliran pikiran dari para filsuf tertentu. Dengan demikian, maka dikenal adanya berbagai aliran filsafat seperti Idealisme, Realisme, Pragmatisme, dsb.

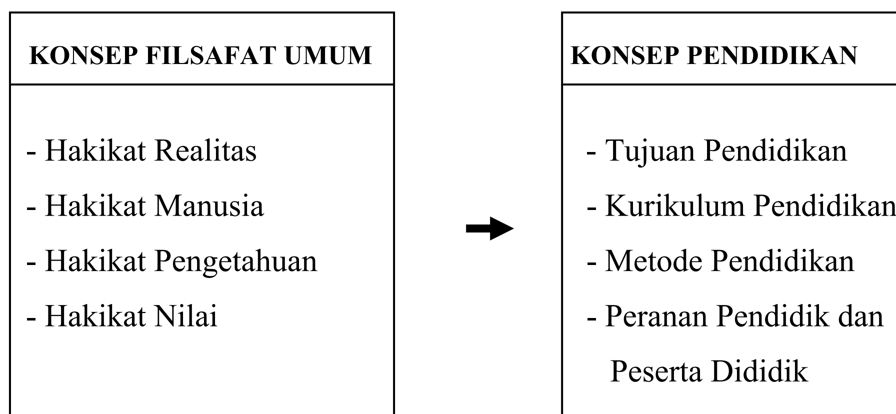
2. Pengertian dan Karakteristik Landasan Filosofis Pendidikan.

Definisi Landasan Filosofis Pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan.

Struktur Landasan Filosofis Pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan yang dideduksi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum (Metafisika, Epistemologi, Aksiologi) yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Hal ini dapat dipahami sebagaimana disajikan oleh Callahan and Clark (1983) dalam karyanya "Foundations of Education", dan sebagaimana disajikan Edward J. Power (1982) dalam karyanya *Philosophy of Education, Studies in Philosophies, Schooling and Educational Policies.*

Berdasarkan kedua sumber di atas dapat Anda pahami bahwa terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan pendidikan tersebut dapat divisualisasikan seperti berikut ini:

BAGAN
IMPLIKASI KONSEP FILSAFAT UMUM
TERHADAP KONSEP PENDIDIKAN



Karakteristik Landasan Filosofis Pendidikan. Landasan filosofis pendidikan berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat *normatif* atau *preskriptif.* Landasan filosofis pendidikan dikatakan bersifat normatif atau preskriptif, sebab landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya (faktual), melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan (ideal), yang disarankan oleh filsuf tertentu untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan/atau studi pendidikan.

Aliran dalam Landasan Filosofis Pendidikan. Sebagaimana halnya di dalam filsafat umum, di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran. Sehubungan dengan ini dikenal adanya landasan filosofis pendidikan Idealisme, landasan filosofis pendidikan Realisme, landasan filosofis pendidikan Pragmatisme, dsb.

Latihan:

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan: 1) definisi filsafat secara leksikal dan operasional; 2) peta konsep cabang-

cabang atau sistematika filsafat; 3) definisi landasan filosofis pendidikan; 4) Deskripsikan hubungan implikasi antara gagasan dalam cabang-cabang filsafat dengan gagasan dalam pendidikan; 5) makna bahwa landasan filosofis pendidikan bersifat normatif atau preskriptif.

Petunjuk Jawaban Latihan:

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali pengertian filsafar berdasarkan asal-usul katanya. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu mengacu kepada konsep tentang cabang-cabang filsafat umum dan filsafat khusus. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu mengacu kepada isi dari suatu landasan pendidikan yang bersifat konseptual, beserta sumber-sumber dari asumsi pendidikan tersebut. Latihan nomor 4) dapat Anda jawab dengan mengacu kepada bagan hubungan implikasi antara gagasan-gagasan filsafat umum terhadap konsep pendidikan. Adapun untuk menjawab latihan nomor 5) Anda terlebih dahulu perlu memahami makna dari istilah normatif dan preskriptif sebagai salah satu karakteristik filsafat.

Rangkuman

Istilah filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu *philein* atau *philos* yang berarti cinta atau sahabat, dan *sophia* atau *sophos* yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, berdasarkan asal usul katanya filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Adapun secara operasional filsafat mengandung dua pengertian, yakni sebagai proses (berfilsafat) dan sebagai hasil berfilsafat (sistem teori atau system gagasan). Di pihak lain jika ditinjau secara leksikal filsafat berarti sikap hidup atau pandangan hidup.

Berkenaan dengan objek studi, proses studi, tujuan studi, hasil studi, penyajian dan sifat kebenaran filsafat dapat diidentifikasi karakteristik sebagai berikut: 1) komprehensif mendasar, 2) kontemplatif/radikal dan sinoptik, 3) normatif atau preskriptif dan individualitistik-unik, 4) tematik sistematis dalam bentuk naratif atau profetik, dan 5) subjektif-paralelistik.

Berdasarkan objek yang dipelajarinya filsafat dapat diklasifikasi ke dalam: 1) Filsafat Umum atau Filsafat Murni, dan 2) Filsafat Khusus atau Filsafat Terapan.Cabang Filsafat Umum. Filsafat umum terdiri atas: a. Metafisika yang meliputi: (1) Metafisika Umum atau Ontologi, dan (2) Metafisika Khusus yang meliputi cabang: (a) Kosmologi, (b) Teologi, dan (c) Antropologi. b. Epistemologi. c. Logika. d. Aksiologi yang meliputi cabang: (1) Etika dan (2) Estetika. Adapun cabang Filsafat Khusus antara lain: (1) Filsafat Hukum, (2) Filsafat Ilmu, (3) Filsafat Pendidikan, dsb. Di dalam filsafat dikenal adanya berbagai

aliran seperti Idealisme, Realisme, Pragmatisme, dsb.

Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sebab itu, terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan memiliki karakteristik dan aliran yang sama dengan karakteristik dan aliran-aliran yang ada dalam filsafat.

Tes Formatif 1

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Secara etimologis filsafat berarti cinta akan ....
   A. kebahagiaan.
   B. kebijaksanaan.
   C. kehidupan.
   D. keduniawian.

2. Tujuan berfilsafat adalah menemukan *hakikat segala sesuatu*. Dalam konteks ini berfilsafat berarti berfikir ....
   A. kontemplatif.
   B. objektif.
   C. sistematis.
   D. subjektif.

3. Dalam berfikir, filsuf berupaya merangkum segala sesuatu yang mendasar dan abadi. Berfikir demikian bersifat ....
   A. analitik.
   B. deduktif.
   C. induktif.
   D. sinoptik.

4. Karakteristik hasil studi filsafat adalah ....
   A. deskriptif.
   B. empirik.
   C. inspiratif.
   D. preskriptif.

5. Karakteristik kebenaran filsafat adalah ....
   A. objektif-tentatif.
   B. objektif-verifikatif.
   C. subjektif-absolut.
   D. subjektif-paralelistik.

6. "Filsafat adalah sekelompok sistem teori atau sistem pikiran", ini adalah pengertian filsafat ditinjau dari segi ....
   A. etimologis.
   B. hasil berpikir.
   C. proses berpikir.
   D. leksikal.

7. Cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan adalah ....
   A. Aksiologi.
   B. Epistemologi.
   C. Ontologi.
   D. Kosmologi.

8. Antropologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ....
   A. alam.
   B. kebudayaan
   C. manusia.
   D. penalaran.

9. Contoh filsafat khusus (filsafat terapan) adalah ....
   A. filsafat alam.
   B. filsafat manusia.
   C. filsafat pengetahuan.
   D. filsafat pendidikan.

10. Seperangkat asumsi pendidikan yang dideduksi dari filsafat umum yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan disebut ....
   A. landasan pendidikan.
   B. landasan psikologi.
   C. landasan filosofis pendidikan.
   D. landasan psikologis pendidikan.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar 2. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Landasan Filosofis Pendidikan Idealisme dan Realisme

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji landasan filosofis pendidikan Idealisme dan landasan filosofis pendidikan Realisme. Kajian landasan filosofis pendidikan dari kedua aliran tersebut meliputi konsep filsafat umum Idealisme dan Realisme, serta implikasi konsep filsafat umum masing-masing aliran tersebut terhadap konsep pendidikannya. Dengan demikian setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat memahami hakikat: realitas, manusia, pengetahuan, dan nilai menurut Idealisme dan Realisme; serta implikasi terhadap konsep pendidikannya yang meliputi : tujuan pendidikan, isi/kurikulum pendidikan, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peserta didik.

1. Landasan Filosofis Pendidikan Idealisme

a. Konsep Filsafat Umum

Metafisika*: Hakikat Realitas.* Di alam semesta terdapat berbagai hal, seperti batu, air, tumbuhan, khewan, manusia, gunung, lautan, speda motor, buku, kursi, tata surya, dsb; selain itu, Anda juga mengenal apa yang disebut jiwa, spirit, ide, dsb. Segala hal yang ada di alam semesta itu disebut realitas *(reality)*. Sesuai dengan sifat berpikirnya yang radikal, para filsuf mempertanyakan apakah sesungguhnya (hakikat) realitas itu? Jawaban mereka bersifat ragam sesuai dengan titik tolak berpikir, cara berpikir dan tafsirnya masing-masing.

Para filsuf Idealisme mengklaim bahwa hakikat realitas bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada bersifat material. Hal ini sebagaimana dikemukakan Plato, bahwa dunia yang kita lihat, kita sentuh dan kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan *(a copy world);* dunia yang sesungguhnya adalah dunia idea-idea *(the world of "ideas").* Karena itu Plato disebut sebagai seorang Idealist (S.E. Frost Jr., 1957).

Bagi penganut Idealisme realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental, yaitu pikiran/spirit/roh. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata, sesungguhnya diturunkan dari pikiran/jiwa/roh. Contoh: Kursi sesungguhnya bukan bersifat material, hanya tampaknya saja bersifat material, padahal hakikat kursi adalah spiritual/ideal, yaitu ide tentang kursi. Pada tingkat universal (alam semesta), pikiran-pikiran yang terbatas hidup dalam suatu dunia yang bertujuan yang dihasilkan oleh suatu pikiran yang tak terbatas atau yang Absolut. Seluruh alam semesta diciptakan oleh suatu pikiran atau roh yang tak terbatas. Karena itu, segala sesuatu dan kita (manusia) merupakan bagian kecil dari pikiran atau roh yang tak terbatas (Callahan and Clark, 1983). Pandangan metafisika Idealisme diekspresikan Parmenides dengan kalimat: *"What cannot be thought cannot be real"/ Apa yang tidak dapat dipikirkan tidaklah nyata.* Schoupenhauer mengekspresikannya dengan pernyataan *"The world is my idea"* / Dunia adalah ideku (G.F. Kneller, 1971). Sebab itu, keberadaan (eksistensi) sesuatu tergantung kepada pikiran/jiwa/spirit/roh.

Hakikat Manusia. Sejalan dengan gagasan di atas, menurut para filsuf Idealisme bahwa manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Pribadi manusia digambarkan dengan kemampuan kejiwaannya (seperti: kemampuan berpikir, kemampuan memilih, dsb). Manusia hidup dalam dunia dengan suatu aturan moral yang jelas – yang diturunkan dari Yang Absolut. Karena manusia merupakan bagian dari alam semesta yang bertujuan, maka manusia pun merupakan makhluk yang cerdas dan bertujuan. Selain itu, karena "pikiran manusia diberkahi kemampuan rasional, maka ia mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan, ia adalah makhluk yang bebas" (Edward J. Power, 1982).

Hakikat manusia bersifat spiritual atau kejiwaan. Berkenaan dengan ini setiap manusia memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengimplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam masyarakat/negara. Kita ambil contoh dari teori Plato tentang tiga bagian jiwa *(Plato's tripartite theory of the soul)*: Menurut Plato, setiap manusia memiliki tiga bagian jiwa, yaitu: *nous* (akal, fikiran) yang merupakan bagian rasional, *thumos* (semangat atau keberanian), dan *epithumia* (keinginan, kebutuhan atau nafsu). Pada setiap orang, dari ketiga bagian jiwa tersebut akan muncul salah satunya yang dominan. Sehingga: pertama, ada orang yang dominan bakat kemampuan berpikirnya; kedua, ada yang dominan keberaniannya, dan ketiga ada yang dominan keinginan/nafsunya. Atas dasar ini, Plato mengklasifikasi manusia di dalam negara berdasarkan bakat kemampuannya tersebut, yaitu: pertama, kelas *counselors* (kelas penasihat atau pembimbing / pemimpin), yaitu para cendekiawan atau para filsuf; kedua, kelas *the state-assistants* / *guardians* (kelas pembantu/penjaga) yaitu kelompok militer; dan ketiga, kelas *money makers* (kelas karya/penghasil) yaitu para petani, pengusaha, industrialis, dsb. Namun demikian klasifikasi manusia tersebut bukanlah kasta yang secara turun temurun tidak dapat berubah. Apabila seseorang dari kelas tertentu - misalnya: dari kelas karya - ternyata memiliki bakat yang sesuai dengan bakat

dalam kelas penjaga atau pembimbing, maka ia harus segera pindah ke kelas yang sesuai dengan bakatnya itu, demikian pula sebaliknya. Selain itu, Plato menghubungkan ketiga bagian jiwa manusia dengan empat kebajikan pokok *(cardinal virtues)* sebagai moralitas jiwa *(soul's morality)*, yaitu: kebijaksanaan/kearifan, keperkasaan, pengendalian diri, dan keadilan. Pikiran/akal dihubungkan dengan kebijaksanaan/kearifan yang harus menjadi moralitas jiwa kelas counselor/ pembimbing/ pemimpin; keberanian dihubungkan dengan keperkasaan yang harus menjadi moralitas jiwa kelas militer / penjaga *(guardians)*, nafsu dihubungkan dengan pengendalian diri yang harus menjadi moralitas jiwa kelas karya/penghasil.Adapun keadilan harus menjadi moralitas jiwa semua orang dari kelas manapun agar keselarasan dan kesimbangan tetap terpelihara dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat Anda simpulkan bahwa hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa/spiritnya, manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih/ bebas, hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah hidup sesuai dengan bakatnya serta nilai dan norma moral yang diturunkan oleh Yang Absolut.

Epistemologi: *Hakikat Pengetahuan.* Proses mengetahui terjadi dalam pikiran, manusia memperoleh pengetahuan melalui *berpikir.* Di samping itu, manusia dapat pula memperoleh pengetahuan melalui *intuisi.* Bahkan beberapa filsuf Idealisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara *mengingat kembali* (semua pengetahuan adalah sesuatu yang diingat kembali). Plato adalah salah seorang penganut pandangan ini. Ia sampai pada kesimpulan tersebut berdasarkan asumsi bahwa spirit/jiwa manusia bersifat abadi, yang mana pengetahuan sudah ada di dalam spirit/jiwa sejak manusia dilahirkan.

Bagi penganut *Idealisme Objective* seperti Plato, ide-ide merupakan esensi yang keberadaannya bebas dari pendriaan. Sedangkan bagi penganut *Idealisme Subjective* seperti George Barkeley, bahwa manusia hanya dapat mengetahui dengan apa yang ia persepsi. Karena itu, pengetahuan manusia hanyalah merupakan keadaan dari pikirannya atau idenya. Adapun setiap rangsangan yang diterima oleh pikiran hakikatnya diturunkan atau bersumber dari Tuhan, Tuhan adalah Spirit Yang Tak Terbatas (Callahan and Clark, 1983).

Sehubungan dengan hal di atas, kebenaran (pengetahuan yang benar) hanya mungkin didapat oleh orang-orang tertentu yang memiliki pikiran yang baik saja, sedangkan kebanyakan orang hanya sampai pada tingkat pendapat" (Edward J. Power, 1982). Adapun uji kebenaran pengetahuan dilakukan melalui uji konsistensi atau koherensi dari ide-idenya. Sebab itu teori uji keberanannya dikenal sebagai *Teori Konsistensi/Teori Koherensi.* Contoh: "Semua makhluk bersifat fana (dapat rusak atau mati), Jamisten adalah makhluk, sebab itu Jamisten akan mati". Pengetahuan ini adalah benar, sebab ide-idenya koheren atau konsisten. "Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, Anwar

bunuh diri dengan jalan memutuskan urat nadinya, karena itu Anwar telah membunuh jalannya perekonomian masyarakat". Pengetahuan ini adalah salah, sebab ide-idenya tidak konsisten/tidak koheren.

Aksiologi: *Hakikat Nilai***.** Para filsuf Idealisme sepakat bahwa nilai-nilai bersifat abadi. Menurut penganut *Idealisme Theistik* nilai-nilai abadi berada pada Tuhan. Baik dan jahat, indah dan jelek diketahui setingkat dengan ide baik dan ide indah konsisten dengan baik dan indah yang absolut dalam Tuhan. Penganut *Idealisme Pantheistik* mengidentikan Tuhan dengan alam. Nilai-nilai adalah absolut dan tidak berubah (abadi), sebab nilai-nilai merupakan bagian dari aturan-aturan yang sudah ditentukan alam (Callahan and Clark, 1983). Sebab itu dapat Anda simpulkan bahwa manusia diperintah oleh nilai-nilai moral imperatif dan abadi yang bersumber dari Realitas Yang Absolut.

2. Implikasi terhadap Pendidikan

Konsep filsafat umum Idealisme (hakikat: realitas, manusia, pengetahuan, dan nilai) sebagaimana telah Anda pahami melalui uraian di atas berimplikasi terhadap konsep pendidikannya. Implikasi tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

*Tujuan Pendidikan***.** Tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi *(self)* siswa. Sebab itu, sekolah hendaknya menekankan aktifitas-aktifitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan-pertimbangan estetis, realisasi diri, kebebasan, tanggung jawab, dan pengendalian diri demi mencapai perkembangan pikiran dan diri pibadi (Callahan and Clark, 1983). Dengan kata lain, pendidikan bertujuan untuk membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebajikan sosial" (Edward J. Power, 1982). Mengingat bakat manusia berbeda-beda maka pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing sehingga kedudukan, jabatan, fungsi dan tangung jawab setiap orang di dalam masyarakat/negara menjadi teratur sesuai asas *"the right man on the right place"* , dan lebih jauh dari itu agar manusia hidup sesuai nilai dan norma yang diturunkan dari Yang Absolut.

*Kurikulum Pendidikan***.** Demi mencapai tujuan pendidikan di atas, kurikulum pendidikan Idealisme berisikan *pendidikan liberal* dan *pendidikan vokasional/praktis*. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral, adapun pendidikan vokasional untuk pengebangan kemampuan suatu kehidupan/pekerjaan. Kurikulumnya diorganisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran *(subject matter centered).* Karena masyarakat dan Yang Absolut mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu hidup, maka isi kurikulum tersebut harus merupakan nilai-nilai kebudayaan yang esensial dalam segala zaman. Sebab, itu, mata pelajaran atau kurikulum pendidikan itu cenderung berlaku sama untuk semua siswa. Dengan demikian Callahan dan Clark (1983) menyatakan

bahwa orientasi pendidikan Idealisme adalah *Essensialisme.*

Metode Pendidikan. Struktur dan atmosfir kelas hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, dan untuk menggunakan kriteria penilaian moral dalam situasi-situasi kongkrit dalam konteks pelajaran. Namun demikian, tidak cukup mengajar siswa tentang bagaimana berpikir, adalah sangat penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan.

Metode mengajar hendaknya mendorong siswa memperluas cakrawala; mendorong berpikir reflektif; mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan-keterampilan berpikir logis; memberikan kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial; meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran; dan mendorong siswa untuk menerima nilai-nilai peradaban manusia (Callahan and Clark, 1983). Sebagaimana dikemukakan Edward J. Power (1982), para filsuf Idealisme "lebih menyukai metode *dialektik*, tetapi beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima. Metode pendidikan Idealisme cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar".

Peranan Guru dan Siswa. Para filsuf Idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Guru harus unggul *(excellent)* agar menjadi teladan bagi para siswanya, baik secara moral maupun intelektual. Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting di dalam sistem sekolah selain guru. Guru harus unggul dalam pengetahuan dan memahami kebutuhan-kebutuhan serta kemampuan-kemampuan para siswa; dan harus mendemonstrasikan keunggulan moral dalam keyakinan dan tingkah lakunya. Guru harus juga melatih berpikir kreatif dalam mengembangkan kesempatan bagi pikiran siswa untuk menemukan, menganalisis, memadukan, mensintesa, dan menciptakan aplikasi-aplikasi pengetahuan untuk hidup dan berbuat (Callahan and Clark, 1983). Karena itu guru hendaknya "bekerjasama dengan alam dalam proses mengembangkan manusia; bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya" (Edward J. Power, 1982).

3. Landasan Filosofis Pendidikan Realisme

a. onsep Filsafat Umum

Terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Realisme merupakan aliran filsafat yang luas dan bervariasi. Di satu pihak, Realisme meliputi materialisme; di lain pihak, Realisme juga meliputi pandangan yang mendekati kepada idealisme objektif. Titus dkk., (1979) antara lain mengidentifikasi tiga jenis Realisme, yaitu Realisme Mekanis, Realisme Objektif, dan Realisme Pluralistik. Tampak bahwa Realisme cukup rumit untuk bisa dijelaskan secara ringkas dengan harapan mencakup semua jenis Realisme yang ada.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka memahami filsafat pendidikan Realisme, uraian di bawah ini hanya akan menyajikan ide-ide umum filsuf Realisme sebagaimana telah diuraikan oleh Calahan and Clark dalam karyanya *"Foundations of Education"* (1983).

Metafisika: *Hakikat Realitas*. Jika filsuf Idealisme menekankan pikiran.jiwa/spirit/roh sebagai hakikat realitas, sebaliknya menurut para filsuf Realisme bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial dan material yang hadir dengan sendirinya *(entity).* Dalam alam tersebut terdapat hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri (Callahan and Clark, 1983). Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada pikiran/jiwa/spirit/roh. Namun demikian, mereka tetap mengakui keterbukaan realitas terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Hanya saja realitas atau dunia itu bukan/berbeda dengan pikiran atau keinginan manusia.

Hakikat Manusia. Manusia adalah bagian dari alam, dan ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya. Pikiran (jiwa) adalah suatu organisme yang sangat rumit yang mampu berpikir. Namun, sekalipun manusia mampu berpikir ia bisa bebas atau tidak bebas (Edward J. Power, 1982). Manusia dan masyarakat adalah bagian dari alam. Karena di alam semesta terdapat hukum alam yang mengatur dan mengorganisasikannya, maka untuk tetap survive dan bahagia tugas dan tujuan manusia adalah menyesuaikan diri terhadap hukum-hukum alam, masyarakatnya dan kebudayaannya.

Epistemologi: *Hakikat Pengetahuan*. Ketika lahir, jiwa atau pikiran manusia adalah kosong. Saat dilahirkan manusia tidak membawa pengetahuan atau ide-ide bawaan, John Locke mengibaratkan pikiran/jiwa manusia sebagai *tabula rasa* (meja lilin/kertas putih yang belum ditulisi). Pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman dria. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya dalam berpikir untuk menemukan objek-objek serta hubungan-hubungannya yang tidak ia persepsi (Callahan and Clark, 1983). Mengingat realitas bersifat objektif, maka terdapat dualisme antara orang yang mengetahui dengan realitas yang diketahui. Implikasinya, para filsuf Realisme menganut *"prinsip independensi"* yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang realitas tidak dapat mengubah substansi atau esensi realitas.

Karena realitas bersifat material dan nyata, maka kebenaran pengetahuan diuji dalam kesesuaiannya dengan fakta di dalam dunia material atau pengalaman dria. Teori uji kebenaran ini dikenal sebagai *Teori Korespondensi.* Contoh: Apabila seseorang mengatakan bahwa rasa gula adalah manis, untuk mengetahui kebenaran pengetahuan / pernyataan tersebut harus diuji melalui pengalaman, misalnya dengan mencicipi gula. Jika dari pengalaman mencicipi gula ternyata gula itu rasanya manis, maka pengetahuan

itu benar. Atas dasar prinsip independensi dan teori korespondensi, maka pengetahuan mungkin saja berubah. Apa yang dulu dinyatakan benar mungkin sat ini dinyatakan salah, atau mungkin pula sebaliknya sesuai dengan hasil pengalaman empiris yang didapat. Sebab itu, epistemologi demikian dikenal pula sebagai *Empirisme* atau *Objektivisme.*

Aksiologi: *Hakikat Nilai***.** Karena manusia adalah bagian dari alam, maka ia pun harus tunduk kepada hukum-hukum alam, demikian pula masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Edward J. Power (1982) bahwa: "Tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam, dan pada tingkat yang lebih rendah diuji melalui konvensi atau kebiasaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat". "Nilai-nilai individual dapat diterima apabila sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakatnya. Pendapat umum masyarakat merefleksikan status quo realitas masyarakat; dan karena realitas masyarakat merepresentasikan kebenaran yang adalah ke luar dari mereka sendiri, serta melebihi pikiran, maka hal itu berguna sebagai suatu standar untuk menguji validitas nilai-nilai individual" (Callahan and Clark, 1983).

b. Implikasi terhadap Pendidikan

*Tujuan Pendidikan***.** Pendidikan pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Dengan jalan memberikan pengetahuan yang *esensial* kepada para siswa, maka mereka akan dapat bertahan hidup di dalam lingkungan alam dan sosialnya. Pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Edward J. Power (1982) menyimpulkan pandangan para filsuf Realisme bahwa tujuan pendidikan Realisme adalah untuk "penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial".

Kurikulum Pendidikan. Kurikulum sebaiknya meliputi: (1) sains/IPA dan matematika, (2) Ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, serta (3) nilai-nilai.

Sains dan matematika sangat dipentingkan. Keberadaan sains dan matematika dipertimbangkan sebagai lingkup yang sangat penting dalam belajar. Sebab, pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alamnya. Ilmu kemanusiaan tidak sepenting sains dan matematika, namun demikian ilmu kemanusiaan tidak seharusnya diabaikan. Sebab, ilmu kemanusiaan diperlukan setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Kurikulum hendaknya menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap kehidupan individu. Dengan mengetahui kekuatan yang menentukan kehidupan kita, kita berada dalam posisi untuk mengendalikan mereka (lingkugan sosial). Nilai-nilai dari objektifitas dan pengujian kritis yang bersifat ilmiah hendaknya ditekankan. Ketika mengajarkan nilai-nilai, sebaiknya tidak menggunakan satu metode yang normatif, tetapi menggunakan analisis kritis. Untuk mendorong kebiasaan-kebiasaan belajar yang

diharapkan, ganjaran hendaknya diberikan ketika kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan dicapai (Callahan and Clark, 1983).

Para filsuf Realisme percaya bahwa kurikulum yang baik diorganisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran *(subject matter centered).* Materi pelajaran hendaknya diorganisasi menurut prinsip-prinsip psikologis tentang belajar, mengajarkan materi pelajaran hendaknya dimulai dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Karena masyarakat dan alam (hukum-hukum alam) mempunyai peranan menentukan bagaimana seharusnya individu hidup untuk menyesuaikan diri dengannya, maka kurikulum direncanakan dan diorganisasikan oleh guru/orang dewasa *(society centered).* Adapun isi kurikulum (mata pelajaran-mata pelajaran) tersebut harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai *esensial* agar siswa dapat menyesuaikan diri baik dengan lingkungan alam, masyarakat dan kebudayaannya. Sebab itu Callahan dan Clark (1983) menyatakan bahwa orientasi pendidikan Realisme memiliki *kesamaan* dengan orientasi pendidikan Idealisme, yaitu *Essensialisme*.

*Metode Pendidikan***.** "Semua belajar tergantung pada pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung (seperti melalui membaca buku mengenai hasil pengalaman orang lain), kedua-duanya perlu disajikan kepada siswa. Metode penyajian hendaknya bersifat logis dan psikologis. *Pembiasaan* merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf Realisme yang merupakan penganut *Behaviorisme*" (Edward J. Power, 1982). Metode mengajar yang disarankan para filosof Realisme bersifat *otoriter*. Guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta; mengiterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru.

Evaluasi merupakan suatu aspek yang penting dalam mengajar. Guru harus mengunakan metode-metode objektif dengan mengevaluasi dan memberikan jenis-jenis tes yang memungkinkan untuk dapat mengukur secara tepat pemahaman para siswa tentang materi-materi yang dianggap esensial. Tes perlu sering dilakukan. Untuk tujuan memotivasi, para filsuf Realisme menekankan bahwa tes selalu penting bagi guru untuk memberikan ganjaran terhadap setiap siswa yang mencapai sukses. Ketika guru melaporkan prestasi para siswanya, ia menguatkan *(reinforces)* apa yang mesti dipelajari (Callahan and Clark, 1983).

*Peranan Guru dan Siswa***.** Guru adalah pengelola kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas *(classroom is teacher-centered);* guru adalah penentu materi pelajaran; guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran, dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang kongkrit untuk dialami siswa. Para siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi, mengendalikan perhatian para siswa, dan membuat siswa aktif (Callahan and Clark, 1983). Dengan demikian guru harus berperan sebagai "penguasa pengetahuan; menguasai keterampilan teknik-teknik mengajar; dengan kewenangan *membentuk* prestasi siswa". Adapun siswa berperan

untuk "menguasai pengetahuan yang diandalkan; siswa harus taat pada aturan dan berdisiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar, disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk berbagai tingkatan keutamaan" (Edward J. Power, 1982).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa orientasi pendidikan Realisme memiliki *kesamaan* dengan orientasi pendidikan Idealisme, yaitu *Essensialisme*. Pendidikan Idealisme dan Realisme sama-sama menekankan pentingnya memberikan pengetahuan dan nilai-nilai esensial bagi para siswa. Namun demikian, karena kedua aliran tersebut memiliki perbedaan konsep mengenai filsafat umumnya (hakikat: realitas, pengetahuan, manusia,dan nilai-nilai) yang menjadi landasan bagi konsep pendidikannya, maka dapat dipahami pula jika kedua aliran itu tetap berbeda dalam hal tujuan pendidikannya, kurikulum pendidikannya, metode pendidikan, serta peranan guru dan peranan siswanya.

Latihan/Tugas:

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini, coba Anda rumuskan kembali: 1) tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan Idealisme, serta cari dan jelaskan konsep filsafat umum yang melandasinya! 2) rumuskan kembali metode pendidikan serta peranan guru dan siswa menurut aliran Realisme, selanjutnya cari dan jelaskan konsep filsafat umum yang melandasinya!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 1) Anda perlu mengkaji kembali konsep tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan Idealisme. Selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap konsep filsafat umum Idealisme yang berimplikasi terhadap tujuan dan kurikulum yang bersangkutan. Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 2) Anda perlu mengkaji kembali konsep metode pendidikan, peranan guru dan siswa menurut Realisme. Selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap konsep filsafat umum Realisme yang berimplikasi terhadap metode pendidikan, peranan guru dan peranan siswa yang bersangkutan.

Rangkuman

Idealisme: hakikat realitas bersifat kejiwaan/spiritual/rohaniah/ideal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, atau mengingat kembali. Kebenaran pengetahuan diuji melalui koherensi/konsistensi ide-idenya. Adapun hakikat nilai diturunkan dari realitas absolute (Tuhan). Implikasinya: pendidikan hendaknya bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, dan kebajikan sosial para siswa, agar

mereka dapat melaksanakan kehidupan yang baik di dalam masyarakat/negara sesuai nilai-nilai yang diturunkan dari Yang Absolut. Untuk itu kurikulum berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional/praktis; kurikulum harus memuat pengetahuan dan nilai-nilai esensial kebudayaan; sebab itu kurikulum pendidikan cenderung sama untuk semua siswa. Kurikulum Idealisme bersifat *subject matter centered*. Metode *dialektik* diutamakan, namun demikian beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima; kecenderungannya mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar". Guru harus unggul dalam hal intelektual maupun moral; bekerjasama dengan alam dalam proses pengembangan manusia; dan bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Adapun siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya.

Realisme: Hakikat realitas bersifat fisik/material dan objektif; keberadaan dan perkembangan realitas diatur dan diorganisasikan oleh hukum alam. Manusia adalah bagian dan dihasilkan dari alam itu sendiri; hakikat pribadi tertentukan dari apa yang dapat dikerjakannya; manusia mampu berpikir tetapi ia dapat bebas atau tidak bebas. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman pendriaan; kebenaran pengetahuan diuji melalui korespondensinya dengan fakta. Nilai hakikatnya diturunkan dari hukum alam dan konvensi/kebiasaan serta adat istiadat masyarakat. Implikasinya: pendidikan bertujuan agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan mampu melaksanakan tanggungjawab sosial. Kurikulum pendidikan berpusat kepada isi mata pelajaran; adapun mata pelajarannya terdiri atas sains/ IPA, matematika, ilmu kemanusiaan dan IPS, serta nilai-nilai. Kurikulum tersebut harus memuat pengetahuan dan nilai-nilai esensial kebudayaan yang diberlakukan sama untuk semua siswa. Kurikulum direncanakan dan ditentukan oleh guru. Kurikulum Realisme bersifat *subject matter centered.* Metode mengajar yang utama adalah pembiasaan; para siswa hendaknya belajar melalui pengalaman langsung ataupun pengalaman tidak langsung. Peranan guru cenderung bersifat otoriter; guru harus menguasai pengetahuan dan keterampilan teknik-teknik mengajar; Guru memiliki kewenangan dalam membentuk prestasi siswa. Adapun siswa berperan untuk menguasai pengetahuan, harus taat pada aturan dan disiplin.

Realisme dan Idealisme memiliki kesamaan dalam orientasi pendidikannya, yaitu Essensialisme. Namun demikian karena kedua aliran ini memiliki gagasan yang berbeda mengenai filsafat umumnya, maka kedua aliran ini tetap memiliki perbedaan pula dalam hal tujuan pendidikan, isi kurikulumnya, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peranan peserta didik/siswanya.

Tes Formatif 2

1. Menurut Idealisme pendidikan hendaknya bertujuan untuk mengembangkan ....
   A. keterampilan siswa agar menjadi tenaga kerja professional.
   B. kemampuan siswa agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya.
   C. bakat, kepribadian, dan kebajikan sosial para siswa.
   D. kemampuan siswa untuk dapat memecahkan masalah sosial.

2. Hakikat realitas menurut Idealisme adalah bersifat ....
   A. kejiwaan.
   B. fisik.
   C. empiris.
   D. berubah.

3. Menurut Idealisme hakikat manusia bersifat spiritual, ia adalah makhluk berpikir yang mampu memilih, dan memiliki bakat kemampuannya masing-masing yang mengimplikasikan status atau kedudukan dan peranannya di dalam negara. Implikasinya maka ....
   A. guru memiliki kewenangan dalam membentuk kepribadian siswa.
   B. kurikulum pendidikan sebaiknya bersifat *subject centered.*
   C. para siswa bebas mengembangkan kepribadian dan bakatnya.
   D. metode pendidikan yang harus diutamakan adalah latihan.

4. Idealisme mengajarkan bahwa nilai hakikatnya diturunkan dari realitas absolut (Tuhan), bersifat universal dan abadi. Implikasinya maka kurikulum pendidikan hendaknya ....
   A. disesuaikan dengan bakat siswa.
   B. sama bagi semua siswa di manapun.
   C. berpusat pada siswa.
   D. berpusat pada masalah.

5. Pendidikan liberal dalam kurikulum pendidikan Idealisme adalah untuk mengembangkan hal berikut, ***kecuali*** ....
   A. kemampuan intelektual.
   B. keterampilan kerja.
   C. nilai moral.
   D. tanggung jawab.

   6. Metode/cara-cara mendidik yang dutamakan oleh penganut Realisme adalah ....
   A. diskusi.
   B. ceramah.
   C. penghayatan.
   D. pembiasaan

6. Berikut ini adalah peranan pendidik menurut Realisme, ***kecuali*** ....
   A. bertanggung jawab membentuk prestasi belajar siswa.
   B. menguasai pengetahuan atau bahan ajar yang mungkin berubah.

C. membimbing siswa mengembangkan bakat bawaannya.
D. terampil mengaplikasikan berbagai teknik mengajar.

7. Menurut penganut Realisme manusia adalah bagian dan hasil dari alam; hakikat nilai diturunkan dari hukum alam dan adat kebiasaan masyarakat. Implikasinya maka bagi penganut Realisme bahwa ....
   A. pendidikan bertujuan agar siswa dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.
   B. peranan pendidik adalah menguasai berbagai metode mengajar dan pengetahuan yang bersifat mutlak.
   C. Isi pendidikan utama seharusnya berbagai mata pelajaran yang berfungsi mengembangkan berpikir siswa.
   D. para siswa berperanan sebagai makhluk yang bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya.

8. Isi/kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pandangan filsafat Realisme adalah ....
   A. pendidikan keterampilan berpikir logis.
   B. pendidikan liberal dan keterampilan.
   C. pendidikan keterampilan kerja.
   D. pendidikan kemampuan memecahkan masalah.

9. Kesamaan orientasi pendidikan Idealisme dan realisme adalah ....
   A. essensialisme.
   B. perrenialisme.
   C. konstruktivisme.
   D. progresivisme.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Cukup
< 70%	= Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnya. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Landasan Filosofis Pendidikan Pragmatisme dan Landasan Filosofis Pendidikan Nasional (PANCASILA)

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji landasan filosofis pendidikan Pragmatisme dan landasan filosofis pendidikan nasional, yaitu landasan filosofis pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Kajian dalam kedua landasan filosofis tersebut meliputi konsep filsafat umum masing-masing aliran yang bersangkutan, serta implikasi terhadap konsep pendidikan. Dengan demikian setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat memahami hakikat: realitas, manusia, pengetahuan, dan nilai menurut Pragmatisme dan Pancasila; serta implikasinya terhadap pendidikan yang meliputi : tujuan pendidikan, isi/kurikulum pendidikan, metode pendidikan, serta peranan pendidik dan peserta didik.

1. Landasan Filosofis Pendidikan Pragmatisme

a. Konsep Filsafat Umum

Metafisika: Hakikat Realitas. Pragmatisme dikenal pula dengan sebutan Eksperimentalisme dan Instrumentalisme. Menurut penganut aliran ini hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia (pengalaman); bersifat plural (pluralistic); dan terus menerus berubah. Mereka berargumentasi bahwa realitas adalah sebagaimana dialami melalui pengalaman setiap individu (Callahan and Clark, 1983). Hal ini sebagaimana dikemukakan William James bahwa: “Dunia nyata adalah dunia pengalaman manusia” (S.E. Frost Jr., 1957). Sifat plural realitas antara lain tersurat dalam pernyataan John Dewey: “Dunia yang ada sekarang ini adalah dunia pria dan wanita, sawah-sawah, pabrik-pabrik, tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang, kota yang hiruk pikuk, bangsa-bangsa yang sedang berjuang, dsb. .... adalah dunia pengalaman kita” (H.H. Titus et all, 1959). Mengingat realitas ini terus berubah, maka realitas tak pernah lengkap

atau tak pernah selesai. Sebab itu, tujuan akhir realitas pun berada bersama perubahan tersebut. Jadi menurut penganut Pragmatisme, "hanya realitas fisik yang ada, teori umum tentang realitas tidak mungkin dan tidak diperlukan" (Edward J. Power, 1982).

Hakikat Manusia. Kepribadian/manusia tidak terpisah dari realitas pada umumnya, sebab manusia adalah bagian daripadanya dan terus menerus bersamanya. Karena realitas terus berubah, manusia pun merupakan bagian dari perubahan tersebut. Beradanya manusia di dunia adalah suatu kreasi dari suatu proses yang bersifat evolusi (S.E. Frost Jr., 1957). "Manusia laki-laki dan perempuan – adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial" (Edward J. Power, 1982). Sejalan dengan perubahan yang terus menerus terjadi tentunya akan muncul berbagai permasalahan dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Sebab itu , manusia yang ideal adalah manusia yang mampu memecahkan masalah baru baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakatnya.

Epistemologi: Hakikat Pengetahuan. Filsuf Pragmatisme menolak dualisme antara subjek (manusia) yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-duanya dalam dunia yang dipersepsinya dan dari dunia yang ia persepsi. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman, adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah atau metode sains sebagai mana disarankan oleh John Dewey. Pengalaman tentang fenomena menentukan pengetahuan. Karena fenomena terus menerus berubah, maka pengetahuan dan kebenaran tentang fenomena itu pun mungkin berubah. Bagaimanapun, kebenaran pada hari ini harus juga dipertimbangkan mungkin berubah esok hari (Callahan and Clark, 1983).

Menurut filsuf Pragmatisme, suatu pengetahuan hendaknya dapat diverifikasi dan diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenarannya adalah workability, satisfaction, and result. Pengetahuan dinyatakan benar apabila dapat dipraktekkan, memberikan hasil dan memuaskan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa "pengetahuan bersifat relatif; pengetahuan dikatakan bermakna apabila dapat diaplikasikan. Sebab itu Pragmatisme dikenal pula sebagai Instrumentalisme" (Edward J. Power, 1982).

Aksiologi: Hakikat Nilai. Nilai-nilai diturunkan dari kondisi manusia. Nilai tidak bersifat ekslusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan/perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia (idividual) merupakan bagian dari masyarakatnya, baik atau tidak baik tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya di dalam masyarakat. Jika akibat yang terjadi berguna bagi dirinya dan masyarakatnya, maka tindakan tersebut adalah baik. Nilai etika dan estetika tergantung pada keadaan relatif dari situasi yang terjadi. Nilai-nilai akhir (ultimate values) tidaklah ada, benar itu selalu relatif dan tergantung pada kondisi yang ada (conditional). Pertimbangan-pertimbangan nilai adalah berguna jika bermakna untuk kehidupan yang

intelegen, yaitu hidup yang sukses, produktif, dan bahagia (Callahan and Clark, 1983). Karena itu alira ini dikenal sebagai Pragmatisme atau Eksperimentalisme.

b. Implikasi terhadap Pendidikan

Tujuan Pendidikan. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- Kesehatan yang baik.
- Ketrampilan-keterampilan kejuruan (pekerjaan).
- Minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan.
- Persiapan untuk menjadi orang tua.
- Kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial (mampu memecahkan masalah-masalah sosial secara efektif).

Tujuan-tujuan khusus pendidikan sebagai tambahan tujuan di atas, bahwa pendidikan harus meliputi pemahaman tentang pentingnya demokrasi. Pemerintahan yang demokratis memungkinkan setiap warga negara tumbuh dan hidup melalui interaksi sosial yang memberikan tempat bersama dengan warga negara yang lainnya. Pendidikan harus membantu siswa menjadi warga negara yang unggul dalam demokrasi atau menjadi warga negara yang demokratis (Callahan and Clark, 1983). Karena itu menurut Pragmatisme pendidikan hendaknya bertujuan menyediakan pengalaman untuk menemukan/memecahkan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan sosialnya (Edward J. Power, 1982).

Kurikulum Pendidikan. Menurut para filsuf Pragmatisme, tradisi demokratis adalah tradisi memperbaiki diri sendiri (a self-correcting tradition). Implikasinya warisan-warisan sosial budaya dari masa lalu tidak menjadi fokus perhatian pendidikan. Melainkan, pendidikan terfokus kepada kehidupan yang baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Standar kebaikan sosial diuji secara terus-menerus dan diverifikasi melalui pengalaman-pengalaman yang berubah. Pendidikan harus dilaksanakan untuk memelihara demokrasi. Sebab hakikat demokrasi adalah dinamika dan perubahan sebagai hasil rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus berlangsung. Namun demikian, rekonstruksi ini tidak menuntut atau tidak meliputi perubahan secara menyeluruh. Hanya masalah-masalah sosial yang serius dalam masyarakat yang diuji ulang agar diperoleh solusi-solusi baru.

Dalam pandangan Pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat. Dalam pendidikan materi pelajaran adalah alat untuk

memecahkan masalah-masalah individual, dan siswa secara perorangan ditingkatkan atau direkonstruksi, dan secara bersamaan masyarakat dikembangkan. Karena itu masalah-masalah masyarakat demokratis harus menjadi bentuk dasar kurikulum; dan makna pemecahan ulang masalah-masalah lembaga demokratis juga harus dimuat dalam kurikulum. Karena itu kurikulum harus menjadi:

- Berbasis pada masyarakat.
- Lahan praktek cita-cita demokratis.
- Perencanaan demokratis pada setiap tingkat pendidikan.
- Kelompok batasan tujuan-tujuan umum masyarakat.
- Bermakna kreatif untuk pengembangan keterampilan-keterampilan baru.
- Kurikulum berpusat pada siswa (pupil/child centrered) dan berpusat pada aktifitas (activity centered). Selain itu perlu dicatat bahwa kurikulum pendidikan Pragmatisme diorganisasi secara interdisipliner, dengan kata lain kurikulumnya bersifat terpadu, tidak merupakan mata pelajaran-mata pelajaran yang terpisah-pisah.

Sejalan dengan uraian di atas, Edward J. Power (1982) menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Pragmatisme "berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut mungkin berubah".

Metode Pendidikan. Sebagaimana dikemukakan Callahan dan Clark (1983), penganut Eksperimentalisme atau Pragmatisme mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah (Problem Solving Method) serta metode penyelidikan dan penemuan (Inquiry and Discovery Method). Dalam prakteknya (mengajar), metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat sebagai berikut: permissive (pemberi kesempatan), friendly (bersahabat), a guide (seorang pembimbing), open-minded (berpandangan terbuka), enthusiastic (bersifat antusias), creative (kreatif), socialy aware (sadar bermasyarakat), alert (siap siaga), patien (sabar), cooperative and sincere (bekerjasama dan ikhlas atau bersungguh-sungguh).

Peranan Guru dan Siswa. Dalam Pragmatisme, belajar selalu dipertimbangkan untuk menjadi seorang individu. Dalam pembelajaran peranan guru bukan "menuangkan" pengetahuannya kepada siswa, sebab ini merupakan upaya tak berbuah. Sewajarnya, setiap apa yang siswa pelajari sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, minat-minat, dan masalah-masalah pribadinya. Dengan kata lain isi pengetahuan tidak bertujuan dalam dirinya sendiri, melainkan bermakna untuk suatu tujuan. Dengan demikian seorang siswa yang menghadapi suatu permasalahan akan mungkin untuk merekonstruksi lingkunganya untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Untuk membantu siswa guru harus berperan:

- Menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi. Field trips,

film-film, catatan-catatan, dan tamu ahli merupakan contoh-contoh aktifitas yang dirancang untuk memunculkan minat siswa terhadap permasalahan penting.
- Membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik.
- Membimbing merencanakan tujuan-tujuan individual dan kelompok dalam kelas untuk digunakan dalam memecahkan masalah.
- Membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah. Secara esensial, guru melayani para siswa sebagai pembimbing dengan memperkenalkan keterampilan, pemahaman-pemahaman, pengetahuan, dan penghayatan-penghayatan melaluipenggunaan buku-buku, komposisi-komposisi, surat-surat, nara sumber, film-film, field trips, televisi, atau segala sesuatu yang tepat digunakan.
- Bersama-sama kelas mengevaluasi apa yang telah dipelajari; bagaimana mereka mempelajarinya; dan informasi baru apa yang setiap siswa temukan oleh dirinya (Callahan and Clark, 1983).

Edwrad J. Power (1982) menyimpulkan pandangan Pragmatisme bahwa "siswa merupakan organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh; sedangkan guru berperanan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa".

Prinsip bahwa segala sesuatu terus berubah, prinsip bahwa pengetahuan terbaik yang diperoleh melalui eksperimentasi ilmiah juga selalu berubah dan bersifat relative, dan prinsip relitivisme nilai-nilai, maka Callahan dan Clark (1983) menyatakan bahwa orientasi pendidikan Pragmatisme adalah Progresivisme. Artinya, pendidikan Pragmatisme menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan membosankan dari pendidikan sekolah yang tradisional. Anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang kehidupan agama, moral, social, politik, dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya pendidikan Pragmatisme dipandang memiliki kekuatan demi terjadinya perubahan social dan kebudayaan melalui penekanan perkembangan individual peserta didik. Selain itu, Callahan dan Clark (1983) memandang Rekonstruksionisme adalah variasi dari Progresivisme, yaitu suatu orientasi pendidikan yang ingin merombak tata susunan kebudayaan lama, dan membangun tata susunan kebudayaan baru melalui pendidikan/sekolah.. Perbedaannya dengan Progresivisme yaitu bahwa Rekonstrukionisme tidak menekankan perubahan masyarakat dan kebudayaan melalui perkembangan individual siswa (child centered), melainkan melalui rekayasa sosial dengan jalan pendidikan/sekolah.

2. Landasan Filosofis Pendidikan Nasional: Pancasila

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam "Pembukaan" Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini Pasal 2 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional" menyatakan bahwa: "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pancasila berisi gagasan-gagasan dasar bernegara atau falsafah kenegaraan, karena itu Pancasila juga adalah falsafah pendidikan nasional atau landasan idiil pendidikan nasional.

Sehubungan dengan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut. Barangkali Anda bertanya: "jika demikian halnya, untuk apa kita mempelajari landasan filosofis pendidikan dari berbagai aliran (Idealisme, Konstruktivisme, Pragmatisme, dsb.) sebagaimana telah dipelajari melalui modul-modul sebelumnya?". Berbagai landasan filosofis pendidikan tersebut tetap perlu kita kaji dengan tujuan untuk memahaminya, memilah dan memilih gagasan-gagasannya yang positif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila untuk diambil hikmahnya demi pengembangan dan memperkaya kebudayaan (pendidikan) kita. Berkenaan dengan ini silakan Anda kaji Pasal 32 UUD 1945 beserta penjelasannya.

a. Konsep Filsafat Umum

Metafisika: Hakikat Realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan (makhluk) Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah Sumber Pertama dari segala yang ada, Ia adalah Sebab Pertama dari segala sebab, tetapi Ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya; dan Ia juga adalah tujuan akhir segala yang ada.

Di alam semesta bukan hanya realitas fisik atau hanya realitas non fisik yang ada, realitas yang bersifat fisik dan/atau non fisik tampak dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. Terdapat alam fana dengan segala isi, nilai, norma atau hukum di dalamnya. Alam tersebut adalah tempat dan sarana bagi manusia dalam rangka hidup dan kehidupannya, dalam rangka melaksanakan tugas hidup untuk mencapai tujuan hidupnya. Di balik itu terdapat alam akhir yang abadi dimana setelah mati manusia akan dimintai pertanggung jawaban dan menerima imbalan atas pelaksanaan tugas hidup dari Tuhan YME. Dalam uraian di atas tersurat dan tersirat makna adanya realitas yang bersifat absolut dan relatif, terdapat realitas yang bersifat abadi dan realitas yang bersifat fana.

Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang menjadi keinginan luhur tersebut yaitu: a. negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur; b. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; c. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa realitas juga tidak bersifat given (terberi) dan final, melainkan juga "mewujud" sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi "mewujudkannya".

Hakikat Manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan YME. Manusia adalah kesatuan badani-rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran (consciousness) dan penyadaran diri (self-awareness), mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Manusia dibekali potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan untuk berbuat baik, namun di samping itu karena hawa nafsunya manusia pun memiliki kemungkinan untuk berbuat jahat. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk: mampu berpikir (cipta), berperasaan (rasa), berkemauan (karsa), dan berkarya. Adapun dalam eksistensinya manusia berdimensi individualitas/personalitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religius. Adapun semua itu menunjukkan dimensi interaksi atau komunikasi (vertikal maupun horisontal), historisitas, dan dinamika.

Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi manusia bersifat mono-pluralis tetapi bersifat integral, artinya bahwa manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan utuh. Pancasila menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa: manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan YME, mendapat panggilan tugas dariNya, dan harus mempertanggung jawabkan segala amal pelaksanaan tugasnya terhadap Tuhan YME (aspek religius); asas mono dualisme: manusia adalah kesatuan badani-ruhani, ia adalah pribadi atau individual tetapi sekaligus insan sosial); asas mono-pluralisme: meyakini keragaman manusia, baik suku bangsa, budaya, dsb., tetapi adalah satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia (Bhineka tunggal Ika); asas nasionalisme: dalam eksistensinya manusia terikat oleh ruang dan waktu, maka ia mempunyai relasi dengan daerah, jaman, dan sejarahnya yang diungkapkan dengan sikapnya mencintai tanah air, nusa, dan bangsa; asas internasionalisme: manusia Indonesia tidak meniadakan eksistensi manusia lain baik sebagai pribadi, kelompok, atau bangsa lain; asas demokrasi: dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kesamaan hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan antara warga negara, dan hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya; asas keadilan sosial: dalam merealisasikan diri manusia harus senantiasa menjunjung tingi tujuan kepentingan bersama dalam membagi hasil pembudayaannya (BP-7 Pusat,

1995).

Epistemologi: Hakikat Pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari Sumber Pertama yaitu Tuhan YME. Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui Utusan-Nya (berupa wahyu) maupun melalui berbagai hal yang digelarkanNya di alam semesta termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan/kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi.

Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak (seperti dalam pengetahuan keagamaan/revealed knowledge yang diimani), tetapi ada pula yang bersifat relatif (seperti dalam pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset, dsb).

Pengetahuan yang bersifat mutlak (ajaran agama/wahyu Tuhan) diyakini mutlak kebenarannya atas dasar keimanan kepada Tuhan YME. Pengetahuan yang bersifat relatif (filsafat, sains, dll) diuji kebenarannya melalui uji konsistensi logis ide-idenya, kesesuainya dengan data atau fakta empiris, dan nilai kegunaannya bagi kesejahteraan manusia dengan mengacu kepada kebenaran dan nilai-nilai yang bersifat mutlak.

Aksiologi: Hakikat Nilai. Sumber Pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan YME. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi/individual dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan YME, masyarakat dan individu.

b. Implikasi terhadap Pendidikan

Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas, sehingga dengan demikian baik isi pendidikan maupun cara-cara pembelajarannya dipilih, diturunkan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada dasar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, pendidikan bukanlah proses pembentukan peserta didik untuk menjadi orang tertentu sesuai kehendak sepihak dari pendidik. Karena manusia (peserta didik) hakikatnya adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri, maka upaya pendidikan harus dipandang sebagai upaya bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Upaya pendidikan adalah pemberdayaan peserta didik. Hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai upaya dan tujuan yang bersifat individualistik semata, sebab sebagaimana telah dikemukakan bahwa kehidupan manusia itu multi dimensi dan merupakan kesatuan yang integral.

Selain hal di atas, dimensi hitorisitas, dinamika, perkembangan kebudayaan dan tugas hidup yang diemban manusia mengimplikasikan bahwa pendidikan harus diselenggarakan sepanjang hayat. Pendidikan hendaknya diselenggarakan sejak dini, pada setiap tahapan perkembangan hingga akhir hayat. Sebab itu, pendidikan hendaknya diselenggarakan baik pada jalur pendidikan informal, formal, maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Tujuan Pendidikan. Pandangan Pancasila tentang hakikat realitas, manusia, pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogyanya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan tersebut hendaknya kita sadari betul, sehingga pendidikan yang kita selenggarakan bukan hanya untuk mengembangkan salah satu potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu saja, bukan hanya untuk terampil bekerja saja, dsb., melainkan demi berkembangnya seluruh potensi peserta didik dalam konteks keseluruhan dimensi kehidupannya secara integral.

Kurikulum Pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; I) dinamika perkembangan global; dan J) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 36 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Metode Pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan. Sebab, tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding metode lainnya dalam segala konteks pendidikan. Pemilihan dan aplikasi metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, hakikat manusia atau peserta didik, karakteristik isi/materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu pendidikan yang tersedia. Penggunaan metode pendidikan diharapkan mengacu kepada pada prinsip cara belajar siswa aktif (CBSA) dan sebaiknya bersifat multi metode.

Peranan Pendidik dan Peserta Didik. ada berbagai peranan pendidik dan peserta didik yang haruis dilaksanaknya, namun pada dasarnya berbagai peranan tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan: “ing ngarso sung tulodo” artinya pendidik harus memberikan atau mejadi teladan bagi peserta didiknya; “ing madya mangun karso”, artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya; dan” tut

wuri handayani" artinya bahwa sepanjang tidak berbahaya pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri.

Orientasi pendidikan. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan, dsb. yang dijunjung tinggi dan dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Contoh: pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak tentunya tetap harus dipertahankan, demikian juga pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang masih dipandang benar dan baik juga perlu dikonservasi. Adapun fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat terberi (given) dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern. Tetapi realitas "mewujud" sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi "mewujudkannya". Semua anggota semesta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan realitas. Sebab itu, peran manusia baik sebagai individu maupun kelompok adalah merajut realitas yang diinginkannya yang dapat diterima oleh lingkungannya. Dalam hal ini hakikat pendidikan seyogyanya diletakkan pada upaya-upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi para pelajar agar mereka tidak saja mampu memahami perubahan tetapi mampu berperan sebagai agen perubahan atau perajut realitas (A. Mappadjantji Amien, 2005). Perubahan merupakan suatu keharusan atau kenyataan yang tidak dapat kita tolak, sehingga pelajar-pelajar harus kita didik untuk menguasainya dan bukan sebaliknya, mereka menjadi dikuasai oleh perubahan.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini, coba Anda kemukakan dan jelaskan: 1) konsep umum filsafat Pragmatisme yang menjadi landasan bagi tujuan pendidikan dan metode pendidikannya. 2) rumuskan kembali konsep hakikat realitas, hakikat manusia dan hakikat nilai berdasarkan Pancasila serta implikasinya terhadap tujuan pendidikan.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 1) Anda perlu mengkaji kembali konsep tujuan pendidikan dan metode pendidikan Pragmatisme. Selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap konsep filsafat umum Pragmatisme yang berimplikasi terhadap tujuan dan metode pendidikan tersebut. Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 2) kaji kembali konsep konsep-konsep hakikat: realitas, manusia dan nilai berdasarkan Pancasila, selanjutnya anda analisis implikasinya terhadap tujuan pendidikan, dan bandingkan dengan rumusan tujuan pendidikan tersebut dengan rumusan tujuan pendidikan nasional.

Rangkuman

Pragmatisme: Realitas hakikatnya adalah sebagaimana dialami manusia; bersifat plural, dan terus menerus berubah. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis dan sosial. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman (metode sains), pengetahuan bersifat relatif; teori uji kebenaran pengetahuan dikenal sebagai pragmatisme/ instrumentalisme, sebab pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diaplikasikan. Hakikat nilai berada dalam proses, yaitu dalam perbuatan manusia, bersifat kondisonal, relatif, dan memiliki kualitas individual dan sosial.

Pendidikan bertujuan agar siswa dapat memecahkan permasalahan hidup individual maupun sosial. Tidak ada tujuan akhir pendidikan. Kurikulum pendidikan hendaknya berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa (child centered) dan berpusat pada aktifitas siswa (activity centered). Adapun kurikulum tersebut mungkin berubah. Pragmatisme mengutamakan metode pemecahan masalah (problem solving method) serta metode penyelidikan dan penemuan (inquiry and discovery method). Guru hendaknya berperan sebagai fasilitator, yaitu memimpin dan membimbing siswa belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Adapun siswa berperan bebas untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Orientasi pendidikan Pragmatisme adalah Progresivisme dan atau Rekonstruksionisme.

Landasan Filosofis Pendidikan Nasional (Pancasila). Konsep Filsafat Umum: Realitas adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah Sumber Pertama dari segala yang ada dan tujuan akhir segala yang ada. Realitas fisik dan/atau non fisik tampak dalam pluralitas fenomena alam semesta sebagai keseluruhan yang integral. Terdapat alam fana dan alam akhirat yang abadi di mana manusia akan dimintai pertanggung jawaban dan menerima imbalan atas pelaksanaan tugas hidupnya dari Tuhan YME. Di alam fana ini realitas tidak tidak bersifat given (terberi) dan final, melainkan juga “mewujud” sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi “mewujudkannya”. Manusia adalah makhluk Tuhan YME (asas Ketuhanan YME); manusia adalah kesatuan badani-rohani, eksistensi dan kehidupannya multi dimensi tetapi ia adalah kesatuan utuh yang integral (asas mono dualis dan mono pluralis tetapi integral). Selain itu, Pancasila juga memandang manusia sesuai asas nasionalisme, internasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial. Pengetahuan diperoleh melalui keimanan/kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak, ada pula yang bersifat relatif. Sumber Pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan YME. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi/individual dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan YME, masyarakat dan individu.

Pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertangung jawab. Isi/kurikulum hendaknya memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; I) dinamika perkembangan global; dan J) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Praktek pendidikan hendaknya diselenggarakan dengan mengunakan multi metode dengan tetap mengutamakan prinsip cara belajar siswa aktif. Peranan pendidik dan peserta didik tersurat dan tersirat dalam semboyan "ing ngarso sung tulodo", "ing madya mangun karso", dan" tut wuri handayani". Adapun orientasi pendidikannya meliputi fungsi konservasi dan kreasi.

Tes Formatif 3

1. Hakikat realitas menurut Pragmatisme adalah kenyataan sebagaimana dialami manusia, adapun sifatnya yaitu ……………….. dan …………………..

2. Pragmatisme mengajarkan bahwa kebenaran pengetahuan dan nilai-nilai adalah bersifat ………..

3. Metode pendidikan yang diutamakan penganut Pragmatisme adalah ………. …… dan ……………………….

4. Realitas hakikatnya terus menerus berubah, kebenaran pengetahuan tergantung dapat tidaknya diaplikasikan untuk memecahkan masalah kehidupan, dan sesuatu dikatakan baik apabila berguna dalam kehidupan individual maupun sosial. Implikasinya maka tujuan pendidikan Pragmatisme adalah …………………………………………….. ……………………………………………….
5. Orientasi pendidikan penganut Pragmatisme adalah ……………………
6. Landasan filosofis pendidikan nasional (Indonesia) adalah ….

7. Berdasarkan Pancasila, kita mengakui asas monopluralisme megenai hakikat realitas, dan manusia. Apakah implikasinya bagi isi kurikulum pendidkan?
8. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila, kemukakan rumusan tujuan pendidikan nasional sebagai implikasi dari nilai-nilai Pancasila !
9. Selain memiliki fungsi konservasi pendidikan juga memiliki fungsi kreasi. Jelaskan landasan ontologis atau landasan metafisikanya!
10. Berikan contoh perbuatan pendidik dalam melaksanakan semboyan “ingarso sung tulodo” dan “tut wuri andayani”.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Cukup
< 70%	= Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Modul 3. Bagus ! Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN

Tes Formatif 1: 1. B. 2. A. 3. D. 4. D. 5. D. 6. B. 7. B. 8. C. 9. D. 10. C.
Tes Formatif 2 : 1. C. 2. A. 3. C. 4. B. 5. B. 6. D. 7. C. 8. A. 9. B. 10. A.

Tes Formatif 3 :

1. Plural dan berubah.
2. Relatif.
3. Metode pemecahan masalah, metode penyelidikan dan penemuan.
4. Tujuan pendidikan Pragmatisme adalah agar siswa mampu memecahkan berbagai

masalah aktual dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan socialnya dan bersikap demokratis.

5. Progresivisme.
6. Pancasila.
7. Kurikulum pendidikan hendaknya dirumuskan dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan.
8. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab.
9. Realitas adalan ciptaan Tuhan YME, terdapat alam fana dan alam akhirat yang abadi, namun realitas fana ini tidak bersifat terberi (given) dan sudah final. Realitas fana ini "mewujud" sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi "mewujudkannya".
10. Contoh perbuatan guru sesuai semboyan ingarso sung tulodo antara lain: guru datang ke kelas tepat waktu, guru berpakaian rapih dan sopan, perbuatan guru sesuai dengan nilai dan norma agama maupun kebudayaan, dlsb. Adapun contoh perbuatan guru sesuai semboyan tut wuri andayani antara lain: guru membimbing para siswa melakukan observasi, guru membimbing siswa melakukan diskusi kelas, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, dsb.

LANDASAN PSIKOLOGIS PENDIDIKAN

MODUL 3

LANDASAN PSIKOLOGIS PENDIDIKAN

Pendahuluan

Keberhasilan guru dalam melaksanakan berbagai peranannya antara lain akan dipengaruhi oleh pemahamannya tentang perkembangan peserta didik, serta kemampuan mengaplikasikannya dalam praktek pendidikan. Pernyataan ini mengacu kepada asumsi bahwa salah satu peranan guru adalah membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya. Selain itu, peranan guru yang lainya dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didiknya. Demi pelaksanaan peranannya itu guru juga perlu memahami bagaimana anak belajar, adapun hal ini berkenaan dengan teori belajar.

Modul ini akan mengantarkan Anda untuk memahami konsep, prinsip dan arah perkembangan individu; tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan individu; serta teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Pemahaman terhadap bahan belajar mansiri ini akan berguna dalam membangun wawasan kependidikan Anda, sehingga Anda diharapkan dapat terhindar dari kekeliruan yang mungkin terjadi dalam rangka pembelajaran. Anda diharapkan tidak keliru dalam mengenal peserta didik. Di samping itu, Anda diharapkan mempunyai petunjuk yang relatif tepat mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang mungkin dapat diabaikan dalam pembelajaran.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memahami hakikat perkembangan, tugas-tugas perkembangan dan teori belajar serta implikasinya terhadap pendidikan. Adapun secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian perkembangan.
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan. Menjelaskan hakikat manusia.
3. Mengidentifikasi arah perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan.
5. Mengidentifikasi tahap dan tugas perkembangan serta implikasinya terhadap pendidikan.
6. Mengidentifikasi teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan.

Keseluruhan modul ini dibagi menjadi tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 berkenaan dengan Perkembangan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya terhadap pendidikan. Kegiatan belajar 2 berkenaan dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan individu, serta imoplikasinya terhadap pendidikan. Kegiatan belajar 3 berkenaan dengan teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan.

Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut ini:

1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam modul ini.
2. Baca materi modul dengan seksama, tambahkan catatan pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan, dll. Sesuai pemikiran yang muncul pada diri Anda. Dalam menjelaskan suatu konsep atau asas, seringkali digunakan istilah dan diberikan contoh, pahami hal tersebut sesuai konteks pembahasannya.
3. Terdapat keterkaitan antara materi sub pokok bahasan kesatu (kegiatan belajar satu) dengan materi sub pokok bahasan kedua (kegiatan belajar kedua) dst. Materi pada kegiatan belajar kesatu berimplikasi terhadap materi kegiatan belajara kedua dst. Karena itu untuk menguasai keseluruhan materi modul ini mesti dimulai dengan memahami secara berurutan materi modul pada setiap sub pokok bahasan yang disajikan pada kegiatan belajar satu s.d. kegiatan belajar tiga secara berurutan.
4. Cermati dan kerjakan latihan/tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan latihan/tugas tersebut, gunakan pengetahuan yang telah Anda kuasai sebelumnya. Pengetahuan dan penghayatan berkenaan dengan pengalaman hidup dan pengalaman kerja Anda sehari-hari akan dapat membantu penyelesaian tugas.
5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan kunci jawaban untuk menentukan penilaian benar /tidaknya jawaban Anda.
6. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan tutorial elektronik, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Perkembangan Individu dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya

Ada tiga pokok bahasan yang akan Anda kaji dalam kegiatan belajar ini, yaitu: pengertian perkembangan, prinsip dan arah perkembangan, faktor-faktor penentu perkembangan beserta implikasinya terhadap pendidikan. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi definisi perkembangan, yang meliputi pengertian kematangan dan belajar serta perbandingannya dengan pertumbuhan. Kajian dalam pokok bahasan kedua meliputi prinsip-prinsip perkembangan, arah perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan. Adapun kajian dalam pokok bahasan ketiga berkenaan dengan teori Nativisme, Empirisme dan Konvergensi, yang keseluruhannya membahas faktor-faktor penentu perkembangan individu serta implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda akan dapat menjelaskan pengertian perkembangan, prinsip-prinsip dan asas perkembangan, serta faktor-faktor penentu perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan.

1. Pengertian Perkembangan

Perkembangan. Setiap individu dalam perjalanan hidupnya mengalami perkembangan *(development).* Mungkin muncul pertanyaan pada diri Anda, apakah yang dimaksud perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung terus menerus sejak terjadinya pembuahan *(conception)* hingga meninggal dunia (Yelon and Weinstein, 1977). Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan individu tersebut dapat terjadi karena dua hal, yaitu: 1) kematangan *(maturation)* dan 2) belajar *(learning)*.

Pertumbuhan. Selain istilah perkembangan, istilah pertumbuhan juga sering digunakan untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri individu. Misalnya dalam kalimat berikut ini: "Anak itu *pertumbuhannya* pesat sekali. Rasanya baru kemarin saya meninggalkan dia, kemarin ini dia masih kecil, eeh sekarang dia sudah gede". Apakah pertumbuhan mempunyai pengertian yang sama dengan perkembangan? Crow & Crow mengemukakan bahwa *pertumbuhan* berkenaan dengan perubahan-

perubahan struktural dan fisiologis (jasmaniah) pada diri seseorang yang berlangsung sejak saat konsepsi melalui periode-periode prenatal (dalam kandungan) dan postnatal (setelah lahir) sampai kedewasaannya (E. Usman Effendi dan Juhaya S. Praja, 1984:48). Jadi, pertumbuhan merupakan proses perubahan yang berkenaan dengan aspek fisik atau jasmaniah individu seperti perubahan tinggi badan, berat badan dsb. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan-perubahan yang terutama berhubungan dengan aspek psikis atau hidup kejiwaan individu seperti perubahan mental, sosial, emosi, dsb., yang mana perubahan-perubahan tersebut dapat melahirkan tingkah laku yang dapat diamati, meskipun tidak dapat diukur seperti yang terjadi pada perubahan-perubahan yang berkenaan aspek jasmaniah. Namun demikian, karena individu itu hakikatnya adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi atau tak dapat dipisah-pisahkan, maka sesunguhnya antara proses pertumbuhan dan perkembangan itu pun pada dasarnya sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya. Antara pertumbuhan fisik dan perkembangan sosial, emosional, moral, dan mental indivdu sesungguhnya sangat sulit untuk dipisahkan, sebab aspek fisik, sosial, emosional, moral, dan mental individu pertumbuhan/perkembangannya saling berhubungan dan saling mempengarhi. Berkenaan dengan ini Sunaryo Kartadinata dan Nyoman Dantes (1996/1997:50) menyatakan bahwa: "Perkembangan adalah proses yang kompleks karena perkembangan merupakan hasil dari berbagai proses biologis, kognitif, sosial dan moral. Oleh karena itu pertumbuhan akan selalu terlibat dalam proses perkembangan".

Kematangan. Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa perubahan-perubahan dalam perkembangan individu dapat terjadi karena kematangan *(maturation)* dan belajar *(learning)*. Kematangan adalah perubahan-perubahan - pada individu - sebagai hasil dari pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan biologis, daripada sebagai perubahan melalui pengalaman. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri individu yang berupa kematangan bukan akibat dari pengalaman, melainkan dikarenakan akibat dari pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan dalam aspek biologis. Contoh: Pada suatu saat untuk pertama kalinya seorang anak remaja putri akan mengalami perubahan tertentu, yaitu menstruasi. Menstruasi terjadi bukan akibat pengalaman karena anak remaja putri yang bersangkutan melakukan sesuatu hal, melainkan akibat dari tercapainya pertumbuhan fisik dan biologis tertentu. Tumbuhnya bulu-bulu pada bagian badan tertentu pada individu, perubahan kelenjar dan tinggi badan juga merupakan contoh kematangan. Coba Anda kemukakan beberapa contoh kematangan yang lainnya seperti yang pernah terjadi pada diri Anda!

Belajar. Selain dapat terjadi karena kematangan, perubahan-perubahan dalam perkembangan individu juga dapat terjadi karena belajar. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan belajar, silahkan Anda kaji beberapa pernyataan dan definisi berikut ini: Menurut Morgan "Belajar adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman" (M.

Ngalim Purwanto, 1993:84). Sejalan dengan definisi itu Cronbach menyatakan bahwa: *"Learning is shown by a change in behavior as a result of experience"* . Belajar ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman (Sardiman A.M, 1986:22). Adapun Witherington mendefinisikan belajar sebagai perubahan di dalam kepribadian sebagaimana dimanifestasikan dalam pola-pola respons atau tingkah laku yang baru berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pemahaman. Berbeda dengan definisi atau pernyataan di atas, Good dan Brophy dalam bukunya *Educational Psychology: A Realistic Approach* menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses yang bersifat internal, yang terjadi pada diri individu yang sedang mengalami belajar, dalam usahanya memperoleh hubungan-hubungan baru *(new associations)*. Hubungan-hubungan baru itu dapat berupa hubungan antara perangsang-perangsang, antara reaksi-reaksi, atau antara perangsang dengan reaksi. Good dan Brophy menyatakan: *"Learning is the development of new associations as a result of experience"* (M. Ngalim Purwanto, 1983:85).

Menyimak beberapa pernyataan dan definisi tentang belajar seperti yang disajikan di atas, dapat Anda simpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu yang bersifat relatif permanen dan terjadi sebagai hasil pengalaman. Ada beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian belajar, yaitu:

a. Pengertian belajar meliputi proses dan hasil.
b. Sebagai suatu proses, belajar merupakan suatu upaya disengaja yang berlangsung pada diri individu yang terjadi melalui pengalaman.
c. Proses belajar menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri individu. Perubahan-perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar meliputi berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikhis, seperti perubahan mengenai pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, keterampilan, sikap, dsb.
d. Perubahan-perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar sifatnya relatif manetap atau permanen.

2. Prinsip dan Arah Perkembangan

Prinsip Perkembangan. Yelon dan Weinstein (1977) mengemukakan lima prinsip perkembangan individu, yaitu:

1) Perkembangan individu berlangsung terus menerus sejak pembuahan hingga meninggal dunia.
2) Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai perkembangan yang normal.
3) Semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental dan emosional dalam pertumbuhan/perkembangannya satu sama lain saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Anak yang superior cenderung superior dalam dalam berbagai

aspek.

4) Arah perkembangan individu dapat diramalkan.
5) Perkembangan berlangsung secara bertahap; setiap tahap memunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu; tahapan perkembangan sejalan dengan tahapan usia; tahap perkembangan berlangsung terus menerus dan bersifat *overlaping*.

Prinsip-prinsip perkembangan sebagaimana dideskripsikan di atas perlu Anda pahami, sebab prinsip-prinsip perkembangan tersebut berimplikasi terhadap pendidikan dan akan berfungsi sebagai asumsi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kependidikan Anda sebagai guru. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda kaji penjelasan di bawah ini:

Prinsip perkembangan yang pertama menyatakan bahwa "perkembangan individu berlangsung terus menerus sejak pembuahan hingga meninggal dunia". Di pihak lain, Anda telah memahami bahwa pendidikan diselenggarakan untuk mengubah perilaku individu ke arah yang diharapkan. Dengan demikian, prinsip perkembangan yang pertama tadi mengimplikasikan bahwa pendidikan adalah mungkin dapat dilaksananakan, sebab individu berada dalam perkembangan, individu masih mungkin berubah. Selain itu, karena perkembaangan itu berlangsung sepanjang hayat, maka pendidikan pun hendaknya diselenggarakan sepanjang hayat.

"Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai perkembangan yang normal". Dengan prinsip perkembangan yang kedua ini guru dapat memahami bahwa pada umumnya siswa berkembang secara normal dan bersama-sama. Sejumlah siswa yang berada pada tahap perkembangan yang sama mungkin menampilkan ciri-ciri yang sama dan memiliki kesiapan belajar yang sama. Sebab itu, pembelajaran secara bersama-sama atau secara klasikal adalah mungkin untuk dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, guru tidak boleh melupakan akan adanya perbedaan kecepatan perkembangan pada setiap individu. Mungkin saja dalam kelompok siswa yang secara usia kronologis berada pada tahapan perkembangan yang sama, tetapi ada diantara siswa tersebut yang menampilkan ciri-ciri dan kesiapan belajar yang berbeda. Mungkin pada umumnya siswa telah memiliki kesiapan untuk mempelajari sesuatu, sementara seseorang atau beberapa orang siswa belum memiliki kesiapan belajar untuk itu. Sebab itu, sekalipun guru melaksanakan pembelajaran secara klasikal, namun guru harus tetap memperhatikan, mempertimbangkan dan memperlakukan siswa secara individual juga. Guru mesti tetap memperhatikan pula akan keunikan setiap siswa, baik secara fisik, mental, emosional maupun sosial.

Prinsip ketiga menyatakan bahwa "semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental dan emosional dalam pertumbuhan/perkembangannya satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi". Ini merupakan salah satu bukti bahwa individu adalah satu kesatuan yang terpadu. Implikasinya, maka proses pembelajaran di madrasah ibtidaiyah atau di sekolah dasar yang diselenggarakan dalam berbagai mata pelajaran hendaknya selalu dihubungkan dan berkenaan dengan seluruh aspek

perkembangan anak. Para guru hendaknya memahami siswa sebagai suatu keseluruhan yang terpadu dan alangkah bijaksananya apabila para guru menyelenggarakan pembelajaran secara terpadu pula.

"Arah perkembangan individu dapat diramalkan". Prinsip perkembangan yang keempat ini mengimplikasikan agar pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan arah perkembangan individu/siswa. Untuk memahami lebih jauh mengenai hal ini Anda dapat mengakajinya dalam pembahasan tentang arah perkembangan.

Prinsip kelima menegaskan bahwa "perkembangan berlangsung secara bertahap; setiap tahap memunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu; tahapan perkembangan sejalan dengan tahapan usia; tahap perkembangan berlangsung terus menerus dan bersifat *overlaping"*. Prinsip perkembangan yang kelima ini pada dasarnya mengimplikasikan agar pendidikan diselenggarakan sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Kita para guru diharapkan menyusun kurikulum pendidikan atau program pembelajaran yang sesuai atau sepadan dengan tahap perkembangan para siswanya.

Arah Perkembangan. Arah perkembangan individu dapat diramalkan, sehubungan dengan itu perkembangan individu pada umumnya mengikuti arah sebagai berikut:

1) Individu berkembang secara menyeluruh; mulai dari kepala hingga kaki dan mulai dari pusat badan hingga kaki dan tangan.
2) Perkembangan struktur mendahului fungsi.
   Dalam diri individu, struktur tertentu misalnya tulang dan otot kaki akan berkembang lebih dulu dibanding perkembangan fungsinya untuk berjalan. Apabila struktur tulang dan otot kaki tersebut sudah berkembang sebagaimana mestinya, baru fungsi kaki untuk berjalan akan berkembang. Demikian halnya perkembangan struktur dan fungsi yang lainnya dalam diri individu.
3) Perkembangan mulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.
   Contoh: Pengenalan anak terhadap berbagai objek bergerak dari pengenalan secara umum (kabur, tidak detail) ke arah pengenalan yang semakin khusus mengenai detail bagian-bagian dari objek tersebut.
4) Perkembangan mental mulai dari kongkrit ke abstrak; mulai dari kecakapan berpikir apa adanya pada saat ini hingga kecakapan berpikir konseptual yang berorientasi ke masa yang akan datang.
5) Perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada persfektivisme hingga dapat mengerti pendirian/pandangan orang lain.
   Dalam usia yang sangat muda, anak akan memandang dirinya sebagai pusat segalanya. Tetapi lambat laun kondisi egosentris ini akan berkembang kea rah pemahaman terhadap orang lain dan lingkungan. Lambat laun anak akan memahami kondisi objektif akan adanya orang lain dan lingkungannya, sehingga ia akan mengerti akan adanya perbedaan pendirian atau pandangan dirinya dan pendirian atau pandangan orang lain.

6) Perkembangan bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri.
   Pada awalnya anak belum dapat mengendalikan diri, ia masih memerlukan dominasi kontrol dari orang lain. Misalnya berkenaan dengan aturan atau disiplin. Namun demikian, lambat laun dan pada akhirnya anak akan dapat mengendalikan dirinya sendiri.

7) Perkembangan bergerak dari absolutisme kepada relativisme.
   Pada awalnya anak akan melihat sesuatu sebagai sesuatu yang mutlak, tidak boleh berubah. Contoh: pada awalnya anak akan berpendapat bahwa segala aturan tidak boleh diubah. Tetapi sejalan dengan perkembangannya, ia akan melihat akan adanya kemungkinan-kemungkinan atau kekecualian di mana dalam konteks tertentu aturan tertentu dapat saja diubah.
8) Perkembangan bergerak spiral menuju ke arah tujuan.
   Menurut prinsip ini berarti bahwa penguasaan tugas-tugas perkembangan akan terjadi pada berbagai tahap perkembangan dalam derajat kompleksitas yang berbeda. Semakin tinggi tahap perkembangannya, maka penguasaan tugas-tugas perkembangnnya akan semakin kompleks. Contoh: Pengenalan anak kelas satu madrasah ibtidaiyah mengenai Tuhan akan berbeda dengan pengenalan anak kelas satu Madrasah Tsanawiyah mengenai Tuhan. Selanjutnya perlu dipahami pula, bahwa perkembangan setiap individu bergerak maju menuju perkembangan yang lebih tinggi hingga mencapai kedewasaan.

Ada beberapa implikasi dari arah perkembangan individu terhadap pendidikan. *Pertama,* mengingat perkembangan struktur mendahului fungsi, maka program pembelajaran hendaknya disusun dengan memperhatikan kesiapan atau kematangan dari struktur pada diri individu/siswa. Contoh: Siswa jangan dulu diajari menulis halus apabila otot-otot jari tangannya belum siap untuk memegang pensil dengan baik. *Kedua,* penyusunan kurikulum pendidikan dan penyusunan program pembelajaran yang lebih bersifat operasional di lembaga pendidikan pada jenjang yang paling bawah (madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar) hendaknya dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai arah perkembangan individu sesuai tahap perkembangannya. Contoh: bahwa program pendidikan itu hendaknya dimulai dari materi ajar yang bersifat umum dan selanjunya mengarah kepada materi ajar yang khusus; dimulai dengan mempelajari hal-hal yang konkrit selanjutnya mengarah kepada yang abstrak; disusun secara bertahap untuk dapat menghilangkan egosentrisme dan mengarah ke perspektifvisme; disusun untuk secara bertahap menumbuhkan kemampuan kontrol dari dalam diri siswa; dalam hal tertentu program pembelajaran hendaknya disusun secara bertahap untuk membangun konsepsi tentang sesuatu yang hakikatnya absolut dan yang relatif; dan bahwa keluasan, kompleksitas dan kedalaman

isi kurikulum pendidikan atau program pembelajaran hendaknya disusun secara spiral menuju perkembangan tertinggi atau kedewasaan.

3. Faktor-faktor Penentu Perkembangan Individu dan Implikasinya terhadap Pendidikan

Salah satu masalah yang menjadi perhatian para ahli psikologi yaitu berkenaan dengan faktor penentu perkembangan individu. Hasil studi psikologi sebagai jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat di bedakan menjadi tiga kelompok teori, yaitu Nativisme, Empirisme dan Konvergensi.

a. Nativisme

Tokoh teori Nativisme antara lain Schoupenhauer. Penganut teori ini berasumsi bahwa setiap individu (anak) dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor turunan *(heredity)* yang dibawa sejak lahir yang berasal dari orang tuanya. Faktor turunan yang dibawa sejak lahir yang berasal dari orang tuanya itu dikenal pula dengan istilah *dasar (nature).* Adapun faktor turunan yang dibawa sejak lahir tersebut menjadi faktor penentu perkembangan individu. Dengan kata lain, bagi penganut teori Nativisme bahwa *dasar* dipandang sebagai satu-satunya penentu perkembangan individu.

Para ahli penganut teori Nativisme umumnya mempertahankan konsepsinya dengan menunjukkan berbagai kesamaan atau kemiripan antara orang tua dengan anak-anaknya. Contoh: apabila ayahnya terampil bermain musik, maka anak-anaknya pun diyakini akan terampil bermain musik; jika orang tuanya pandai dalam bidang sains, maka anak-anaknya pun diyakini akan memiliki kepandaian dalam bidang sains; Apabila orang tuanya pandai melukis maka anaknya pun diyakini akan pandai melukis, dsb.

Teori Nativisme memberikan implikasi yang *tidak kondusif* terhadap pendidikan. Teori Nativisme tidak memberikan kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengubah kepribadian peserta didik. Berdasarkan hal itu, peranan pendidikan atau sekolah sedikit sekali dapat dipertimbangkan untuk dapat mengubah perkembangan peserta didik. Teori demikian dipandang sebagai teori yang pesimistis terhadap upaya-upaya pendidikan untuk dapat mengubah atau turut menentukan perkembangan individu.

Teori Nativisme tidak dapat dipertahankan kebenarannya.Teori Nativisme tidaklah dapat kita diterima, baik sebagai asumsi dalam ilmu pendidikan maupun dalam praktek pendidikan. Sebab, jika teori Nativisme itu kita terima sebagai suatu asumsi, jika kita menerimanya sebagai sesuatu kebenaran bahwa perkembangan individu semata-mata tergantung pada dasar, maka konsekuensinya bahwa madrasah atau sekolah sepantasnya dibubarkan saja. Para orang tua, para guru dan siapapun tidak perlu melakukan pendidikan, sebab pendidikan dipandang tidak akan berfungsi untuk mengubah keadaan

individu/anak sesuai dasar yang dimilikinya. Namun demikian, hal tersebut di atas bertentangan dengan realitas yang sesungguhnya, karena terbukti bahwa sejak dulu hingga sekarang para orang tua dan para guru, baik di rumah maupun di madrasah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, mereka mendidik anak-anak/siswa-siswanya karena pendidikan itu terbukti merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan harus dilakukan dalam rangka membantu anak/siswa agar berkembang ke arah yang di harapkan. Dengan demikian, teori Nativisme tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak perlu diadopsi secara keseluruhannya.

b. Empirisme

Tokoh teori Empirisme antara lain John Locke dan J.B. Watson. Mereka menolak asumsi Nativisme, mereka berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih ibarat papan tulis yang belum ditulisi (*as a blank slate* atau *tabula rasa*). Individu lahir ke dunia tidak membawa ide-ide bawaan. Penganut Empirisme meyakini bahwa setelah kelahirannya, faktor penentu perkembangan individu ditentukan oleh faktor lingkungan/pengalamannya. Faktor penentu perkembangan individu yang diyakini oleh penganut empirisme dikenal pula dengan istilah *ajar (nurture).* Perkembangan individu tergantung kepada hasil belajarnya sedangkan faktor penentu utama dalam belajar sepenuhnya berasal dari lingkungan (Yelon and Weinstein, 1977). Dengan demikian, mereka tidak percaya kepada faktor turunan atau dasar (nature) yang dibawa sejak lahir sebagai penentu perkembangan individu. Sebaliknya, mereka meyakini pengalaman/lingkungan atau ajar *(nurture)* itulah satu-satunya faktor penentu perkembangan individu.

Implikasi teori Empirisme terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat *membentuk* kepribadian peserta didik; tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ada di pihak pendidik. Teori Empirisme memberikan implikasi yang bersifat optimistis terhadap pendidikan untuk dapat sepenuhnya mempengaruhi atau menentukan perkembangan individu seperti apa yang diharapkan pendidik. Hal ini sebagaimana dikemukakan J. B. Watson:

"Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type specialist. I might select doctor, lawyer, artist, mechant-chief, and yes even beggar-man and thief, regardless of his talents, pencahnts, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors" (Edward. J. Power, 1982).

Menyimak pernyataan di atas, dapat Anda pahami bahwa para penganut teori Empirisme begitu optimis dengan pendidikan sebagai upaya yang dapat diandalkan dalam rangka membentuk individu/siswa. Apakah kiranya teori Empirisme ini dapat dipertahankan kebenarannya? Sebagaimana dikemukakan Sumadi Suryabrata (1990:187-188) bahwa "jika sekiranya konsepsi Empirisme ini memang benar, maka kita

akan dapat menciptakan manusia ideal sebagaiman kita cita-citakan asalkan kita dapat menyediakan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk itu. Tetapi kenyataan membuktikan hal yang berbeda daripada yang kita gambarkan itu".

c. Teori Konvergensi

Tokoh teori Konvergensi antara lain William Stern dan Robert J. Havighurst. Mereka berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh dasar *(nature)* atau faktor turunan *(heredity)* yang dibawa sejak lahir maupun oleh faktor ajar *(nurture)* atau lingkungan/pengalaman. Misalnya, Havighurst menyatakan bahwa "karakteristik tugas perkembangan pada masa bayi dan anak kecil adalah *biososial.* Sebab, perkembangan anak adalah berdasarkan kematangan yang berangsur-angsur dari organ tubuhnya (biologis), dan berhasil tidaknya dalam tugas perkembangan itu tergantung kepada lingkungan sosialnya (Robert J. Havighurst, 1953). Penelitian yang dilakukan beberapa ahli juga menunjukkan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi dengan cara yang kompleks dari faktor hereditas dan faktor lingkungan (Yelon and Weinstein, 1977).

Implikasi teori Konvergensi terhadap pendidikan yakni memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan, namun demikian pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor-faktor hereditas peserta didik: kematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental,dsb. Kiranya teori konvergensi inilah yang cocok kita terapkan dalam praktek pendidikan.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan: 1) definisi perkembangan; 2) Perbedaan perubahan pada diri individu karena kematangan dan belajar; dan 3) buat bagan yang menunjukkan perbandingan teori Nativisme, Empirisme dan Konvergensi mengenai faktor penentu perkembangan individu serta implikasinya terhadap pendidikan.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali pengertian perkembangan. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu mengacu kepada definisi, contoh dan karakteristik/ciri-ciri dari kematangan dan belajar. Adapun untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu memahami esensi teori Nativisme, Empirisme dan Konvergensi mengenai faktor penentu perkembangan individu serta implikasinya terhadap pendidikan.

Rangkuman

Setiap individu dalam perjalanan hidupnya mengalami perkembangan, yaitu proses perubahan yang berlangsung terus menerus sejak terjadinya pembuahan *(conception)* hingga meninggal dunia. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan individu tersebut dapat terjadi karena dua hal, yaitu kematangan *(maturation)* dan belajar *(learning)*.

Perkembangan dan pertumbuhan memang terjadi pada individu, sekalipun keduanya memiliki pengertian yang berbeda, tetapi sesungguhnya sulit bagi kita untuk memisahkan antara keduanya. Berdasarkan riset psikologi, kita dapat memahami adanya lima prinsip perkembangan individu dan delapan arah perkembangan individu. Di samping itu, terdapat tiga teori utama yang berbeda pendapat mengenai faktor-faktor penentu perkembangan individu, yaitu teori Nativisme, Empirisme dan Konvergensi.

Salah satu tokoh teori Nativisme adalah Schopenhauer. Teori Nativisme menyatakan bahwa faktor turunan (heredity) yang dibawa sejak lahir yang diwariskan oleh orang tua atau dasar *(nature)* adalah satu-satunya faktor penentu perkembangan individu. Sebaliknya, teori Empirisme berpendapat bahwa faktor penentu perkembangan individu tiada lain adalah lingkungan/pengalaman atau ajar *(nurture)*. Tokoh teori Empirisme antara lain John Locke dan J.B. Watson. Berbeda dengan kedua teori tadi, William Stern sebagai salah satu tokoh teori Konvergensi berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan (dasar) maupun faktor lingkungan/pengalaman (ajar).

Teori Nativisme memberikan implikasi yang bersifat pesimistis terhadap pendidikan. Pendidikan dipandang tidak akan mampu mengubah atau menentukan perkembangan peserta didik. Sebaliknya, teori Empirisme memberikan implikasi yang begitu optimistis terhadap pendidikan. Pendidikan dipandang punya kuasa untuk dapat menentukan perkembangan peserta didik sesuai apa yang diharapkan. Adapun teori Konvergensi memberikan implikasi yang bersifat moderat. Di satu pihak meyakini bahwa pendidikan berfungsi untuk turut membantu perkembangan peserta didik sesuai apa yang diharapkan. Namun di pihak lain, sekaligus meyakini pula bahwa sejauh mana kemampuan pendidikan dapat turut membantu perkembangan peserta didik akan tergantung pula kepada faktor turunan atau dasar *(nature)* yang dimiliki peserta didik yang bersangkutan.

TES FORMATIF 1

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Perubahan yang terus menerus terjadi pada individu yang berlangsung sejak konsepsi hingga meningal dunia disebut ....
   A. belajar. B. kematangan.
   C. perkembangan. D. kecakapan.

2. Contoh perubahan pada individu yang disebabkan oleh belajar adalah ....
   A. Badru memiliki sikap toleransi dalam kehidupan beragama.
   B. Pada saat remaja mulai tubuh kumis di atas bibir Badru.
   C. Halimah mulai menstruasi pada masa remaja awal.
   D. Pada masa remaja, Halimah mulai tertarik kepada lawan jenisnya.

3 Perubahan-perubahan pada individu sebagai hasil dari pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan biologis disebut ....
   A. belajar *(learning).* B. kematangan *(maturation).*
   C. kecakapan (ability). D. perkembangan *(development).*

4. Pernyataan yang tergolong prinsip perkembangan adalah ....
   A. arah perkembangan individu dapat diramalkan.
   B. individu berkembang secara menyeluruh.
   C. perkembangan bergerak dari absolutisme ke relativisme.
   D. perkembangan individu berlangsung secara bertahap.

5. Sesuai dengan arah perkembangan mental anak, pengajaran bagi anak-anak kelas rendah di madrasah ibtidaiyah hendaknya berkenaan dengan bahan ajar yang ....
   A. dimulai dari yang jauh mengarah ke yang dekat.
   B. dimulai dari yang dekat mengarah ke yang jauh.
   C. dimulai dari yang konkrit mengarah ke yang abstrak.
   D. dimulai dari yang abstrak mengarah ke yang konkrit.

6. Belajar sesuatu mata pelajaran hendaknya dilakukan secara bertahap, hal ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip perkembangan individu, yaitu bahwa ....
   A. arah perkebangan individu dapat diramalkan.
   B. kecepatan perkembanagan individu berbeda-beda.
   C. perkembanagan individu berlangsung secara bertahap.
   D. perkembangan individu berlangsung terus menerus.

7. Dalam praktek pendidikan pada kelas rendah di madrasah ibtidaiyah, pada awalnya kontrol guru dalam rangka penegakkan aturan dan disiplin sangat diperlukan. Ini sesuai dengan arah perkembangan individu, yaitu bahwa perkembangan bergerak dari ....
   A. dominasi dari dalam diri kepada kontrol dari luar diri .
   B. dominasi dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri.
   C. egosentrisme kepada persfektivisme.
   D. absolutisme kepada relativisme.

8. Perkembangan individu hakikatnya akan dipengaruhi oleh faktor bawaan (dasar) dan faktor lingkungan (ajar). Ini adalah konsepsi dari teori ....
   A. Behaviorisme.
   B. Empirisme.
   C. Konvergensi.
   D. Nativisme.

9. Salah seorang tokoh penganut teori Konvergensi adalah ....
   A. John Locke.
   B. J. B. Watson.
   C. Schopenhauer.
   D. William Stern.

10. Pernyataan yang tergolong implikasi teori Empirisme terhadap pendidikan yaitu bahwa ....
   A. Guru tidak akan dapat turut membantu perkembangan peserta didik.
   B. Guru punya kuasa untuk membentuk prestasi peserta didik.
   C. Guru tidak diperlukan karena anak hanya akan berkembang sesuai dasarnya.
   D. Guru diperlukan sebab anak akan berkembang sesuai dasar dan ajar.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda mengenai materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Cukup
< 70%	= Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda teruskan untuk mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnya . **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Tahap dan Tugas Perkembangan Individu Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan

Ada dua pokok bahasan yang akan Anda kaji dalam kegiatan belajar ini. Pertama, tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan individu. Kedua, implikasi tahap dan tugas perkembangan individu terhadap pendidikan. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi pengertian tahap perkembangan, pengertian tugas perkembangan dan deskripsi tugas-tugas perkembangan individu menurut beberapa ahli psikologi. Kajian dalam pokok bahasan kedua meliputi implikasi tugas-tugas perkembangan individu terhadap praktek pendidikan, khususnya praktek pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda akan dapat menjelaskan pengertian tahap perkembangan, tugas perkembangan, serta implikasi tugas-tugas perkembangan individu terhadap praktek pendidikan.

1. Tahap dan Tugas Perkembangan Individu

Sebelum filsuf J.J. Rousseau menghasilkan pemikiran tentang hakikat anak, pada umumnya orang berasumsi bahwa anak adalah miniatur orang dewasa. Sebab itu, anak diperlakukan seperti orang dewasa dan harus berperilaku seperti orang dewasa. Tetapi selanjutnya, asumsi tersebut telah ditinggalkan orang. Sebagaimana Anda maklumi, masa kanak-kanak adalah suatu tahap yang berbeda dengan orang dewasa. Anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap mengenai keadaan fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, mereka mempunyai cara-cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan usianya. Konsep inilah yang oleh para ahli psikologi disebut tahap perkembangan.

Robert Havighurst (1953) membagi perkembangan individu menjadi empat tahap, yaitu:

(1) Masa bayi dan kanak-kanak kecil (0-6 tahun);
(2) Masa kanak-kanak (6-12 tahun);

(3) Masa remaja atau adolesen (12-18 tahun);
(4) Masa dewasa (18 tahun - ....).

Selain mendeskripsikan tahap-tahap perkembangan sebagaimana disajikan di atas, Havighurst juga mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan (developmental task). Adapun yang dimaksud tugas perkembangan yaitu sejumlah tugas yang harus diselesaikan oleh individu yang terdapat pada suatu tahap perkembangannya. Apabila individu berhasil menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, keberhasilan tersebut akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila individu gagal menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, kegagalan tersebut akan mengakibatkan kekecewaan dan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahapan berikutnya.

Menurtut Havighurst tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan setiap individu pada setiap tahap perkembangannya adalah sebagai berikut:

a. Tugas Perkembangan Masa Bayi dan Kanak-kanak Kecil (0-6 Tahun):
    1) Belajar berjalan.
    2) Belajar makan makanan yang padat.
    3) Belajar berbicara/berkata-kata.
    4) Belajar mengontrol pembuangan kotoran tubuh.
    5) Belajar tentang perbedaan kelamin dan kesopanan/kelakuakuan yang sesuai dengan jenis kelaminnya.
    6) Mencapai stabilitas fisiologis/jasmaniah.
    7) Pembentukan konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan kenyataan fisik.
    8) Belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, saudara-saudaranya, dan orang lain.
    9) Belajar membedakan yang benar dan yang salah, dan pengembangan kesadaran diri/kata hati.

b. Tugas Perkembangan Masa masa kanak-kanak (6-12 tahun):
    1) Belajar keterampilan fisik yang perlu untuk permainan sehari-hari.
    2) Pembentukan kesatuan sikap terhadap dirinya sebagai suatu organisme yang tumbuh.
    3) Belajar bermain dengan teman-teman mainnya.
    4) Belajar memahami peranan-peranan kepriaan atau kewanitaan.
    5) Pengembangan kemahiran dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung.
    6) Pengembangan konsep-konsep yang perlu untuk kehidupan sehari-hari.
    7) Pengembangan kesadaran diri, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai.
    8) Pengembangan kebebasan pribadi.

9) Pengembangan sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga.

c. Tugas Perkembangan Masa Remaja atau Adolesen (12-18 Tahun):
   1) Mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin.
   2) Mencapai peranan sosial sebagai laki-laki atau perempuan.
   3) Menerima/menghargai tubuh sendiri dan menggunakannya secara efektif.
   4) Mencapai kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya.
   5) Memperoleh jaminan kebebasan ekonomi.
   6) Memilih dan mempersiapkandiri untuk suatu pekerjaan.
   7) Mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga.
   8) Mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep yang perlu untuk menjadi warga negara yang cakap.
   9) Menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertangung jawab dalam masyarakat.
   10) Menguasai seperangkat nilai dan sistem etik sebagai pedoman bertingkah laku.

d. Tugas Perkembangan pada Masa Dewasa (18- ...).
   1) Tugas Perkembangan pada Masa Dewasa Awal:
      a) Memilih jodoh/pasangan hidup.
      b) Belajar hidup bersama dengan pasangan hidup (suami/isteri).
      c) Memulai suatu keluarga.
      d) Mengasuh anak.
      e) Menyelenggarakan/mengelola rumah tangga.
      f) Memulai meduduki suatu jabatan/pekerjaan.
      g) Menerima tanggung jawab sebagai warga negara.
      h) Mencari suatu perkumpulan sosial yang sesuai.

   2) Tugas Perkembangan pada Masa Dewasa Tengah Umur:
      a) Mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara yang dewasa.
      b) Mencapai dan mempertahankan suatu tingkat kehidupan ekonomi yang layak/mapan.
      c) Membantu nak-anak belasan tahun menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia.
      d) Mengembangkan penggunaan waktu luang orang dewasa.
      e) Menghubungkan diri sendiri kepada suami atau isteri sebagai suatu pribadi.
      f) Menerima dan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan fisiologis karena usia.Menyesuaikan diri pada
      g) Menyesuaikan diri terhadap orang tua yang sangat tua.

3) Tugas Perkembangan pada Masa Usia Lanjut:
   a) Menyesuaikan diri pada kekuatan dan kesehatan jasmani yang makin menurun.
   b) Menyesuaikan diri pada saat pensiun dan pendapatan yang berkurang.
   c) Menyesuaikan diri terhadap kematian suami/isteri (menjanda/menduda).
   d) Membentuk suatu ikatan dengan kelompok seusia.
   e) Memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kewarganegaraan.
   f) Menyusun penyelenggaraan kehidupan jasmaniah yang memuaskan.

Yelon dan Weinstein (1977) sepakat bahwa perkembangan individu berlangsung secara bertahap. Dengan bersumber kepada karya Suterly dan Donnely (1973), Krogman (1972), serta Papalia dan Olds (1975), Yelon dan Weinstein mengemukakan perkembangan jenis-jenis tingkah laku dalam kebudayaan Barat pada umur yang bervariasi. Jenis-jenis perkembangan tingkah laku individu tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan Jenis-jenis Tingkah Laku masa anak kecil (toddler).
   a) Perkembangan Fisik:
      (1) Perkembangan fisik sangat aktif.
      (2) Belajar merangkak, berjalan, berlari, mendaki, makan sendiri, membentu dengan balok-balok, dan menulis cakar ayam.
      (3) Belajar kebiasaan membuang kotoran (learns toilet habits).

   b) Perkembangan Mental:
      (2) Perkembangan bahasa dari menangis kepada pengucapan kalimat lengkap.
      (3) Bermain secara konstan.
      (4) Belajar konsep-konsep, seperti warna, "satu", "banyak", dsb.
      (5) Objek dilihatnya sebagai benda-benda yang bergerak (hidup).

   c) Perkembangan Sosial:
      (1) Menggunakan bahasa untuk menyatakan kontrol dengan menggunakan kata "tidak".
      (2) Menyukai anak-anak lain, tetapi tidak bermain dengan mereka.
      (3) Menyukai berjalan-jalan dekat rumah.

   d) Perkembangan Emosional:
      (1) Memberikan respon/menanggapi terhadap afeksi dan persetujuan.
      (2) Tergantung kepada orang tua.

(3) Berkembang dari mennagis yang tidak beraturan kepada berbagai cara menunjukan emosi yang berbeda-beda.

2). Perkembanagn Jenis Tingkah Laku Masa Pra Sekolah (Presholler).

a) Fisik:

(1) Perkembangan fisik sangat aktif.
(2) Koordinasi pegangan tangan sangat baik, dapat melempar, menangkap, meloncat, menggambar bentuk, dan menulis halus/pelahan.
(3) Dapat belajar keterampilan manual.
(4) Perkembangan otot-otot yang mantap.

b) Mental:

(1) Egosentrik; pemahaman terhadap pandangan dan perasaan orang lain kecil.
(2) Bahasa berkembang dengan baik, mengucapkan kalimat, perbendaharaan kata yang banyak, tertarik kepada ceritera.
(3) Masih sulit berpikir tentang ide-ide abstrak.

c) Sosial:

(1) Menghormati kekuasaan.
(2) Mentaati aturan-aturan.
(3) Pertemanan bersifat sementara.
(4) Bermain dekat rumah, tetapi tidak dengan anak-anak lain.

d) Emosional:

(1) Memberikan respon terhadap afeksi dan persetujuan.
(2) Mulai memusatkan diri kepada tipe-tipe pribadi laki-laki atau perempuan, peranan-peranan berdasarkan gender, dan kecakapan.
(3) Memberikan tanggapan yang baik terhadap kebiasaan.
(4) Berpusat pada diri sendiri.
(5) Mengekspresikan semua perasaan.

3) Perkembangan Jenis Tingkah laku Masa Kanak-Kanak (Childhood).

a) Fisik:

(1) Keterampilan-keterampilan badan cukup baik, otot-otot kuat, dan terkoordinasi.
(2) Turut serta dalam permainan-permainan kelompok.
(3) Perkembangan keseimbangan lebih lanjut, kegesitan, daya tahan, kekuatan tenaga dan keterampilan khusus.

b) Mental:

(1) Egosentris berkurang.

(2) Menggunakan simbol-simbol dan bahasa untuk memecahkan masalah-masalah dan komunikasi.
(3) Rasa ingin tahu, berhasrat untuk belajar.
(4) tertarik kepada arti kata dan lelucon.
(5) Membaca digunakan sebagai alat dan untuk kesenangan.

c) Sosial
(1) Berorientasi kepada kelompok tetapi kehidupan di rumah masih berpengaruh.
(2) Ingin bebas
(3) Memuja pahlawan.
(4) Pemisahan dari jenis kelamin lain.
(5) Kelompok mempengaruhi konsep dirinya.

d) Emosional
(1) Banyak menggunakan waktu untuk membebaskan diri dari rumah.
(2) Menyamakan diri dengan teman sebayanya.
(3) Masih tetap menyenangi persetujuan orang dewasa.
(4) Mudah terharu, sedih.
(5) Pemberani dan sangat percaya pada diri sendiri.

4) Perkembangan Jenis Tingkah Laku Masa Remaja Awal (Early Adolescence)
a) Fisik:
(1) Pertumbuhan dan kesadaran akan tubuhnya cepat.
(2) Kematangan seksual.
(3) Pengembangan kekuatan, keperkasaan, kelenturan, kecepatan, dan ketangkasan.
(4) Pengembangan berbagai keterampilan.
(5) Proporsi tubuh tumbuh dengan kecepatan yang berbeda.

b) Mental:
(1) Telah dapat mulai berpikir abstrak.
(2) Melakukan pengujian-pengujian kebenaran hipotesa dan melakukan pemikiran hipotesis.
(3) Egosentrik, dalam hal ini mereka berpikir bahwa perhatian setiap orang terfokus kepada mereka.

c) Sosial:
(1) Menyesuaikan diri kepada norma-norma kelompok, mencari persetujuan kelompok.
(2) Berteman dekat dengan sebaya dan sejenis.
(3) Membicarakan sek dan percintaan romantic dengan teman karib sejenis.
(4) Menuntut pripacy.

d) Emosional:
(1) Mengusahakan untuk lebih bebas.
(2) Mempertanyakan siapa saya, pribadi macam apakah saya ini.
(3) Terombang-ambing antara kekanak-kanakan dan kedewasaan.
(4) Emosional tidak stabil.

5) Perkembangan Jenis Tingkah Laku Remaja Akhir (Late Adoloscence).
a) Fisik:
(1) Kematangan fisik.
(2) Keterampilan-keterampilan gerak prima.

b) Mental:
(1) Sebagian besar dapat berpikir abstrak.
(2) Egosentrisme hilang.

c) Sosial:
(1) Bebas dari kehidupan rumah.
(2) Menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok.
(3) Berminat kepada lawan jenis kelamin dan mengadakan hubungan antar pribadi.
d) Emosional:
(1) Mapannya identitas diri dalam kedudukannya dalam masyarakat.
(2) Kadang-kadang menolak untuk menyesuaikan diri.

Apabila Yelon dan Weinstein mengemukakan berbagai jenis perilaku pada setiap tahap individu, Jean Piaget secara khusus mengemukakan tahap-tahap perkembangan mental/kognitif individu. Piaget mendeskripsikan tahap-tahap perkembangan mental/ kognitif individu menjadi empat tahapan sebagai berikut:

(1) Tahap Sensorimotor (0 – kurang lebih 2 tahun).
Pada tahap ini tingkah laku anak ditentukan oleh perasaan (senses) dan aktivitas motorik; Kesan (impression) anak tentang dunia dibentuk oleh persepsi mengenai perasaannya dan oleh manipulasi dari lingkungannya. Pembentukan konsep/ide

pada tahapan ini terbatas kepada objek yang bersifat permanen atau objek yang tampak dalam batas pengamatan anak. Perkembangan skema verbal dan kognitif masih sangat sedikit dan tidak terkoordinaikan.

(2) Tahap Operasi Awal/Preoperational (2 – 6 tahun).

Pada tahapan ini anak mulai menggambarkan kejadian-kejadian dan objek-objek melalui simbol-simbol, termasuk simbol-simbol verbal bahasa. Artinya, mereka sudah mulai berpikir tentang benda-benda dengan tidak terikat pada kehadiran benda konkrit. Anak sudah menghubungkan tentang kejadian atau objek yang dihadapinya dengan skema yang sudah ada dalam ingatannya. Tetapi anak relatif masih belum dapat menerima perbedaan persepsi dengan orang lain, kemampuan yang berkembang pada saat ini masih bersifat egosentrik, sehingga cara-cara dan pengetahuan yang ia miliki itulah yang dianggapnya benar, sepertinya tidak ada alternatif cara dan pengetahuan benar yang lainnya. Anak-anak pada tahapan ini juga sudah mulai memecahkan jenis-jenis masalah, tetapi hanya mengenai masalah-masalah mengenai barang-barang yang tampak/kelihatan.

(3) Tahap Operasi Konkrit (7 – 11 tahun).

Pada tahap ini, skema kognitif anak berkembang, terutama berkenaan dengan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Perkembangan keterampilan berpikirnya yaitu berkenaan dengan keterampilan menggolong-golongkan (mengklasifikasi) berdasarkan ciri dan fungsi sesuatu; mengurutkan sesuatu misalnya dari yang terkecil ke yang terbesar; membandingkan benda-benda; memahami konsep konservasi, yaitu kemampuan memahami bahwa sesuatu itu tidak berubah walaupun misalnya sesuatu itu dipindahkan tempatnya, tali yang dilingkarkan panjangnya tidak berubah walaupun ditarik menjadi memanjang, dsb.; memahami identitas, yaitu kemampuan mengenal bahwa suatu objek yang bersifat fisik akan mengambil ruang dan memiliki volume tertentu; dan kemampuan membandingkan pendapat orang.

(4) Tahap Operasi Formal (12 tahun ke atas).

Pada tahap ini anak memiliki kecakapan berpikir simbolik, tidak tergantung kepada keberadaan objek secara fisik. Anak pada tahapan operasi formal mampu berpikir logis, matematis, dan abstrak. Anak bahkan mungkin dapat memahami hal-hal yang secara teortis mungkin terjadi sekalipun ia belum pernah melihat kejadiannya secara nyata.

Coba Anda analisis berdasarkan tahapan perkembangan mental/kognitif Jean Piaget, tergolong kepada tahapan perkembangan mental/kognitif yang manakah para siswa madrasah ibtidaiyah?

Ahli psikologi lain yang mendeskripsikan tahap perkembangan kognitif individu adalah Jerome Bruner. Menurut Bruner (Yelon dan Weinstein, 1977) perkembangan kognitif individu melalui tiga tahapan sebagai berikut:

(1) Tahap Enactive.
Pada tahap ini individu memahami atau menggambarkan realitas melalui apa yang dikerjakannya, melalui respon-respon motoriknya.

(2) Tahap Imageri atau Iconic.
Pada tahap ini individu mulai mampu berpikir atas dasar gambar, demonstrasi, atau hal yang konkrit.

(3) Tahap Symbolic
Pada tahap ini individu berpikir dengan menggunakan simbil-simbol; dapat berpikir tentang benda-benda sekalipun benda-benda tidak ada dihadapannya; dapat menggunakan bahasa untuk merumuskan hipotesis dan berpikir lebih jauh dari informasi yang telah diberikan. Pada tahap ini bahasa digunakan sebagai alat untuk berpikir.

Setelah Anda mengkaji tahap-tahap perkembangan mental/kognitif dari Jean Piaget dan Bruner, selanjutnya mari kita kaji tahapan perkembangan moral individu dari Lawrence Kohlberg. Sebagaimana dikemukakan Yelon dan Weinstein (1977), menurut Kohlberg perkembangan moral individu terdiri atas tiga tingkatan, adapun setiap tingkatan mempunyai dua tahapan. Dengan demikian, perkembangan moral individu keseluruhannya akan melalui enam tahapan sebagai berikut:

(1) Tingkat I: Pramoral atau Prakonvensional.
Pada tingkat ini, "jahat/tidak baik" adalah apa yang mengakibatkan hukuman, dan "baik" adalah apa yang menghasilkan ganjaran atau hadiah.
Tahap 1 : Kepatuhan dan Hukuman.
Pada tahap ini keputusan moral anak didasarkan atas ketakutan kepada orang yang mempunyai otoritas dan untuk menghindari hukuman.
Tahap 2: Instrumental Relatif.
Pada tahap ini (usia 7-8 tahun), sesuatu dipandang "adil" oleh anak apabila orang membalas budi kebaikan yang dilakukannya. Misal: saling memberi, saling menolong, dsb.; aturan permainannya berdasarkan otoritas manusia.

(2) Tingkat II: Konvensional.
Pada tingkat ini anak memiliki sikap loyal terhadap aturan (order) dan harapan masyarakat, keluarga, kelompok sosial dan negara.
Tahap 3: Orientasi Keselarasan Interpersonal.
Pada tahap ini keputusan moral anak didasarkan atas keinginan memenuhi harapan orang lain, anak telah menyadari bahwa orang lain mengharapkan kelakuan tertentu darinya. Ia menyadari adanya kode-kode keluarga dan kebudayaan.
Tahap 4: Otoritas dan Aturan Masyarakat.
Pada tahap ini pertimbangan moral anak tidak lagi didasarkan atas harapan orang yang dihormati (orang yangmemiliki otoritas), akan tetapi didasarkan atas harapan

masyarakat umum. Ini artinya bahwa anak telah menerima otoritas dan aturan-aturan masyarakat dan lembaga-lembaganya termasuk agama. Pada tahapan ini aturan dan hukum dipandang sebagai nilai utama yang dapat mengatur dan memelihara masyarakat. (Umumnya berkembang pada usia akhir anak sekolah menengah).

(3) Tingkat III: Postkonvensional.

Pada tingkat ini seseorang memandang masalah moral dari pandangan yang lebih tinggi lebih dari sekedar norma atau aturan. Masalah moral dipandangnya sebagai sesuatu yang diterimanya secara principal dan individual.

Tahap 5: Orientasi Kontrak Sosial dan Legislatis.

Pada tahap ini seseorang memandang masalah moral dari segi hak dan norma umum yang berlaku bagi individu yang telah diselidikinya secara kritis dan diterima baik oleh masyarakat. Kewajiban moral dipandang sebagai kontrak sosial. Komitmen sosial dan legal dipandang sebagai hasil persetujuan bersama yang harus dipatuhi.

Tahap 6: Orientasi Prinsip-prinsip Etis yang Universal.

Pada tahap ini "keadilan" didefinisikan oleh kata hati sesuai dengan prinsip-prinsip etik yang menjadi pilihannya, yang didasarkan kepada pemikiran logis yang menyeluruh, konsistensi dan universalitas. Jadi pada tahap ini seseorang bertindak atas dasar prinsip-prinsip etis yang universal di luar perjanjian antar manusia.

Tahapan ini merupakan tahapan tertinggi dalam perkembangan moral seseorang.

Demikianlah deskripsi tahap-tahap perkembangan moral individu menurut Lawrence Kohlberg. Coba Anda analisis, berdasarkan tahapan perkembangan moral menurut Lawrence Kohberg, tergolong ke dalam tahapan manakah tahap perkembangan moral siswa madrasah ibtidaiyah? Setelah menjawab tugas latihan tadi, silahkan Anda melanjutkan pada kajian kedua mengenai implikasi tahap dan tugas perkembangan individu terhadap pendidikan.

2. Implikasi Tahap dan Tugas Perkembangan Individu terhadap Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah

Baru saja Anda selesai mengkaji uraian bagian satu tentang tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan individu. Berdasarkan kajian tersebut kiranya dapat Anda pahami, bahwa keberhasilan individu dalam menyelesaikaan tugas-tugas perkembangannya akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila individu gagal menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, kegagalan tersebut akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahapan berikutnya. Implikasi dari hal tersebut, maka dalam konteks ini para guru hendaknya menyadari peranannya untuk

membantu atau memfasilitasi para siswanya agar dapat menyelesaikan berbagai tugas perkembangannya.

Yelon dan Weinstein (1977) mendeskripsikan implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik (orang dewasa) yang diharapkan dalam rangka membantu penyelesaian tugas-tugas perkembangannya sebagai berkut:

a. Perlakuan Pendidik (Orang Dewasa) yang Diharapkan bagi Perkembangan Peserta Didik pada Masa Kanak-Kanak Kecil:
   2) Menyelenggarakan disiplin secara lemah lembut secara konsisten.
   3) Menjaga keselamatan tanpa perlindungan yang berlebihan.
   4) Bercakap-cakap dan memberikan respon terhadap perkataan peserta didik.
   5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dan bereksplorasi.
   6) Mengahargai hal-hal yang dapat dikerjakan peserta dididk.

b. Perlakuan Pendidik (Orang Dewasa) yang Diharapkan bagi Perkembangan Peserta Didik pada Masa Prasekolah:
   1) Memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada peserta didik secara berangsur-angsur dan terus-menerus.
   2) Latihan harus ditekankan pada koordinasi: kecepatan, mengarahkan keseimbangan, dsb.
   3) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta didik.
   4) Menyediakan benda-benda untuk diekplorasi.
   5) Memberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial – dan kerja kelompok kecil.
   6) Menggunakan program aktif, seperti: bernyanyi dengan bergerak, dll.
   7) Memperbanyak aktifitas berbahasa seperti ceritera, mengklasifikasikan, diskusi masalah, dan membuat aturan-aturan.

c. Perlakuan Pendidik (Orang Dewasa) yang Diharapkan bagi Perkembangan Peserta Didik pada Masa Kanak-kanak:
   1) Menerima kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan anak; dan menambah tanggung jawab anak.
   2) Mendorong pertemanan dengan menggunakan projek-projek dan permainan kelompok.
   3) Membangkitkan rasa ingin tahu.
   4) secara konsisten mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami.
   5) Menghadapkan anak pada gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan baru.
   6) Bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran.
   7) Memberikan contoh model hubungan sosial.
   8) Terbuka terhadap kritik.

d. Perlakuan Pendidik (Orang Dewasa) yang Diharapkan bagi Perkembangan Peserta Didik pada Masa Remaja Awal:
   1) Memberikan kesempatan berolahraga secara tim dan perorangan, tetapi tidak mengutamakan tenaga fisik yang besar.
   2) Menerima makin dewasanya peserta didik.
   3) Memberikan tanggung jawab secara berangsung-angsur.
   4) Mendorong kebebasan dan tanggung jawab.

e. Perlakuan Pendidik (Orang Dewasa) yang Diharapkan bagi Perkembangan Peserta Didik pada Masa Remaja Akhir:
   1) Menghargai pandangan-pandangan peserta didik.
   2) Menerima kematangan peserta didik.
   3) Memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk berolahraga dan bekerja secara cermat.
   4) Memberikan kesempatan yang luas untuk pendidikan karir.
   5) Mengggunakan kerjasama kelompok untuk memecahkan masalah.
   6) Berkreasi bersama dan bersama-sama menegakan berbagai aturan.

Mengingat perkembangan siswa madrasah ibtidaiyah berada pada masa kanak-kanak (Childhood), maka perhatian Anda sebagai guru Madrasah ibtidaiyah hendaknya lebih fokus lagi kepada jenis-jenis perlakuan pendidik (orang dewasa) yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak (Childhood), yaitu pada point c sebagaimana di uraikan di atas.

Selanjutnya, berdasarkan kajian mengenai tahap dan tugas perkembangan individu, Anda pun dapat memahami bahwa tahap-tahap perkembangan individu menunjukkan kemampuan dan kesiapan belajarnya. Implikasi dari hal tersebut, maka para guru hendaknya tidak mengembangkan sesuatu kompetensi pada diri siswa sebelum siswa yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kesiapan belajar untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Para guru hendaknya tidak mengajarkan sesuatu materi ajar sebelum siswa yang bersangkutan memiliki kesiapan belajar untuk mempelajari materi ajar tersebut. Sebab itu, pengetahuan tentang perkembangan individu diperlukan oleh guru dalam rangka mengidentifikasi rentang kompetensi atau materi ajar yang sepadan bagi para siswa yang berada pada tahap perkembangan tertentu.

Secara khusus, berikut ini akan dikemukakan implikasi dari setiap aspek perkembangan siswa madrasah ibtidaiyah terhadap pendidikan, yang mendeskripsikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh guru dalam rangka pendidikan agar sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan siswa:

Perkembangakan Fisik. Mengacu kepada tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Yelon dan Weinstein (1977), tahap perkembangan siswa madrasah ibtidaiyah

tergolong pada Masa Kanak-Kanak (Childhood). Perkembangan aspek fisik pada masa ini yaitu: a) Keterampilan-keterampilan badan cukup baik, otot-otot kuat, dan terkoordinasi; b) Turut serta dalam permainan-permainan kelompok; c) Perkembangan keseimbangan lebih lanjut, kegesitan, daya tahan, kekuatan tenaga dan keterampilan khusus.

Implikasi dari perkembangan fisik siswa seperti dijelaskan di atas, maka kegiatan fisik hendaknya betul-betul disadari pentingnya bagi siswa madrasah ibtidaiyah, terutama di kelas-kelas rendah. Selain itu perlu diperhatikan, kegiatan fisik siswa akan turut membantu perkembangan kognitifnya. Ketika anak dihadapkan kepada konsep abstrak, anak perlu perlu melakukan aktivitas fisik untuk membantu mereka menghayati konsep-konsep yang belum dikenalnya itu. Sehubungan dengan itu dalam rangka pembelajarannya, siswa madrasah ibtidaiyah hendaknya dihadapkan pada kegiatan-kegiatan yang aktif secara fisik.

Perkembangan Mental/Kognitif. Berdasarkan tahap perkembangan mental atau kognitif menurut Jean Piaget, perkembangan mental/kognitif siswa madrasah ibtidaiyah berada pada perkembangan dari tahap operasi awal (the preoperational stage) ke tahap operasi konkrit (the concrete operations stage). Apabila kita menggunakan tahap perkembangan kognitif dari Bruner, tahap perkembangan tersebut di atas sebanding dengan tahap perkembangan dari akhir tahap enactive dan tahap iconic/imagery. Pada saat ini siswa madrasah ibtidaiyah skema kognitifnya berkembang, terutama berkenaan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Perkembangan kecakapannya yaitu berkenaan dengan keterampilan menggolong-golongkan (mengklasifikasi) berdasarkan ciri dan fungsi sesuatu; mengurutkan sesuatu misalnya dari yang terkecil ke yang terbesar; membandingkan benda-benda; memahami konsep konservasi; memahami identitas, yaitu kemampuan mengenal bahwa suatu objek yang bersifat fisik akan mengambil ruang dan memiliki volume tertentu; dan kemampuan membandingkan pendapat orang.

Implikasi dari hal di atas, maka pembelajaran bagi siswa madrasah ibtidaiyah hendaknya: membangkitkan rasa ingin tahu siswa, menghadapkan siswa pada gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan baru, memungkinkan siswa melakukan eksplorasi, berpikir, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa. Untuk itu, guru hendaknya memfasilitasi siswa untuk belajar/bekerja dalam kelompok kecil.

Perkembangan Sosial. Menurut tahap-tahap perkembangan seperti dikemukakan Yelon dan Weinstein (1977), perkembangan sosial siswa madrasah ibtidaiyah yakni: berorientasi kepada kelompok tetapi kehidupan rumah masih berpengaruh, ingin bebas, memuja pahlawan, pemisahan dari jenis kelamin, dan bahwa kelompok akan mempengaruhi konsep dirinya.

Implikasi dari perkembangan di atas, maka para guru hendaknya: mendorong

pertemanan dengan menggunakan projek-projek dan permainan kelompok. Selain itu, guru hendaknya memberikan contoh model hubungan sosial yang baik.

Perkembangan Emosional. Perkembangan emosional siswa madrasah ibtidaiyah antara lain: banyak menggunakan waktu untuk membebaskan diri dari rumah, menyamakan diri dengan teman sebayanya namun masih menerima persetujuan dari orang dewasa, mudah terharu, tetapi pemberani dan percaya pada diri sendiri.

Implikasi dari perkembangan di atas, maka guru mestinya menerima kebutuhan-kebutuhan akan kebebasan anak dan menambah tanggung jawab anak. Selain itu, guru hendaknya mengembangkan keberanian dan perasaan percaya diri siswa, juga keterbukaan siswa terhadap kritik.

Perkembangan Moral. Berdasarkan tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral siswa madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar berada pada pergeseran dari akhir tahap 1 (kepatuhan dan hukuman), tahap 2 (Instrumental Relatif) dan menuju tahap 3 (Orientasi Keselarasan Interpersonal).

Implikasi dari tahap perkembangan di atas, maka guru hendaknya bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran, secara konsisten mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami. Namun demikian, pada kelas-kelas rendah, para guru diharapkan mempertimbangkan orientasi kepatuhan dan hukuman pada diri siswa.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan: 1) definisi tugas perkembangan; 2) persamaan tahap perkembangan siswa madrasah ibtidaiyah menurut Piaget dan Bruner. 3) implikasi taahap dan tugas perkembangan kognitif siswa madrasah ibtidaiyah terhadap peranan yang perlu dilakukan guru dalam pendidikan.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali pengertian tugas perkembangan. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu membandingkan perkembangan individu menurut Piaget dan Bruner.Adapun untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu memahami deskripsi tugas perkembangan siswa madrasah ibtidaiyah dan implikasinya terhadap pendidikan.

Rangkuman

Setiap anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap mengenai keadaan fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya. Seraya mereka berkembang, mereka mempunyai cara-cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan usianya. Konsep inilah yang oleh para ahli psikologi disebut tahap perkembangan. Pada setiap tahap perkembangan terdapat seperangkat tugas perkembangan, yaitu sejumlah tugas yang harus diselesaikan oleh individu yang terdapat pada suatu tahap perkembangannya.

Ada berbagai ahli psikologi yang mendeskripsikan berbagai aspek perkembangan secara komprehensif mengenai tahap dan tugas perkembangan individu, antara lain Robert Havighurst, Yelon dan Weinstein. Tahap perkembangan aspek mental/kognitif antara lain dideskripsikan oleh Jean Piaget dan Jerome Bruner. Adapun mengenai tahap perkembangan moral individu dideskripsikan oleh Lawrence Kohlgerg.

Menurut Havighurst perkembangan siswa madrasah ibtidaiyah tergolong pada tahap Masa Kanak-kanak (6-12 tahun). Ini sebanding dengan tahap akhir prasekolah dan Masa Kanak-kanak sebagaimana dideskripsikan Yelon dan Weinstein. Menurut Jean Piaget perkembangan mental/kognitif siswa madrasah ibtidaiyah berada dari tahap operasi awal (the preoperational stage) menuju sampai ke tahap operasi konkrit (the concrete operations stage). Apabila kita menggunakan tahap perkembangan kognitif dari Bruner, tahap perkembangan tersebut sebanding dengan tahap perkembangan dari akhir tahap enactive sampai dengan tahap iconic/imagery. Adapun mengenai perkembangan moralnya, menurut Kohlberg siswa madrasah ibtidaiyah berada pada pergeseran dari akhir tahap 1 (kepatuhan dan hukuman), tahap 2 (Instrumental Relatif) dan menuju tahap 3 (Orientasi Keselarasan Interpersonal).

Tahap dan tugas perkembangan siswa, baik berkenaan aspek fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya memberikan implikasi terhadap pendidikan, yaitu berkenaan dengan peranan guru, isi kurikulum atau berbagai kompetensi yang semestinya dikembangkan pada diri siswa, maupun berkenaan dengan cara pembelajarannya.

Tes Formatif 2

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Seperangkat tugas yang harus diselesaikan individu yang muncul pada setiap tahap perkembanngannya disebut ....
   A. tahap pertumbuhan.
   B. tugas pertumbuhan.
   C. tahap perkembangan.
   D. tugas perkembangan.

2. Menurut Havighurst perkembangan siswa madrasah ibtidaiyah berada pada tahap ....
   A. masa bayi dan kanak-kanak kecil.
   B. masa kanak-kanak.
   C. masa remaja.
   D. masa dewasa.

3. Berikut ini adalah tugas-tugas perkembangan anak usia 6 s.d. 12 tahun (siswa madrasah ibtidaiyah) menurut Havighurst, kecuali ....
   A. belajar berbicara atau berkata-kata.
   B. belajar memahirkan keterampilan membaca, menulis dan berhitung.
   C. belajar bermain dengan teman sepermainan.
   D. belajar memahami peranan-peranan kepriaan dan kewanitaan.

4. Perkembangan kognitif pada tahap iconic menurut Bruner, dalam tahap perkembangan kognitif menurut Piaget sebanding dengan tahap ....
   A. sensori motor.
   B. praoperasional.
   C. operasi konkrit.
   D. operasi formal.

5. Keberhasilan individu dalam menyelesaaikan tugas perkembangannya akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada tahap berikutnya. Implikasinya bahwa dalam konteks ini peranan guru adalah
   A. Menyiapkan sejumlah pengalaman agar siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
   B. Menyusun kurikulum agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
   C. Melaksanakan evaluasi sesuai dengan pembelajaran yang telah diseleng-garakan.
   D. memfasilitasi para siswanya agar dapat menyelesaikan berbagai tugas perkembangannya.

6. Tahap-tahap perkembangan individu menunjukkan kemampuan dan kesiapan belajarnya. Implikasinya maka guru hendaknya ….
   A. mengembangkan kompetensi sesuai dengan tahap perkembangan siswa.
   B. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang dikehendakinya.
   C. selalu mengikuti kemauan siswa dalam menentukan bahan ajar.
   D. memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menentukan bahan ajar.

7. Pada tahapan tertentu siswa madrasah ibtidaiyah telah mampu menyatakan bahwa "kursi dan meja tergolong furniture". Perkembangan kemampuan kognitif ini tergolong contoh keterampilan ….
   A. membandingkan.
   B. mengurutkan.
   C. mengklasifikasikan.
   D. membedakan.

8. Agar sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan aspek kognitif siswa, guru madrasah ibtidaiyah hendaknya memfasilitasi siswa agar ….
   A. memungkinkan perkembangan rasa percaya dirinya.
   B. memungkinkan siswa mampu berinteraksi sosial.
   C. memungkinkan siswa mampu mengekspresikan perasaannya.
   D. memungkinkan untuk bereksplorasi dan berpikir .

9. Implikasi dari perkembangan sosial anak usia 6-12 tahun terhadap pendidikan adalah bahwa guru hendaknya ….
   A. mengembangkan rasa percaya diri pada diri siswa.
   B. mendorong pertemanan dan permainan kelompok.
   C. mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami.
   D. membangkitkan rasa ingin tahu pada diri siswa.

10. Implikasi tahap dan tugas perkembangan moral anak usia 6-12 tahun (siswa madrasah ibtidaiyah) terhadap pendidikan adalah ….
   A. guru hendaknya bersama-sama siswa menciptakan aturan dan kejujuran.
   B. guru sebaiknya memfasilitasi siswa untuk belajar secara berkelompok.
   C. guru seharusnya berupaya memberikan kebebasan bermain kepada siswa.
   D. guru perlu membimbing siswa dalam rangka memecahkan masalah.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda mengenai materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda teruskan untuk mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus ! Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini. terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Teori Belajar dan Implikasinya Terhadap Pendidikan

Salah satu peranan pendidik dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didiknya. Demi pelaksanaan perananya itu pendidik (guru) perlu memahami bagaimana anak belajar, adapun hal ini berkenaan dengan teori belajar. Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji tentang teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan, adapun hal tersebut meliputi tiga permasalahan pokok. Permasalahan pokok pertama meliputi teori belajar menurut aliran Behaviorisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Permasalahan pokok kedua berkenaan dengan teori belajar menurut aliran Kognitif dan implikasinya terhadap pendidikan. Sedangkan permasalahan pokok ketiga berkenaan dengan teori belajar menurut aliran Humanisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan mempelajari kegiatan belajar ini, maka Anda akan memperoleh pemahaman tentang teori belajar menurut aliran Behaviorisme, Kognitivisme dan Humanisme serta implikasinya terhadap berbagai aspek pendidikan.

1. Teori Belajar Behaviorisme

Tokoh teori belajar Behaviorisme antara lain B. F. Skinner. Teori belajar Behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa: (1) hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi; (2) tingkah laku dan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dimodifikasi oleh kondisi-kondisi lingkungan; (3) komponen teori behavioral ini adalah stimulus, respon dan konsekuensi; (4) faktor penentu yang penting sebagai kondisi lingkungan dalam belajar adalah *reiforcement.*

Kaum behavioris menjelaskan belajar sebagai suatu sistem respons tingkah laku terhadap rangsangan fisik. Mereka mengutamakan akibat atau konsekuensi dari suatu penguatan *(reinforcement)*, praktek atau latihan, dan motivasi eksternal. Guru yang menganut teori ini, biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Selanjutnya bagian-bagian itu disusun secara hierarki, dari yang sederhana

sampai yang kompleks. Peserta didik dipandang sebagai makhluk yang pasif, yang membutuhkan motivasi dari luar dan dipengaruhi oleh *reinforcement.* Sebab itu mereka mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan baik dan menentukan bagaimana siswa seharusnya dimotivasi, dan dievaluasi.Kemajuan belajar siswa diukur dengan hasil yang dapat diamati.

Secara rinci, implikasi konsep-konsep teori belajar Behaviorisme terhadap pendidikan adalah sebagaimana dirangkumkan oleh Yelon dan Weinstein (1977) berikut ini:

a) Individualisasi: perlakuan individual didasarkan kepada tugas, ganjaran dan disiplin.
b) Motivasi: motivasi belajar bersifat ekstrinsik melalui pembiasaan secara terus-menerus atau melalui *reinforcement.*
c) Metodologi: metode belajar dijabarkan secara rinci untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tertentu, dan menggunakan teknologi.
d) Tujuan kurikuler: berpusat pada pengetahuan dan keterampilan akademis serta tingkah laku sosial.
e) Bentuk pengelolaan kelas: pengelolaan kelas berpusat pada guru, hubungan-hubungan sosial hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan yang hendak dicapai.
f) Usaha mengefektifkan mengajar: yaitu dengan cara menyusun program secara rinci dan bertingkat serta mengutamakan penguasaan bahan atau keterampilan,
g) Partisipasi: peserta didik mungkin pasif.
h) Kegiatan belajar peserta didik: pemahiran keterampilan melalui pembiasaan setahap demi setahap secara rinci.
i) Tujuan umum: kemampuan mengerjakan sesuatu (kompetensi).

2. Teori Belajar Kognitif

Tokoh teori belajar Kognitif adalah Jerome Bruner dan Jean Piaget. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa: (1) individu mempunyai kemampuan memproses informasi. (2) kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. (3) belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi; (4) hasil belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif; (3) cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai tahap perkembangannya. Berkenaan dengan ini, coba Anda ingat-ingat kembali teori tahap-tahap perkembanagan kognitif dari Jean Piaget dan Jerome Bruner yang telah Anda pelajari pada kegiatan belajar 2 BBM ini.

Menurut Piaget bahwa setiap makhluk hidup perlu beradaptasi dan mengorganisasi lingkungan fisik di sekitarnya agar tetap hidup. Bagi piaget pikiran dan tubuh juga

terkena aturan main yang sama. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa perkembangan pemikiran juga mirip dengan perkembangan biologis, yaitu beradaptasi dengan dan mengorganisasi lingkungannya. Menurut Piaget (1971) bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya adalah teori adaptasi pikiran ke dalam suatu realitas, seperti organisme beradaptasi ke dalam lingkungan.

Sebagaimana dijelaskan Paul Suparno (1997), Piaget berpendapat bahwa pikiran manusia mempunyai struktur yang disebut *skema* atau *skemata.* Skema adalah suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skemata itu akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan mental anak. Orang dewasa mempunyai banyaak skema. Skema ini digunakan untuk memproses dan mengidentifikasi rangsangan yang datang. Anak yang baru lahir memiliki sedikit skema, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi lebih umum, lebih terperinci dan lebih lengkap.

Adaptasi intelektual manusia dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui *asimilasi* dan *akomodasi*. Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru ke dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus.

Apabila seseorang tidak dapat mengasimilasikan rangsangan atau pengalaman yang baru karena sama sekali tidak cocok dengan skema yang ada dalam pikirannya, maka orang itu akan melakukan akomodasi, yaitu: (1) membentuk skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan atau pengalaman baru itu, atau (2) memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan atau pengalaman baru itu. Skema adalah hasil suatu konstruksi, sebab itu skema bukan tiruan dari kenyataan dunia yang ada.

Dalam perkembangan kognitif seseorang diperlukan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Proses atau keadaan itu disebut *equilibrium* , yaitu pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. Apabila asimilasi dan akomodasi tidak seimbang, keadaan itu disebut *disequilibrium*. Sedangkan proses dari disequilibrium ke equilibrium disebut *equilibration.* Equilibration terus berlangsung pada diri seseorang melalui asimilasi dan akomodasi. Equilibration membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya (skemata). Bila terjadi ketidakseimbangan maka seseorang dipacu untuk mencari keseimbangan dengan jalan asimilasi dan akomodasi.

Menurut Piaget, skema berkembang sejalan dengan tahap-tahap perkembangan mental/kognitif individu. Jadi secara konseptual bahwa perkembangan kognitif berjalan dalam semua tahap perkembangan pemikiran seseorang sejak lahir sampai dewasa.

Pengetahuan dibentuk oleh iondividu secara terus menerus. Demikianlah bahwa Piaget tergolong ahli psikologi kognitif yang menganut filsafat konstruktivisme.

Implikasi konsep-konsep teori belajar Kognitif terhadap pendidikan adalah sebagaimana dirangkumkan oleh Yelon dan Weinstein (1977) sebagai berikut:

a) Individualisasi: perlakuan individu didasarkan pada tingkat perkembangan kognitif peserta didik.
b) Motivasi: bersifat intrinsik yang timbul berdasarkan pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik.
c) Metodologi: menggunakan kurikulum dan metode-metode yang berfungsi mengembangkan keterampilan dasar berpikir.
d) Tujuan Kurikuler: difokuskan untuk mengembangkan keseluruhan kemampuan sensori motor, bahasa, kognitif, adapun interaksi sosial merupakan cara/alat untuk mengembangkan intelegensi.
e) Bentuk pengelolaan kelas: berpusat pada peserta didik; guru hendaknya berperan untukmembimbing siswa dalam belajar, bereksplorasi dan discovery.
f) Usaha mengefektifkan mengajar: dengan cara mengutamakan program program pendidikan berupa pengetahuan-pengetahuan yang terpadu, adapun konsep-konsep dan keterampilan harus disusun secara hierarkhis.
g) Partisipasi peserta didik: peserta didik dituntut berpartisipasi aktif untuk mengembangkan kognitif, peserta didik belajar dengan bekerja.
h) Kegiatan belajar peserta didik: mengutamakan belajar melalui tilikan (insight learning) dan pemahaman.
i) Tujuan umum: mengembangkan kemampuan atau fungsi-fungsi kognitif secara optimal dan kemampuan menggunakan kecerdasan secara bijaksana.

3. Teori Belajar Humanisme.

Tokoh teori belajar Humanisme antara lain Carl Rogers. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa: (1) individu adalah pribadi utuh, ia mempunyai kebebasan memilih untuk menentukan kehidupannya; (2) individu mempunyai hasrat untuk mengetahui *(curiosity)*, hasrat untuk bereksplorasi, dan mengasimilasi pengalaman-pengalamannya; (3) belajar adalah fungsi seluruh kepribadian individu; (4) belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh kepribadian individu (jika relevan dengan kebutuhan individu, dan melibatkan aspek intelektual dan emosional individu).

Implikasi konsep-konsep teori belajar Humanisme terhadap pendidikan adalah sebagaimana dirangkumkan oleh Yelon dan Weinstein (1977) sebagai berikut:

a) Individualisasi: perlakuan terhadap individua didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan individual dan kepribadian peserta didik.
b) Motivasi: bersifat intrinsik yaitu berdasarkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan

individual peserta didik.

c) Metodologi: menggunakan metode/pendekatan proyek yang terapadu, menekankan pada studi-studi sosial atau mempelajari kehidupan sosial.
d) Tujuan Kurikuler: mengutamakan pada pengembangan sosial, keterampilan berkomunikasi, kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan kelompok dan individu.
e) Bentuk pengelolaan kelas: berpusat pada peserta didik, peserta didik bebas memilih sedangkan guru/pendidik berperan untuk membantu dan bukan untuk mengarahkan.
f) Usaha mengefektifkan mengajar : pengajaran disusun dalam bentuk topik- topik yang terpadu berdasarkan kebutuhan peserta didik secara perorangan.
h) Partisipasi peserta didik: mengutamakan partisipasi aktif peserta didik.
i) Kegiatan belajar peserta didik: Mengutamakan belajar melalui pemahaman dan pengertian, bukan hanya memperoleh pengetahuan.
j) Tujuan umum: mencapai kesempurnaan diri dan pemahaman.

Dalam rangka praktek pendidikan, kita hendaknya tidak mengadopsi hanya salah satu aliran teori belajar di atas. Berbagai konsep dari ketiga teori belajar tersebut hendaknya dipandang sebagai alternatif yang dapat dipilih, dan dapat saling melengkapi. Sehubungan dengan itu, kita hendaknya bijaksana dalam memilih, mengadopsi dan mengaplikasikan konsep-konsep yang tepat. Adapun yang perlu kita jadikan titik tolak/ acuan dalam memilih, menerima dan mengaplikasikannya antara lain pandangan kita tentang hakikat peserta didik, tujuan pendidikan yang hendak dicapai, karakteristik peserta didik, serta situasi dan kondisi atau konteks yang dihadapi.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan: 1) Konsep belajar menurut Behaviorisme; 2) Implikasi teori belajar Behaviorisme terhadap pengelolaan kelas. 3) Syarat belajar yang akan bermakna bagi siswa menurut teori Humanisme; 4) Implikasi teori belajar Humanisme terhadap upaya mengefektifkan pembelajaran; 5) Konsep belajar menurut teori Kognitif; 6) Implikasi teori belajar Kognitif terhadap tujuan umum pendidikan.

Petunjuk Jawaban Latihan

- Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) dan 2) Anda perlu mengingat kembali konsep belajar dan implikasi teori belajar Behaviorisme terhadap pendidikan.
- Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) dan 4) Anda perlu mengingat kembali konsep belajar dan implikasi teori belajar Humanisme terhadap pendidikan.

- Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 5) dan 6) Anda perlu mengingat kembali konsep belajar dan implikasi teori belajar Kognitif terhadap pendidikan.

Rangkuman

Terdapat tiga aliran teori belajar yang pokok yang berimplikasi terhadap pendidikan, yaitu teori belajar Behaviorisme, teori belajar Kognitif dan teori belajar Humanisme.

Tokoh teori belajar Behaviorisme antara lain B. F. Skinner. Kaum behavioris menjelaskan belajar sebagai suatu sistem respons tingkah laku terhadap rangsangan fisik. Teori belajar Behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa: (1) hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi; (2) tingkah laku dan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dimodifikasi oleh kondisi-kondisi lingkungan; (3) komponen teori behavioral ini adalah stimulus, respon dan konsekuensi; (4) faktor penentu yang penting sebagai kondisi lingkungan dalam belajar adalah *reiforcement.* Teori belajar ini memberikan implikasi tertentu terhadap pendidikan, yakni berkenaan dengan individualisasi, tujuan pendidikan, kurikulum, memotivasi belajar, metodologi, dan usaha mengefektifkan mengajar.

Tokoh teori belajar Kognitif adalah Jerome Bruner dan Jean Piaget. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa: (1) individu mempunyai kemampuan memproses informasi. (2) kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. (3) belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi; (4) hasil belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif; (3) cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai tahap perkembangannya. Teori belajar ini memberikan implikasi tertentu terhadap pendidikan, yakni berkenaan dengan individualisasi, tujuan pendidikan, kurikulum, memotivasi belajar, metodologi, dan usaha mengefektifkan mengajar.

Tokoh teori belajar Humanisme antara lain Carl Rogers. Teorinya didasarkan pada asumsi bahwa: (1) individu adalah pribadi utuh, ia mempunyai kebebasan memilih untuk menentukan kehidupannya; (2) individu mempunyai hasrat untuk mengetahui *(curiosity),* hasrat untuk bereksplorasi, dan mengasimilasi pengalaman-pengalamannya; (3) belajar adalah fungsi seluruh kepribadian individu; (4) belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh kepribadian individu (jika relevan dengan kebutuhan individu, dan melibatkan aspek intelektual dan emosional individu). Teori belajar ini memberikan implikasi tertentu terhadap pendidikan, yakni berkenaan dengan individualisasi, tujuan pendidikan, kurikulum, memotivasi belajar, metodologi, dan usaha mengefektifkan mengajar.

Tes Formatif 3

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Penganut teori belajar Behaviorisme memandang belajar sebagai ....
   A. suatu sistem respon tingkah laku terhadap rangsangan fisik.
   B. suatu proses proses internal berupa pemrosesan informasi .
   C. fungsi seluruh kepribadian individu.
   D. suatu kegiatan mengembangkan daya-daya individu.

2. Contoh *reinforcement* atau penguatan positif yang mungkin diberikan oleh guru kepada siswa agar perbuatannya diulang kembali adalah ....
   A. memberikan beban tugas belajar tambahan.
   B. memberikan tindakan berupa hukuman .
   C. memberikan ganjaran berupa pujian.
   D. membiarkan atau tidak menghiraukan perbuatan siswa

3. Belajar akan bermakna bagi siswa apabila melibatkan seluruh aspek kepribadian siswa. Ini adalah prinsip teori belajar ....
   A. Behaviorisme. B. Daya.
   C. Kognitif.. D. Humanaisme

4. Belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Ini adalah konsep belajar menurut aliran ....
   A. Behaviorisme. B. Daya.
   C. Kognitif. D. Humanisme.

5. Dalam teori belajar Jean Piaget, suatu proses kognitif dalam menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru ke dalam skema yang telah ada disebut ....
   A. asimilasi. B. akomodasi.
   C. equilibrium. D. disequilibrium.

6. Apabila kita mengacu kepada teori Humanisme, maka pengelolaan kelas akan ....
   A. berpusat kepada guru. B. berpusat kepada siswa.
   C. berpusat pada bahan ajar. D. berpusat pada tujuan.

7. Implikasi dari teori belajar humanisme, bahwa materi ajar hendaknya ....
   A. ditetapkan sesuai dengan kehendak guru.
   B. disusun secara hierarki dari yang kompleks ke yang sederhana.
   C. dirancang dan dipelajari siswa secara parsial.
   D. dirancang dan dipelajari siswa secara terpadu.

8. Implikasi dari teori belajar Kognitif, bahwa motivasi belajar bersumber dari ....
   A. diri siswa melalui pengetahuan yang telah dimilikinya.
   B. diri siswa sesuai dengan kebutuhannya.
   C. luar diri siswa berupa tugas dan ganjaran.
   D. luar diri siswaa berupa tugas dan hukuman.

9. Mengembangkan kemampuan mengerjakan sesuatu merupakan implikasi pendidikan yang paling baik dari teori ....
   A. Behaviorisme. B. Gestalt.
   C. Kognitif. . D. Humanisme.

10. Metode/pendekatan proyek yang terapadu dan studi-studi sosial atau mempelajari kehidupan social terutama akan digunakan oleh guru penganut teori belajar ....
   A. Behaviorisme. B. Gestalt.
   C. Kognitif. . D. Humanisme.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda mengenai materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda teruskan untuk mempelajari modul selanjutnya. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN

Tes Formatif 1: 1. C. 2. A. 3. B. 4. A. 5. C. 6. C. 7. B. 8. C. 9. D. 10. B.
Tes Formatif 2 : 1. D. 2. B. 3. A. 4. C. 5. D. 6. A. 7. C. 8. D. 9. B. 10. A.
Tes Formatif 3 : 1. A. 2. C. 3. D. 4. C. 5. A. 6. B. 7. D. 8. A. 9. A. 10. D.

LANDASAN SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS PENDIDIKAN

MODUL 4

LANDASAN SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS PENDIDIKAN

Pendahuluan

Suatu lembaga pendidikan dan program pendidikannya akan mencerminkan kehidupan dan kebudayaan masyarakatnya, keadaan-keadaan sosial-budaya tak akan terpisahkan darinya. Landasan sosiologis dan antropologis pendidikan antara lain membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaannya, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan pendidikan dan kebudayaannya serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Sebab itu Kajian tentang landasan sosiologis dan antropologis ini dipandang penting bagi para pendidik, khususnya bagi para guru.

Modul ini akan membantu Anda untuk memahami konsep pendidikan sebagai proses sosialisasi dan enkulturasi, serta hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaannya. Dengan mempelajari modul ini pada akhirnya Anda akan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip sosiologis dan antropologis sebagai asumsi pendidikan. Semua ini akan mengembangkan wawasan kependidikan Anda dan akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan lebih lanjut.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memahami pendidikan sebagai sosialisasi dan enkulturasi serta hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaannya. Adapun secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian individu, masyarakat dan kebudayaan.
2. Menjelaskan pendidikan sebagai sosialisasi dan enkulturasi.
3. Mengidentifikasi tujuan diselenggarakannya sosialisasi dan enkulturasi (pendidikan) oleh masyarakat.
4. Menjelaskan pengertian pendidikan sebagai pranata sosial.
5. Mengidentifikasi hubungan pendidikan dengan masyarakat.
6. Mengidentifikasi hubungan pendidikan dengan kebudayaan.
7. Mengidentifikasi fungsi pendidikan dalam masyarakat dan kebudayaannya.
8. Mendeskripsikan jenis-jenis lingkungan pendidikan.
9. Mengidentifikasi jenis-jenis pola kegiatan sosial pendidikan dan implikasinya terhadap pendidikan.
10. Mengidentifikasi jenis-jenis sikap guru kepada siswa serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru.

Keseluruhan modul ini dibagi menjadi tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 berkenaan dengan pendidikan, sosialisasi dan enkulturasi. Kegiatan belajar 2 berkenaan dengan pendidikan, masyarakat dan kebudayaannya. Kegiatan belajar 3 berkenaan dengan lingkungan –lingkungan pendidikan.

Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut ini:

1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam modul ini.
2. Baca materi modul dengan seksama, tambahkan catatan pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan, dll. sesuai pemikiran yang muncul. Dalam menjelaskan suatu konsep atau asas, seringkali digunakan istilah dan diberikan contoh, pahami hal tersebut sesuai konteks pembahasannya.
3. Terdapat keterkaitan antara materi sub pokok bahasan kesatu (kegiatan pembelajaran satu) dengan materi sub pokok bahasan kedua (kegiatan pembelajaran kedua) dst. Materi pada kegiatan pembelajaran kesatu berimplikasi terhadap materi kegiatan pembelajaran kedua dst. Karena itu untuk menguasai keseluruhan materi modul ini mesti dimulai dengan memahami secara berurutan materi modul pada setiap sub pokok bahasan yang disajikan pada kegiatan pembelajaran satu s.d. kegiatan pembelajaran tiga secara berurutan.
4. Cermati dan kerjakan latihan/tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan latihan/tugas tersebut, gunakan pengetahuan yang telah Anda kuasai sebelumnya. Pengetahuan dan penghayatan berkenaan dengan pengalaman hidup Anda sehari-hari akan dapat membantu penyelesaian tugas.
5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan kunci jawaban untuk menentukan penilaian benar /tidaknya jawaban Anda.
6. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan tutorial elektronik, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Pendidikan: Sosialisasi dan Enkulturasi

Ada dua pokok bahasan yang akan Anda kaji dalam kegiatan belajar ini, yaitu: (1) individu, masyarakat dan kebudayaan; (2) Pendidikan sebagai sosialisasi dan enkulturasi. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi definisi tentang individu, masyarakat dan kebudayaan; struktur sosial, status dan peranan individu; serta tindakan sosial, konformitas dan kontrol sosial. Sedangkan pokok bahasan kedua meliputi definisi sosialisasi dan enkulturasi, sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidikan, serta sosialisasi dan enkulturasi sebagai upaya mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian individu, masyarakat, kebudayaan; pendidikan sebagai sosialisasi dan enkulturasi; serta tujuan diselenggarakannya sosialisasi dan enkulturasi (pendidikan) oleh masyarakat.

1. Individu, Masyarakat, dan Kebudayaan

Pada modul 1 kegiatan belajar 2 tentang "Manusia sebagai Makhluk yang Perlu Dididik dan Dapat Dididik" Anda telah mempelajari tentang hakikat manusia. Salah satu konsep yang Anda kaji dalam kegiatan belajar tersebut yaitu konsep individualitas yang menjelaskan hakikat manusia sebagai individu. Masih ingatkah Anda apa yang dimaksud dengan individu? Silahkan rumuskan kembali definisinya! Ya bagus, **individu** adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri (otonom). Selanjutnya, silahkan Anda kaji pengertian masyarakat berikut ini. **Masyarakat** didefinisikan oleh Ralph Linton sebagai "setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas". Sejalan dengan definsi dari Ralph Linton, Selo Sumardjan mendefinisikan masyarakat sebagai "orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan *kebudayaan*" (Soerjono Soekanto, 1986). Dari dua definisi masyarakat

tadi, kiranya Anda dapat mengidentifikasi adanya empat unsur yang mesti terdapat di dalam masyarakat, yaitu:

1) Manusia (individu-individu) yang hidup bersama,
2) Mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama.
3) Mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan.
4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya.

Manusia hidup bermasyarakat dan menghasilkan kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? **Kebudayaan** yaitu "keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar" (Koentjaraningrat, 1985). Terdapat tiga jenis wujud dari kebudayaan, ketiga wujud kebudayaan tersebut adalah:

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dsb.
2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Antara individu, masyarakat dan kebudayaannya tak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana Anda maklumi bahwa setiap individu hidup bermasyarakat dan berbudaya, adapun masyarakat itu sendiri terbentuk dari individu-individu. Masyarakat dan kebudayaan mempengaruhi individu, sebaliknya masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi pula oleh individu-individu yang membangunnya.

Struktur Sosial, Status, dan Peranan. Di dalam masyarakat terdapat *struktur sosial***,** Komblum mendefinisikannya sebagai *"the recurring patterns of behavior that create relationships among individuals and groups within a society"* **-** yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial tersebut setiap individu mempunyai *kedudukan (status)* dan *peranan (role)* tertentu. Status adalah kedudukan seseorang di dalam suatu struktur sosial. Misal, di dalam struktur organisasi madrasah seseorang mungkin berkedudukan sebagai kepala madrasah, sebagai guru, sebagai siswa, dsb. Adapun menurut Ralph Linton status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban (*a collection of rights and duties)* seseorang sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan peranan adalah berbagai hal yang harus dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Peranan pada dasarnya merupakan aspek dinamis dari suatu status. Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya. Status dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) status yang diperoleh sejak

lahir atau diberikan kepada individu *(ascribed status),* (2) status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan *(achieved status)* (Kamanto Sunarto, 1993). Contoh *ascribed status* antara lain: status sebagai anak, status sebagai laki-laki, perempuan, dsb. Sedangkan contoh *achieved status* antara lain: juara kelas, sarjana pendidikan, guru madrasah ibtidaiyah, dsb.

Interaksi Sosial, Tindakan Sosial, Konformitas, Penyimpangan Tingkah Laku/ Sosial, dan Kontrol Sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan-tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial**,** adapun dalam interaksi sosial tersebut mereka melakukan berbagai *tindakan sosial***,** yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta *konformitas* dan *homogenitas.* Konformitas yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat, sedangkan homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma dan perilaku individu-individu di dalam masyarakatnya.

Apabila dalam berinteraksi sosial tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu tidak sesuai dengan sistem nilai dan norma atau kebudayaan masyarakatnya, maka individu yang bersangkutan akan dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan social *(deviant behavior* atau *social deviant).* Terhadap pelaku penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial tersebut masyarakat akan mengucilkannya, bahkan melakukan *pengendalian sosial (social control),* yaitu apa yang didefinisikan Peter L. Berger sebagai "berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang" (Kamanto Sunarto, 1993).

2. Sosialisasi dan Enkulturasi sebagai Pendidikan

Upaya Mempertahankan Kelangsungan Eksistensi Masyarakat dan Kebudayaan. Seperti telah dijelaskan di muka, salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial antara lain mengimplikasikan reproduksi sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Dengan memiliki keturunan berarti masyarakat memiliki generasi muda yang akan menjadi generasi penerus dari generasi sebelumnya. Sehubungan dengan keturunan atau generasi mudaya, dengan tujuan khususnya agar tetap tercipta *konformitas* dan *homogenitas* di dalam masyarakat, dan umumnya untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat serta kebudayaannya, maka terhadap generasi mudanya masyarakat melakukan apa yang di dalam sosiologi disebut *sosialisasi (socialization),* atau apa yang di dalam antropologi disebut *enkulturasi (enculturation).*

Sebagaimana Anda maklumi, manusia berbeda dengan khewan yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri yang diperoleh sejak kelahirannya. Saat kelahirannya, anak manusia dalam keadaan tak berdaya, karena naluri yang dibawa ketika kelahirannya relatif tidak lengkap. Anak manusia yang baru lahir, sekalipun ia telah mempunyai *ascribed status* (sebagai anak), namun ia belum tahu status dan peranannya itu. Ia juga belum tahu dan belum mampu melaksanakan berbagai status dan peranan lainnya di dalam masyarakat yang harus diraihnya *(achieved status)*. Demikian pula mengenai kebudayaan masyarakatnya. Ia belum memiliki sistem nilai, norma, pengetahuan, adat kebiasaan, serta belum mengetahui dan belum dapat menggunakan dengan tepat berbagai benda sebagai hasil karya masyarakatnya. Anak manusia harus belajar dalam waktu yang relatif lebih panjang untuk mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai statusnya dan sesuai kebudayaan masyarakatnya. Berbagai peranan harus dipelajari oleh anak (individu anggota masyarakat) melalui proses *sosialisasi*; adapun mengenai kebudayaan perlu dipelajarinya melalui *enkulturasi.* Jika anak tidak mengalami sosialisasi dan/atau enkulturasi, maka ia tidak akan dapat berinteraksi sosial, ia tidak akan dapat melakukan tindakan sosial sesuai status dan peranannya serta kebudayaan masyarakatnya. Contohnya adalah perilaku anak-anak yang hidup dengan binatang sebagaimana dikemukakan Anne Rollet yang telah Anda kaji dalam modul 1 kegiatan belajar 2.

Sosialisasi dan Enkulturasi. Ditinjau dari sudut masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu - khususnya generasi muda - ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Adapun jika ditinjau dari sudut individu, dalam proses sosialisasi dan enkulturasi setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kebudayaan masyarakatnya, sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya.

Menurut Peter L. Berger "*sosialisasi* adalah suatu proses dimana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat" (Kamanto Sunarto, 1993). Yang dipelajari individu melalui sosialisasi ini adalah peranan-peranan. Dalam proses sosialisasi individu belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankannya serta peranan-peranan yang harus dijalankan orang lain. Melalui penguasaan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat ini individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan *enkulturasi* adalah suatu proses dimana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Herkovits menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai anggota kelompok (Imran Manan,1989).

Dalam uraian di atas Anda melihat bahwa definisi sosialisasi yang digunakan dalam sosiologi tampak memiliki arti yang berbeda dengan definisi dan makna enkulturasi yang

digunakan dalam antropologi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun dalam kehidupan yang riil, sesunguhnya di dalam sosialisasi itu *inherent* (melekat) juga kebudayaan. Sebab, kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu di dalam proses sosialisasi sebenarnya terjadi juga proses *enkulturasi* (pembudayaan), yang mana "di dalam enkulturasi ini seorang individu mempeIajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaanya" (Koentjaraningrat, 1985). Demikian pula sebaliknya, bahwa di dalam enkulturasi sesungguhnya terjadi juga proses sosialisasi.

Pendidikan. Sebagaimana telah diuraikan pada Modul 1 Kegiatan Belajar 3, pendidikan diupayakan antara lain agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sebab itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan *sosialisasi*, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan *enkulturasi*. Karena di dalam proses sosialisasi hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi, dalam konteks ini maka pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan: 1) empat unsur yang mesti terdapat di dalam masyarakat; 2) definisi sosialisasi; 3) definisi enkulturasi; dan 4) tujuan diselenggarakannya sosialisasi dan enkulturasi (pendidikan) oleh masyarakat.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengacu kepada pengertian/definisi masyarakat dari Ralph Linton dan Selo Sumardjan. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) dan nomor 3) Anda dapat mengacu kepada pengertian "pemasyarakatan" dan "pembudayaan"; adapun untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 4) Anda dapat mengacu kepada kepentingan terciptanya konformitas, homogenitas serta kelangsungan masyarakat dan kebudayaannya.

Rangkuman

Setiap individu hidup di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Antara individu, masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya tak dapat dipisahkan dan terdapat hubungan

pengaruh-mempengaruhi.

Di dalam masyarakat terdapat *struktur sosial*. Dalam struktur sosial tersebut setiap individu mempunyai kedudukan *(status)* dan peranan *(role)* tertentu. Status dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) *ascribed status,* dan (2) *achieved status.* Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya jika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan atau untuk mencapai tujuan-tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial*.* Dalam interaksi sosial tersebut mereka melakukan berbagai *tindakan sosial*. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya agar tercipta *konformitas* dan *homogenitas.* Terhadap pelaku penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial masyarakat akan melakukan *pengendalian sosial (social controll)*.

Dengan tujuan agar tetap tercipta *konformitas* dan *homogenitas* di dalam masyarakat, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya, maka terhadap generasi mudanya masyarakat melakukan *sosialisasi (socialization)* dan/atau *enkulturasi (enculturation).*

Apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan *sosialisasi*, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan *enkulturasi*. Dalam kehidupan yang riil antara sosialisasi dan enkulturasi akan sulit untuk dapat dipisahkan, sebab di dalam proses sosialisasi hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, sebaliknya, bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Sehubungan dengan itu, maka hendaknya dipahami bahwa pendidikan hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi.

Tes Formatif 1

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan menjadi milik individu melalui ....
   A. dorongan instingtif. B. diturunkan secara genetik.
   C. perilaku bersifat alamiah. D. upaya belajar.

2. "Memiki perbedaan, unik dan otonom dalam mengambil keputusan", ini merupakan karakteristik dari .....
   A. individu B. masyarakat.
   C. kebudayaan. D. status.

3. Berikut ini tiga unsur pokok yang ada dalam masyarakat, ***kecuali*** ....
   A. individu-individu yang hidup bersama.
   B. berinterraksi social dalam waktu cukup lama.
   C. menghasilkan kebudayaan.
   D.tidak adanya kesadaran kebersamaan.

4. Tindakan sosial setiap individu hendaknya sesuai dengan nilai, norma dan harapan masyarakatnya agar di dalam masyarakat tercipta ....
   A. homogenitas/konformitas. B. kebudayaan/kultur.
   C. kontrol sosial. D. struktur sosial.

5. Suatu kedudukan yang berisi sekumpulan hak dan kewajiban disebut ....
   A. budaya. B. peranan.
   C. perilaku. D. status.

6. Ditinjau dari Antropologi, pendidikan dapat pula dipandang sebagai ....
   A. akulturasi. B. adaptasi.
   C. enkulturasi. D. civilisasi.

7. Perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu, disebut ....
   A. interaksi sosial. B. peranan sosial.
   C. status sosial. D. Tindakan sosial.

8. Apabila perilaku individu tidak sesuai dengan sistem nilai, norma dan harapan masyarakatnya, maka individu itu disebut melakukan ....
   A. pengendalian sosial.
   B. penyimpangan sosial.
   C. status sosial.
   D. struktur sosial.

9. Suatu proses di mana anak belajar berbagai peranan agar ia menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakatnya disebut ....
   A. adaptasi.
   B. interaksi.
   C. transaksi.
   D. sosialisasi.

10. Berikut ini adalah tujuan masyarakat menyelenggarakan sosialisasi dan/atau enkulturasi, ***kecuali*** ....
   A. agar tercipta konformitas dan homogenitas.
   B. agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial.
   C. untuk mempertahankan keberadaan masyarakat.
   D. untuk mempertahankan kelangsungan kebudayaan.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda mengenai materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Cukup
< 70%	= Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda teruskan untuk mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnya . **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Pendidikan, Masyarakat dan Kebudayan

Ada tiga pokok bahasan yang akan Anda kaji dalam kegiatan belajar ini, yaitu: (1) Pendidikan sebagai pranata sosial; (2) Pendidikan dan masyarakat, (3) Pendidikan dan kebudayaan. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi definisi pranata sosial, jenis-jenis pranata sosial, dan pranata pendidikan sebagai pranata sosial. Kajian dalam pokok bahasan kedua meliputi hubungan antara pendidikan dan ekonomi, hubungan pendidikan dan mobilitas sosial, hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial, serta implikasinya terhadap peranan guru. Adapun kajian dalam pokok bahasan ketiga meliputi enkulturasi dalam rangka transmisi dan perubahan kebudayaan; pandangan Superorganik, Konseptualis, dan Realis tentang kebudayaan dan implikasinya terhadap pandangan tentang pendidikan; serta fungsi pendidikan dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian pendidikan sebagai pranata sosial, hubungan pendidikan dengan masyarakat, serta hubungan dan fungsi pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya.

1. Pendidikan sebagai Pranata Sosial

Pranata Sosial. Theodorson G. A. mendefinisikan pranata sosial *(social institution)* sebagai *"an interrelated system of social roles and norms organized about the satisfaction of an important social need or function"*. Panata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi disekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting (Sudarja Adiwikarta,1988). Komblum menggunakan istilah institusi untuk menjelaskan pranata sosial, ia mendefinisikannya sebagai "suatu struktur status dan peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anggota masyarakat" (Kamanto Sunarto, 1993). Adapun Koentjaraningrat (1984), dalam definisinya tentang pranata secara tersurat menyebutkan juga peralatan-peralatan dan manusia-manusia yang melaksanakan peranan-peranan itu. Redaksi berbagai definisi pranata sebagaimana disajikan di atas memang berbeda-beda, namun demikian pada dasarnya mengandung pengertian yang relatif sama. Esensinya dapat Anda pahami

bahwa pranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola; aktivitas yang khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau manusia yang mempunyai status dan peran masing-masing yang saling berhubungan atau mempunyai struktur; mengacu kepada sistem ide, nilai dan norma atau tata kelakuan tertentu; dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan; dan aktifitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Pendek kata, *pranata sosial adalah* perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya *(basic needs).*

Jenis Pranata Sosial. Setiap anggota masyarakat (individu) dan masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan akan metabolisme, reproduksi, keamanan, kesehatan, dsb. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini akan dipenuhi dalam bentuk respons budaya penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, pendidikan, dsb. Respons-respons ini akan memiliki kesamaan polanya dalam suatu masyarakat tertentu. Pola respons yang terstandar itu disebut *pranata sosial.*. Terdapat berbagai pranata sosial, antara lain: pranata ekonomi, pranata politik, pranata agama, pranata pendidikan, dsb.

Pranata pendidikan. Pranata pendidikan adalah salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan/atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Melalui pranata pendidikan sosialisasi dan/atau enkulturasi diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaanya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, dan/atau perpindahan.

Sebagai pranata sosial, pranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan *bersifat terbuka*. Sebab itu, pranata pendidikan mengambil masukan (input) dari masyarakat dan memberikan keluarannya (out put) kepada masyarakat. Contoh: Para pendidik dan peserta didik dalam suatu pranata pendidikan masukkannya berasal dari penduduk masyarakat itu sendiri; Tujuan pendidikan dirumuskan berdasarkan masukan dari sistem nilai, harapan dan cita-cita masyarakat yang bersangkutan; dsb. Sebaliknya, masyarakat menyediakan atau memberikan sumber-sumber input bagi pranata pendidikan dan menerima out put dari pranata pendidikan. Contoh: di dalam masyarakat terdapat penduduk, sistem nilai, sistem pengetahuan, dsb., hal ini merupakan sumber input yang disediakan masyarakat bagi pranata pendidikan. Tetapi masyarakat pun (misalnya suatu perusahaan) menerima lulusan dari pranata pendidikan (sekolah atau perguruan tinggi) untuk diangkat sebagai pegawai atau karyawan), dsb.

Seperti Anda Maklumi, selain pranata pendidikan, di dalam masyarakat terdapat pula pranata-pranata lainnya, seperti pranata ekonomi, pranata politik, dst. Berkenaan dengan ini perlu Anda pahami bahwa "terdapat hubungan antara pranata pendidikan dengan pranata-pranata lainnya yang ada di dalam masyarakat, bahkan juga terdapat

hubungan saling mempengauhi antara pranata pendidikan dengan masyarakat secara keseluruhan sebagai supra sistem yang melingkupinya".

2. Pendidikan dan Masyarakat

a. Hubungan Pendidikan dan Ekonomi.

Explosion of Education. Dalam perspektif sejarah diketahui bahwa pendidikan pada awalnya diselenggarakan secara informal di dalam keluarga dan diselenggarakan secara nonformal di dalam masyarakat. Adapun selanjutnya, pendidikan juga diselenggarakan secara formal di sekolah. Bahkan sebagaimana Anda maklumi, belakangan ini dunia pendidikan mengalami perkembangan yang pesat luar biasa. Perkembangan tersebut antara lain berkenaan dengan jumlah lembaga pendidikannya (baik jumlah lembaga pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan dasar, lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi); peningkatan jenjang pendidikan untuk suatu jabatan atau profesi tertentu (misal: dulu untuk menjadi guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah cukup lulusan dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atau Pendidikan Guru Agama (PGA) yang sederajat dengan pendidikan menengah atas, lalu ditingkatkan menjadi Diploma 2, dan sekarang harus Strata 1); adanya peningkatan aspirasi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, dsb. Terhadap perkembangan seperti itu Olive Banks menamakannya sebagai *"explosion of education"* atau ledakan pendidikan (Sudarja Adiwikarta, 1988).

Di samping terjadinya perkembangan dalam dunia pendidikan yang begitu pesat seperti dideskripsikan di atas, belakangan terjadi pula perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi antara lain ditandai dengan diaplikasikannya teknologi yang semakin canggih di bidang industri, terbukanya lapangan kerja baru yang membutuhkan keahlian dan manajemen tertentu, dsb. Sehubungan dengan kedaan di atas, muncul pertanyaan: apakah terdapat hubungan antara keadaan pendidikan dengan keadaan ekonomi suatu masyarakat ?

Hubungan Pendidikan dan Kehidupan Ekonomi. Berkenaan dengan permasalahan sebagaimana dipertanyakan di atas, berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, Sudarja Adiwikarta (1988) menyimpulkan adanya hubungan yang ajeg dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi, yaitu bahwa pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Menyimak pernyataan di atas, dapat Anda simpulkan adanya hubungan timbal balik antara pertumbuhan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, tidak diketahui dengan jelas faktor mana yang muncul lebih dahulu yang menjadi penyebab bagi faktor yang lainnya, apakah pertumbuhan pendidikan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan pendidikan.

Dengan mengutif penjelasan dari Parelius (1978) dan Knowles (1982), Sudarja Adiwikarta (1988) mengemukakan bahwa dalam sosiologi, konsep hubungan antara pendidikan dan kehidupan ekonomi seperti telah diuraikan di atas, mendapat dukungan dari para penganut teori konsensus dan teori konflik. Kedua penganut teori tersebut memiliki kesamaan pandangan bahwa fungsi utama institusi atau pranata pendidikan dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi adalah mempersiapkan para pemuda untuk mengisi lapangan kerja produktif. Adapun dalam hal pendidikan bagi orang dewasa, tujuan yang hendak dicapai tentu bukan lagi mempersiapkan kemampuan, melainkan meningkatkannya agar peserta didik dapat mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat itu. Sebab itu, mereka (peserta didik) mendapatkan pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Proses tersebut terjadi pada semua masyarakat, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling maju.

Untuk lebih memperjelas konsepsi di atas, Anda sebaiknya mengkaji bagan tentang peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi di bawaah ini.

BAGAN
PERAN PELAKSANA PENDIDIKAN
PADA MASYARAKAT TRADISIONAL DAN MODERN
DALAM HUBUNGAN DENGAN KEHIDUPAN EKONOMI

LINGKUNGAN PENDIDIKAN	**EKONOMI TRADISIONAL**	**EKONOMI MODERN**
KELUARGA	Memegang peranan utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa.Untuk itu keluarga memberikan pendidikan mental, nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan ekonomi.	• Melakukan pengasuhan dasar. • Pada usia tertentu menyerahkan pendidikan kepada sekolah. • Mendorong, membantu, mengawasi anak dalam belajar menurut sistem persekolahan.

SEKOLAH	• Mempersiapkan golongan elite dengan kemampuan dasar (baca, tulis hitung). • Melakukan fungsi selektif. • Melakukan fungsi alokatif.	• Menyiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan. • Melaksanakan fungsi selektif. • Melaksanakan fungsi alokatif.
MASYARAKAT	• Menyediakan model untuk ditiru. • Menyelenggarakan latihan magang. • Menyelenggarakan upacara inisiasi.	• Menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisisr. • Menyediakan media komunikasi. • Menyediakan arena kompetisi.

Bagan dimodifikasi dari Bagan III.1 (Sudarja Adiwikarta, 1988:46-47).

b. Hubungan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial. Anda pasti setuju bahwa diantara manusia hakikatnya terdapat persamaan *(equality).* Anda pun sering mendengar berbagai pernyataan mengenai persamaan diantara sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, kenyataan juga menunjukkan bahwa di manapun di dalam suatu masyarakat selalu terdapat ketidaksamaan *(inequality)* status atau kedudukan anggota masyarakat. Ketidaksamaan status ini mungkin dalam hal jabatan pekerjaan, jenis pekerjaan, kekayaan, prestise, tingkat pendidikan, dsb. Pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya disebut stratifikasi sosial *(social stratification)*.

Kelas-kelas dalam Stratifikasi Sosial. Ada berbagai jenis metode yang digunakan para ahli sosiologi dalam menentukan stratifikasi social, antara lain (1) metode objektif, (2) metode subjektif, dan (3) metode reputasi (S. Nasution, 1983). Melalui metode objektif, stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan kriteria objektif yang antara lain berkenaan dengan jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dsb. Melalui metode subjektif stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan pandangan anggota masyarakat sendiri dalam menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakatnya. Sedangkan melalui metode reputasi stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Dalam hal ini anggota masyarakat diberi kesempatan untuk

menentukan golongan-golongan sosial yang terdapat dalam masyarakatnya, selanjutnya mereka diminta untuk mengidentifikasi anggota masing-masing golongan. Dalam menentukan stratifikasi sosial dengan menggunakan metode reputasi, W. Lloyd Warner menemukan enam kelas atau golongan, yaitu kelas atau golongan:*"upper-upper, lower-upper, upper-midle, lower-midle, upper-lower, lower-lower"* (golongan / kelas: atas-atas, atas bawah, menengah atas, menengah bawah, bawah atas, dan bawah bawah).

Stratifikasi sosial Tertutup dan Terbuka. Dalam sosiologi dikenal pembedaan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Menurut J. MiltonYinger suatu stratifikasi disebut tertutup manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Adapun suatu stratifikasi disebut terbuka apabila setiap anggota masyarakat memiliki peluang untuk menduduki status yang berbeda dengan orang tuanya, mungkin lebih tinggi atau lebih rendah (Kamanto Sunarto, 1993).

Mobilitas Sosial. Di dalam sistem stratifikasi sosial, setiap orang mempunyai statusnya masing-masing, setiap orang akan menduduki golongan atau kelasnya masing-masing. Namun demikian, sebagaimana telah Anda pahami bahwa di dalam stratifikasi sosial terbuka, setiap orang memiliki peluang untuk naik atau bahkan mungkin turun statusnya/kelas/golongannya. Inilah yang disebut mobilitas sosial. Contoh: Anak seorang pedagang kaki lima (PKL) yang telah menjadi sarjana tehnik dan mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih besar dari penghasilan orang tuanya, akan menduduki golongan yang lebih tinggi daripada golongan yang diduduki orang tuanya di dalam stratifikasi sosialnya. Mobilitas sosial akan terus berlangsung, terbuka peluang bagi seseorang untuk naik status/golongan dalam tangga sosialnya. Sebaliknya, mereka yang lahir dalam status/golongan atas yang kurang memiliki motivasi dan usaha yang keras untuk memperoleh pengetahuan, sikap, mental, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk profesi tertentu, maka ia akan dengan sendirinya akan turun status/golongan dalam tangga sosialnya.

Stratifikasi sosial dan mobilitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat, telah menarik perhatian para sosiolog, mereka mempertanyakan hal tersebut dalam hubungannya dengan pendidikan. Adakah hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial ? Demikian halnya, mereka mempertanyakan tentang hubungan antara pendidikan dengan stratifikasi sosial.

Hubungan Pendidikan dan Mobilitas Sosial. Dari uraian di atas Anda telah memahami bahwa dalam masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka terdapat kesempatan bagi warganya untuk naik dalam tangga sosialnya, demikian pula di situ terbuka kemungkinan bagi warganya untuk turun dalam tangga sosialnya. Sosiolog bernama Ralph Turner mengakui adanya *mobilitas sosial vertikal* seperti itu. Menurut Turner, dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka, pendidikan dipandang sebagai suatu sarana mobilitas sosial yang penting. Turner melihat pendidikan sebagai

pemegang fungsi mobilitas sosial (Sudarja Adiwikarta, 1988). Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang makin besar harapan untuk naik status dalam tangga sosialnya. Sehubungan dengan ini S. Nasution (1983) juga menyatakan bahwa "Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. …. Pendidikan merupakan jalan bagi *mobilitas sosial*".

Hubungan Pendidikan dan Stratifikasi Sosial. Banyak tokoh pendidikan yang menaruh kepercayaan akan fungsi pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang sehingga dapat naik status/golongan dalam tangga sosialnya. Implikasinya, muncul gagasan dan program perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dengan gagasan dan program tersebut diharapkan dapat dicairkannya batas-batas antar status/kelas/golongan dalam tangga sosial yang ada. Diharapkan bahwa kesempatan belajar yang sama memerikan peluang bagi setiap anak untuk mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakannya. Program wajib belajar atau pendidikan universal memberikan kompetensi yang sama bagi setiap orang dari semua status/golongan. Dengan demikian, perbedaan sosial akan dapat dikurangi, sekalipun mungkin tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Permasalahannya, apakah dengan pendidikan tersebut stratifikasi sosial dapat dihilangkan?

Melalui pembahasan tentang sosialisasi dan enkulturasi dalam kegiatan belajar 1 Anda telah memahami konsep *konformitas* dan *homogenitas* bukan? Dalam konteks ini, masyarakat memerlukan terciptanya homogenitas tertentu, jika tidak ada homogenitas masyarakat tidak akan ada. Sebab itu, dalam arti sebagai sosialisasi dan/atau enkulturasi, pendidikan diselenggarakan masyarakat agar tercipta homogenitas tersebut. Sebaliknya dalam konteks permasalahan sebagaimana dikemukakan pada alinea di atas (dalam konteks stratifikasi sosial), masyarakat justru memerlukan terciptanya *heterogenitas* tertentu. Jika heterogenitas ini tidak ada, maka masyarakat pun tidak akan ada. Karena itu, menurut sosiolog bernama Emile Durkheim, pendidikan bukan hanya memegang peranan dalam *proses sosialisasi* untuk terciptanya *homogenitas*, melainkan juga memegang peranan dalam *proses seleksi* untuk terciptanya *heterogenitas*. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda kaji uraian selanjutnya di bawah ini.

Sebagaimana dikemukakan Sudarja Adiwikarta (1988), Emile Durkheim berpendapat bahwa makin maju suatu masyarakat maka akan terdapat pembagian kerja *(division of labor)* yang menuntut *spesialisasi* untuk bidang pekerjaan tersebut. Spesialisasi mengandung arti *seleksi*, karena spesialisasi menempatkan orang-orang pada posisi tertentu sesuai dengan bakat, minat, kompetensi dan kesempatan yang tersedia di dalam masyarakat. Proses ini juga berarti *alokasi* dan *distribusi* sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Orang mendapat penghargaan, termasuk imbalam materi, sesuai dengan peran yang dimainkannya di dalam masyarakat. Seleksi berarti alokasi dan distribusi sumber kemakmuran, karena setiap bidang spesialisasi mendapat

imbalan yang berbeda. Lebih jauh lagi, peristiwa-peristiwa tersebut dapat melahirkan stratifikasi sosial. Bagaimana mungkin proses seleksi, alokasi dan distribusi itu terjadi? Hal ini dapat terjadi adalah melalui pendidikan. Earl Hopper mendukung teori tersebut. Menurut Hooper Seleksi dilakukan di berbagai tahapan, dan itu dimulai di lembaga pendidikan. Ketika memasuki sekolah anak-anak mengalami seleksi yang ketat melalui tes masuk. Kemudian ia harus memilih jurusan atau program studi, adapun diterima atau tidaknya di jurusan atau program studi yang dipilih, kriterianya ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum pendidikan di berbagai jenjang dan prodi atau jurusan diproyeksikan untuk suatu lapangan pekerjaan tertentu, ada yang jabatannya tinggi ada yang menengah atau rendah, demikian pula gajinya. Melalui lembaga pendidikan ini anggota masyarakat diseleksi dan mendapatkan pengetahuan, sikap, mental dan keterampilan tertentu. Sehingga dengan demikian, ketika memasuki lapangan kerja – yang juga melalui seleksi - mereka akan menempati lapangan kerja tertentu sesuai dengan pendidikannya. Seperti Anda ketahui, bahwa setelah memasuki lapangan kerja pun, seseorang akan mungkin mendapatkan pelatihan atau pendidikan lanjutan. Ada lapangan kerja yang potensial untuk mendapatkan pendapatan yang baik atau kurang baik, dan ada lapangan kerja yang tertutup atau terbuka untuk mendapatkan kemajuan melalui pendidikan lebih lanjut baik yang diselenggarakan oleh lembaga atau perusahaan tempat seseorang bekerja atau pun melalui pendidikan di lembaga lain. Hopper melihat pendidikan sebagai sarana seleksi dalam pelaksanaan peran-peran sosial yang sebagaimana dikemukakan Durkhein dapat melahirkan stratifikasi sosial.

Menyimak uraian di atas, kesimpulan apa yang dapat Anda rumuskan? Ya, jadi pendidikan selain memiliki fungsi sosialisasi demi terciptanya homogenitas, juga memiliki fungsi seleksi demi terciptanya heterogenisasi yang berimplikasi bagi lahirnya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tidak akan hilang karena pendidikan, sebaliknya pendidikan akan melahirkan atau melestarikan adanya stratifikasi sosial.

Implikasi bagi Peranan Guru. Pendidikan dipandang tidak akan dapat menghapuskan stratifikasi sosial, bahkan sebaliknya akan dapat melestarikan adanya stratifikasi sosial. Sekalipun demikian, konsep hubungan antara pendidikan dan mobilitas sosial memberikan harapan bagi setiap orang untuk dapat naik status/golongan di dalam tangga sosialnya. Hal ini mesti dipahami dan diperhatikan betul oleh para guru, sebab konsep ini akan dapat dijadikan acuan oleh para guru untuk memberikan dorongan atau motivasi bagi para siswanya agar mereka belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi dan belajar sampai jenjang pendidikan tertinggi. Guru hendaknya dapat memberikan contoh atau teladan mengenai kasus-kasus mobilitas sosial tersebut. Dalam konteks ini, alangkah sangat tidak diharapkan apabila guru memandang rendah para siswanya yang berasal dari golongan rendah, dan apabila guru tidak yakin dengan kemampuan para siswanya tersebut. Sikap guru seperti ini jelas akan kontra produktif, akan menghalangi untuk terjadinya mobilitas sosial. Sebab itu, para guru hendaknya menyadari betul

bahwa pendidikan – khususnya sekolah - memiliki fungsi mobilitas sosial.

3. Pendidikan dan Kebudayaan.

Enkulturasi, Transmisi Kebudayaan dan Perubahan Kebudayaan. Kebudayaan adalah ciptaan manusia dan syarat bagi kehidupan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan dan karena kebudayaannya manusia menjadi makhluk yang berbudaya. Coba Anda perhatikan bayi yang baru lahir ke dunia, ia dalam keadaan penuh ketergantungan kepada orang lain, khususnya kepada orang tuanya, ia belum dapat mengendalikan emosinya, belum tahu nilai dan norma, belum mampu membayangkan masa depannya, dst. Namun demikian, karena ia hidup dalam lingkungan yang berbudaya, melalui pendidikan (enkulturasi) pada akhirnya ia menjadi orang dewasa yang mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan budayanya yang begitu kompleks.

Sebagaimana telah Anda pahami melalui kegiatan belajar 1, menurut sudut pandang antropologi, bahwa yang memungkinkan hal di atas terjadi adalah *enkulturasi*. Dengan mengacu kepada pernyataan Melville J. Herkovits, Imran Manan (1989:34) mengemukakan bahwa: "Enkulturasi seorang individu selama tahun-tahun awal dari kehidupannya adalah mekanisme pokok yang membuat sebuah kebudayaan stabil, sementara proses yang berjalan pada anggota masyarakat yang lebih tua sangat penting dalam mendorong perubahan". Jadi selama masa kanak-kanak dan masa mudanya, enkulturasi menstabilkan budaya, karena enkulturasi mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sosial yang diterima menjadi kepribadian anak yang makin matang. Dalam hal ini enkulturasi berarti transmisi kebudayaan. Namun demikian, di kala dewasa, enkulturasi sering mendorong perubahan. Hal ini terjadi karena banyak bentuk-bentuk perilaku baru yang diperlukan orang dewasa, bahkan tidak hanya bagi dirinya saja tetapi juga bagi kebudayaan itu sendiri.

Pandangan tentang Kebudayaan dan Pendidikan. Ada tiga pandangan tentang kebudayaan yang berimplikasi terhadap konsep pendidikan. Ketiga pandangan tersebut yakni: 1) Pandangan Superorganik, 2) Pandangan Konseptualis, dan 3) Pandangan Realis (Imran Manan, 1989).

Pandangan Superorganik. Apabila melalui uraian di atas Anda telah memahami bahwa kebudayaan adalah ciptaan manusia, sebaliknya menurut pandangan Superorganik, bahwa kebudayaan merupakan sebuah kenyataan yang berada di atas dan di luar individu-individu yang menjadi pendukung kebudayaan, dan realita tersebut mempunyai hukum-hukumnya sendiri. Jadi kebudayaan itu merupakan realita superorganis. Leslie White salah seorang pendukung pandangan Superorganik mengemukakan bahwa: "Perilaku manusia semata-mata merupakan respons organisme terhadap rangsangan budaya. Karena itu, tingkah laku manusia ditentukan oleh kebudayaan. Apa yang dicari orang dan bagaimana ia mencarinya ditentukan oleh kebudayaan. Ini merupakan pandangan

“determinisme budaya” di mana manusia dipandang sebagai instrumen, melalui manusia kebudayaan mengungkapkan dirinya sendiri.

Sebagaimana dikemukakan Kneller (Imran Manan, 1989), implikasi pandangana Superorganik tentang kebudayaan terhadap pendidikan adalah bahwa pendidikan dipandang sebagai suatu proses yang digunakan suatu masyarakat untuk mengendalikan dan membentuk individu-idividu sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai dasar suatu kebudayaan. Pendidikan - informal,formal maupun nonformal - merupakan proses yang meletakkan generasi baru di bawah pengendalian sebuah sistem budaya. Pandangan superorganik juga menekankan keharusan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk menjamin bahwa para guru benar-benar menanamkan gagasan-gagasan, sikap-sikap dan keterampilan-keterampilan yang mendukung kelanjutan kebudayaan. Ini berarti bahwa pendidikan bersifat sentralistik, selain itu pendidikan hanya berfungsi untuk pewarisan atau transisi kebudayaan.

Pandangan Konseptualis. Sebaliknya dari pandangan Superorganik, menurut pandangan Konseptualis kebudayaan tidak memiliki realita yang bersifat ontologis, kebudayaan bukan suatu realita superorganis diatas dan di luar individu. Melainkan, kebudayaan adalah sebuah “logical construct” yang diabstraksikan dari tingkah laku manusia. Kebudayaan adalah sebuah konsep yang dibangun dari keseragaman-keseragaman yang dapat diamati dalam urutan tingkah laku dengan menggunakan sebuah proses abstraksi logis.

Implikasi pandangan Konseptualis tentang kebudayaan terhadap pendidikan adalah bahwa dalam pendidikan generasi baru harus mempelajari warisan budayanya sesuai dengan perhatiannya dan mengembangkan gambaran mereka sendiri mengenai kebudayaannya secara objektif. Sebab itu, menurut pandangan Konseptualis pendidikan dipandang dapat menjadi alat perubahan budaya dalam arti menciptakan iklim opini yang merangsang pemikiran dan penerimaan pemikiran inovatif.

Pandangan Realis. Menurut pandangan Realis, kebudayaan merupakan sebuah konsep dan realita empiris. Sebagaimana dikemukakan David Bidney (Imran Manan, 1989), kebudayaan merupakan “warisan budaya” yaitu abstraksi atau generalisasi dari “perilaku” nyata anggota-anggota masyarakat. Hal ini berarti kebudayaan merupakan sebuah konsep (abstraksi) dan juga sebuah realita (tingkah laku).

Implikasi pandangan Realis tentang kebudayaan terhadap pendidikan: Pengikut pandangan Realis meyakini bahwa anak manusia memiliki daya penyesuaian terhadap realita yang mengelilinginya, baik terhadap yang bersifat fisik maupun sosial-budaya. Untuk mengembangkan daya penyesuaian tersebut mereka harus diberi berbagai pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan yang disediakan oleh kebudayaan mereka. Mereka menginginkan system pendidikan yang berfungsi untuk melatih generasi muda mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan secara objektif perubahan sosial

budaya yang sesuai dengan nilai-nilai dasar budayanya.

Fungsi Pendidikan dalam Masyarakat dan Kebudayaannya. Uraian di atas memberikan pemahaman kepada Anda tentang adanya perbedaan paham mengenai kebudayaan dan implikasinya terhadap pendidikan. Ini berkenaan dengan apakah fungsi pendidikan dalam suatu masyarakat hanya untuk menanamkan warisan budaya atau mempengaruhi perkembangan kebudayaan? Selain itu juga berkenaan dengan apakah anak didik harus mempelajari warisan budaya sebagaimana diajarkan pendidiknya, ataukah anak didik harus mengeksplorasi atas inisiatif sendiri, menciptakan gambarnya sendiri tentang warisan kebudayaan? Lepas dari perbedaan pendapat tersebut, dari uraian di atas juga Anda kiranya dapat memperoleh pelajaran bahwa pada dasarnya terdapat dua fungsi pokok pendidikan dalam hubungannya dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya. Kedua fungsi yang dimaksud adalah:

1) Fungsi konservasi.

Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan/mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan/atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masayarakat.

2) Fungsi Inovasi/kreasi/transformasi

Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya.

Kedua fungsi pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu fungsi konservasi dan fungsi inovasi pendidikan bagi masyarakat dan kebudayaannya dapat kita pahami dan riil terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana Anda maklumi, di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai, pengetahuan, dan kelakuan-kelakuan berpola yang masih relevan dan dipandang baik yang harus tetap dilestarikan. Sebaliknya, terdapat pula nilai-nilai, pengetahuan dan kelakuan berpola yang sudah dipandang tidak relevan lagi dan tidak bernilai yang perlu diubah atau diperbaharui. Adapun untuk melestarikan dan melakukan pembaharuan atau perubahan tersebut masyarakat perlu melakukannya melalui pendidikan, atau melalui apa yang di dalam antropologi disebut enkulturasi.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda rumuskan: 1) definisi pranata sosial; 2) definisi pranata pendidikan; 3) jenis hubungan antara pendidikan dengan kehidupan ekonomi, 4) implikasi pandangan konseptualis terrhadap konsep pendidikan, 5) dua fungsi utama pendidikan dalam hubungan dengan masyarakat dan kebudayaannya.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali pengertian pranata sosial. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu mengacu kepada definisi pranata sosial dan keperluan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mengantarkana generasi mudanya agar dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu memperhatikan pengaruh timbal balik antara factor ekonomi dan pendidikan. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 4) Anda perlu mengingat kembali tiga pandangan tentang kebudayaan dan pendidikan. Adapun untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 5) Anda dapat mengacu kepada kenyataan riil tentang adanya pelestarian dan perubahan kebudayaan di dalam masyarakat.

Rangkuman

Pranata Pendidikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, masyarakat memiliki pranata sosial. Ada berbagai jenis pranata sosial, salah satunya yakni pranata pendidikan. Pranata pendidikan adalah salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan/atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya.

Pranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan *bersifat terbuka*. Sebab itu, pranata pendidikan mengambil masukan (input) dari masyarakat dan memberikan keluarannya (out put) kepada masyarakat. Selain pranata pendidikan, di dalam masyarakat terdapat pula pranata-pranata lainnya, seperti pranata ekonomi, pranata politik, dst. Terdapat hubungan antara pranata pendidikan dengan pranata-pranata lainnya yang ada di dalam masyarakat, bahkan terdapat hubungan saling mempengauhi antara pranata pendidikan dengan masyarakat secara keseluruhan sebagai supra sistem yang melingkupinya.

Pendidikan dan Masyarakat. Dalam bidang pendidikan telah terjadi perkembangan yang begitu pesat *(explosion of education)*, sejalan dengan itu terjadi pula perkembangan di bidang ekonomi. Diketahui bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pertumbuhan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, tidak diketahui dengan jelas faktor mana yang muncul lebih dahulu yang menjadi penyebab bagi faktor yang lainnya. Penganut teori Konsensus dan teori Konflik memiliki kesamaan pandangan bahwa fungsi utama pranata pendidikan dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi adalah mempersiapkan para pemuda untuk mengisi lapangan kerja produktif. Adapun pendidikan bagi orang dewasa bertujuan meningkatkannya agar mereka mampu

menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Sebab itu, melalui pranata sosial yang ada di dalam masyarakatnya (keluaga, sekolah, dan masyarakat) mereka (peserta didik) mendapatkan pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat khususnya dalam kehidupan ekonomi. Proses tersebut terjadi pada semua masyarakat, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling maju.

Di mana pun, di dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial *(social stratification)*, yaitu pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Ada dua jenis stratifikasi sosial, yaitu stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Di dalam stratifikasi sosial terbuka terdapat mobilitas sosial. Menurut Turner, dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka, pendidikan dipandang sebagai suatu sarana mobilitas sosial yang penting. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang makin besar harapan untuk naik status dalam tangga sosialnya.

Pendidikan selain memiliki fungsi sosialisasi demi terciptanya homogenitas, juga memiliki fungsi seleksi demi terciptanya heterogenisasi yang berimplikasi bagi lahirnya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tidak akan hilang karena pendidikan, sebaliknya pendidikan akan melahirkan atau melestarikan adanya stratifikasi sosial.

Sekalipun pendidikan tidak akan dapat menghilangkan stratifikasi sosial, namun para guru hendaknya menyadari betul bahwa pendidikan – khususnya sekolah - memiliki fungsi mobilitas sosial. Hal ini mesti dipahami dan diperhatikan betul oleh para guru, sebab konsep ini akan dapat dijadikan acuan dalam rangka memberikan dorongan (motivasi) bagi para siswanya agar mereka belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi dan belajar sampai jenjang pendidikan tertinggi.

Pendidikan dan Kebudayaan. Enkulturasi memiliki dua dimensi pengertian dalam kaitannya dengan kebudayaan, yaitu: (1) enkulturasi sebagai transmisi kebudayaan, dan (2) enkulturasi sebagai pendorong perubahan kebudayaan.

Ada tiga pandangan yang berbeda tentang kebudayaan yang berimplikasi terhadap konsep pendidikan. Ketiga pandangan tersebut yakni: 1) pandangan Superorganik, 2) pandangan Konseptualis, dan 3) Pandangan Realis. Lepas dari perbedaan pandangan menurut ketiga pandangan tersebut, bahwa pada dasarnya terdapat dua fungsi pokok pendidikan dalam hubungannya dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya. Kedua fungsi yang dimaksud adalah:

1) Fungsi konservasi.
   Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan/mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan/atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat.
2) Fungsi Inovasi/kreasi/transformasi

Dalam hal ini, pranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya.

Kedua fungsi pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu fungsi konservasi dan fungsi inovasi pendidikan bagi masyarakat dan kebudayaannya dapat kita pahami dan riil terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Tes Formatif 2

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Perilaku terpola yang digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya disebut pranata ....
   A. agama. B. ekonomi.
   C. politik. D. sosial.

2. Untuk mengantarkan generasi mudanya agar dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya, masyarakat melakukana sosialisasi dan/atau enkulturasi pada suatu lembaga yang disebut pranata ....
   A. kebudayaan. B. perkawinan.
   C. hukum. D. pendidikan.

3. Diketahui bahwa antara perkembangan pendidikan dan perkembangan kehidupan ekonomi ....
   A. terdapat hubungan searah, yaitu perkembangan pendidikan mempengaruhi perkembangan kehidupan ekonomi.
   B. terdapat hubungan searah, yaitu perkembangan ekonomi mempengaruhi perkembangan pendidikan.
   C. terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perkembangan pendidikan dan perkembangan kehidupan ekonomi.
   D. tidak terdapat hubungan antara perkembangan pendidikan dan perkembangan kehidupan ekonomi.

4. Penganut teori Konsensus dana teori Konflik sepakat bahwa fungsi utama pranata pendidikan dalam kaitannya dengan ekonomi adalah mempersiapkan generasi muda untuk dapat ....
   A. mengisi lapangan kerja produktif dalam masyarakat.
   B. menjadi anggota masyarakat yang konsumptif.
   C. hidup sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
   D. hidup sesuai kecenderungan konsumsi masyarakat.

5. Ciri utama peran sekolah pada masyarakat ekonomi modern adalah ....
   A. menyelenggarakan upacara inisiasi bagi generasi mudanya.
   B. menyiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
   C. melaksanakan fungsi seleksi kemampuan dan pekerjaan.
   D. melaksanakan fungsi alokasi kemampuan dan pekerjaan.

6. Pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimiliknya disebut ....
   A. mobilitas sosial.
   B. mobilitas vertikal.
   C. stratifikasi sosial.
   D. tindakan sosial.

7. Pemegang utama fungsi mobilitas sosial dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka adalah ....
   A. keluarga.
   B. keturunan.
   C. pendidikan.
   D. ekonomi.

8. Guru hendaknya menyadari adanya hubungan antara pendidikan dengan mobilitas sosial, sebab hal itu merupakan asumsi dalam rangka ....
   A. mendidik para siswa sesuai dengan kelas sosial orang tuanya.
   B. mendidik para siswa sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya.
   C. memotivasi para siswa untuk mencapai prestasi dan jenjang pendidikan tertinggi.
   D. melestarikan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat para siswanya.

9. Pendidikan dipandang sebagai suatu proses yang digunakan masyarakat untuk mengendalikan dan membentuk individu-idividu sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai dasar suatu kebudayaan. Ini adalah implikasi dari konsep kebudayaan menurut pandangan ....
   A. Konseptualis.
   B. Konsensus.
   C. Realis.
   D. Superorganik.

10. Apabila pendidikan diupayakan untuk mewariskan nilai-nilai kebudayaan masyarakatnya, maka dalam hal ini pendidikan melaksanakan fungsi ....
    A. inovasi.
    B. kreasi.
    C. konservasi.
    D. transformasi.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda mengenai materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda teruskan untuk mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnya . **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Lingkungan Pendidikan dan Pola Kegiatan Sosial Pendidikan

Ada tiga pokok bahasan yang akan Anda kaji dalam kegiatan belajar ini, yaitu: (1) Lingkungan pendidikan; (2) Pola-pola kegiatan sosial pendidikan; (3) Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Kajian dalam pokok bahasan pertama meliputi konsep lingkungan pendidikan informal, formal dan nonformal. Kajian dalam pokok bahasan kedua meliputi jenis-jenis pola hubungan sosial pendidikan, yaitu pola nomothetis, ideografis, dan transaksional serta implikasinya terhadap pendidikan. Adapun kajian dalam pokok bahasan ketiga meliputi jenis-jenis pola sikap guru kepada siswa serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep tentang lingkungan pendidikan informal, formal dan nonformal; jenis-jenis pola kegiatan sosial pendidikan dan implikasinya terhadap pendidikan; serta jenis-jenis sikap guru kepada siswa serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru.

1. Lingkungan Pendidikan

a. Pendidikan Informal, Formal, dan Nonformal

Pendidikan dijalani individu sepanjang hayat. Dalam rangka pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat tersebut, pendidikan berlangsung secara informal, formal dan nonformal di berbagai lingkungan pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka dapat dikenal adanya tiga jenis lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan informal, lingkungan pendidikan formal dan lingkungan pendidikan nonformal.

1) Lingkungan Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar (alamiah) di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, pergaulan di tempat bekerja, kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat,

dsb. Pengetahuan, sikap, nilai-nilai, norma-norma, adat kebiasaan, dan keterampilan-keterampilan tertentu diwariskan masyarakat dan diperoleh anak atau individu anggota masyarakat antara lain melalui pendidikan yang bersifat informal itu.

a) Pendidikan Informal di dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal, artinya terdapat di setiap tempat di mana pun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas dua orang (suami-isteri) atau lebih (ayah, ibu dan anak). Adapun dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan, yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit.

Jenis atau bentuk keluarga. Menurut Kamanto Sunarto (1993) keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan keanggotaannya, keluarga dibedakan menjadi *keluarga batih* (*nuclear family*) dan *keluarga luas* (*extended family*). Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga batih. Berdasarkan garis keturunannya,keluarga dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: keluarga *patrilinial* (garis keturunan ditarik dari pria atau ayah); keluarga *matrilineal* (garis keturunan ditarik dari wanita atau ibu), dan keluarga *bilateral* (garis keturunan ditarik dari pria dan wanita atau ayah dan ibu). Selain itu, berdasarkan pemegang kekuasaannya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga *patriarhat (patriarchal),* yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ayah; keluarga *matriarhat (matriarchal),* yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu; dan keluar*ga equalitarian,* yaitu ayah dan ibu mempunyai kekuasaan yang sama. Berdasarkan bentuk perkawinannya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga *monogami,* yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan; keluarga *poligami,* yaitu pernikahan antaraa satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan; keluarga *poliandri,* yaitu satu orang perempuan mempunyai lebih dari satu orang suami pada satu saat. Berdasarkan status sosial ekonominya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga golongan *rendah, ke*luarga golongan *menengah,* dan keluarga golongan *tinggi.* Selanjutnya, berdasarkan keutuhannya, keluarga dibedakan menjadi: keluarga *utuh;* keluarga *pecah* atau bercerai, dan keluarga *pecah semu.* yaitu keluargaa yang tidak bercerai tetapi hubungan antara suami dengan istri dan dengan anakanaknya sudah tidak harmonis lagi.

Fungsi keluarga. Keluarga memiliki berbagai fungsi, antara lain fungsi affeksi, fungsi biologis, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi rekreasi, dsb. Namun menurut antroplog bernama George Peter Murdock (Sudardja Adiwikarta, 1988), terdapat empat fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu:

1. Sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan.

2. Mengembangkan keturunan.
3. Melaksanakan pendidikan.
4. Sebagai kesatuan ekonomi.

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini *orang tua (ibu dan ayah) adalah pengemban tanggung jawab pendidikan anak.* Secara kodrati orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, dan atas kasih sayangnya orang tua mendidik anak-anaknya. Orang yang berperan sebagai pendidik bagi anak di dalam keluarga utamanya adalah ayah dan ibu. Namun demikian, selain mereka, saudara-saudaranya, pembantu rumah tangga atau *baby sitter* pun turut serta mendidik anak. Apalagi dalam keluarga luas *(extended family)*, bahwa kakek, nenek, paman, bibi, atau siapa pun yang tinggal serumah dengan anak juga akan turut mempengaruhi atau mendidik anak ybs. Menyimak hal itu, pergaulan pendidikan di dalam keluarga terkadang tidak berlangsung hanya dilakukan oleh orang tua (ayah, ibu) saja.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat informal, artinya bahwa suatu keluarga dibangun bukan pertama-tama sebagai pranata pendidikan, namun demikian, pada kenyataanya secara wajar di dalam keluarga berlangsung pendidikan yang diselenggarakan orang tua kepada anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga terselenggara atas dasar tanggung jawab kodrati dan atas dasar kasih sayang yang secara naluriah ada pada diri orang tua. Di samping itu, cara-cara pelaksanaan pendidikan dalam keluarga berlangsung tidak dengan cara-cara yang formal dan *artificial*, melainkan melalui cara-cara dan dalam suasana yang wajar.

Sejak kelahirannya, anak mendapatkan pengaruh dan pendidikan dari keluarganya. Pendidikan yang dilakukan dalam keluarga sejak anak masih kecil akan menjadi dasar bagi pendidikan dan kehidupannya di masa datang. Hal ini sebagaimana dikemukakan M.I. Soelaeman (1985) bahwa: "pengalaman dan perlakuan yang didapat anak dari lingkungannya semasa kecil - dari keluarganya - menggariskan semacam pola hidup bagi kehidupan selanjutnya. Adler menyebut pola hidup ini dengan kata *Leitlinie*, yaitu semacam garis yang membimbing kehidupannya, yang - sadar atau tidak sadar - diusahakan anak untuk meraihnya". Pengalaman yang diterima anak semasa kecil akan menentukan sikap hidupnya dikemudian hari. Sehubungan dengan itu *keluarga merupakan peletak dasar pendidikan anak.*

Sekalipun tujuan pendidikan dalam keluarga tidak dirumuskan secara tersurat, tetapi dari apa yang tersirat dapat dipahami bahwa *tujuan pendidikan dalam keluarga* adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Sehubungan dengan itu, pendidikan dalam keluarga dapat dipandang sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Adapun *isi pendidikan dalam keluarga* biasanya meliputi: berbagai pengetahuan yang mendasar, sikap, nilai dan norma agama, nilai dan norma masyarakat/budaya, serta keterampilan-keterampilan tertentu.

Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *fungsi pendidikan dalam keluarga* adalah: (1) sebagai peletak dasar pendidikan anak, dan (2) sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya.

Berbagai faktor yang ada dan terjadi dalam keluarga akan turut menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan anak. Jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam struktur keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status sosial ekonomi orang tua, dan sebagainya akan turut mempengaruhi pendidikan anak dalam keluarga, yang pada akhirnya akan turut pula mempengaruhi pribadi anak.

b) Pendidikan Informal dalam Masyarakat

Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita analisis, semuanya itu tentunya mengandung muatan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, sikap, keterampilan, dst. yang dengan cara-cara yang wajar/informal dalam kehidupan sehari-hari (tidak dirasakan sebagai pendidikan oleh individu) diwariskan oleh masyarakat kepada generasi mudanya. Dalam konteks ini *pendidikan merupakani pewarisan sosial* yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.

2) Pendidikan Formal (Sekolah)

Sekolah sebagai Pranata Sosial. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 20 Tahun 2003). Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah, Sekolah didirikan secara sengaja oleh masyarakat dan/atau pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jika kita analisa, sekolah mewujudkan aktivitas khas dari kelakuan berpola yang ada di masyarakat; aktivitas khas ini dilakukan oleh berbagai pribadi atau manusia yang mempunyai struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan, misal: kepala sekolah, guru, siswa, dsb; aktivitas khas di sekolah mengacu kepada sistem ide, nilai, norma atau tata kelakuan tertentu; menggunakan berbagai peralatan; dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Dengan demikian, **Sekolah** adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Waini Rasyidin dan M.I. Soelaeman menyatakan: "Sekolah ialah suatu satuan (unit) sosial atau lembaga sosial yang kekhususan tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan" (Odang Muctar, 1991).

Komponen Sekolah. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh

berbagai unsur atau komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri atas: 1) tujuan pendidikan, 2) Manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, petrugas kebersihan, dst., 3) kurikulum, 4) Media pendidikan dan teknologi pendidikan, 5) Sarana, prasarana, dan fasilitas, serta 6) pengelola sekolah. Tiga komponen utama sekolah – sebagaimana halnya madrasah - yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya, yaitu: 1) peserta didik, 2) guru, dan kurikulum. Namun demikian dewasa ini idealnya struktur sekolah memerlukan dukungan berbagai komponen, tidak hanya didukung oleh tiga komponen tersebut.

Sekolah sebagai Pranata/Lembaga Pendidikan Formal. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan kesatuan kegiatan-kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang terencana dan teratur menurut tatanan nilai dan norma yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Redja Mudyahardjo (Odang Muchtar, 1991) antara lain mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan formal sekolah mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Fungsi/tugas intern sekolah adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Adapun fungsi/tugas ekstern sekolah adalah kegiatan untuk mencapai tujuan institusional.
2) Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah, dan antara sekolah dengan lembaga lainnya.
3) Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Hal ini seperti tampak dalam jenjang sekolah dan tingkatan kelas, adanya kurikulum formal, jadwal belajar tertulis, dsb.
4) Kredensials dipandang penting baik dalam, penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan

Formalitas sekolah merembes ke dalam Kurikulum dan Pembelajaran. Formalitas sekolah berakar pada status para individu yang menjadi komponennya, serta sistem nilai dan norma yang serba resmi. Perlu kita sadari bahwa selanjutnya formalitas tersebut merembes ke dalam kurikulum dan cara-cara pembelajaran. Misal: belakangan disinyalir bahwa kurikulum formal sekolah berisi mata pelajaran-mata pelajaran yang bersifat terpisah-pisah atau tidak terintegrasi. Dalam prakteknya (kurikulum actual), cara-cara pembelajaran pun menjadi begitu formal, sehingga pembelajaran menjadi artificial (dibuat-buat), membosankan. Pendidikan tereduksi menjadi hanya sebatas pengajaran atau latihan saja. Semua ini pada akhirnya dapat menimbulkan hasil pendidikan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat maupun individu. Misal: pendidikan di sekolah menjadi parsial/memihak hanya untuk mengembangkan aspek tertentu saja

dari kepribadian peserta didik (terlalu bersifat intelketual), kurang mengembangkan keseluruhannya. Pendidikan di sekolah menjadi makin jauh dari kenyataan di dalam masyarakatnya. Hasilnya banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki kecakapan hidup, mereka tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya di dalam masyarakat., menganggur, "merasa asing hidup di dalam lingkungan masyarakatnya sendiri",dsb. Jika demikian halnya, jangan-jangan masyarakat akan setuju dengan Ivan Illich yang pernah menyerukan pembubaran sekolah.

Sekolah memang adalah lembaga pendidikan formal, tetapi barangkali perlu disadari bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka sosialisasi, enkulturasi, dst., yang secara keseluruhannya disebut dengan istilah humanisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya sekolah akan tetap mempunyai hubungan fungsional dua arah dengan masyarakatnya, dibutuhkan dan didukung masyarakatnya.

Fungsi Pendidikan Sekolah. Dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah dapat dikemukakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat.
2) Fungsi sosialisasi (memilih dan mengajarkan peranan sosial)
3) Fungsi integrasi sosial.
4) Fungsi Mengembangkan kepribadian individu/anak.
5) Fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.
6) Fungsi inovasi/men-transformasi masyarakat dan kebudayaan.

Perbedaan Sosialisasi di Sekolah dan di dalam Keluarga. Menurut George Herbert Mead, manusia yang baru lahir belum mempunyai diri (self) manusia. Diri manusia berkembang melalui interaksi dengan anggota masyarakatnya. Adapun perkembangan diri manusia berlangsung melalui tahapan: *play stage, game stage, dan generalized other.* Pada tahap play stage anak kecil mulai mengambil peranan orang-orang yang berada di sekitarnya melalui cara *meniru* peranan orang tuanya atau orang dewasa lain yang sering berinteraksi dengannya dikala mereka *bermain.* Misalnya, anak menirukan peranan ayahnya atau ibunya - berangkat kerja. Tetapi anak belum memahami isi peranan tersebut dan alasan tentang peranan yang dilakukan atau ditirunya itu. Pada tahap game stage anak bukan hanya telah mengetahui peranan yang harus dijalankannya, tetapi telah pula mengetahui peranan yang harus dilakukan orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Pada tahap ini anak telah mampu mengambil peranan orang lain. Pada tahap generalized, anak telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami peranannya sendiri serta peranan orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Anak telah mampu mengambil peranan-peranan yang dijalankan orang lain di masyarakat. Selaku anak ia telah memahami peranan yang dilakukan orang tua; selaku siswa ia telah memahami peranan yang dilakukan oleh guru, dsb. Menurut Mead,

jika seseorang telah mencapai tahap ini maka orang tersebut telah mempunyai suatu diri. Pandangan Mead menunjukkan bahwa diri seseorang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain (Kamanto Sunarto, (1993).

Sejumlah ahli sosiologi mempelajari perbedaan antara sosialisasi di sekolah dengan di keluarga. Robert Dreeben (1968) misalnya, ia mengemukakan empat perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah, yaitu *independence, achievement, universalism, and specifity*. Menurut Kamanto Sunarto (1993) pemikiran Dreeben ini dipengaruhi oleh dikhotomi Talcott Parsons - misalnya antara *ascriptions dan achievement, particularism dan universalism, diffusinnes dan specifity.* Keempat perbedaan yang dikemukakan Dreeben tersebut yaitu:

1) Kemandirian *(independence).*
   Di sekolah anak mulai belajar hidup lepas dari orang tuanya.Kalau di rumah anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam mengerjakan sesuatu, sebaliknya di sekolah ia belajar menyelesaikannya sendiri.
2) Prestasi *(achievement).*
   Kalau di rumah anak lebih banyak terkait dengan status yang diterimanya *(ascribed status)* dan peranan-peranan yang diterimanya; Dalam hal tertentu di sekolah anak dituntut belajar dengan apa yang dapat diraihnya.
3) Universalisme *(universalism).*
   Kalau di rumah anak mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya karena ia memang anak mereka, di sekolah setiap anak memperoleh perlakuan yang relatif sama.
4) Specifity *(spesifity)*
   Di sekolah, kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Misal: kekeliruan siswa dalam mata pelajaran Matematika tidak mempengaruhi penilaian gurunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa dapat memperoleh kegagalan serta kritik dalam jam pelajaran tertentu, tetapi ia pun dapat meraih keberhasilan dan pujian pada jam pelajaran lainnya.

3) Pendidikan Nonformal

Definisi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat (12) UU RI No. 20 Tahun 2003).

Fungsi. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga maasyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang

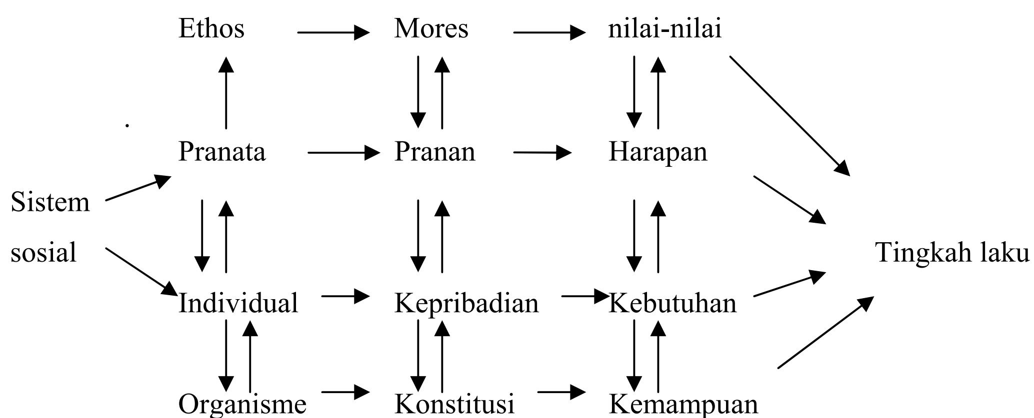
hayat.

Lingkup. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaran, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik..

Satuan Pendidikan. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Contoh: hasil belajar Paket A dapat disetarakan dengan hasil belajar di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, dsb.

2. Pola-Pola Kegiatan Sosial Pendidikan

Sebagaimana dikemukakan J.W. Getzels dan H.A. Thelen, pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya, yaitu: (1) dimensi nomothetis dan (2) dimensi ideografis (A. Morrison and D. McIntyre, 1972). Dimensi nomothetis meliputi variable pranata *(institution)*, peranan *(role),* dan harapan-harapan sosial *(expectations),* sedangkan dimensi ideografis meliputi variable individu *(individual),* kepribadian, *(personality),* dan kebutuhan-kebutuhan perorangan *(need-dispositions)*. Selanjutnya, bahwa dimensi nomothetis saling berhubungan dengan variable-variabel kebudayaan, yaitu *ethos, mores, dan nilai-nilai* masyarakat; adapun dimensi ideografis saling berhubungan dengan variable-variabel biologis, yaitu individu sebagai makhluk hidup *(organism),* keadaan jasmaninya *(constitution),* dan kemampuan-kemampuannya *(potentialities).* Dengan demikian, terjadinya suatu tingkah laku dapat dibagankan sebagai berikut:



Apabila kegiatan sosial pendidikan dianalisis berdasarkan kecenderungan orientasinya terhadap fungsi dimensi-dimensi tingkah laku sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya tiga pola kegiatan sosial pendidikan, yaitu: (1) Pola Nomothetis, (2) Pola Ideografis, dan (3) Pola Transaksional.

Pola Nomothetis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif/nomothetis dari pada fungsi tingkah laku ideografis. Dengan demikian, maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan-tuntutan institusi, pranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial daripada tuntutan-tuntutan individual, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan individual. *Pendidikan* berdasarkan pola nomothetis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian *(socialization of personality)*. Pendidikan dipandang sebagai upaya pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Hal ini menimbulkan sosilogisme dalam pendidikan.

Berkenaan dengan hal di atas Jaeger (1977) membedakan pola kegiatan sosialisasi (pendidikan) menjadi dua pola ekstrim, yaitu (1) pola sosialisasi dengan cara represi *(repressive socialization)*, dan (2) pola sosialisasi partisipasi *(participatory socialization)*.

Kebalikan dari Pola Nomothetis adalah Pola Ideografis. Karena itu *Pendidikan* berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan *(personalization of roles),* yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau *developmentalisme* dalam pendidikan.

Kegiatan sosial pendidikan Pola Transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomothetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Sebab itu *pendidikan* berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. setiap individu mengenal tujuan-tujua sistem, dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kebutuhan pribadinya; b. setiap individu percaya bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan kepada dirinya adalah rasional apabila harapan-harapan tersebuit dapat dicapai; c. Setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama.

Sebagaimana dikemukakan A. Harris dalam bukunya *"I'am O.K. You're O.K.; A Practical Guide to Transacssional Analysis"* (Redja Mudyahardjo, 1991), bahwa dalam kegiatan social pendidikan pola Transaksional memungkinkan munculnya empat jenis pola dasar hubungan transaksional. Keempat jenis pola dasar hubungan transaksional yang dimaksud adalah:

1) I'am not O.K. - You're O.K.
2) I'am O.K. – You're not O.K.
3) I'am not O.K. – You're O.K.

4) I'am O.K. – You're O.K.

Dalam kegiatan pendidikan, jenis pola kegiatan social pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola Transaksional. Adapun dalam kegiatan social pendidikan pola Transaksional tersebut diharapkan tercipta pola dasar hubungan transaksional jenis yang keempat, yaitu: "I'am O.K. – You're O.K.", artinya bahwa guru mau melaksanakan pendidikan dan siswa pun mau melaksanakan pendidikan.

3. Pola Sikap Guru kepada Siswa dan Implikasinya terhadap Fungsi dan Tipe Guru

David Hargreaves (Sudarja Adiwikarta, 1988) mengemukakan tiga kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe/kategori guru.

Pola Pertama: Guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi (pembudayaan). Implikasinya maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan peretimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjinak atau penggembala singa *("lion tamer").*

Pola Kedua: Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus meghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau "entertainer".

Pola Ketiga: Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar, dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid. Baik secara individual maupun kelompok kecil, guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru-murid didasari kepercayaan, dan arah belajar-mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Tipe guru demikian dikategorikan oleh Hargreaves sebagai "guru romantik" *(romantic).*

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar ini, coba Anda kemukakan 1) tiga jenis lingkungan pendidikan; 2) definisi pendidikan formal; 3) tiga komponen utama sekolah sebagai syarat untuk dapat menjalankan fungsi minimumnya; 4) tiga contoh fungsi pendidikan sekolah; 5) implikasi jenis pola kegitan sosial Nomothetis terhadap pendidikan; 6) jenis pola hubungan sosial transaksional yang sebaiknya terjadi dalam praktek pendidikan.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 1) Anda perlu mengingat kembali jenis-jenis lingkungan pendidikan dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 2) Anda perlu mengacu kepada definisi pendidikan formal sebagaimana termaktub pada pasal 1 ayat 11 UU RI No. 20 Tahun 2003. Untuk dapat menjawab tugas latihan nomor 3) Anda perlu mengacu kepada komponen-komponen utama sekolah. Untuk dapat mejawab latihan nomor 4) Anda perlu mengingat kembali enam fungsi pendidikan sekolah. Untuk menjawab latihan nomor 5) Anda perlu mengacu kepada konsep pola kegiatan sosial pendidikan. Adapun untuk mejawab latihan nomor 6) Anda perlu mengacu pada konsep pola hubungan sosial Transaksional.

Rangkuman

Pendidikan dijalani individu sepanjang hayat yang berlangsung secara informal, formal dan nonformal di berbagai lingkungan pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka dikenal adanya tiga jenis lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan informal, lingkungan pendidikan formal dan lingkungan pendidikan nonformal.

Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara wajar (alamiah) di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal antara lain berlangsung di dalam keluarga, sebab salah satu fungsi keluarga yang bersifat universal adalah melaksanakan pendidikan. Ada berbagai jenis keluarga, setiap jenis keluarga tentunya akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap pendidikan anak. Pendidikan informal dalam keluarga merupakan peletak dasar pendidikan anak. Dalam hal ini orang tua (ibu dan ayah) adalah pengemban tanggung jawab pendidikan anak. Tujuan pendidikan dalam keluarga adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Sehubungan dengan itu, pendidikan dalam keluarga dapat dipandang sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Adapun *isi pendidikan dalam keluarga* biasanya meliputi: berbagai pengetahuan yang mendasar, sikap, nilai dan norma agama, nilai dan norma masyarakat/budaya, serta keterampilan-keterampilan tertentu. Selain di dalam keluarga, pendidikan

informal dapat pula berlangsung di dalam masyarakat. Pendidikan informal di dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adat kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, pagelaran kesenian, dan bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sekolah adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. Tiga komponen utama sekolah yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya, yaitu: 1) peserta didik, 2) guru, dan kurikulum. Namun demikian dewasa ini idealnya struktur sekolah memerlukan dukungan berbagai komponen, tidak hanya didukung oleh tiga komponen tersebut. Sekolah dikenal pula sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki karakteristik tertentu. Adapun fungsi pendidikan sekolah antara lain: (1) Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat.; (2) Fungsi sosialisasi; (3) Fungsi integrasi sosial; (4) Fungsi Mengembangkan kepribadian individu/ anak; (5) Fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan; (6) Fungsi inovasi/ men-transformasi masyarakat dan kebudayaan. Sejumlah ahli sosiologi mempelajari perbedaan antara sosialisasi di sekolah dengan di keluarga. Robert Dreeben (1968) misalnya, ia mengemukakan empat perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah, yaitu *independence, achievement, universalism, and specifity*.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pola Kegiatan Sosial Pendidikan. Apabila kegiatan sosial pendidikan dianalisis berdasarkan kecenderungan orientasinya terhadap fungsi dimensi-dimensi tingkah laku individu, maka dapat diidentifikasi adanya tiga pola kegiatan sosial pendidikan, yaitu: (1) Pola Nomothetis, (2) Pola Ideografis, dan (3) Pola Transaksional. Pendidikan berdasarkan pola nomothetis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian *(socialization of personality)*. Pendidikan dipandang sebagai upaya pewarisan nilai-

nilai sosial kepada generasi muda. Hal ini menimbulkan sosilogisme dalam pendidikan. Pendidikan dipandsang sebagai proses sosialisasi. Jaeger (1977) membedakan pola kegiatan sosialisasi (pendidikan) menjadi dua pola ekstrim, yaitu (1) pola sosialisasi dengan cara represi *(repressive socialization)*, dan (2) pola sosialisasi partisipasi *(participatory socialization)*.

Kebalikan dari Pola Nomothetis adalah Pola Ideografis. Karena itu *Pendidikan* berdasarkan pola kegiatan sosial ideografis mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan *(personalization of roles),* yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau *developmentalisme* dalam pendidikan.

Kegiatan sosial pendidikan Pola Transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomothetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Sebab itu *pendidikan* berdasarkan pola ini dipahami sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. setiap individu mengenal tujuan-tujua sistem, dan tujuan-tujuan itu juga merupakan bagian dari kebutuhan pribadinya; b. setiap individu percaya bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan kepada dirinya adalah rasional apabila harapan-harapan tersebuit dapat dicapai; c. Setiap individu merasa bahwa ia termasuk suatu kelompok dengan suasana emosional yang sama.

Dalam kegiatan sosial pendidikan pola Transaksional memungkinkan munculnya empat jenis pola dasar hubungan transaksional. Keempat jenis pola dasar hubungan transaksional yang dimaksud adalah: (1) *I'am not O.K. - You're O.K. (2) I'am O.K. – You're not O.K. (3) I'am not O.K. – You're O.K. (4) I'am O.K. – You're O.K.*

Dalam kegiatan pendidikan, jenis pola kegiatan sosial pendidikan yang diharapkan terjadi adalah jenis pola Transaksional. Adapun dalam kegiatan sosial pendidikan pola Transaksional tersebut diharapkan tercipta pola dasar hubungan transaksional jenis yang keempat, yaitu: "I'am O.K. – You're O.K.", artinya bahwa guru mau melaksanakan pendidikan dan siswa pun mau melaksanakan pendidikan.

Pola Sikap Guru terhadap Siswa. David Hargreaves (Sudarja Adiwikarta, 1988) mengemukakan tiga kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe/kategori guru. Pola Pertama: Guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi (pembudayaan). Implikasinya maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai penjinak atau penggembala singa *("lion tamer").* Pola Kedua: Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus meghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan,

menarik dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau “entertainer”. Pola Ketiga: Guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar, dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berubah, bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Implikasinya guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid. Baik secara individual maupun kelompok kecil, guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru-murid didasari kepercayaan, dan arah belajar-mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Tipe guru demikian dikategorikan oleh Hargreaves sebagai “guru romantik” *(romantic).*

Tes Formatif 3

Petunjuk: Jawablah semua soal di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang pada salah satu identitas alternatif jawaban yang paling tepat.

1. "Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi". Ini adalah definisi pendidikan ....
   A. informal. B. formal.
   C. nonformal. D. pesantren.

2. Pengalaman pendidikan anak sejak kecil di dalam keluarga akan membangun pola hidupnya di kemudian hari, sebab itu pendidikan di dalam keluarga dipandang sebagai ....
   A. pendidikan yang bersifat informal.
   B. pendidikan yang bersifat nonformal.
   C. peletak dasar pendidikan bagi anak.
   D. pengemban tangung jawab pendidikan anak.

3. Berikut ini adalah tiga komponen utama sekolah yang menjadi syarat agar dapat melaksanakan fungsi minimumnya, ***kecuali*** ....
   A. guru. B. gedung/bangunan.
   C. kurikulum. D. peserta didik.

4. Hasil pendidikan pada Kelompok Belajar Paket A melalui jalur pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan hasil pendidikan pada ....
   A. madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar.
   B. raudhatul atfal/taman kanak-kanak.
   C. sekolah menengah pertama atau SMP.
   D. sekolah menengah atas atau SMA.

5. Di madrasah ibtidaiyah (sekolah) para siswa diajari Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini adalah contoh bahwa madrasah ibtidaiyah (sekolah) memiliki fungsi ....
   A. transmisi kebudayaan. B. sosialisasi.
   C. integrasi sosial. D. inovasi.

6. Contoh lembaga pendidikan nonformal adalah ....
   A. pusat kegiatan belajar masyarakat. B. madrasah ibtidaiyah.
   C. sekolah dasar. D. madrasah tsanawiyah.

7. Berbeda dengan sosialisasi di dalam keluarga, di madrasah (sekolah) anak-anak memperoleh perlakuan yang relatif sama. Menurut Robert Dreeben hal ini tergolong aturan yang berkenaan dengan ….

   A. *achievement.* B. *independence.*
   C. *specifity.* D. *universalism.*

8. Ciri kegiatan sosial pendidikan *Nomothetis* adalah mengutamakan ….

   A. kebutuhan dan harapan individu. B. kebutuhan dan harapan masyarakat.
   C. kebutuhan dan harapan guru. D. kebutuhan individu dan msayarakat.

9. Dalam praktek pendidikan, jenis pola hubungan transaksional yang diharapkan terjadi adalah pola hubungan ….

   A. *I'am not O.K. - You're O.K.* B. *I'am O.K. – You're not O.K.*
   C. *I'am not O.K. – You're O.K.* D. *I'am O.K. – You're O.K.*

10. Guru memandang siswa belum menguasai kebudayaan, adapun fungsi guru adalah menggiring siswa untuk mempelajari isi kebudayaan sesuai pilihan guru dengan alasan itulah yang terbaik bagi siswanya. Menurut Davis Hargreaves guru demikian dikategorikan sebagai guru ….

    A. "entertainer". B. "melancholic".
    C. "lion tamer". D. "romantic".

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda mengenai materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda teruskan untuk mempelajari modul 5 . **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban

Tes Formatif 1: 1. D. 2. A. 3. D. 4. A. 5. D. 6. C. 7. D. 8. B. 9. D. 10. B.
Tes Formatif 2 : 1. D. 2. D. 3. C. 4. A. 5. B. 6. A. 7. C. 8. C. 9. D. 10. C.
Tes Formatif 3 : 1. B. 2. C. 3. B. 4. A. 5. C. 6. A. 7. D. 8. B. 9. D. 10. C.

MODUL 5

LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN INDONESIA

LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN INDONESIA

Pendahuluan

Realitas pendidikan nasional Indonesia dewasa ini tentunya terpaut dengan praktek-praktek pendidikan pada masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai pengetahuan dan nilai sejarah dalam praktek pendidikan bangsa kita di masa lalu, yang dapat kita ambil hikmahnya demi pembangunan pendidikan di masa sekarang dan di masa depan. Sebab itu, sejarah pendidikan nasional tersebut perlu Anda pelajari.

Modul ini akan membantu Anda untuk memahami pendidikan di Indonesia sejak zaman Purba hingga zaman kolonial Belanda; pendidikan di Indonesia pada zaman pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) dan zaman Pendudukan Militerisme Jepang; serta pendidikan pada zaman kemerdekaan hingga era pembangunan jangka panjang pertama (PJP I). Semua ini tentunya akan memperluas wawasan kependidikan Anda, dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam berpartisipasi membangun pendidikan nasional.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat mendeskripsikan sejarah pendidikan di Indonesia. Adapun secara khusus Anda diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Menjelaskan pendidikan pada zaman Purba.
2. Menjelaskan pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Budha.
3. Menjelaskan pendidikan pada zaman kerajaan Islam
4. Menjelaskan pendidikan pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol.
5. Menjelaskan pendidikan pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.
6. Menjelaskan pendidikan Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional).
7. Menjelaskan pendidikan zaman pendudukan Militerisme Jepang.
8. Menjelaskan pendidikan pada periode tahun 1945-1969.
9. Menjelaskan pendidikan pada era PJP I.

Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama mencakup sejarah pendidikan di Indonesia pada zaman Purba, zaman kerajan Hindu-Budha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, serta zaman kolonial Belanda. Kegiatan belajar kedua mecakup sejarah pendidikan yang diselenggarakan oleh Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) dan pemerintah Pendudukan Jepang. Adapun kegiatan belajar ketiga mencakup sejarah pendidikan pada periode tahun 1945-1969 dan pada era PJP I.

Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut ini:

1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam modul ini.
2. Baca materi modul dengan seksama, tambahkan catatan pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan, dll. sesuai pemikiran yang muncul.
3. Cermati dan kerjakan latihan/tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan latihan/ tugas tersebut, gunakan pengetahuan dan pengalaman Anda sebelumnya.
4. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan kunci jawaban untuk menentukan penilaian sudah atau belum memadainya jawaban Anda.
5. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan tutorial elektronik, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Pendidikan Pada Zaman Purba Hingga Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji sejarah pendidikan Indonesia pada zaman Purba hingga zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Kajian sejarah pendidikan ini meliputi dua hal pokok, yaitu latar belakang sosial budayanya dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, melalui kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman Purba, zaman kerajaan Hindu/Budha, zaman kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol, dan pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda yang turut mewarnai perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman berikutnya hingga dewasa ini.

1. Zaman Purba.

Latar Belakang Sosial Budaya. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman Purba disebut kebudayaan *paleolitik.* Adapun kebudayaan pada kurang lebih 1500 tahun SM yang lalu disebut kebudayaan *neolitik.*

Karakteristik kebudayaan masyarakat pada zaman ini tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut masyarakat antara lain *animisme* dan *dinamisme*. Masyarakat dipimpin oleh oleh ketua adat. Namun demikian ketua adat dan para *empu* (pandai besi dan dukun yang merupakan orang-orang pandai) tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali ketika mereka melaksanakan peranannya dalam upacara adat atau upacara ritual, dll. Sebab itu, mereka tidak memiliki *stratifikasi sosial* yang tegas, tata masyarakatnya bersifat egaliter. Adapun karakteristik lainnya yakni bahwa mereka hidup bergotong-royong.

Pendidikan. *Tujuan pendidikan* pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap dan terhadap nilai-nilai religi (kepercayaan) yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal (sekolah). Pendidikan

dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. *Kurikulum pendidikannya* meliputi pengetahuan, sikap dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah (khususnya bagi anak laki-laki) dan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan riil dalam masyarakatnya. *Pendidiknya* terutama adalah para orangtua (ayah dan ibu), dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakah kepada pandai besi atau kepada dukun jumlahnya sangat terbatas, utamanya adalah anak-anak mereka sendiri.

2. Zaman Kerajaan Hindu-Budha.

Latar Belakang Sosial Budaya. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Hubungan dagang semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan itu ke dalam masyarakat kita masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India. Antara lain berupa bahasa, tulisan, agama, termasuk juga sistem pemerintahan yang berlaku di India.

Masuknya pengaruh kebudayaan tersebut di atas telah menimbulkan perubahan keadaan sosial-budaya masyarakat setempat. Para ketua adat di negeri kita zaman itu lambat laun berusaha menyamai raja India. Diantara para ketua adat ada yang dinobatkan atau menobatkan diri menjadi raja-raja lokal. Struktur sosial yang pada awalnya bersifat egaliter (tidak mengenal stratifikasi sosial yang tegas) juga turut berubah. Maka timbullah dua golongan manusia, yaitu: golongan yang dijamin dan golongan yang menjamin. Raja dengan para pegawainya berstatus sebagai yang dijamin, sedangkan rakyat jelata berstatus sebagai yang menjamin, berkembanglah *feodalisme.*. Sebagaimana di India, terdapat stratifikasi sosial berdasarkan kasta, yakni: kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, Syudra, dan Paria. Sekalipun stratifikasi sosial semacam itu tidak berlaku secara menyeluruh dan tegas di dalam masyarakat kita (misal: bagi penganut animisme, dinamisme dan Budha yang juga telah ada saat itu), namun batas pemisah kelas sosial antara yang dijamin dan yang menjamin tampak jelas. Menurut para ahli, paling lambat pada abad ke 5 Masehi telah dimulailah zaman sejarah di negeri kita. Hal ini ditandai dengan ditemukannya tulisan tertua (tulisan huruf Palawa bahasa Sansekerta) oleh para ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai.

Pendidikan. Pendidikan pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga dan didalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut *Perguruan (Paguron)* atau *Pesantren*. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya yang menjadi *pendidik (guru atau pandita)* adalah kaum Brahmana, kemudian lama kelamaan para

empu menjadi guru menggantikan kedudukan para Brahmana. Terdapat tingkatan guru: pertama, *guru (perguruan) keraton*, di sini yang menjadi murid-muridnya adalah para anak raja dan bangsawan; kedua adalah *guru (perguruan) pertapa*, di sini yang menjadi murid-muridnya berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun demikian para guru pertapa juga biasanya selektif dalam menerima seseorang untuk menjadi muridnya. Ini antara lain merupakan implikasi dari feodalisme yang berkembang saat itu. *Pendidikan bersifat aristokratis*, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria, belum menjangkau masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak kasta Waisya dan Syudra, apalagi bagi anak-anak dari kasta Paria. Pada zaman ini pengelolaan pendidikan bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintahan (para raja) tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan, pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita.

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta dididik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. *Kurikulum pendidikannya* meliputi agama, bahasa sansekerta termasuk membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya (perguruan), maka *metode* atau cara-cara pendidikannya pun adalah *"Sistem Guru Kula"*. Dalam sistem ini murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama, murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru.

Pada zaman berkembangnya agama Budha yang berpusat di Kerajaan Sriwijaya (di Palembang), telah terdapat "Perguruan Tinggi Budha". Selain dari dalam negeri sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Indocina. Darmapala sangat terkenal sebagai maha guru Budha. Perguruan-perguruan Budha menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekali candi Borobudur, Mendut, dan Kalasan merupakan pusat-pusat pendidikan agama Budha. Perhatikan hasil sastra yang ditulis para empu (pujangga) yang bermutu tinggi. Contoh: Pararaton, Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, dan Baratayuda. Para pujangga yang terkenal antara lain Empu Kanwa, Empu Seddah, Empu Panuluh, dan Empu Prapanca (Idit suhendi, dkk, 1991).

3. Zaman Kerajaan Islam

Latar Belakang Sosial Budaya. Nusantara memiliki letak yang strategis dalam rangka pelayaran dan perdagangan. Ke negeri kita berdatangan pula para saudagar beragama Islam. Melalui mereka para raja dan masyarakat pesisir memeluk agama Islam. Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa (Majapahit). Melalui para saudagar dari Jawa yang masuk memeluk agama Islam, maka tersebarlah Islam ke pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam

di pulau Jawa Anda juga mungkin masih ingat akan jasa para wali yang dikenal sebagai *Wali Sanga*. Akhirnya berdirilah kerajan-kerajaan Islam.

Pemerintahan pada zaman ini dipimpin oleh raja. Di dalam wilayah kerajaan-kerajaan Islam umumnya masyarakat tidak menganut stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Sesuai ajaran Islam, masyarakat tidak membedakan manusia berdasarkan keturunan atau kasta. Sekalipun zaman ini masih tetap terdapat kelompok raja dan para bangsawan/ para pegawai di satu pihak, dan terdapat kelompok rakyat jelata di pihak lain, namun feodalisme di kalangan masyarakat pada umumnya mulai ditinggalkan.

Pendidikan. *Tujuan pendidikan* pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertaqwa kepada Allah S.W.T., sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui "iman, ilmu dan amal". Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti: di langgar-langgar, mesjid, dan pesantren. Lembaga perguruan atau pesantren yang sudah ada sejak zaman Hindu-Budha dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan atau ulama Islam. *Kurikulum pendidikannya* tidak tertulis (tidak ada kurikulum formal). Pendidikan berisi tentang tauhid (pendidikan keimanan terhadap Allah S.W.T.), Al-Qur'an, hadist, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab.

Pendidikan adalah hak semua orang, bahkan semua orang wajib mencari ilmu, mendidik diri atau belajar. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat *demokratis***.** Pada zaman ini pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Raja tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan (pengelolaan pendidikanbersifat otonom).

Metode atau *cara-cara pendidikan*. Pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah: ceramah atau *tabligh* (wetonan) untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak (belajar bersama) biasanya dilakukan di mesjid; mengaji Al-Qur'an dan *sorogan* (cara-cara belajar individual). Dalam metode sorogan walaupun para santri bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi mereka belajar dan diajar oleh ustadz secara individual. Cara-cara belajar dilakukan pula melalui *nadoman* atau lantunan lagu. Selain itu dilakukan pula melalui media dan cerita-cerita yang telah digunakan para pandita Hindu-Budha, hanya saja isi ajarannya diganti dengan ajaran yang Islami. Demikian pula dalam sistem pesantren atau pondok asrama. Di langgar atau surau, selain melaksanakan shalat, biasanya anak-anak belajar mengaji Al-Qur'an dan materi pendidikan yang sifatnya mendasar. Adapun materi pendidikan yang lebih luas dan mendalam dipelajari di pesantren.

4. Zaman Pengaruh Portugis dan Spanyol.

Latar Belakang Sosial-Budaya. Pada awal abad ke –16 ke negeri kita datanglah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang

kedatangan mereka juga disertai oleh *missionaris* yang bertugas menyebarkan agama Katholik. Pada akhir abad ke-16 mereka meninggalkan negeri ini karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate, karena perdagangan rempah-rempah sudah tidak menguntungkan lagi, dan karena kalah dalam peperangan melawan Belanda.

Pendidikan. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katholik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah *(Seminarie)* di Ternate, selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Gowa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana untuk dididik. Pada tahun 1546, di Ambon telah ada tujuh kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik.

5. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Latar Belakang Sosial Budaya. Pada tahun 1596 bangsa Belanda telah datang ke negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk berdagang. Pada tahun 1602 mereka mendirikan VOC. Karena VOC merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan, maka selain berupaya menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Kekuasaan VOC akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Negeri Belanda, karena itu sejak tahun 1800-1942 negeri kita menjadi jajahan Pemerintah Kolonial Belanda.

Karaketristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: (1) berlangsungnya kolonialisme, (2) dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia, (3) terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa dengan urutan dari lapisan tertingi s.d. terbawah sebagai berikut: bangsa Belanda, golongan orang Timur Asing, golongan Priyayi/ Bangsawan Pribumi, dan golongan Rakyat Jelata Pribumi.

Sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa kita ditindas dan diadu domba, kekuasaan para raja dirampasnya, dan kekayaan alam Indonesia diangkutnya. Sesungguhnya bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan ini, perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Seiring perjuangan bangsa yang tak pernah padam, pada awal abad ke-20 muncul tekanan serta kecaman kaum humanis dan kaum sosial demokrat di Belanda atas kekeliruan politik penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Keadaan ini akhirnya memaksa pemerintah

kolonial Belanda untuk melaksanakan *Politik Etis* (1901).

Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20 (sejak kebangkitan nasional tahun 1908) lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Coba Anda urai kembali sejarah berbagai perkumpulan atau organisasi pergerakan nasional beserta usaha-usahanya yang timbul sejak Kebangkitan Nasional tahun 1908 sebagaimana telah Anda pelajari di SMP dan SMA.

Pendidikan. Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia pada zaman ini, secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan yaitu: Pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda; Kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Berikut ini mari kita kaji kondisi pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Adapun pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan Kaum Pergerakan Nasional akan kita kaji pada kegiatan pembelajaran 2.

a. Pendidikan Zaman VOC

Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. VOC menyelenggarakan sekolah dengan *tujuan* untuk misi keagamaan (Protestan), bukan untuk misi intelektualitas, adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah yang penduduknya memeluk Katholik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Sampai dengan tahun 1627 di Ambon telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau lainnya sekitar 18 sekolah.

Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat formal (belum tertulis), dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan pasti. *Murid-muridnya* berasal dari anak-anak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi *guru* adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnya telah dididik di Belanda.

Selama kira-kira 200 tahun berkuasa di negeri kita, pendidikan yang dilaksanakan VOC benar-benar sangat sedikit sekali. Sampai tahun 1779 jumlah murid pada sekolah VOC adalah sbb: Batavia 639 orang, pantai utara Jawa 327 orang, Makasar 50 orang, Timor, 593 orang, Sumatera barat 37 orang, Cirebon 6 orang, Banten 5 orang, Maluku 1057 orang, dan Ambon 3966 orang (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976).

b. Pendidikan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagai kelanjutan dari zaman VOC, pendidikan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indonesia. *Kebijakan dan praktek pendidikan* pada zama ini antara lain:

1) Tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakyat, tetapi kebijakan ini tidak terwujud.
2) Tahun 1811-1816 ketika pemerintahan di bawah kekuasaan Raffles pendidikan bagi rakyat juga diabaikan.
3) Tahun 1816 Komisaris Jenderal C.G.C. Reindwardt menghasilkan Undang-undang Pengajaran yang dianggap sebagai dasar pendirian sekolah, tetapi Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang dikeluarkan tahun1818 tidak sedikit pun menyangkut perluasan pendidikan bagi rakyat Indonesia, melainkan hanya berkenaan dengan pendidikan bagi orang-orang Belanda dan golongan Pribumi penganut Protestan.
4) Selanjutnya, di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch dikeluarkan kebijakan *Culturstelsel* (Tanam Paksa) demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bagi Belanda. Karena untuk hal ini dibutuhkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang banyak, maka tahun 1848 Gubernur Jenderal diberi kuasa untuk menggunakan dana anggaran belanja negara sebesar f 25.000 tiap tahunnya untuk mendirikan sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan tujuan mengahasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pada tahun 1849-1852 didirikan 20 sekolah (di tiap keresidenan). Namun sekolah ini hanya diperuntukan bagi anak-anak Pribumi golongan priyayi/bangsawan, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diperkenankan. Penyelenggaraan pendidikan bagi kalangan bumi putera yang dicanangkan sejak 1848 mengalami hambatan karena kekurangan guru dan mengenai bahasa pengantarnya. Maka pada tahun 1852 didirikanlah *Kweekschool* (sekolah guru) pertama di Surakarta, dan menyusul di kota-kota lainnya. Sekolah ini pun hanyalah untuk anak-anak golongan priyayi.
5) Pada tahun 1863 dan 1864 keluar kebijakan bahwa penduduk pribumi pun boleh diterima bekerja untuk pegawai rendahan dan pegawai menengah di kantor- kantor dengan syarat dapat lulus ujian. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh putusan Raja pada tgl. 10 September 1864. Demi kepentingan itu di Batavia didirikanlah semacam sekolah menengah yang disempurnakan menjadi HBS *(Hogere Burger School)*.
6) Tahun 1867 didirikan Departemen Pengajaran Ibadat dan Kerajinan.
7) Tahun 1870 UU Agraris dari De Waal yang memberikan kesempatan kepada pihak partikelir untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pegawai. Hal ini berimplikasi pada perluasan sekolah.

8) Tahun 1893 keluar kebijakan diferensiasi sekolah untuk Bumi Putera, yaitu Sekolah Kelas I untuk golongan priyayi, sedangkan Sekolah Kelas II untuk golongan rakyat jelata.
9) Setelah dilaksanakannya *Politik Etis*, pada tahun 1907 Gubernur Jenderal Van Heutsz mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Bumi Putera: pertama, mendirikan Sekolah Desa yang diselenggarakan oleh Desa, bukan oleh Gubernemen. Biaya dsb. menjadi tanggung jawab pemerintah desa; kedua, memberi corak sifat ke-Belanda-an pada Sekolah Kelas I. Maka tahun 1914 Sekolah Kelas I diubah menjadi HIS *(Holands Inlandse School)* 6 tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sedangkan Sekolah Kelas II tetap bernama demikan atau disebut *Vervoleg School* (sekolah sambungan) dan merupakan lanjutan dari Sekolah Desa yang didirikan mulai tahun 1907. Akibat dari hal ini, maka anak-anak pribumi mengalami perpecahan, golongan yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya.
10) Pada tahun 1930-an usaha perluasan pendidikan bagi Bumi Putera mengalami hambatan. Surat Menteri Kolonial Belanda Colijn kepada Gubernur Jenderal de Jonge pada 10 Oktober 1930 menyatakan bahwa perluasan sekolah negeri jajahan terutama untuk kaum Bumi Putera akan sulit karena kekurangan dana.

Dalam periode pemerintahan kolonial Belanda, betapa kecilnya usaha-usaha pendidikan bagi kalangan Bumi Putera. Sampai akhir tahun 1940 dari jumlah penduduk bangsa Indonesia 68.632.000, sedangkan yang bersekolah hanya 3,32%.

Ciri-ciri pendidikan. Ciri-ciri pendidikan zaman ini antara lain: pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan Bumi Putera, pendidikan umumnya hanya diperuntukan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putera dari golongan priyayi; kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Tilaar (1995) mengemukakan lima ciri pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu:1) Adanya *Dualisme pendidikan*, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan Bumi Putera; 2) *Sistem Konkordansi,* yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi Bumi Putera hal ini di satu pihak memberi efek menguntungkan, sebab penyelenggaran pendidikan menjadi relatif sama, tetapi dipihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum Bumi Putera yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri; 3) *Sentralisasi pengelolaan pendidikan* oleh pemerintahan kolonial Belanda; 4) *Menghambat gerakan nasional*; dan 5) *Munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional (kemerdekaan)*.

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini, coba Anda rumuskan kembali: 1) tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan pada zaman Purba. 2) Pada zaman kerajaan Hidhu pendidikan bersifat aristokratis. Kemukakan dasar-dasar sosial budayanya ! 3) Kemukakan jenis-jenis lembaga pendidikan yang diselenggarakan pada zaman kerajaan Islam! 4) Apakah tujuan penyelenggaraan pendidikan zaman pengaruh Portugis dan Spanyol? 5) kemukakan ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 1) Anda perlu mengkaji kembali konsep tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan pada zaman Purba. Untuk menjawab latihan no. 2) Anda perlu menganalisis implikasi dari munculnya kerajaan-kerajaan, feodalisme dan stratifikasi sosial yang berkembang zaman kerajaan Hindhu. 3) keluarga, langgar, mesjid, dan pesantren. 4) Penyebaran agama Katholik. Untuk menjawab latihan no. 5) Anda perlu mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemereintah Belanda berdasarkan latar belakang budaya saat itu (politik, ekonomi, dsb.).

Rangkuman

Zaman Purba. Kebudayaan zaman ini dikenal sebagai paleolitik dan neolitik, masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas (egaliter), adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Implikasinya, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. Saat ini pendidikan berlangsung di dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alamiah (belum berlangsung secara formal).

Zaman Kerajaan Hindu-Budha. Kedatangan saudagar-saudagar dari India telah mengakibatkan perubahan sosial budaya penduduk pribumi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kerajaan dan feodalisme, tersebarnya agama Hindu dan Budha, munculnya stratifikasi sosial berdasarkan kasta, dan dimulainya zaman sejarah. Implikasinya, pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan masyarakat juga telah berlangsung di *perguruan atau pesantren*. Pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, membela diri, dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sansekerta termasuk membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Khususnya zaman Hindu pendidikan bersifat *aristokratis.* Adapun metode pendidikannya adalah *sistem guru kula*. Pada zaman Kerajaan Budha sudah berdiri “Perguruan Tinggi Budha” yang mana murid-

muridnya berdatangan dari berbagai negara tetangga. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom dimana pemerintah tidak ikut campur dalam mengelola sistem pendidikan.

Zaman Kerajaan Islam. Kedatangan para saudagar beragama Islam telah mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat pribumi. Antara lain tersebarnya agama Islam dan kebudayaan yang bercorak Islami. Pemerintahan tetap berbentuk kerajaan, namun bagi kalangan muslim stratifikasi social sebagaimana berlaku pada zaman sebelumnya mulai ditinggalkan. Implikasinya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat melalui pelaksanaan iman, ilmu dan amal. Selain di dalam keluarga pendidikan berlangsung juga di langgar-langgar, mesjid, dan pesantren. Pendidikan bersifat *demokratis*; seperti pada zaman-zaman sebelumnya pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan (otonom). Kurikulumnya meliputi tauhid (pendidikan keimanan terhadap Allah S.W.T.), Al-Qur'an, hadist, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Metode pendidikan dilakukan melalui *tabligh (wetonan)* dan *sorogan* (cara-cara belajar individual), selain itu digunakan pula media dan ceritera-ceritera yang digunakan pada zaman Hindu-Budha hanya saja isinya diganti dengan ajaran yang Islami. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang muncul zaman kerajan Hindu-Budha diselenggarakan pula pada zaman kerajaan Islam dan bahkan sampai dewasa ini.

Zaman portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi selain itu mereka pun (para missionaris) bertujuan menyebarkan agama Katholik. Implikasinya, pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katholik. Tahun 1536 didirikan sekolah *(Seminarie)* di Ternate, selain itu didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka.

Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awalnya (1596)bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang, mereka mendirikan VOC (1602). Selain berusaha menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protestan. Sejak tahun 1800-1942 negeri kita menjadi jajahan Pemerintah Kolonial Belanda. Karaketristik kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lain: (1) berlangsungnya penjajahan, kolonialisme; (2) dalam bidang ekonomi berlangsung monopoli perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar dunia; (3) terdapat stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa.

Bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajahan Belanda, perlawanan dan pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok bangsa kita di berbagai daerah di tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20 (sejak kebangkitan nasional tahun 1908) lahirlah berbagai pergerakan.

Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan.

Implikasi dari kondisi di atas, pada zaman kolonial Belanda secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu: pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda yaitu: (1) Tujuan pendidikannya adalah untuk mengahasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggengan penjajahan. (2) adanya dualisme pendidikan, (3) sistem konkordansi, (4) sentralisasi pengelolaan pendidikan, (5) menghambat gerakan nasional.

TEST FORMATIF 1

1. Kemukakan rumusan tujuan pendidikan pada zaman Purba.
2. Di bandingkan dengan kondisi pendidikan pada zaman Purba, perubahan atau perkembangan apa yang terjadi dalam pendidikan pada zaman Kerajaan Hindu/ Budha ?
3. Pada zaman Kerajaan Islam pendidikan bersifat demokratis, apa maksudnya dan mengapa demikian (apa dasarnya) ?
4. Apakah tujuan pendidikan pada zaman Portugis/Spanyol ?
5. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *dualisme* dan *sistem konkordansi* dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kaum Bumi Putra. Mengapa demikian (apa dasar sosial budaya dan tujuan pendidikannya), serta kemukakan untung ruginya bagi kaum Bumi Putra!

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali
80% - 89% = Baik
70% - 79% = Cukup
< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar 2. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Pendidikan Yang Diselenggarakan Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) dan Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari sejarah pendidikan Indonesia pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda yang diselenggarakan Kaum Pergerakan, serta pendidikan pada zaman Pendudukan Militerisme Jepang. Kajian dalam modul ini meliputi latar belakang sosial budayanya dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan pendidikan yang diselenggarakan Kaum Pergerakan sebagai upaya perjuangan kemerdekaan dan rintisan pendidikan nasional, serta dapat menjelaskan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pendudukan Militerisme Jepang.

1. Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) sebagai Sarana Perjuangan Kemerdekaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Latar Belakang Sosial Budaya Timbulnya Pergerakan Nasional. Seperti telah Anda pahami melalui kegiatan pembelajaran 1 bahwa kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerasan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa dan kekayaan Indonesia, telah menimbulkan penderitaan/kemiskinan. Perbedaan kedudukan dan kehidupan yang mencolok antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia sangat nyata, baik dalam kedudukan sosial maupun pemberian gaji. Stratifikasi sosial, sistem dualisme dan konkordansi dalam bidang pendidikan telah menimbulkan rendahnya kesempatan pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, juga menimbulkan perpecahan dan kebodohan. Selain itu, pendidikan bagi bangsa kita hanya ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah untuk mendukung sistem ekonomi dan politik

kolonialisme. Pendidikan kolonial Belanda tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu dan merdeka.

Bagi bangsa Indonesia berbagai kondisi yang sangat merugikan akibat kebijakan dan praktek-praktek penjajahan tersebut di atas telah menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa kebangsaan/ nasionalisme. Kebesaran masa lampau bangsa kita semasa zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dsb., juga memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Sebab itu , kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakan. Bahasa melayu yang merupakan bahasa kesatuan makin menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa. Selain itu, karena mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka timbul persepsi bahwa Belanda adalah Kafir. Itulah antara lain faktor-faktor intern (faktor-faktor yang terjadi di dalam negeri) yang menimbulkan pergerakan kebangsaan/pergerakan nasional.

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik melalui jalur politik praktis, jalur ekonomi, sosial-budaya. dan khususnya melalui jalur *pendidikan.* Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perjuangan fisik. Mengingat ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan semakin menyadari bahwa pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam program perjuangannya. Usaha-usaha kaum pergerakan melalui jalur pendidikan demi kemerdekaan dan rintisan ke arah pendidikan nasional tampak jelas. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar dan/atau dalam program kerjanya.

Pendidikan. I Djumhur dan H. Danasuparta (1976) mengemukakan bahwa setelah tahun 1900 usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giatnya. Untuk mengubah keadaan akibat penjajahan, kaum pergerakan memasukan pendidikan ke dalam program perjuanganya. Dewasa ini lahirlah sekolah-sekolah partikelir (perguruan nasional) yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua:

1) Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik, seperti yang diselenggarakan oleh: Ki Hadjar Dewantara (Taman Siswa), Dr. Douwes Dekker atau Dr. Setyabudhi (Ksatrian Institut), Moch. Sjafei (INS Kayutanam) dsb.
2) Sekolah-sekolah yang sesuai tuntutan agama (Islam), seperti yang diselenggarakan oleh: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib di Padangpanjang, dll

Selain itu, sebelumnya telah diselenggarakan pula pendidikan oleh tokoh-tokoh wanita seperti R.A. Kartini (di Jepara), Rd. Dewi Sartika (di Bandung), dan Rohana

Kuddus (di Sumatera).

Kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan *antara lain* sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. R.A. Kartini, Rd. Dewi Sartika, dan Rohana Kuddus.

Sekalipun tinggal di daerah yang berjauhan, R.A. Kartini, Rd. Dewi Sartika, dan Rohana Kuddus menghadapi masalah yang relatif sama. Mereka melihat kepincangan dalam masyarakat dan ketidak adilan terhadap wanita, sehingga menghambat kemajuan kaum wanita karena adat kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Sebab itu, baik R.A. Kartini, Dewi Sartika, maupun Rohana Kudus memiliki cita-cita yang relatif sama pula, yaitu keinginan untuk bebas, berdiri sendiri, serta membebaskan kaum wanita (gadis-gadis) Indonesia lainnya dari ketertinggalan dan ikatan adat kebiasaan. Mereka masing-masing berupaya memperjuangkan emansipasi kaum wanita demi perbaikan kedudukan dan derajat kaum wanita untuk mengejar kemajuan melalui upaya pendidikan. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan mereka adalah:

- R.A. Kartini (1879-1904): Pada tahun 1903 Ia membuka "Sekolah Gadis" di Jepara, dan setelah menikah ia membukanya lagi di Rembang. Karena usianya yang relatif pendek usaha Kartini di bidang pendidikan tidak terlalu banyak, namun ia telah memberikan petunjuk jalan, melakukan rintisan pendidikan bagi kaum wanita. Cita-citanya memberikan gambaran perjuangan dan cita-cita kaum wanita Indonesia.
- Rd. Dewi Sartika (1884-1947): Pada tahun 1904 Ia mendirikan "Sakola Isteri" (Sekolah Isteri). Murid pertamanya berjumlah 20 orang, makin lama muridnya bertambah. Pada tahun 1909 sekolah ini melepas lulusannya yang pertama dengan mendapat ijazah. Pada tahun 1912 di 9 kabupaten seluruh Pasundan telah dijumpai sekolah semacam Sekolah Isteri Dewi Sartika. Pada tahun 1914 Sekolah Isteri diganti namanya menjadi "Sakola Kautamaan Isteri" (Sekolah Keutamaan Isteri), dan pada tahun 1920 tiap-tiap kabupaten di seluruh Pasundan mempunyai Sakola Kautamaan Isteri. Adapun untuk melestarikan sekolah-sekolahnya itu dibentuk "Yayasan Dewi Sartika".
- Rohana Kuddus (1884- 1969): Rohana Kuddus dikenal sebagai wanita Islam yang taat pada agamanya dan sebagaimana kedua tokoh di atas ia giat sekali mempelopori emansipasi wanita. Selain sebagai pendidik, ia pun adalah wartawan wanita pertama Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan I. Djumhur dan H. Danasuparta (1976), pada tahun 1896 (pada usia 12 tahun) Rohana telah mengajarkan membaca dan menulis (huruf Arab dab Latin) kepada teman-teman gadis sekampungnya. Pada tahun 1905 ia mendirikan Sekolah Gadis di Kota Gedang. Pada tgl. 11 Februari 1911 ia memimpin Perkumpulan Wanita Minagkabau yang diberi nama "Kerajinan Amai Setia" yang kemudian dijadikan nama sekolahnya. Rohana juga berjuang menerbitkan surat kabar khusus untuk wanita.

Pada tgl 10 Juli 1912 Rohana menjadi pemimpin redaksi surat kabar wanita di kota Padang yang diberi nama “Soenting Melajoe”.

Kurikulum pendidikan mereka memiliki kesamaan pula, yaitu berkenaan dengan membaca, menulis, berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kewanitaan agar mereka dapat berkarya.

b. Budi Utomo

Pada tahun 1908 Budi Utomo dalam kongresnya yang pertama (3-4 Oktober 1908) menegaskan bahwa tujuan perkumpulan itu adalah untuk kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan memajukan *pengajaran,* pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Untuk itu Budi Utomo pada tahun 1913 mendirikan *Darmo-Woro Studiefonds*; dan mendirikan tiga Sekolah Netral di Solo dan dua di Yogyakarta. Pada tahun 1918 mendirikan Kweekschool di Jawa Tengah, kemudian Sekolah Guru Kepandaian Putri untuk Sekolah Kartini, enam Normaal School, dan sepuluh Kursus Guru Desa, dsb. Pada tahun itu sekolah-sekolah Budi Utomo telah berkembang hingga jumlahnya kurang lebih mencapai 480 (H.A.R. Tilaar, 1995).

c. Muhammadiyah

Pada tanggal 18 November 1912 K. H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah dengan berbagai sekolahnya, didirikan dalam rangka memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri, untuk mengatasi kristenisasi, dan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang melaksanakan ajaran al-Qur’an dan Hadits sesuai yang diajarkan Rosululloh (Nabi Muhammad S.A.W).

Dasar/asas dan Tujuan Pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadits. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri dan berguna bagi masyarakat. Sebagai orang muslim harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berjiwa tauhid yang murni; beribadah kepada Allah; berbakti kepada orang tua dan baik kepada kerabatnya; memiliki akhlak yang mulia dan halus perasaannya; berilmu pengetahuan dan mempunyai kecakapan; dan cakap memimpin keluarga dan masyarakat (Abu Ahmadi, 1975).

Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mencapai tujuannya Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di bawah pimpinan Majelis Pengajaran. Sekolah-sekolah itu di samping memberikan pendidikan agama Islam, memberikan juga berbagai mata pelajaran seperti di sekolah-sekolah Pemerintah. Usaha-usaha lain berupa perluasan pengajian-pengajian (di bawah bimbingan Majelis Tabligh), menyebarkan bacaan-bacaan agama, mendirikan mesjid-mesjid, madrasah-

madrasah, pesantren-pesantren, dan sebagainya.

Pada zaman Belanda, Muhammadiyah mempunyai bagian-bagian sekolah:
Taman Kanak-kanak (Busthanul Atfal) Inheemse Mulo
Sekolah kelas II Normaalschool
Sekolah Schakel Kweekschool
HIS HIK
MULO AMS
Sekolah-sekolah agamanya:
Ibtidaiyah (SD dengan dasar Islam)
Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan dengan dasar Islam)
Diniyah, yang hanya meberikan pelajaran agama saja
Mu'allimin/Muallimat (SGB Islam)
Kulliyatul Mubaligin (SPG Islam)

Pada masa Pendudukan Jepang hingga kini organisasi Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya berjalan terus. Pada tahun 70-an sekolah-sekolahnya berjumlah ± 6000 buah, tersebar di seluruh Indonesia; telah memiliki 17 Universitas dan 43 Akademi (I. Djumhur dan Danasuparta, 1976). Sampai kini Muhammadiyah terus berjuang dan berkembang dalam rangka mencapai cita-citanya.

d. **Perkumpulan Putri Mardika**. Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912. Bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan (Odang Muchtar, 1976).
e. **Trikoro Dharmo**.

Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Dharmo, dan selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai tempat di tanah air hingga terwujudnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Berbagai organisasi pemuda dan pelajar ini bersama-sama gerakan lainnya menyumbangkan jasa-jasa yang besar demi pendidikan nasional dan kemerdekaan Indonesia. "Mereka bersepakat untuk memperbanyak kesempatan memperoleh pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah sehingga dapat menampung semakin banyak anak Indonesia, mempermudah untuk dapat mengikuti pelajaran bagi semua lapisan masyarakat, dan agar para anak didik mempunyai perasaan peka sebagai putra Indonesia" (H.A.R. Tilaar, 1995).

f. Perguruan Taman Siswa

Pada mulanya Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) bersama rekan-rekannya berjuang di jalur politik praktis, selanjutnya mulai tahun 1921 perjuangannya difokuskan di jalur pendidikan. Hal ini Beliau lakukan mengingat Departemen Pengajaran Pemerintah Belanda bersikap diskriminatif mengenai hak dan penyelenggaraan pendidikan bagi bagsa kita. Pendidikan Kolonial tidak berdasarkan kebutuhan bangsa kita, melainkan

hanya untuk memenuhi kepentingan kolonial. Isi pendidikannya tidak sesuai dengan kemajuan jiwa-raga bangsa. Pendidikan kolonial tidak dapat mengadakan perikehidupan bersama, sehingga kita selalu bergantung kepada kaum penjajah. Pendidikan kolonial tidak dapat menjadikan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hadjar Dewantara keadaan ini (penjajahan) tidak akan lenyap jika hanya dilawan dengan pergerakan politik saja. Melainkan harus dipentingkan penyebaran benih hidup merdeka di kalangan rakyat dengan jalan pengajaran yang disertai pendidikan nasional (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976). Sehubungan dengan hal di atas pada tgl. 3 Juli 1922 di Yogyakarta Ki Hadjar Dewantara mendirikan "National Onderwijs Institut Taman Siswa" yang kemudian menjadi "Perguruan Nasional Taman Siswa".

Dasar atau Azas Pendidikan. Pada pembukaan lembaga pengajaran Taman Siswa (3 Juli 1922), Ki Hadjar Dewantara mengemukakan tujuh azas pendidikannya yang kemudian dikenal dengan Azas Taman Siswa 1922. Ketujuh Azas tersebut adalah:

1) Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan wajib mengingat tertibnya kehidupan umum. Hendaknya tiap anak dapat berkembang menurut kodrat atau bakatnya. Dalam mendidik, perintah dan hukuman yang kita anggap memperkosa hidup kebatinan anak hendaknya ditiadakan. Mereka hendaknya dididik melalui "Among –methode".
2) Pengajaran berarti mendidik untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka fikirannya, dan merdeka tenaganya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, melainkan harus juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan mengamalkannya demi kepentingan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang bermanfaat bagi kepentingan lahir dan batin dalam hidup bersama.
3) Pendidikan hendaknya berasaskan kebudayaan kita sendiri sebagai penunjuk jalan, untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaban bangas kita sendiri kita lalu pantas berhubungan bersama-sama dengan bangsa asing.
4) Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat umum daripada mempertinggi pengajaran kalau usaha mempertinggi ini mengurangi tersebarnya pengajaran.
5) Agar bebas, merdeka lahir batin, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri.
6) Agar hidup tetap dengan berdiri sendiri, maka segala belanja mengenai usaha kita harus dipikul sendiri dengan uang pendapatan sendiri.
7) Dengan tidak terikat lahir batin, serta kesucian hati, berminat kita berdekatan dengan Sang Anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada Sang Anak.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Asas Taman Siswa 1922, pada

tahun 1947 diubah menjadi *"Panca Dharma"* Taman Siswa, yaitu: 1) Kebebasan atau Kemerdekaan, 2) Kebudayaan, 3) Kodrat Alam, 4) Kebangsaan, dan 5) Kemanusiaan.

Tujuan Pendidikan. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maka .... Maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, *agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggauta masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.* Tujuan pendidikan itu ialah *kesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia, baik sebagai satu-satunya orang (individual), maupun sebagai anggauta masyarakat (social)".* (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).

Penyelenggaraan Pendidikan. Berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa (1922) dimulai dengan dibukanya sekolah untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun yang diberi nama *Taman Lare atau Taman Anak* kadang diberi nama penjelasan *"Sekolab Froebel Nasional atau Kindertuin".* Sebutan Taman Lare atau Taman Anak untuk anak di bawah umur 7 tahun kemudian diganti namanya menjadi *Taman Indria.* Alasannya karena anak-anak di bawah umur 7 tahun itu semata-mata berada pada periode perkembangan pancainderanya.

Pada tahun-tahun berikutnya dibuka Taman Anak untuk anak-anak umur 7-9 tahun (kelas I-III); Taman Muda untuk anak-anak umur 10-13 tahun (kelas IV-VI), dan kelas VII sebagai kelas masyarakat; Taman Dewasa (setingakt SMP); Taman Madya (setingkat SMA); Taman Guru; dan Taman Ilmu (setingkat Sekolah Tinggi). Taman Guru meliputi: Taman Guru BI, yaitu sekolah guru untuk calon guru Taman Anak dan Taman Muda (satu tahun setelah Taman Dewasa); Taman Guru BII (satu tahun setelah Taman Guru BI); Taman Guru BIII (satu tahun setelah Taman Guru BII) yang menyiapkan calon guru Taman Dewasa. Taman Guru BIII terdiri atas dua bagian: Bagian A (Alam/Pasti), yaitu bagi para calon guru mata pelajaran alam/pasti; dan Bagian B (Budaya), yaitu bagi para calon guru mata pelajaran Bahasa, Sejarah, dsb. Pada Taman Guru, selain diselenggarakan Taman Gurtu BI s.d. BIII, juga diselenggarakan Taman Guru Indriya, yaitu sekolah gurtu yang menyiapkan para calon guru untuk Taman Indriya.

Metode Pendidikan.Cara atau metode pendidikannya adalah "*among-methode*" atau "*among system*", yaitu menyokong kodrat alamnya anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri". Dasar sistem among ini adalah kodrat alam dan kemerdekaan. (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977). Pendidikan dengan sistem among memakai cara pondok asrama, karena dengan cara itu dapatlah ketiga lingkungan pendidikan bekerja bersama-sama (keluarga, perguruan dan perkumpulan pemuda). Persatuan ketiga corak lingkungan tersebut penting sekali untuk sempurnanya pendidikan *(sistem tri-pusat pendidikan).* Pelaksanaan pendidikan tersebut berpedoman pula pada berbagai semboyan, adapun semboyan yang paling terkenal adalah "*Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, Tutwuri handayani*. Artinya: Kalau pendidik berada di muka, dia memberi teladan

kepada peserta didik. Kalau berada di tengah, membangun semangat, berswakarya, dan berkreasi pada peserta didik. Kalau berada di belakang, pendidik mengikuti dan mengarahkan peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Dengan kata lain, seorang pendidik atau pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntut, dan membimbing peserta didik/orang yang dipimpinnya. Coba Anda berikan contoh perbuatan guru yang nyata sebagai bentuk pelaksanaan ketiga semboyan tersebut.

Perjuangan Taman Siswa terus berlanjut, sampai saat ini lembaga pendidikan Taman Siswa terus berkembang. Lembaga pendidikan Taman Siswa tersebar di seluruh pelosok tanah air.

g. Ksatrian Institut

Ksatrian Institut didirikan di Bandung oleh Ernest Francoist Eugene Douwes Dekker (Multatuli atau Setyabudhi). Ia memimpin lembaga ini sejak 1922-1940. Dasar pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui sejarah kebangsaan. Tujuan pendidikannya yakni menghasilkan ksatria (ridderschap) bagi Indonesia Merdeka di masa datang. Sekolah kejuruan merupakan organisasi dalam sistem pendidikan Ksatreian Institut, yang diharapkan agar lulusannya menjadi nasionalis yang berguna dan dapat berdiri sendiri derta mencari lapangan kerja yang praktis. Lulusannya umumnya mendapat tempat di perusahaan-perusahaan swasta atau berdiri sendiri. Sampai dengan tahun 1937 perkembangan sekolahnya telah mencapai 9 sekolah yang tersebar di Bandung, Ciwidey, dan Ciajur (Odang Muchtar, 1976).

h. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tgl 31 Januari 1926. Salah seorang ulama yang membangun perkumpulan NU adalah K.H. Hasyim Asy'ari, yang pernah menjadi Raisul Akbar perkumpulan ini. Sejak 1899 Beliau telahmembuka pesantren Tebuireng di Jombang. Sebelum menjadi partai politik NU bertujuan: memegang teguh salah satu mazhab dari mazhab Imam yang ber-empat, yaitu: 1. Syafi'I, 2. Maliki, 3. Hanafi, 4. Hambali dan mengerjakan apa-apa yang menjadikan kemaslahatan untuk agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan berbagai usaha seperti: memajukan dan memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengadakan tabligh-tabligh dan pengajian-pengajian, disamping usaha lainnya. Pada akhir tahun 1938 Komisi Perguruan NU telah menetapkan susunan madrasah-madrasahnya sebagai berikut: Madrasah Awaliyah (2 tahun); Madrasah Ibtidaiyah (3 tahun); Madrasah Tsanawiyah (3 tahun); Madrasah Mu'alimin Wusytha (2 tahun); dan Madrasah Mu'alimin Ulya (3 tahun). Selanjutnya setelah menjadi partai politik (Mei 1952) hingga sekarang NU terus berjuang melakukan inovasi dan menyelenggarakan pendidikan (I. Djumhur dan H. Danasuparta, 1976)..

i. INS Kayutanam

Indonesisch Nederland School (INS) didirikan oleh Mohammad Sjafei (1895-1969) pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam, Sumatera Barat. Pada tahun 1950 kepanjangan INS diubah menjadi *Indonesian Nasional School*, dan selanjutnya menjadi *Institut Nasional Sjafei*. Perjuangan INS juga diarahkan demi kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapat berdiri sendiri tidak tergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaum penjajah.

Dasar Pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ag. Soejono (1979) pada awal didirikannya INS mempunyai dasar pendidikan sebagai berikut:

1) *Berfikir secara logis atau rasional.* INS mementingkan berfikir logis sebab menurut kenyataan, dalam masyarakat Indonesia saat itu masih banyak orang yang berfikir secara mistik.
2) *Keaktifan atau kegiatan*. INS menggunakan banyak keaktifan anak dalam pengajaran, latihan skill dan pendidikan agar anak bekerja beraturan dan intensif. Lagi pula Moh. Sjafei menyadari, bahwa besar sekali pengaruh keaktifan bagi pengalaman, fikir dan watak. Inilah sebabnya mata pengajaran ekspresi dinomorsatukan di INS dengan tidak mengabaikan pengetahuan lain. Keaktifan itu dipakainya pula untuk menjalankan pekerjaan yang praktis: membuat sendiri alat bercocok tanam, beternak, membuat gedung dan berbagai lapangan olah raga dengan mempergunakan bahan yang terdapat di Indonesia. Begitulah anak di sekolah tidak hanya duduk, melihat mendengarkan, dan percaya saja.
3) *Pendidikan kemasyarakatan*. Sesuai dengan sifat Indonesia, maka di INS diberikan banyak kesempatan bekerja sama. Contoh: Majalah Rantai Mas dikerjakan bersama dan merupakan tempat untuk mengadakan ekspresi dengan bahasa; bersama menjalankan pertunjukan dan koperasi. Perkumpulan koperasi bukan saja untuk memenuhi keperluan murid sehari-hari, melainkan juga sebagai latihan bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, yang menanti mereka, apabila mereka kelak terjun ke dalam masyarakat. Bergotong royong adalah ciri khas Indonesia.
4) *Memperhatikan bakat anak.* Anak yang ternyata pandai dan mempunyai banyak kesanggupan dalam sesuatu mata pengajaran, setelah mengikuti semua mata pengajaran, mendapat pendidikan lebih lanjut dan mendalam untuk menyempurnakan bakat, hingga ia dapat menjadi ahli dalam vak itu.
5) *Menentang intelektualisme.* Hal tersebut di atas adalah beberapa usaha untuk menjauhkan intelektualisme dari INS. Sejalan dengan hal di atas, usaha-usaha yang lainnya adalah:
    a. pendidikan keindahan diperhatikan sungguh-sungguh. Ini terbukti dengan dipentingkannya vak ekspresi; kerap diadakan pertunjukan; bersama-sama murid mengatur gedung dan halamannya, dsb.

b. Rasa tanggung jawab dikembangkan melalui berbagai keaktifan, agar anak didik berani berdiri sendiri. Penyelenggaraan dan perkembangan INS sendiri memberi contoh dalam hal ini. Atas usaha sendiri Moh. Sjafei menyelenggarakan INS yang megah itu. Tidak diterimanya bantuan dari pihak mana pun seperti dari pemerinta Belanda yang dapat mengikat hidup INS.
c. Perasaan keagamaan diberi kesempatan berkembang luas dan bersih jauh dari kepicikan dan kekolotan.

Tujuan Pendidikan INS. Tujuan pendidikan INS Kayutanam sebagaimana dikemukakan Umar Tirtarahardja .dan La Sulo (1995) adalah sebagai berikut:

1) Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan.
2) Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3) Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat.
4) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab.
5) Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan.

Penyelenggaraan Pendidikan. Beberapa usaha yang dilakukan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam yang dalam bidang pendidikan antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, seperti Ruang Rendah (7 tahun, setara sekolah dasar), Ruang Dewasa (4 tahun sesudah Ruang Rendah, setara sekolah menengah), dan sebagainya. Di samping itu, INS Kayu Tanam juga menyelenggarakan usaha lain sebagai bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni penerbitan *Sendi* (majalah anak-anak), buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf/aksara dan angka dengan judul *Kunci 13,* mencetak buku-buku pelajaran, dan lain-lain (Soejono, 1958:46). Seperti diketahui, upaya-upaya dari Ruang Pendidik INS tersebut dilakukan sebagai usaha mandiri, dan menolak bantuan yang mungkin akan membatasi kebebasannya.

j. Pada bulan Juli Tahun 1927 dalam pidato pembelaannya Bung Hatta di pengadilan Den Haag mengusulkan supaya ada perbaikan dalam berbagai bidang sosial, antara lain adalah bidang pembinaan pendidikan nasional.
k. Kongres Pasundan pada tahun 1930 juga menempatkan pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu sarana utama perjuangannya.
l. Pada bulan November 1937 dalam kongres ke-26 Persatuan Guru Indonesia (PGI) di Bandung dirumuskan supaya diadakan wajib belajar. Pada Kongresnya tahun 1938 di Malang PGI menuntut agar pendidikan dan pengajaran diserahkan ke daerah tetapi didahului dengan perbaikan keuangan daerah.

Tentu saja masih banyak lagi usaha-usaha rakyat, partai dan organisasi yang berjuang dalam bidang pendidikan, seperti: Syarikat Islam (SI), perjuangan PNI, berbagai pesantren, dsb.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan praktek-praktek di bidang politik ekonomi, maupun pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda sangat tidak adil. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda tidak memungkinkan bangsa kita menjadi cerdas, bebas, bersatu dan merdeka. Selain itu kita dapat melihat bahwa Kebangkitan Nasional melahirkan kesadaran mengenai pentingnya peranan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam memperjuangkan kemerdekaan demi lahirnya negara nasional. Dalam periode ini berbagai pergerakan nasional mencantumkan program pendidikan bagi semua kalangan rakyat Indonesia. Selain itu, pada masa ini lahir pula konsepsi dan perintisan sistem pendidikan nasional Indonesia, maksudnya suatu sistem pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan kolonial Belanda (Odang Muchtar, 1976). Terdapat tiga ciri pendidikan nasional (pendidikan kaum pergerakan) pada masa ini, yaitu: (1) bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tingi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia (H.A.R. Tilaar, 1995).

2. Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang.

Latar Belakang Sosial Budaya. Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda berakhir ketika pada tgl. 8 Maret 1942 mereka menyerah kepada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan pendudukan militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun.

Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri ini yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang Pasifik dan sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya. Di balik itu, mereka mempropagandakan semboyan *Hakko Ichiu* atau semboyan "kemakmuran bersama" Asia Timur Raya. Mereka menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan "perang suci" (melawan sekutu) demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Namun demikian tujuan pendudukan militer Jepang lama kelamaan menjadi penindasan. Ada dua kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang : 1) menghapuskan semua pengaruh Barat di Indonesia melalui "pen-Jepang-an", dan 2) memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan perang Asia Timur Raya.

Pendidikan. Implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu:

1) Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya. Contoh: Tiap pagi di sekolah-sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *"Kimigayo".* Upacara pagi dilanjutkan dengan pengibaran bendera *Hinomaru* dan membungkuk untuk menghormat *Tenno Heika.* Tiap hari para siswa harus mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang, melakukan *taiso* (senam), dan diwajibkan pula melakukan *kinrohoshi* (kerja bakti). Selain itu, dibentuk PETA sebagai program pendidikan militer bagi para pemuda; dibentuk barisan murid-murid Sekolah Rakyat *(Seinen-tai)*; dan barisan murid-murid Sekolah Lanjutan *(Gakuto-tai).*
2) Hilangnya Sistem Dualisme dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang bersifat dualistis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak Bumi Putera dihapuskan pada zaman Jepang. Sekolah bersifat terbuka untuk seluruh lapisan anak Indonesia. Namun demikian, hanya satu jenis sekolah rendah diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: Sekolah Rakyat 6 tahun *(Kokumin Gakko).* Sekolah Desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi Sekolah Pertama. Susunan jenjang sekolah menjadi:
    a. Sekolah Rakyat 6 tahun (termasuk Sekolah Pertama).
    b. Sekolah Menengah 3 tahun.
    c. Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun.
    d. Perguruan Tinggi.

2) Sistem Pendidikan menjadi lebih merakyat (populis). Sebagaimana dikemukakan di atas, pada prinsipnya terjadi perubahan bahwa sekolah menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat *("Demokrasi Pendidikan").* Hapusnya sistem *Konkordansi* dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan terarah bagi kebutuhan masyarakat, meskipun kepraktisan tersebut lebih berarti untuk keperluan kemenangan perang Jepang. Selain itu bahasa Indonesia pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar di sekolah dan dijadikan bahasa ilmiah, di samping tentunya bahasa Jepang. Sedangkan bahasa Belanda dilarang untuk digunakan (H.A.R. Tilaar, 1995).

Latihan

1. Setelah kebangkitan nasional (1908) perjuangan yang dilakukan kaum pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) tidak hanya melalui jalur politik praktis, melainkan juga melalui jalur pendidikan. Kemukakan latar belakang politik dan sosial budaya yang menjadi landasannya.
2. Kemukakan persamaan dan perbedaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Taman Siswa dengan pendidikan yang diselenggrakan Muhammadiyah!
3. Apa tujuan pendidikan zaman Pendudukan Militerisme Jepang?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas no. 1. Anda mesti memperhatikan cita-cita kemerdekaan kaum Bumi Putra (bangsa Indonesia), politik pemerintah kolonial Belanda, dan tujuan serta ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda.

No. 2. Perhatikan kesamaannya bagi kepentingan bangsa Indonesia, dan perbedaannya dalam hal asas pendidikannya. No. 3. Kata kuncinya demi kepentingan perang.

Rangkuman

Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Nasional. Faktor intern yang menimbulkan pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) antara lain adalah: 1) Penderitaan dan berbagai kondisi yang merugikan bangsa Indonesia akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah menimbulkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehingga muncul rasa kebangsaan/nasionalisme. 2) Kebesaran masa lampau bangsa kita juga memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. 3) Kaum terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakan. 4) Bahasa melayu yang merupakan bahasa kesatuan makin menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa. 5) Karena mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, maka timbul persepsi bahwa Belanda adalah Kafir.

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik dalam jalur politik, ekonomi, sosial-budaya, dan khususnya melalui jalur *pendidikan.* Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perjuangan bidang fisik. Mengingat ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan memasukan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar dan/atau dalam program kerjanya.

Karakteristik pendidikan kaum pergerakan adalah: (1) bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang. Sesuai kondisi politik saat ini, tujuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pendudukan Jepang diarahkan demi kepentingan memenangkan Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah: 1) hilangnya *sistem dualisme* pendidikan, 2) kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat, 3) susunan jenjang sekolah menjadi SR

6 Th., SM 3 Th., SMT 3 Th., dan PT., 4) hilangnya *sistem konkordansi* 5) bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Tes formatif 2

1. Selain berjuang melalui politik praktis, dsb. mengapa Kaum Pergerakan Nasional berjuang pula melalui jalur pendidikan?
2. Kemukakan tiga karakteristik pendidikan yang diselenggarakan oleh Kaum Pergerakan Nasional pada zaman kolonial Belanda!
3. Kemukakan latar belakang lahirnya Muhammadiyah!
4. Dasar pendidikan Perguruan Taman Siswa adalah Panca Dharma. Tuliskan kelima dharma dari Panca Dharma tersebut, dan dharma apa saja yang terutama melandasi semboyan "tutwuri handayani" atau "Among Methode".
5. Kemukakan karakteristik pendidikan pada zaman pendudukan militerisme Jepang!

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali
80% - 89% = Baik
70% - 79% = Cukup
< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar 3. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Pendidikan Indonesia Periode Tahun 1945-1969 dan Masa Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Ke I: 1969-1993

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mempelajari sejarah pendidikan Indonesia pada periode tahun 1945-1969 dan pada masa PJP I. Kajian dalam modul ini meliputi latar belakang politik dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan perkembangan kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan pada periode tahun 1945-1969 dan pada masa PJP I.

1. Pendidikan pada Periode Tahun 1945-1969

a. *Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan*

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD1945 sebagai dasar negara. Sejak saat ini jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Contoh: Sekolah Menengah zaman Jepang (*Skoto Cu Dakko dan Coto Cu Gakko)* diubah menjadi SMTP dan SMTA.

Bersamaan dengan berjalannya revolusi fisik, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan "Instruksi Umum" agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan *patriotisme*. Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri PP dan K membentuk Komisi Pendidikan dan Komisi ini membentuk Panitia Perancang Undang-Undang (RUU) mengenai pendidikan dan pengajaran. Karena terganggu dengan pecahnya perang kolonial kedua, pembahasan RUU di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) terhenti dan baru dapat dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Oktober 1949. Tanggal 5 April 1950 RUU tersebut diundangkan sebagai UU RI No.4

Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. UU RI No. 4 Tahun 1950 ini kemudian diterima oleh DPR pada tanggal 27 Januari 1954, kemudian disyahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan tanggal 18 Maret 1954 sebagai UU No. 12 Tahun 1954 (H.A.R. Tilaar, 1995).

b. Peletakan Dasar Pendidikan Nasional.

Pada tgl. 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Namun setelah Konferensi Meja Bundar, tahun 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memberlakukan UUD RIS. Pada saat RIS kembali ke negara kesatuan RI, UUD RIS diganti dengan UUD Sementara RI atau UU No. 7 Tahun 1950. Setelah Pemilu tahun 1955, karena Konstituante gagal menyusun UUD maka tgl. 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945.

Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara sebagaimana diuraikan di atas, tetapi pendidikan nasional Indonesia tetap dilaksanakan sesuai jiwa UUD 1945, dan bahwa UU RI No. 4 Tahun 1950 *de facto* digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah Negara Kesatuan RI. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tgl. 19 Mei 1950, serta sebagaimana dinyatakan dalam Pengumuman Bersama Menteri PP dan K RIS dan RI tgl. 30 Juni 1950. Selanjutnya UU pernyataan berlakunya UU tersebut di atas (RUU) diajukan kepada DPR. Pada tgl. 27 Juni 1954 DPR menerima RUU tersebut, kemudian disahkan oleh pemerintah pada tgl. 12 Maret 1954, dan diberlakukan pada tgl. 18 Maret 1954 sebagai UU RI No. 12 Tahun 1954. Di dalam Pasal 3 UU ini termaktub bahwa *"Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteran masyarakat dan tanah air".* Adapun Pasal 4 menyatakan: *"Pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam "Panca Sila" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia".*

c. Demokrasi Pendidikan.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UURI No. 4 Tahun 1950, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu Kewajiban Belajar Sekolah Dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekolah dasar ini direncanakan selama 10 tahun (1950-1960). Pelaksanaan program ini didukung dengan PP No. 65 Tahun 1951. Karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadapi masalah kekurangan guru dan jumlah sekolah, maka berdasarkan Keputusdan Menteri Pendidikan No. 5033/F tgl. 5 Juli 1950 didirikanlah Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar

(KPKPKB). Pada tahun 1952 Jumlah KPKB (Kursus Pengantar Kewajiban Belajar) sebagai embrio SD atau SD Kecil telah mencapai 3.372 dengan jumlah siswa sekitar setengah juta orang. Pada saat ini demokratisasi pendidikan (kewajiban belajar) tampak sudah mulai dilaksanakan. Selanjutnya KPKPKB ditingkatkan menjadi SGB dan SGA, selain itu . didirikan pula kursus-kursus persamaan SGB dan SGA (H.A.R. Tilaar, 1995).

a. Lahirnya LPTK pada Tingkat Universiter.

Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar SD telah menimbulkan KPKPKB, SGB, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah menengah dilaksanakan melalui PGSLP serta Kursus B I dan Kursus B II untuk guru sekolah Lanjutan Atas. Selain lembaga-lembaga tersebut beberapa lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan antara lain: APD (Akademi Pendidikan Jasmani), ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia), Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitan, dan Fakultas Pedagogik Universitas Gajah Mada.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka atas dorongan Prof. Moh. Yamin pada tahun 1954 didirikanlah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di empat tempat yaitu di Batu Sangkar, Bandung, Malang dan Tondano. Atas dasar konferensi antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) negeri seluruh Indonesia di Malang tanggal 21 s.d. 25 Agustus 1960, maka berbagai lembaga pendidikan tenaga guru (PGSLP, Kursus BI, BII dan PTPG) diintegrasikan ke dalam FKIP pada Universitas. Selanjutnya pada tahun 1960-an didirikanlah IKIP yang berdiri sendiri sebagai perpindahan dari PTPG sesuai dengan UU PT No. 22 Tahun 1961, sekalipun demikian di beberapa Universitas FKIP tetap berdiri.

b. Lahirnya Perguruan Tinggi.

Antara tahun 1949-1961 pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT antara lain: Universitas Gajah Mada (20 November 1949), Universita Indonesia (1950), Universitas Airlangga (1954). Universitas Hasanuddin, PTPG yang kemudian menjadi IKIP (1954-1961), Universitas Andalas (1956) dan Universitas Sumatera Utara di Medan.

Pada tanggal 4 Desember 1961 lahir UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Pokok-pokok yang menonjol dalam UU ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah prinsip Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Era Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969.

Pidato Presiden RI tgl. 17 Agustus 1959 sebagai penjelasan resmi tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikenal sebagai *Manifesto Politik (Manipol).* Melalui TAP MPRS-

RI No. I/MPRS/1960 Manifesto Politik tersebut ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan berdasarkan TAP tersebut dikeluarkan pula TAP MPRS-RI No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969. Di dalam TAP tersebut antara lain dikatakan bahwa pembangunan semesta berencana tahap pertama ini merupakan pembangunan dalam masa peralihan menuju masyarakat adil dan makmur, demikian pula pembangunan tersebut sifatnya menyeluruh. Dasar-dasar pembangunan tersebut ialah Pancasila dan Manipol serta untuk mengembangkan kepribadian Indonesia. Dalam era ini Manipol dijadikan doktrin negara, dan dalam perkembangan selanjutnya, intisari Manipol dirangkumkan dengan kependekan USDEK, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK secara sistematis diindoktrinasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di semua jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam TAP-TAP MPRS di atas ada beberapa hal yang menarik perhatian, antara lain bahwa: (1) untuk mengembangkan kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia, maka pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing harus ditolak; (2) Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi; (3) pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa para siswa/mahasiswa *berhak untuk tidak ikut serta,* apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya. Rumusan ini jelas merupakan rumusan yang dimasukan oleh golongan politik tertentu. Jelas-jelas rumusan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila (H.A.R. Tilaar, 1995).

Setelah Presiden menyatakan Dekrit 5 Juli 1959, salah satu usaha menyesuaikan pendidikan nasional dengan pekembangan politik pada masa itu, maka atas dasar Instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1 tanggal 17 Agustus 1959 di keluarkan apa yang disebut *Sapta Usaha Tama.* Sebagai pelaksanaan instruksi di atas, di dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tanggal 17 Agustus 1961 dirumuskan sebagai berikut: 1) Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkapnya, sebagai asas pendidikan nasional. 2) Menetapkan *Pantja Wardhana.* Selain itu diselenggarakan pula apa yang disebut dengan *Hari Krida*.

Dalam rangka menyesuaikan segala usaha untuk mewujudkan Manipol, melalui Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 pendidikan nasional dipandang sebagai sarana yang maha penting, fungsi pendidikan nasional dipandang sebagai alat revolusi. Pendidikan harus difungsikan atau harus memiliki Lima Dharma Bhakti Pendidikan, yaitu: (1) Membina Manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi (Moral Pancasila); (2) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segenap bidang dan tingkatnya *(manpower)*; (3) Memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional; (4) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) Menggerakan dan menyadarkan

seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat dan manusia Indonesia Baru.

Selanjutnya dinyatakan bahwa asas pendidikan nasional adalah Pancasila – Manipol USDEK. Dengan demikian ***tujuan pendidikan nasional*** adalah untuk melahirkan warga negara-warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Dalam hal ini, moral pendidikan nasional ialah Pancasila Manipol/USDEK, dan politik pendidikannya adalah Manifesto Politik. Selanjutnya melalui Penetapan Presiden RI No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila antara lain dirumuskan kembali mengenai dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik nasional. Yang menarik dalam rumusan-rumusan tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa tugas pendidikan nasional Indonesia ialah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan *Nasakom*.

Banyak program pembangunan yang telah direncanakan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969). Rencana proyek pembangunan di bidang pendidikan antara lain berkenaan pengembangan pendidikan tinggi, diprioritaskannya pengembangan sekolah-sekolah kejuruan, kursus-kursus, dsb. Namun demikian akibat pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI, maka rontoklah rencana pembangunan nasional semesta berencana tersebut.

Setelah pemberontakan G. 30 S/PKI dapat ditumpas, terjadi suatu keadaan peralihan masyarakat Indonesia dari *Orde Lama* ke *Orde Baru*. Dalam menegakkan Orde Baru ini terlibat secara aktif golongan intelektual yang dikenal sebagai KAMI dan KAPPI yang menggelorakan Tri Tura. Khususnya dalam bidang pendidikan, pada masa ini prinsip pendidikan Pantja Wardhana kemudian disusul dengan *sistem pendidikan nasional Pancasila*. Hal ini sebagaimana isi Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa *sistem pendidikan haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya ialah membentuk manusia Pancasilais sejati. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik manusia.* Hal tersebut diperkuat lagi dengan Tap MPRS RI No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selanjutnya, melalui TAP MPR-RI No. V/MPR/1973 tentang Pencabutan produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan MPRS-RI menyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut TAP I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, juncto TAP XXXIV/MPRS/67 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN (H.A.R. Tilar, 1995).

2. Pendidikan Pada Masa PJP I

Pelaksanaan Pelita I PJP I dicanangkan mulai 1 April 1969, maka pada tgl. 28-30 April 1969 pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar/pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konperensi dalam rangka: 1) mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, dan 2) menyusun suatu prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya.

Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahirnya *Proyek Penilaian Nasional Pendidikan* **(PPNP)** pada tgl. 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tgl. 26 Mei 1969. Isi SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu dua tahun (kemudian diubah menjadi tiga tahun) PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Hasil kerja PPNP dimanfaatkan oleh *Badan Pengembangan Pendidikan* atau **BPP** (Sekarang BALITBANG) Depdikbud yang didirikan melalui Keputusan Presiden No. 84/1969 tgl. 18 Oktober 1969. Hasil kerja PPNP dijadikan dasar perencanaan pendidikan yang lebih baik untuk Pelita II serta telah meletakan dasar-dasar perencanaan pendidikan untuk Pelita-Pelita selanjutnya. Dengan hasil kerja PPNP inilah pembangunan pendidikan untuk PJP I mulai dimantapkan.

Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP I terdapat beberapa kebijakan yang terus menerus dikemukakan, yaitu: 1) relevansi pendidikan, 2) pemerataan pendidikan, 3) peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, 4) mutu pendidikan, dan 5) pendidikan kejuruan. Selain kebijakan pokok tersebut terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian kita. Pertama, kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam bidang pendidikan. Kedua, pengembangan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Ketiga, dirumuskan dan disyahkannya UU RI No. 2 Tahun 1989 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional" sebagai pengganti UU pendidikan lama yang telah diundangkan sejak tahun 1950.

Tujuan Pendidikan Nasional. Sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirumuskan bahwa *Tujuan Pendidikan* adalah untuk membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kurikulum Pendidikan. Dalam PJP I telah dilakukan tiga kali perubahan kurikulum pendidikan (sekolah), yaitu apa yang dikenal sebagai: Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984.

Di dalam kurikulum 1968 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasilais sejati. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik yang kuat. Namun demikian, salah satu ciri utama kurikulum 1968 ini yaitu organisasi kurikulumnya masih berorientasi kepada bahan/mata pelajaran. Dengan mengacu kepada Tap MPR No. II/MPR/1973 tentang GBHN dan dengan menampung berbagai hasil percobaan dalam bidang pendidikan waktu itu, maka kurikulum 1968 diperbaharui dengan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dikembangkan dengan menggunakan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Satuan Pelajaran atau Modul. Ciri utama kurikulum 1975 yaitu organisasi kurikulumnya yang berorientasi kepada tujuan pendidikan, menekankan CBSA dan konsep belajar tuntas. Memang dalam pelaksanaan kurikulum 1975 ini hierarkhi tujuan pendidikan menjadi jelas, namun demikian kurikulum ini masih bersifat *sentralistik.*

Dengan lahirnya Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, dan berbagai masukan dari Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN), Kurikulum 1975 diperbaharui lagi dengan Kurikulum 1984. Hasil percobaan di Cianjur tentang CBSA lebih memantapkan penyusunan kurikulum tersebut. Pada tingkat SMA, kurikulum ini terdiri atas Program Inti dan Program Pilihan. Juga dibedakan antara Program A untuk jalur akademik dan Program B untuk siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi sehingga memperoleh program-program latihan kekaryaan. Sayang sekali kurikulum ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, seperti program B tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan tenaga maupun biayanya. Selain itu Kurikulum 1984 juga masih bersifat *sentralistik*. Contoh kekurangan tenaga antara lain ditunjukkan oleh hasil penelitian Konsorsium Ilmu Pendidikan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajarkan mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Demikian pula bahwa kurikulum tersebut tidak didesiminasikan ke LPTK-LPTK sehingga calon-calon guru tidak mengetahui apa sebenarnya isi kurikulum 1984.

Kurikulum Pendidikan Kejuruan. Dalam Pelita I selain penyempurnaan sistem sekolah kejuruan, juga ditingkatkan mutu pendidikannya terutama mutu guru dan laboratoriumnya. Dengan dana pinjaman Bank Dunia diadakan berbagai usaha untuk meningkatkan pendidikan teknik menengah. Beberapa STM ditingkatkan, juga membangun apa yang disebut Sekolah Teknik Menengah Pembangunan, diadakan bengkel-bengkel latihan pusat yang dapat digunakan beberapa STM termasuk STM swasta. Usaha perbaikan kurikulum terus menerus, baik melalui dana pinjaman dari ADB *(Asian Development Bank),* juga bantun teknis dari negara-negara sahabat, seperti Australia, Swisss, dan Austria. Memang dengan usaha-usaha itu beberapa STM atau pusat pelatihan tenaga teknik seperti yang ada di Bandung dengan bantuan pemerintah Australia telah dapat menjembatani hubungan antara kurikulum STM atau

pusat pelatihan guru teknik dengan dunia industri yang berada di sekitarnya. Namun berbagai usaha tersebut secara keseluruhan belum dapat memenuhi kebutuhan baik mengenai jumlah sekolah kejuruan maupun mutunya. Kurikulum sekolah kejuruan masih terasa masih terlalu banyak mata pelajaran teorinya dan masih terbatas latihan-latihan prakteknya yang justru sangat diperlukan. Peningkatan mutu kurikulum sekolah kejuruan tersebut mengalami kesulitan antara lain juga karena dunia industri kita pada saat itu masih belum menyadari pentingnya kaitan antara sekolah kejuruan dengan sekolah kerja H.A.R. Tilaar, 1995).

Kurikulum Pendidikan Tinggi (PT). Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan tingi termasuk kurikulumnya juga telah dilaksanakan selama PJP I. Salah satu usahanya adalah dengan mengganti sistem *kontinental* dengan sistem *anglo saxis*, yaitu dengan penerapan sistem kredit semester (Sistem SKS) pada pertengahan tahun 1970-an. Maksudnya adalah untuk meningkatkan efisiensi internal dari PT yang pada saat itu memang sangat rendah. Selain Sistem SKS, juga mata-mata kuliah yang diajarkan dikaji dan disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam rangka inilah dibentuk apa yang disebut konsorsium perguruan tinggi menurut program studi yang disajikan di PT.

Sarana, Prasarana Pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia selama PJP I secara kuantitatif merupakan fenomena yang menakjubkan, bukan hanya bagi kita sendiri tetapi juga bagi dunia luar. Secara akumulatif pertumbuhan rata-rata siswa SD selama PJP I sekitar 50% pertahun, SLTP 150%, SLA 220%, dan Perguruan Tingi (PT) 320%. Angka partisipasi kasar SD dari 64% pada permulaan PJP I menjadi 99,7% pada akhir PJP I; SMTP dari 16,9% menjadi 66,7%; SMTA dari 8,6% menjadi 45,1%; dan PT dari 1% menjadi 11% (H.A.R. Tilaar,1995)..

Pertumbuhan jumlah siswa/mahasiswa di berbagai jenjang dan jenis pendidikan tersebut tentu saja disertai pula dengan penambahan prasarana dan sarana pendidikan. Antara lain: gedung-gedung sekolah baru, penambahan ruang belajar, buku-buku pelajaran, pengadaan sarana-sarana pembantu proses belajar-mengajar, pembangunan sarana fisik Perguruan Tinggi, dan pembangunan sarana pendidikan dasar melalui Inpres Pembangunan SD. Prasarana dan sarana pendidikan memang telah banyak dibangun selama PJP I, namun demikian pengadan prasarana dan sarana pendidikan tersebut ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan.

Wajib Belajar. Melalui program pembangunan di atas, dan dengan dicanangkannya Wajib Belajar Sekolah Dasar sejak tanggal 2 Mei 1984, maka pada akhir Pelita II kesempatan belajar anak-anak usia 7-12 tahun praktis telah dicapai, walaupun tentunya masih terdapat sejumlah anak-anak yang hidup terpencil, anak-anak luar biasa, maupun putus sekolah yang masih harus dituntaskan di dalam pembangunan selanjutnya (pada tahun 1988/1989 atau akhir Pelita IV angka partisipasi SD telah mencapai 99,6% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yaitu 30.182.900 anak). Wajib Belajar SD Enam Tahun pada

Pelita V telah diperluas dengan perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Sebab itulah UNESCO pada tahun 1994 menganugerahkan *Bintang Aviciena* kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pengakuan peranan pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan rakyat (H.A.R. Tilaar, 1995).

Tenaga Kependidikan dan Lembaga PendidikanTenaga Kependidikan (LPTK). Berkenaan dengan hal ini dalam PJP I antara lain terdapat dua masalah pokok, yaitu: 1) kekurangan tenaga pengajar yang berwenang pada semua jenis dan tingkat pendidikan, dan 2) masalah peningkatan mutu Tenaga Kependidikan dan LPTK.

1) Kekurangan tenaga pengajar yang berwenang pada semua jenis dan tingkat pendidikan.

   Pada tahun 1989/1990 untuk SD terdapat kekurangan tenaga hampir 600.000 orang. Ditambah lagi dengan kulaifikasi guru SD banyak yang belum memenuhi persyaratan. Untuk SLTP dan SLTA masalahnya berlainan, walaupun secara makro terdapat kelebihan guru, tetapi dalam kenyataannya terdapat kekurangan guru yang parah karena memusatnya para guru di kota-kota. Selain itu banyak mata pelajaran yang tenaga gurunya tidak mencukupi. Yang sangat kekurangan adalah guru-guru IPA dan Matematika. Sekitar 40% guru matematika di SMP sebenarnya berlatar belakang sebagai guru agama, sosiologi, antropologi dan ilmu sosial lainnya. Sekita 30% guru SMA mengajar mata pelajaran yang bukan kemampuan/keahliannya. Mengenai ijazah tertinggi yang dimiliki para guru SMP Negeri: 8,3% dari 204.125 orang guru SMP Negeri belum lulus SLTA, separohnya memiliki ijazah PGSLP atau D1, 17,1% berijazah PGSLP atau D2, dan hanya 24,2 % berijazah Sarjana Muda atau S1. Selanjutnya di SMA Negeri dan Swasta terdapat 4,5% guru belum tamat SLTA, 3,6% berijazah PGSLP atau D1, 58,4% berijazah PGSLA atau D3, dan sisanya 33,5% berijazah sarjana muda atau S1.

   Pada tahun 1989 dari sekitar 11 ribu dosen pada 30 IKIP dan FIP Negeri baru 3% berkualifikasi S3, 10% S2 dan 87% berkualifikasi S1. Keadaan ini tentu saja mempengaruhi usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masalah pemenuhan kekurangan tenaga kependidikan yang berwenang terhambat bukan hanya karena penyebaran yang tidakmerata tetapi juga karena masalah dana yang tidak mencukupi.

2) Masalah peningkatan mutu Tenaga Kependidikan dan LPTK.

   Dalam PJP I telah diambil keputusan untuk meningkatkan kualifikasi guru SD dengan Diploma I dan II, guru SMP dengan D III dan untuk SMA semakin lama semakin dipegang oleh lulusan S1. Berkenaan dengan hal di atas, telah dilakukan pula pembaharuan dalam bentuk likuidasi SPG dan SGO menjadi Program DII Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk PT telah didirikan berbagi Program Pascasarjana (S2, S3) dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu para dosen PT. Bea siswa dari dalam dan luar negeri telah lama dilaksanakan, demikian pula telah didirikan

beberapa Pusat Antar Universitas (PAU atau *inter-university center*). Selain itu untuk meningkatkan ilmu pendidikan telah didirikan Konsorsium Ilmu Pendidikan (H.A.R. Tilaar, 1995).

Pendidikan Kejuruan, Pelatihan dan Ketenagakerjaan. Konsep keterkaitan antara pendidikan nasional dan dunia kerja yang telah dirintis sejak Pelita I dalam pelaksanaannya pada Pelita-Pelita berikutnya mengalami berbagai hambatan. Setiap sektor termasuk sektor pendidikan dan tenaga kerja masing-masing berjalan sendiri-sendiri.Akibatnya terjadilah ketidakserasian antara output sistem pendidikan nasional dengan kebutuhan tenaga kerja (muncul masalah *relevansi* atau masalah *link and match*). Sistem pendidikan telah menghasilkan tenaga terdidik tetapi tidak terampil, sehingga pengangguran makin lama semakin besar jumlahnya.

Pada PJP I kualitas manusia Indonesia memang meningkat, termasuk pula pendidikannya. Contoh: antara tahun 1971-1990 penduduk yang tidak berpendidikan berkurang dari 42,5% menjadi 18,9%. Pada Tahun 1971 penduduk yang tamat SD baru 21,6%, sedangkan tahun 1990 menjadi 30,1%. Begitu pula untuk tingkat SLTP dan SLTA naik lebih dari 300% dan untuk tingkat PT menjadi hampir lima kali lipat. Naiknya tingkat pendidikan manusia Indonesia berpengaruh terhadap latar belakang pendidikan tenaga kerja kita. Makin tinggi latar belakang pendidikan tenaga kerja diharapkan akan semakin tinggi pula produktivitasnya. Namun demikian, pada tahun 1990 tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah terendah di ASEAN. Selain itu apabila pada tahun 1971 terdapat 840.000 orang penganggur, maka pada tahun 1990 meningkat tiga kali lipat yaitu hampir mencapai 2,5 juta orang penganggur. Memang tercatat pula bahwa jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat, yaitu jika pada tahun 1971 baru sekitar 40 juta, maka pada tahun 1990 menjadi 72 juta.

Keadaan di atas menunjukkan adanya masalah relevansi dan atau kurangnya keterkaitan dan kesepadanan antara output pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Contohnya: terdapat kelebihan lulusan SLTA kejuruan, tetapi sebenarnya di lapangan terdapat kekurangan yang besar mengenai tenaga-tenaga tamatan SLTA Kejuran Teknik.

Terdapat pula masalah koordinasi mengenai pendidikan kejuruan, pelatihan dan ketenagakerjaan ini, yaitu simpang siurnya mengenai tanggung jawab pembinaan pendidikan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 (mengenai tugas Menteri Pendidikan, Menteri Tenaga Kerja, dan Ketua LAN) dengan PP No. 73 Tahun 1991 yang mengacu pada UU RI No. 2 Tahun 1989 yang mengatur tentang Pendidikan Luar Sekolah yang juga mengatur tugas PLS yang mencakup berbagai jenis pelatihan (kursus). Selain hal di atas, masih dirasakan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat (industri, dsb) dalam rangka pendidikan dan pelatihan (H.A.R. Tilaar, 1995).

*Pendidikan Tinggi. S*elama PJP I pemerintah telah melakukan upaya peningkatan *pemerataan pendidikan tinggi*, yaitu melalui pembangunan sarana fisik PTN-PTN serta sarana penunjang lainnya dengan menggunakan "strategi bertahap bergilir". Dalam peningkatan pemerataan PT ini partisipasi PTS begitu besar. Tercatat data bahwa pada tahun 1993/1994 jumlah PTN hanya 51, sedangkan PTS berjumlah 1035. Upaya-upaya itu telah memperbesar angka partisipasi pendidikan tinggi. Jika pada tahun 1968 tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya 1,6% (156.000 orang), maka pada akhir PJP I menjadi 11% (2.491.100 orang).

Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi memang cukup menggembirakan, sekalipun jika dibandingkan dengan di negara lain masih jauh tertinggal. Namun demikian relevansi dan mutu pendidikan tinggi masih perlu terus ditingkatkan. Contoh: di satu pihak terdapat kelebihan produksi sarjana, di pihak lain terdapat kekurangan tenaga-tenaga sarjana dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini berkaitan dengan masalah kurikulum PT tersebut. Komposisi jenis-jenis program studi yang ada menunjukkan bahwa program studi ilmu sosial dan ilmu pendidikan/keguruan lebih banyak disbanding dengan program studi lainnya. Pengangguran sarjana menunjukkan lebih besar pada kedua jenis program studi tersebut.

Mutu pendidikan tinggi kita memang bervariasi mulai dari mutu yang paling tinggi sampai dengan yang sangat diragukan. Hal ini ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: mutu dosennya yang kebanyakan masih berkualifikasi S1, belum cukup tersedianya sarana penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, serta biaya operasional yang belum memadai. Selain itu juga kualitas raw input ke PT yang berlatarbelakang NEM antara 4-6 (H.A.R. Tilaar, 1995)..

Inovasi Pendidikan. Selama PJP I dan sudah sejak Pelita I keinginan untuk melakukan inovasi pendidikan sangat besar. Bahkan sejak sebelum Pelita I dimulai telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan agar dapat dilakukan usaha-usaha peningkatan sistem dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Selain berkenaan dengan tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, sarana/prasarana pendidikan dan wajib belajar, pelaksanaan beberapa inovasi pendidikan selama PJP I yaitu: Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), Proyek Pamong, Proyek CBSA, STEPPES, COPLANER, dan *Primary Education Quality Improvement Project (PEQIP).* Sayang sekali berbagai inovasi pendidikan yang telah dilaksanakan banyak menghadapi kemandegan dan tidak berkelanjutan (HAR Tilaar ,1995).

Pembiayaan. Sumber dana pembangunan pendidikan pada PJP I berasal dari dana rupiah dan dana yang diperoleh dari kerja sama luar negeri. Di dalam pembiayaan pendidikan terdapat berbagai sumber yaitu: 1) Pemerintah yang dapat berupa biaya rutin, biaya pembangunan, biaya INPRES SD, dan subsidi batuan pembangunan pendidikan (SBPP). 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 3) Sumbangan untuk badan pembantu pembinaan pendidikan (BP3).

Jumlah dana pembangunan untuk sektor pendidikan pada Pelita I sebesar 83,8 milyar rupiah (6,8% dari jumlah dana pembangunan) , adapun pada Pelita V meningkat menjadi 9 trilyun rupiah (11,4% dari jumlah dana pembangunan). Jadi jumlah dana pembangunan sektor pendidikan selama PJP I mencapai 20 trilyun rupiah. Dana sektor pendidikan ini belum lagi ditambah dari dana rutin, SPP, dll.

Kualitas Pendidikan. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu selama PJP I telah banyak upaya pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. HAR Tilaar (1995) menunjukkan kualitas pendidikan pada PJP I antara lain dengan indikator sebagai berikut:

1) Dana Pendidikan (Pendidikan Dasar): Belum memadainya dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tahun 1991 unit cost untu siswa SD tidak lebih dari 5 US $, sedangkan negara maju menyediakan 105,5 US $.
2) Kelulusan SD: Persentase jumlah siswa yang menamatkan SD pada tahun 1989 sekitar 70%, sedangkan di negara maju mencapai 91%. Data ini menunjukkan pula bahwa SD kita pada saat itu mengalamai ketidak efisienan dengan data rasio input-output sebesar 70%, sehingga rata-rata waktu yang diperlukan untuk menamatkan SD adalah 8,5 tahun.
3) Prestasi membaca komprehensif juga dinilai sangat kurang dibanding dengan di negara maju.
4) Daya Serap terhadap isi kurikulum: Rata-rata hasil EBTANAS Murni siswa SMA pada tahun 1987-1990 menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan kita. Misalnya untuk mata pelajaran PMP dan Bahasa Indonesia rata-ratanya 6; sedangkan B. Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia antara 4-5. Artinya daya serap lulusan SMA kurang dari 50% dari apa yang ditentukan dalam Kurikulum 1984.

Selain hal di atas, kita juga mengetahui bahwa jumlah pengangguran semakin meningkat. Apabila tahun 1971 tercatat 840.000 orang, maka pada tahun 1990 menjadi hampir 2,5 juta orang. Pengangguran itu pun adalah banyak dari lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Di satu pihak terdapat kelebihan lulusan SLTA dan PT, di lain pihak terdapat kekurangan tenaga-tenaga tertentu dari lulusan SLTA dan PT tersebut.

Latihan

Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia kita mengenal pembangunan pendidikan pada era Orde Lama (1961-1969) dan era pembangunan Pendidikan pada era Orde Baru (1969-1993). Coba Anda bandingkan dasar dan tujuan pendidikan dari kedua era atau orde pembangunan tersebut !

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, Anda perlu mengingat kembali Makna dari Dekrit Presiden 5 juli 1959, Manipol USDEK, dan mengenai Dasar/asas serta tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 dan Penetapan Presiden RI No. 19 Tahun 1965. Selain itu Anda perlu pula memperhatikan makna Orde Baru, Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966, dan UU RI No. 2 Tahun 1989.

Rangkuman

Periode 1945-1969. Pada tgl. 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Sejak saat itu jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sekalipun pada tahun 1949 terjadi perubahan dasar negara yaitu dengan UUD RIS, tetapi pendidikan nasional tetap dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945. Sejak tahun 1950 bangsa Indonesia telah mempunyai UU RI No. 4 Tahun 1950 tentang "Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah" *yuncto* UU RI No. 12 Tahun 1954. Di dalam Pasal 3 UU ini termaktub bahwa "Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteran masyarakat dan tanah air". Adapun Pasal 4 menyatakan: "Pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam "Panca Sila" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia".

Pada Tahun 1950-1960 telah dirancang dan dilaksanakan wajib belajar SD, untuk mengatasi kekurangan guru didirikan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar (KPKPKB). KPKPKB selanjutnya ditingkatkan menjadi SGB dan SGA. Adapun untuk guru sekolah menengah didirikan PGSLP dan APD. Tahun 1954 didirikan PTPG yang diubah menjadi FKIP dan akhirnya menjadi IKIP. Selain LPTK, sejak tahun 1949-1961 pemerintah juga telah mendirikan beberapa perguruan tinggi (universitas) dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1961 tentang "Perguruan Tinggi".

Pada era Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969) sekalipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan bahwa Bangsa dan Negara Kesatuan RI kembali ke UUD 1945, tetapi karena dominasi politik tertentu maka dasar atau asas pendidikan nasional diubah menjadi *Pancasila dan Manipol USDEK*. Pada era ini tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan warga-warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Tugas pendidikan adalah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan *Nasakom.* Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka ditetapkan apa yang disebut Sapta Usaha Tama, Pantja Wardhana, dan Hari Krida. Berbagai program pembangunan pada era ini akhirnya rontok akibat terjadinya Pemberontakan G-30 S/PKI pada tahun 1965 dan lahirlah era baru yang

dikenal dengan Orde Baru.

Era PJP I (1969-1993). Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP I dasar pendidikan dikembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945, yang kemudian di dalam UU No. 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sejak awal Pelita I PJP I telah dilakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan nasional, selanjutnya pembangunan pendidikan dilakukan secara bersinambungan pada setiap Pelita. Selama PJP I telah dilakukan tiga kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975 dan 1984; penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan; Inpres SD; Upaya peningkatan jumlah dan mutu tenaga kependidikan; serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya demi meningkatkan partisipasi, relevansi, efisiensi, efektivitas dan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, pembangunan pendidikan dibiayai baik dengan menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjasama luar negeri. Memang banyak hasil pembangunan pendidikan selama PJP I yang telah di raih, namun demikian permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan dan masih harus terus diupayakan melalui pembangunan pendidikan pada PJP selanjutnya.

Test Formatif 3

1. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikan apakah yang telah diambil pemerintah setelah proklamasi 17 Agustus 1945 hingga menjelang era *Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama(1961)* ?
2. Sebagai koreksi terhadap kebijakan dan praktek pendidikan era Orde Lama, Orde Baru menetapkan kembali Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional. Apakah asas (dasar) pendidikan nasional pada era Orde Lama ?
3. Selama PJP I telah dilakukan tiga kali perubahan kurikulum sekolah, kemukakan ketiga kurikulum yang dimaksud !
4. Hasil pembangunan pendidikan selama PJP I dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan di Indonesia masih memunculkan masalah relevansi. Jelaskan !

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari modul selanjutnya. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN

Tes Formatif 1:

1. Tujuan Pendidikan pada zaman Purba adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan nilai-nilai religi.
2. Perubahan atau pekembangan yang terjadi antara lain: a) dasar atau nilai acuan pendidikan adalah ajaran Hindu/Budha; b) berdirinya lembaga pendidikan yang dikenal sebagai *pesantren atau paguron*; dan c) berkembangnya cara-cara pendidikan *sistem guru-kula*.
3. Pada zaman Kerajaan Islam pendidikan bersifat demokratis, maksudnya bahwa kesempatan pendidikan diberikan bagi semua orang. Dasarnya adalah ajaran Islam yang tidak mengenal kasta-kasta, serta hukum wajibnya setiap orang mencari ilmu.
4. Tujuan pendidikan pada zaman Portugis/Spanyol utamanya adalah demi penyebaran agaman Katholik.
5. Dasar sosial budayanya adalah politik kolonialisme, diberlakukannya stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku bangsa, dan kepentingan monopoli ekonomi.

Tujuan pendidikannya untuk mengahasilkan tenaga kerja murah, dan untuk melanggengkan penjajahan.

Bagi Bumi Putera, dualisme penyelenggaraan pendidikan sangat merugikan, sebab pendidikan tersebut bukan untuk mencerdaskan kehidupan kaum Bumi Putera serta adanya diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan, dan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum Bumi Putera. Adapun sistem konkordansi di satu pihak menguntungkan karena penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama dengan di negeri Belanda, tetapi dipihak lain merugikan karena dengan sistem konkordansi jiwa kaum Bumi Putera diupayakan agar menjadi asing dengan budaya dan kebangsaannya sendiri.

Test Formatif 2:

1. Sebab kaum pergerakan nasional menyadari bahwa pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda tidak memungkinkan bangsa Indonesia menjadi cerdas,

bebas, bersatu dan merdeka. Tujuan dan ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda diarahkan hanya untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi melanggengkan penjajahan.
2. Karakteristik pendidikan kaum pergerakan adalah: (1) bersifat nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.
3. Latar Belakang lahirnya Muhammadiyah adalah atas dasar kesadaran bahwa: pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, melainkan dilaksanakan hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda; melihat gejala nyata bahwa pemerintah Belanda *(missionaris)* berusaha memperluas pendidikan dan pengajaran Kristen (kritenisasi); dan dengan didorong oleh cita-cita ingin mengadakan pembaharuan dalam cara berfikir dan beramal masyarakat menurut tuntutan agama Islam yaitu Qur'an dan Hadits sebagaimana diajarkan oleh Rosulullah, maka pada tanggal 18 November 1912 K. H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta.
4. Panca Dharma adalah dasar pendidikan Taman Siswa, yaitu: kebebasan/kemerdekaan, kebudayaan, kodrat alam, kebangsaan, dan kemanusiaan.
   Semboyan Tutwuri Handayani atau Among Methode terutama dilandasi dharma kebebasan/kemerdekaan dan kodrat alam.
5. Karakteristik pendidikannya adalah: 1) hilangnya *sistem dualisme* pendidikan, 2) kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat, 3) susunan jenjang sekolah menjadi SR 6 Th., SM 3 Th., SMT 3 Th., dan PT., 4) hilangnya *sistem konkordansi* 5) bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah.

Test Formatif 3:

1. Kebijakan dan praktek pendidikanyang telah diambil pemerintah saat itu antara lain: 1) mengeluarkan "instruksi Umum" agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme; 2) membentuk Panitia Perancang UU mengenai Pendidikan dan Pengajaran yang pada akhirnya melahirkan UU RI No. 4 Tahun 1950 Tentang "Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah" yuncto UU RI No. 12 Tahun 1954; 3) melaksanakan Wajar SD bagi anak-anak usia 8 tahun; 4) melaksanakan KPKPKB, SGB, SGA; 5) Selanjutnya mendirikan Kursus PGSLP, Kursus BI dan BII; 5) mendirikan PTPG, diubah menjadi FKIP dan akhirnya menjadi IKIP. 6) mendirikan beberapa Universitas, dan 7) melahirkan UU No. 22 Tahun 1961 tentang "Perguruan Tinggi".

2. Dasar pendidikan nasional pada masa Orde Lama adalah Pancasila dan Manipol USDEK.
3. Kurikulum 1968, kurikulum 1975, dan kurikulum 1984.
4 Hasil pembangunan pendidikan dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan masih memunculkan masalah relevansi: Secara kuantitas lulusan sekolah memang dipandang cukup banyak, tetapi mereka belum terampil dan kemampuan mereka tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Dengan demikian dibanding dengan pada awal PJP I, maka pada akhir PJP I jumlah pengangguran semakin meningkat.

LANDASAN YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

MODUL

6

LANDASAN YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendahuluan

Sistem pendidikan nasional memiliki landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan pemahaman tersebut diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Modul ini akan membantu Anda dalam memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional, khususnya landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan pada SD/MI baik yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional, khususnya landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan pada SD/MI dan landasan yuridis mengenai guru sebagai pendidik profesional. Adapun secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan landasan yuridis cita-cita dan amanat mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
2. Menjelaskan landasan yuridis tentang dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan di dalam sistem pendidikan ansional.
3. Menjelaskan landasan yuridis tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Menjelaskan landasan yuridis tentang jalur jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
5. Menjelaskan landasan yuridis tentang kurikulum dan bahasa pengantar.
6. Menjelaskan landasan yuridis tentang peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Menjelaskan landasan yuridis fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan.

8. Menjelaskan landasan yuridis lingkup Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI).
9. Menjelaskan landasan yuridis tentang guru sebagai pendidik profesional.

Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kegiatan belajar 2 membahas landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Adapun kegiatan belajar 3 membahas tentang standar nasional pendidikan SD/MI dan guru sebagai pendidik profesional.

Untuk dapat memahami materi modul ini dengan baik serta mencapai kompetensi yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut ini:

1. Sebelum membaca modul ini, pelajari terlebih dahulu glosarium pada akhir modul yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakan dalam modul ini.
2. Baca materi modul dengan seksama, tambahkan catatan pinggir, berupa tanda tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan sesuai pemikiran yang muncul.
3. Terdapat keterkaitan antara materi sub pokok bahasan kesatu (kegiatan pembelajaran satu) dengan materi sub pokok bahasan kedua (kegiatan pembelajaran kedua) dst. Materi pada kegiatan pembelajaran kesatu berimplikasi terhadap materi kegiatan pembelajaran kedua dst. Karena itu untuk menguasai keseluruhan materi modul ini mesti dimulai dengan memahami secara berurutan materi modul pada setiap sub pokok bahasan yang disajikan pada kegiatan pembelajaran satu s.d. kegiatan pembelajaran tiga secara berurutan.
4. Cermati dan kerjakan tugas yang diberikan. Dalam mengerjakan tugas tersebut, gunakan pengetahuan yang telah Anda kuasai sebelumnya. Pengetahuan dan penghayatan berkenaan dengan pengalaman hidup Anda sehari-hari akan dapat membantu penyelesaian tugas.
5. Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gunakan kunci jawaban untuk membuat penilaian benar /tidaknya jawaban Anda.
6. Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutorial tatap muka dan tutorial elektronik, untuk digunakan dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir mata kuliah.

Landasan Yuridis Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan mengkaji landasan yuridis sistem pendidikan nasional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kajian dalam kegiatan belajar ini meliputi cita-cita nasional mengenai pendidikan; amanat UUD 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional; pengertian pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional; dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah; serta wajib belajar. Dengan demikian setelah mempelajari kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berdasarkan UUD 1945. Selain itu Anda juga akan dapat menjelaskan landasan yuridis berdasarkan UUD 1945 maupun UU RI No. 20 tahun 2003 berkenaan dengan: pengertian pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional; visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara dan pemerintah; serta wajib belajar.

1. Cita-cita Pendidikan dan Amanat UUD Negara R.I. Tahun 1945 (UUD 1945) Mengenai Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tgl. 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tgl. 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Apabila Anda mengkaji alinea keempat Pembukaan UUD 1945, di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar "Pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".

2. Definisi Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional

Melalui modul 5 (Landasan Historis Pendidikan) telah Anda ketahui bahwa Pemerintah telah memberlakukan UU RI No. 4 tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah yuncto UU RI No. 12 Tahun 1954. Sejak 27 Maret 1989 undang-undang tersebut diganti dengan UU RI No. 2 Tahun 1989 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Adapun sejak tanggal 8 Juli 2003 Pemerintah memperbaharui dan menggantinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Mari kita kaji apa yang dimaksud dengan pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional menurut undang-undang tersebut.

Pendidikan. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

*Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional.*Yang dimaksud pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003). Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Pasal 1 ayat 3 UU RI No. 20 Tahun 2003).

3. Dasar, Visi, Misi, Fungsi, Tujuan, Strategi Pendidikan nasional, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Dasar Pendidikan Nasional. Dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 bahwa: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Visi dan Misi Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan , pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI (Penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003, serta berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk "berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Pasal 3 dan Penjelasan atas UU RI No. 20 tahun 2003).

Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (Penjelasan atas UU RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kamauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003).

4. Hak dan Kewajiban warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Negara dan Pemerintah

Hak dan Kewajiban Warga Negara. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selanjutnya dalam Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Berkenaan dengan Pasal 5 ayat (2) s.d. ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003, Pasal 32 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mempu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di samping mempunyai berbagai hak tersebut di atas, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya" (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945). Selanjutnya Pasal 6 UU RI Tahun 2003 menyatakan:

(1) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan Kewajiban Orang Tua. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada pasal 7 UU RI No. 20 tahun 2003, yaitu:

(1) Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Hak dan Kewajiban Masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat termaktub pada pasal 8 dan pasal 9 UU RI Tahun 2003. Pasal 8 menyatakan: " Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Adapun pasal 9 menyatakan bahwa: "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan".

Kewajiban Negara. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan agar: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. "Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 10 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Di samping mempunyai berbagai hak tersebut, pemerintah juga mempunyai berbagai

kewajiban. Apabila Anda mengkaji kembali Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, maka dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Adapun Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar:"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Selanjutnya menurut Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

5. Wajib Belajar

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 34 UU RI No. 2003 menyatakan:

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(4) Ketenetuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dewasa ini diselenggarakan wajib belajar 9 tahun atau wajib belajar pendidikan dasar. Dengan demikian, setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Penyelenggaraan pendidikan dasar ini dapat berbentuk SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat (misalnya program Paket A) serta SMP dan madrasah tsanawiyah (Mts), atau bentuk lain sederajat (misalnya program Paket B).

Latihan

Setelah selesai mempelajari uraian materi pada kegiatan pembelajaran ini, coba Anda rumuskan : 1) apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia di bidang pendidikan sebagaimana tersurat dalam UUD 1945? 2) Kemukakan pasal dan ayat di dalam UUD

1945 yang mengamanatkan agar pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional! 3) Apakah yang dimaksud dengan pendidikan nasional? 4) Apakah dasar dan tujuan pendidikan nasional? 5) Hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki warga negara mengenai pendidikan? 6) Prinsip-prinsip apakah yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 1) Anda perlu mengkaji kembali alinea keempat Pembukaan UUD 1945. 2) Cari pada ayat-ayat yang terkandung pada Pasal 31 UUD 1945. 3) Cari pada Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 20 tahun 2003. 4) Bandingkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003. 5) Bandingkan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 serta Pasal 6 UU RI No. 20 tahun 2003. 6) Bandingkan dengan Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003.

Rangkuman

UUD 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk membiayaninya. Pasal 31 UUD 1945 juga mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kuranya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, serta memajukan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Landasan yuridis pendidikan yang bersumber dari UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional - yang dikaji dalam kegiatan pembelajaran ini - antara lain meliputi: Pasal 1 Ketentuan Umum; Penjelasan mengenai visi, misi, dan strategi pendidikan nasional; Pasal 2 mengenai dasar pendidikan nasional; Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional; Pasal 4 mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan; Pasal 5 s.d.Pasal 11 mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah; Pasal 32 mengenai Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; serta Pasal 34 mengenai wajib belajar.

Tes Formatif 1

1. Cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan (Preambule) UUD 1945, yaitu untuk ....
   A. memajukan kesejahteraan umum.
   B. mencerdaskan kehidupan bangsa.
   C. melindungi segenap bangsa Indonesia.
   D. melaksanakan ketertiban dunia.

2. Amanat UUD 1945 agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional termaktub pada ....
   A. Pasal 31 ayat (1).
   B. Pasal 31 ayat (3).
   C. Pasal 31 ayat (2).
   D. Pasal 31 ayat (4)

3. Pasal 2 UU RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dasar pendidikan nasional adalah ....
   A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   B. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003.
   C. Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   D. Pancasila dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003.

4. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" adalah ....
   A. fungsi pendidikan nasional.
   B. misi pendidikan nasional.
   C. visi pendidikan nasional.
   D. tujuan pendidikannasional.

5. "Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kamauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran". Ini adalah salah satu rumusan dari ....
   A. strategi pembangunan pendidikan nasional.
   B. seperangkat hak yang dimiliki peserta didik.
   C. visi dan misi pendidikan nasional.
   D. prinsip penyelenggaraan pendidikan.

6. Apabila seorang guru tidak adil dalam memberikan penilaian atas hasil belajar para siswanya dengan alasan perbedaan ras atau suku bangsa, berarti guru tersebut melanggar ....
   A. tujuan pendidikan nasional.
   B. prinsip penyelenggaraan pendidikan.
   C. misi pendidikan nasional.
   D. hak pemerintah.

7. “Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi” merupakan salah satu ....
   A. fungsi pendidikan nasional.
   B. strategi pembangunan pendidikan nasional.
   C. tujuan pendidikannasional.
   D. misi pendidikan nasional.

8. “Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” adalah kewajiban ....
   A. peserta didik.
   B. masyarakat.
   C. pemerintah.
   D. orang tua.

9. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti....
   A. pendidikan SD.
   B. pendidikan SMP.
   C. pendidikan dasar.
   D. pendidikan menengah.

10. Contoh pelanggaran orang tua atas kewajibannya dalam konteks wajib belajar adalah
    A. orang tua siswa tidak ikut menyumbang biaya pembangunan gedung sekolah karena tidak memiliki biaya.
    B. orang tua siswa tidak membeli buku paket yang dijual pihak sekolah karena tidak memiliki uang untuk membayarnya.
    C. orang tua menyuruh anaknya yang berusia 7 tahun mengamen di jalanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
    D. orang tua tidak mengijinkan anaknya yang berusia 7 tahun untuk mengikuti pendidikan SD atau pendidikan yang sederajat.

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar 2. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Landasan Yuridis Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Pada Jalur, Jenjang dan Satuan Pendidikan

Dalam kegiatan belajar ini Anda akan melanjutkan kajian landasan yuridis pendidikan mengenai sistem pendidikan nasional yang bersumber dari UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan mengkaji materi pada kegiatan belajar ini Anda akan dapat menjelaskan landasan yuridis tentang jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan; pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh; kurikulum, bahasa pengantar; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana, prasarana, pendanaan, pengelolaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan; serta evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan standar nasional pendidikan.

1. Jalur Jenjang, Jenis, dan Satuan Pendidikan

Jalur Pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat tiga jalur pendidikan, termaktub pada Pasal 13 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa:

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melangkapi dan memperkaya.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pendidikan Formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat 11 UU RI No. 20 Tahun 2003). Tersurat pada pasal tersebut dan ditegaskan lagi pada Pasal 14 bahwa: “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi".

Pendidikan Dasar. Pasal 17 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
(2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan atas pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa "Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B. (Catatan: Paket A dan B diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal).

Pendidikan Menengah. Menurut Pasal 18 UU RI Tahun 2003 bahwa:
(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
(3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam Penjelasan atas pasal 18 ayat (3) di atas dikemukakan bahwa: "Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C. (Catatan: Paket C diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal).

Pendidikan Tinggi. Pasal 19 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:
(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Selanjutnya menurut Pasal 20 bahwa:
(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Selain pasal (19) dan pasal (20) masih terdapat lima pasal lagi yang mengatur tentang pendidikan tinggi, yaitu pasal (21) s.d. pasal (25). Silakan Anda baca dalam UU RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jenis Pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan (Pasal 1 ayat 9). "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus" (Pasal 15 UU RI No.20 Tahun 2003). Penjelasan atas Pasal 15 ini adalah sebagai berikut:

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimalsetara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Satuan Pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 16 UU RI No. 20 Tahun 2003). Adapun yang dimaksud "*satuan pendidikan* adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan" (Pasal 1 ayat 10 UU RI No. 20 Tahun 2003). Coba Anda identifikasi berbagai satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal sebagaimana telah diuraikan di muka.

Badan Hukum Pendidikan. Pasal 53 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan :

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pendidikan Nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 ayat 12 UU RI No. 20 Tahun 2003). Selanjutnya menurut Pasal 26 bahwa:

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penialaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 ayat 13 UU RI No. 20 Tahun 2003). Selanjutnya Pasal 27 menyatakan:

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 ayat 14 UU RI No. 20 Tahun 2003). Pasal 28 UU RI No. 20 Tahun 2003 selanjutnya menyatakan:

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas Pasal 28 ayat (1): Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan *bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar*. Penjelasan atas Pasal 28 ayat (3): Taman kanak-

kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Pendidikan Kedinasan. Pasal 29 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Keagamaan. Pasal 30 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan Jarak Jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi, dan media lain (Pasal 1 ayat 15 UU RI No. 20 Tahun 2003). Selanjunya menurut Pasal 31 bahwa:

(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin

mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Kurikulum, Bahasa Pengantar, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan

Kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 ayat 19 UU RI No. 20 Tahun 2003). Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 terdapat tiga pasal yang mengatur tentang kurikulum, yaitu Pasal 36, 37, dan 38.

Pasal 36:

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, keserdasan, dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37:

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan;
c. bahasa;
d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;
f. ilmu pengetahuan sosial;
g. seni dan budaya;
h. pendidikan jasmani dan olahraga;
i. keterampilan/kejuruan; dan
j. muatan lokal.
....
(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .... diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38:
(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
....
Bahasa Pengantar. Pasal 33 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:
(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, dan/atau keterampilan tertentu.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Peserta Didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Hak Peserta Didik. Termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang segama;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
d. menndapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu

membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Kewajiban Peserta Didik. Termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa: "Setiap peserta didik berkewajiban:

b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa: "Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa: "Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah".

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Pendidik* adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun yang dimaksud *tenaga kependidikan* adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Lihat Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU RI No. 20 tahun 2003). Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 terdapat enam pasal yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan yaitu: pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.

Pasal 39:

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40:

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
c. memberi keteladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41:
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42:
(1) Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43:
(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi

kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pengelolaan Pendidikan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tentang sarana dan prasarana pendidikan dinyatakan pada Pasal 45 UU RI No. 20 Tahun 2003, yaitu:

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendanaan Pendidikan. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003, tentang pendanaan pendidikan dinyatakan pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 46:

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 47:

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
(3) Ketentuan mengenai sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 48:

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Pasal 49:

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Ketentuan menganai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengelolaan Pendidikan. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 mengenai pengelolaan pendidikan dinyatakan pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 52.

Pasal 50:

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomidalam mengelola pendidikan di lembaganya.
(7) ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51:
(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52:
(1) Pengeloaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan. Mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan dinyatakan dalam Pasal 54 sampai dengan 56 UU RI No. 20 Tahun 2003. Berikut ini beberapa pasal dan ayat mengenai peran masyarakat dalam pendidikan. Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Pasal 50 ayat 2). Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat (Pasal 55 ayat 1). Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan,

serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 55 ayat 2).

Dewan Pendidikan. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah (Pasal 56 ayat 1 UU RI No. 20 Tahun 2003). Dewan pendidikan sebagai lembaga madiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (Pasal 56 ayat 2 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Komite sekolah/Madrasah. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56 ayat 3 UU RI No. 20 Tahun 2003).

5. Evaluasi, Akreditasi, Sertifikasi, dan Standar Nasional Pendidikan.

Evaluasi. Pasal 57 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:
(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Selanjutnya Pasal 58 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:
(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan (Pasal 58 ayat 2).

Akreditasi. Pasal 60 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sertifikasi. Pasal 61 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan pada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Standar Nasional Pendidikan. Pasal 35 UU RI No. 20 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

(1) Standar nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Latihan

Setelah selesai mempelajari kegiatan belajar ini, coba tuliskan: 1) tiga jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. 2) Apa yang dimaksud dengan pendidikan umum? 3) tiga jenjang pendidikan formal. 4) satuan pendidikan nonformal apakah yang setara dengan satuan pendidikan SD? 5) Untuk apa Akreditasi dilakukan? 6) kemukakan sepuluh isi kurikulum yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah 7) tuliskan berbagai hak dan kewajiban pendidik yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003. 8) kemukakan pula berbagai hak dan kewajiban peserta didik.

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan no. 1 Anda perlu mengingat kembali jalur pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional. Untuk menjawab pertanyaan no. 2 anda perlu mengingat kembali definisi jenis-jenis pendidikan. 3) Bandingkan dengan Pasal 14.

4) Ingat jenis-jenis Kelompok Belajar Paket. 5)Bandingkan dengan Pasal 60 ayat (1).
6) Bandingkan dengan Pasal 37 ayat (1). 7) Bandingkan dengan Pasal 40.

8) Bandingkan dengan Pasal 12 UU RI No. 20 Tahun 2003.

Rangkuman

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 dalam sistem pendidikan nasional, terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada jalur pendidikan formal terdapat tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Adapun jenis pendidikannya terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Dalam sistem pendidikan nasional diselenggarakan pula pendidikan anak usia dini, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan, dan/atau keterampilan tertentu.

Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas, hak dan kewajiban tertentu.

Terdapat pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.

Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk

kepentingan masyarakat. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan R I mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Tes Formatif 2

1. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu ....
2. MI/SD tergolong ke dalam jenjang pendidikan ....
3. Mengacu pada Pasal 15 UU RI No 20 Tahun 2003, jenis pendidikan yang diselenggarakan di SD/MI adalah pendidikan ....
4. Bentuk (satuan) pendidikan lain pada jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan sedarajat/setara dengan SD/MI adalah ....
5. Menurut Pasal 54 UU RI No. 20 Tahun 2003, bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk ....
6. Dua bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal adalah ....
7. Kepala sekolah memaksa peserta didik untuk mengikuti pelajaran agama yang diajarkan oleh guru agama yang tidak seagama dengan peserta didiknya. Ini adalah contoh pelanggaran terhadap ....
8. Peran dari komite sekolah/madrasah adalah ....
9. Akreditasi dilakukan pemerintah untuk ....
10. Pendanaan pendidikan menjadi taggung jawab bersama antara ....

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali
80% - 89% = Baik
70% - 79% = Cukup
< 70% = Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, silahkan Anda lanjutkan untuk mempelajari Kegiatan Belajar 3. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

Standar Nasional Pendidikan SD/MI dan Guru Sebagai Pendidik Profesional

Dalam kegiatan pembelajaran ini Anda akan mengkaji dua hal pokok, yaitu Standar Nasional Pendidikan SD/MI menurut Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; dan mengenai guru sebagai pendidik profesional menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dengan mempelajari kegiatan pembelajaran ini Anda akan dapat menjelaskan landasan yuridis tentang standar nasional pendidikan SD/MI yang meliputi: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. Selain itu Anda juga akan dapat menjelaskan landasan yuridis tentang guru sebagai pendidik profesional yang meliputi: kedudukan, fungsi dan tujuan; prinsip profesionalitas; kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi; hak dan kewajiban; pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian; pembinaan dan pengembangan; penghargaan dan perlindungan; cuti; organisasi profesi dan kode etik guru.

1. Standar Nasional Pendidikan SD/MI

Anda dipersilakan mengkaji secara teliti tentang Standar Nasional Pendidikan berkenaan dengan pendidikan untuk SD/MI, yang termaktub pada PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Pengertian. Lingkup, fungsi, dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Pengertian dan Lingkup. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1). Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana pendidikan; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan (Pasal 2 ayat (1)).

Fungsi dan Tujuan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Pasal3). Standar Pendidikan Nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 4).

b. Standar Isi

Pasal 5

(1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan /akademik.

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

(1) Kurikulum untuk pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
   a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
   b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
   c. kelompok mata pelajaran ilmu pengertahuan dan teknologi;
   d. kelompok mata pelajaran estetika;
   e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

   ....

(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.

(5). Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
(3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pegetahuan sosial, keterampilan/ kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

....

(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olah raga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
(3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

....

Beban Belajar

Pasal 10

(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktut, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
(2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka,

dan persentase beban belajar setiap kelompok mata pelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

....

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

....

Pasal 17

(1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetrensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

....

Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

(1) Kalender pendidikan/akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.

(3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

c. Standar Proses.

Pasal 19

(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kuranya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimum per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidkan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksnakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dilmaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembalajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

d. Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25

(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
(2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26
(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
....

Pasal 27
(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
....

e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik
Pasal 28
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
   a. kompetensi pedagogik;
   b. kompetensi kepribadian;
   c. kompetensi profesional;
   d. kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

....

(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
   a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
   b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi ; dan
   c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

   ....

Pasal 30

(2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai keperluan.

(3) Guru mata pelajaran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan.

   ....

(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata peljaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

. ...

Pasal 32

Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31.

....

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Tenaga kependidikan pada:

....

b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

....

e. SDLB .... atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga admisistrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.

(2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

....

Pasal 38

....

(2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:

a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Sebagaimana termaktub pada Pasal 38 ayat (5) bahwa kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Pengawasaan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.

(2) Kriteria untukmenjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:

a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasu;
b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
c. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

(3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

....

Pasal 41

(1) setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
(2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 42

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkelkerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

....

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sampai dengan 47 dikembangkan oleh BSNP BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan meliputi standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan (Pasal 49 s.d. 58), oleh Pemerintah Daerah (Pasal 59), dan oleh Pemerintah (Pasal 60-61). Namun dalam kesempatan ini yang akan Anda kaji hanya berkenaan dengan pengelolaan oleh satuan pendidikan SD/MI.

Standar Pengelolaan Oleh satuan Pendidikan

Pasal 49

(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian , kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

....

Pasal 50

(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.

....

Pasal 51

(1) Pengambilan keputusn pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
(2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

(1) Setiap satuan pendidikan harus mempunyai pedoman yang mengatur tentang:
   a. Kurikulum tingkat satuian pendidikan dan silabus;
   b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
   c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
   d. Pembagian tugas diantara pendidik;
   e. Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;
   f. Peraturan akademik;
   g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasana;
   h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
   i. Biaya operasional pendidikan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a,b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
....

Pasal 53

(1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
   b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
   c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada.
   d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
   e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
   f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sara dan prasarana pembelajaran;
   g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
   h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
   i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
   ....
   k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
   l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
....

Pasal 54

(1) Pengelolaaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
....

(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawakan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

....

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58

(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada yat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurangkurangnya setiap akhir semester.
(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan nonformal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Wali kota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutran.
(6) Untuk pendidikandasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawad satuan

pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

....

(8) Setiap pihak yang menrima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

g. Standar Pembiayaan

Pasal 62

(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
(2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
    b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
    c. biaya operasi pendidikan tk langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peratuaran Menteri berdasarkan usulan BSNP.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 63

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
    a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
    b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
    c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

    ....

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada ayat (1) butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
    b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
    c. memperbaiki proses pembelajaran.

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegraan dan kepribadian dilakukan melalui:
    a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik;serta
    b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilia.
(5) Peniulaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
(6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
    a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
    b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
    a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
    b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
    c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. kelompok mata pelajaran estetika;
    e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

(2) Dalam menyelenggarakan ujian nasional BSNP bekerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mentyeri.

Pasal 68

(1) Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
   a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
   b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
   c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
   d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
(4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

(1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
(2) Pada program Paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Kewarganegaraan.

....

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Kelulusan

Pasal 72

(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :
   a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
   b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika,

dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. Lulus Ujian Nasional.

(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Adapun untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

2. Guru sebagai Pendidik Profesional

Anda dipersilakan mengkaji secara teliti pasal-pasal tentang guru yang termaktub pada Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagaimana disajikan berikut ini.

a. Guru, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 ayat 1). Berikut ini deskripsi kedudukan, fungsi, dan tujuan guru:

Pasal 2

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengakuan kedudukam guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6
Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, madiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

b. Prinsip Profesionalitas

Pasal 7
(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
   b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
   c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidik sesuai dengan bidang tugas;
   d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
   e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
   f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
   g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
   h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
   i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokraris, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

c. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9
Kualifikasi akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10
(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntable.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksu pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d. Hak dan Kewajiban

Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
    a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan perofesi dalam bidangnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki serifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Tunjangan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18
(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dala pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

e. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional. Pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

f. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 24

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2) Pemerintar provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleng penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27
Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.
(4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29
(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangakat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mencapai batas usia pensiun;
    c. atas permintaan sendiri;
    d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
    e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
    a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
    b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
    c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasala 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama.

g. Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui jabatan fungsional.
(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33
Kebijakan strategi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Mentri.

Pasal 34
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35
(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentukan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

h. Penghargaan

Pasal 36
(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37
(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
(4) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38
Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

i. Perlindungan

Pasal 39
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

j. Cuti

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41
(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42
Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:
a. menetapkan dan menegakan kode etik guru;
b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
c. memberikan perlindungan profesi guru;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43
(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44
(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik duru dan memberikan rekomendasi pemberian

sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.

(4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

(5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

l. Sanksi

Pasal 77

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran;
   b. peringatan tertulis;
   c. penundaan pemberian hak guru;
   d. penurunan pangkat;
   e. pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi oleh organisasi profesi.

(6) Guru yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

....

Pasal 79

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
   a. teguran;

b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

m. Ketentuan Peralihan

Pasal 80
(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:
a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersakutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik;
....
(2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertantangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

n. Ketentuan Penutup

Pasal 82
(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Latihan/Tugas

Setelah selesai mempelajari kegiatan pembelajaran ini, coba tuliskan: 1) fungsi standar nasional pendidikan. 2) Lingkup standar nasional pendidikan. 3) terdiri atas kelompok mata pelajaran apa saja kurikulum untuk jenis pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar? 4) Siapakah yang harus mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (SD/MI) dan silabusnya? 5) Siapakah yang mengembangkan kompetensi

lulusan pendidikan dasar? 6) Kompetensi apa saja yang harus dimiliki pendidik (guru) sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar? 7) Kemukakan prinsip-prinsip profesionalitas guru! 8) kemukakan pula kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya!

Rambu Jawaban

Jawaban latihan/tugas no1 s.d. no 6 harus mengacu pada PP RI No. 19 Tahun 2005. Untuk no. 1) lihat pasal 3. 2) lihat pasal 2. 3) lihat pasal 6 ayat (1). 4) lihat pasal 17 ayat (2). 5) lihat pasal 27 ayat (1). 6) lihat pasal 28 ayat (3). 7) lihat pasal 7 UU RI No. 14 Tahun 2005. 8) lihat pasal 20 UU RI No. 14 Tahun 2005.

Rangkuman

Standar Nasional Pendidikan SD/MI – sebagai bahan kajian dalam kegiatan pembelajaran ini – mengacu pada PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Lingkupnya meliputi: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana pendidikan; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.

UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen merupakan salah satu landasan yuridis tentang guru sebagai tenaga profesional. Di dalamnya antara lain menetapkan tentang kedudukan, fungsi dan tujuan guru; prinsip profesionalitas; kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru; hak dan kewajiban guru; pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian guru; pembinaan dan pengembangan guru; penghargaan dan perlindungan terhadap guru; cuti; organisasi profesi dan kode etik guru.

Tes Formatif 3

1. Apakah tujuan standar nasional pendidikan?
2. Meliputi apa sajakah perencanaan proses pembelajaran yang harus disusun pada satuan pendidikan sesuai standar proses menurut standar nasional pendidikan?
3. Kemukakan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang harus dimiliki pendidik pada SD/MI sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut standar nasional pendidikan!
4. Harus berpedoman pada panduan yang dikeluarkan oleh siapakah penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar ?
5. Menurut standar penilaian pendidikan, digunakan untuk apakah penilaian hasil belajar oleh pendidik ?
6. Menurut standar penilaian pendidikan, mencakup mata pelajaran apa sajakah yang diujikan kepada peserta didik dalam ujian nasional pada SD/MI?
7. Menurut standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, dilakukan oleh siapa dan melalui kegiatan apakah pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar di bidang akademik?
8. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005, harus dibuktikan dengan apakah agar guru diakui berkedudukan sebagai tenaga profesional?
9. Apakah fungsi kedudukan guru sebagai tenaga profesional?
10. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005, oleh karena apakah guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru?

Tindak Lanjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat pada bagian akhir modul ini. Hitung berapa jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100%	= Baik Sekali
80% - 89%	= Baik
70% - 79%	= Cukup
< 70%	= Kurang

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, berarti Anda telah selesai mempelajari modul ini. **Bagus !** Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN:

Tes Formatif 1

1. B; 2. B; 3. C; 4. A; 5. D; 6. D; 7. B; 8. C; 9. C; 10. D.

Tes Formatif 2

1. Pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
2. Jenjang pendidikan dasar.
3 Jenis pendidikan umum.
4. Program Paket A.
5. Badan Hukum Pendidikan.
6. Taman kanak-kanak (TK) dan raudatul athfal (RA).
7. Pelanggaran terhadap hak peserta didik.
8. Peranan komite sekolah/madrasah adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
9. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tes Formatif 3

1. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
2. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
3. Pendidik pada SD/MI harus memiliki: a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1); b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi, dan c. sertifikat profesi guru SD/MI.
4. Harus berpedoman pada panduan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
5. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik; b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan c. memperbaiki proses pembelajaran.

6. Mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional pada SD/MI mencakup Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
7. Dilakukan oleh Rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
8. Harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
9. Fungsi kedudukan guru sebagai tenaga professional adalah untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
10. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan guru karena: a. melanggar sumpah dan janji jabatan; b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

Glosarium

Antropo-Filosofis (Filsafat Antropologi): cabang filsafat (metafisika) yang mempelajari hakikat manusia.

Animal Educandum : identitas atau sebutan yang diberikan M.J. Langeveld kepada manusia, yang berarti bahwa manusia adalah hewan yang perlu dididik dan perlu mendidik diri.

Animal Educabile : identitas atau sebutan yang diberikan yang diberikan M.J. Langeveld kepada manusia, yang berarti bahwa manusia adalah hewan yang dapat dididik.

Asumsi, gagasan, kepercayaan, prinsip, atau pernyataan yang diterima benar dan dijadikan titik tolak dalam berpikir dan/atau bertindak.

Dinamika (dinamika manusia): manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya untuk "menyempurnakan" diri dalam konteks hubungannya dengan alam, sesama, maupun Tuhan.

Eksistensi : cara khas ber-ada-nya manusia di dunia.

Evolusionisme : aliran metafisika (kosmologi) yang berpendirian bahwa alam semesta berkembang dari alam itu sendiri. Implikasinya bahwa adanya manusia di dunia pun sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri.

Etnolog, ahli etnologi : ahli ilmu tentang masalah/unsur-unsur kebudayaan suku bangsa dan masyarakat suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta penyebaran kebudayaan umat manusia di muka bumi.

Filsafat : sistem pikiran (gagasan, teori) yang komprehensif tentang segala sesuatu yang bersifat mendasar sebagai hasil berpikir secara sistematis, kritis dan radikal.

Hereditas : faktor bawaan manusia sejak kelahirannya; transmisi biologis karakteristik-karakteristik genetik dari orang tua kepada turunannya.

Historisitas : yaitu keterpautan eksistensi manusia (pada saat ini) kepada masa lalunya, dan keterarahan ke masa depannya. Sebab itu manusia adalah makhluk yang belum selesai mewujudkan dirinya.

Implikasi	:	yang termasuk atau tersimpul; keadaan terlibat. Berimplikasi berarti mempunyai implikasi atau hubungan keterlibatan. Di dalam logika biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan: jika – maka.
Kosmologi	:	cabang filsafat (metafisika) yang mempelajari tent5ang hakikat alam atau kosmos.
Kreasionisme	:	aliran metafisika yang berpendirian bahwa adanya alam semesta (termasuk manusia) adalah sebagai ciptaan/makhluk Creative Cause atau Personality (Tuhan).
Metafisika	:	cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat realitas (kenyataan).
Mobilitas Sosial	:	gerak naik turun individu atau kelompok dalam suatu hierarkhi atau tangga social; perpindahan status dalam stratifikasi social.
Mobilitas social vertical	:	mobilitas ke atas atau ke bawah dalam stratifikasi social.
Nilai Moral	:	sesuatu yang dipandang baik dan berharga oleh suara batin (kata hati) manusia berkenaan dengan perbuatannya.
Norma Moral	:	kriteria atau ukuran perbuatan yang mana suara batin (kata hati) manusia mengharuskan untuk melaksanakannya.
Potensi	:	kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.
Stratifikasi Sosial	:	perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya.
Aksiologi	:	cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai.
Deduktif	:	cara berpikir untuk memperoleh kesimpulan tentang sesuatu yang bersifat khusus yang diturunkan dari sesuatu (pernyataan) yang bersifat umum yang telah diterima kebenarannya.
Entity	:	adalah wujud.
Epistemologi	:	cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan.
Esensi (esensial)	:	sesuatu yang bersifat inti atauhakikat fundamental, atau unsur-unsur mutlak yang menentukan keadaan sesuatu; wujud suatu realita yang membedakan realita tersebut dari jenis yang lainnya.
Induktif	:	cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dengan bertolak dari pernyataan-pernyataan (bukti-bukti empiris)

yang bersifat khusus (particular).

Metafisika : cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas.

Ontologi : adalah cabang filsafat (cabang Metafisika) yang mempelajari tentang hakikat ada-nya segala sesuatu.

Realitas (Reality) : Kenyataan sebagaimana adanya.

Self-evidence : suatu asas bahwa kebenaran atau pengetahuan buktinya berada di dalam kebenaran atau pengetahuan itu sendiri.

Substansi : ada yang mandiri, pengemban sifat-sifat; bentuk ada yang untuk berada tidak memerlukan pengada lain.

Subject Centered (kurikulum), suatu model pengorganisasian kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Adakalanya orang menggunakan istilah subject matter centered, yaitu kurikulum yang diorganisasi dengan berpusat kepada mata pelajaran.

Tabula rasa : meja berlapis lilin yang pada zaman dulu digunakan sebagai alat untuk menulis, zaman sekarang identik dengan kertas kosong yang belum ditulisi.

Asimilasi, : adalah proses kognitif yang mana dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Asimilasi dapat dipandang sebagai proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru dalam suatu skema yang sudah ada.

Akomodasi : adalah (1) membentuk skema baru yang dapat cocok denganrangsangan atau pengalaman baru itu, atau (2) memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan atau pengalaman baru itu.

Curiosity : adalah hasrat ingin tahu yang mendalam.

Disequilibrium : adalah suatu keadaan di mana asimilasi dan akomodasi tidak seimbang.

Equalibration : yaitu suatu proses dari disequilibrium ke equilibrium.

Equilibrium : yaitu pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi.

Reinforcement : adalah tindakan untuk memberikan penguatan atas suatu respons; setiap keadaan yang memperbesar kemungkinan suatu respons akan muncul kembali dalam situasi yang sama.

Skema : adalah suatu struktur mental atau kognitif yang mana dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. skema berkembang sejalan dengan tahap-tahap perkembangan mental/kognitif individu.

Enkulturasi : adalah suatu proses dimana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Menurut M. J. Herkovits adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai anggota kelompok.

Fungsi Selektif : yaitu salah satu fungsi pendidikan (sekolah) dalam rangka menempatkan peserta didik sesuai dengan bakat dan kemampuannya, yang akan turut menentukan kedudukan peserta didik di dalam tangga sosialnya di kemuadian hari.

Homogenitas : yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma dan perilaku individu-individu di dalam masyarakatnya.

Konformitas : yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat,

Mobilitas Sosial : perpindahan orang dari status/kelas/golongan sosial yang satu ke status/kelas/golongan yang lain. Perpindahan tersebut mungkin naik atau mungkin pula turun.

Mobilitas Vertikal : mobilitas ke atas (naik) atau ke bawah (turun) dalam stratifikasi sosial.

Pendekatan Obyektif : pendekatan dalam studi tentang stratifikasi sosial yang menggunakan ukuran obyektif berupa variabel yang mudah diukur secara statistik seperti pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Pendekatan subyektif : pendekatan dalam studi tentang stratifikasi sosial yang melihat kelas sebagai suatu kategri social, sehingga ditandai oleh kesadaran jenis.

Pendekatan reputasi : pendekatan dalam studi stratifikasi sosial di mana para subjek penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut pada suatu skala tertentu.

Stratifikasi Sosial : pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status/kelas/goongan yang diduduki atau dimilikinya.

Sosialisasi	:	adalah suatu proses dimana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Petter L. Berger); sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial (M.J. Herkovits)
CBSA	:	Cara Belajar Siswa aktif.
Hari Krida	:	hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap hari Sabtu.
KAMI	:	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.
KAPPI	:	Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia.
Neolitik	:	fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan yang terbuat dari batu yang telah diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar.
NASAKOM	:	Nasionalis, Agama, dan Komunis.
Orde Baru	:	Orde yang bertekad mengoreksi dan mengadakan instrospeksi secara mendasar dan menyeluruh atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang telah disalaharahkan oleh Orde Lama; Tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara kita, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
Paleolitik	:	fase atau tingkat kebudayan zaman purba yang berlangsung kurang lebih dari 750.000 tahun s.d. 15.000 tahun yang lalu, ditandai dengan pemakaian alat-alat serpih, zaman batu tua.
Pantja Wardhana	:	Sistem pendidikan yang meliputi: 1) perkembangan kecerdasan; 2) perkembangan moral nasional, 3) perkembangan artistik emosional; 4) pengembangan skill; 5) perkembangan fisik (kesehatan/jasmani).
Perguruan	:	Lembaga pendidikan dimana guru dan para murid hidup bersama di padepokan, dan para murid berguru kepada para cerdik cendekia (guru). Perguruan ini lambat laun dikenal sebagai pesantren yaitu tempat para santri (catrik) berguru.
Sapta Usaha Tama	:	Usaha-usaha meliputi: 1) Penertiban aparatur dan usaha Kementrian PP dan K; 2) Menggiatkan kesenian dan olahraga; 3) Mengharuskan usaha halaman; 4) Mengharuskan penabungan; 5) Mewajibkan usaha-usaha koperasi; 6) Mengadakan kelas masyarakat; 7) Membentuk regu kerja di

kalangan SLA dan Universitas.

Stratifikasi Sosial : pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya.

Tri Tura, Tiga tuntutan rakyat, yaitu: 1) kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen, 2) menghapuskan sisa-sisa PKI, dan 3) menurunkan harga.

Bimbingan : bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.

BSNP : Badan Standar Nasional Pendidikan.

Jalur pendidikan : wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan : tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Komite Sekolah/Madrasah, adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Kurikulum : seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Latihan : bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menguasai keterampilan.

Manajemen Berbasis sekolah/Madrasah, bentuk otonomi manajeman pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/ /madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Pembelajaran : proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pendidik : tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagau guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan Jarak Jauh: pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi, dan media lain.

Pendidikan Anak Usia Dini : suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan dengan sistem terbuka : pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry – multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-progream pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelejaran tatap muka atau jarak jauh.

Pendidikan multi makna : proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Pengajaran : bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka upaya menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Peserta didik : anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Nasional Pendidikan : kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang "Standar Nasional Pendidikan"

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional".

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang "Guru dan Dosen".

Ibrahim, Thalib (Penyadur), (1978), Pendidikan Mohd. Sjafei INS Kayu Tanam, Mahabudi, Jakarta.

Djumhur, I dan Danasuparta, (1976), Sejarah Pendidikan, CV. Ilmu, Bandung.

Majelis Luhur Persatuan Taman siswa, (1977), Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta.

Muchtar, O., (1976), Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertian dan sejarah Perkembangan, Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung.

Poerbakawatja, S., (1970), Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta.

Soejono, Ag., (1979), Aliran-Aliran Baru dalam Pendidikan; Bagian ke-2, CV. Ilmu, Bandung.

Suhendi, Idit, (1997), Dasar-Dasar Historis dan Sosiologis Pendidikan, dalam Dasar-Dasar Kependidikan, IKIP Bandung.

Tilaar, HAR., (1995), 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Tirtarahardja, U. dan La Sula (1995), Pengantar Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta.

Adiwikarta, S., (1988), Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.

Manan, I., (1989), Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.

-----------, (1989), Anthropologi Pendidikan, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.

Muchtar, O., (1991), Dasar-Dasar Kependidikan, Depdikbud, IKIP Bandung.

Nasution, S., (1983), Sosiologi Pendidikan, Jemmars, Bandung.

Sunarto, K., (1993), Pengantar Sosiologi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Syaripudin, T., (2007), Landasan Pendidikan, Percikan Ilmu, Bandung.

Wuradji, M. S., (1988), Sosiologi Pendidikan, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud., Jakarta.

E. Usman E. dan Juhaya, S.P., (1984), Pengantar Psikologi, Angkasa, Bandung.

M. Ngalim Purwanto., (1993), Psikologi Pendidikan, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sumadi S. Brata, (1990), Psikologi Pendidikan, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunaryo K. dan Nyoman D., (1996/1997) Landasan-Landasan Pendidikan Sekolah Dasar, Bagian Proyek Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Dirjendikti, Depdiknas.

Suparno, P., (1997), Filsafat Konstrukstivisme dalam Pendidikan, Kanisius, Yogyakarta.

Yelon L.S. dan Weinstein, W.G., (1977), A Teacher>s World Psychology in the Clasroom, McGraww-Hill International Book Company, Tokyo.

Amien, A. M., (2005), Pendidikan dari Persfektif Sains Baru: Belajar Merajut realitas, Lembaga Penerbitan Unhas.

Callahan J. F., Clark, L.H., (1983), Foundation of education, Macmillan Publishing Co. Inc., New York.

Henderson, S. van P., Introduction to Philosophy of Education, The University of Chicago Press, Chicago.

Kneller, G., (Ed.), (1971), Foundations of Education, John Wiley and Sons, New York.

Noor, M., (Ed.), (1987), Filsafat dan Teori Pendidikan: Jilid I Filsafat Pendidikan, Sub Koordinator Mata kuliah filsafat dan Teori Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Bandung.

Oesman O,. Alfian, (Penyunting) (1992), Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP 7 Pusat.

Power, Edward, J., (1982), Philosophy of education: Studies in Philosophies, Schooling, and Educational Policies, Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, New Jersey.

Syam, M. N., (1984), Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya.

Suparno, P., (1997), Filsafat Konstrukstivisme dalam Pendidikan, Kanisius, Yogyakarta.

Titus, H.H., Living Issues in Philosophy, American Book Company, New York.

Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional".

Abdul Fattah Jalal, (1988), Azas-Azas Pendidikan Islam, CV. Diponegoro, Bandung.

Abdullah, A.R.S.,(1991), Educational Theory, A Quranic Outlook (Alih bahasa: Mutammam), CV Diponegoro, Bandung.

Abdur Rahman, an-Nahlawi, (1989), Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam, CV. Diponegoro, Bandung.

Al-Rasyidin dan Syamsul Nizar, (2005), Filsafat Pendidikan Islam, Ciputat Press, Ciputat.

Adler, Mortimer, J., (1982), The Paideia Proposal An Educational Manifesto, Macmillan Publishing Company, New York.

Buber, M., (1959), Between Man and Man, (Translated by Ronald Gregor Smith), Beacon Press, Boston.

Butler, J. D., (1957), Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion, Harper & Brothers Publish¬ers, New York.

Cassirer, E., (1987), An Essay On Man. (Terj.: Alois A. Nugro¬ho), Gramedia, Jakarta, 1987.

Friedman, S. M., (1954), Martin Buber, The. Life of Dialogue, Routledge and Began Paul Ltd., London.

Frost Jr., S.E., (1957), Basic Teaching of.The. Great Philoso¬phers, Barnes & Nobles, New York.

Hasan, F., (1973), Berkenalan dengan Eksistensialisme, Pustaka Jaya, Jakarta.

Henderson, S. v. P., (1959), Introduction to Philosophy of Education, The University of Chicago Press, Chicago.

Huijbers, T., (1987), Manusia Merenungkan Dunianya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Langeveld, M.J., (1980), Beknopte Theoritische Paedagogiek, (Terj.:Simajuntak), Jemmars, Bandung.

Matsushita, Konosuke, (1982), Thoughts of Man, (terj. HB Yassin), Pustaka Jaya, Jakarta.

Muchtar, O., (1976), Pendidikan Nasional Indonesia, Pengertia dan Sejarah Perkembangan, Balai penelitian, IKIP Bandung.

Mudyahardjo, R. (1995), Filsafat Pendidikan (Sebuah Studi Akademik) Bagian I Orientasi Umum: Landasan Filosofis Pendidikan dan Filsafat Pendidikan sebagai Suatu teori Pendidikan, Jurusan Filsafat Dan sosiologi Pendidikan, FIP, IKIP Bandung.

----------, (2001), Filsafat Ilmu Pendidikan: Suatu Pengantar, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.

Othman, A.I., (1987), The Concept of Man in Islam in The Writings of Al-Ghazali, (Terj.: Johan Smit, Anas Mahyudin, Yusuf), Pustaka, Bandung.

Plato, (1986), Phaidon: Dialog Sokrates tentang Tubuh-Jiwa, Sinar Baru, Bandung.

Poespowardojo, S. dan Bertens, K., (1983), Sekitar Manusia.: Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia, Gramedia, Jakarta.

Soelaeman, M.I., (1988), Suatu, Telaah tentang Manusia-Religi.¬Pendidikan, Depdikbud.

Syam, M. N., (1984), Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia.

Syaiyidain, K.G., (1954), Iqbal>s Educationals Philosophy, Shaik Muhammad Ashraf, Kasmiri Bazar, Lahore.

Schumacher, E.F., (1980), A Guide for The Perflexed, Sphere Books Ltd., London.

Syaripudin, T., (1994), Implikasi Eksistensi Manusia terhadap Konsep Pendidikan Umum (Thesis), Program Pascasarjana IKIP Bandung.

Titus, Harold, et all., (1959), Living Issues in Philosophy, American Book Coy., New York

Van Peursen, C.A., (1982). Tubuh-Jiwa-Roh., (Terj.: K. Bertens), BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Van der Weij, P.A., (1988), Filsuf-Filsuf Besar tentang. Manusia (Terj.: K. Bertens), Gramedia, Jakarta.